

ISSN 1412-663X

# HARMONI

Jurnal Multikultural & Multireligius

# HARMONI

Jurnal Multikultural & Multireligius

Volume VIII, Nomor 30, April - Juni 2009

**Akreditasi LIPI Nomor: 90/AKRED-LIPI/P2MBI/5/2007**

**PEMBINA:**

Kepala Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI

**PENGARAH:**

Sekretaris Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI

**PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB:**

Kapuslitbang Kehidupan Keagamaan

**PEMIMPIN REDAKSI:**

M. Yusuf Asry

**SEKRETARIS REDAKSI:**

Akmal Salim Ruhana

**DEWAN REDAKSI:**

M. Atho Mudzhar (Badan Litbang dan Diklat Dep. Agama)

Rusdi Muchtar (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Muhammad Hisyam (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Muhaimin AG (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Muh. Nahar Nahrawi (Badan Litbang dan Diklat Dep. Agama)

Ahmad Syafi'i Mufid (Badan Litbang dan Diklat Dep. Agama)

Nuhrison M. Nuh (Badan Litbang dan Diklat Dep. Agama)

Sjuhada Abduh (Badan Litbang dan Diklat Dep. Agama)

Mursyid Ali (Badan Litbang dan Diklat Dep. Agama)

Bashori A. Hakim (Badan Litbang dan Diklat Dep. Agama)

Mazmur Sya'roni (Badan Litbang dan Diklat Dep. Agama)

**SIRKULASI & KEUANGAN:**

Fatchan Kamal

Fauziah

**SEKRETARIAT:**

Reslawati

Achmad Rosyidi

Zabidi

**REDAKSI & TATA USAHA:**

Gedung Bayt Al-Quran, Museum Istiqlal, Taman Mini Indonesia Indah

Jakarta Telp. 021-87790189 / Fax. 021-87793540

Email : harmoni2007@gmail.com

**PENERBIT:**

Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Badan Litbang & Diklat

Departemen Agama RI

Jurnal Harmoni terbit tiga bulan sekali. Redaksi menerima tulisan mengenai wawasan multikultural & multireligius baik artikel, makalah, laporan penelitian, hasil wawancara, maupun telaah pustaka. Panjang tulisan antara 10-15 halaman kuarto 1,5 spasi, diserahkan dalam bentuk *print out* dan *file*. Redaksi berhak menyunting naskah tanpa mengurangi maksud tulisan. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

## DAFTAR ISI

### **Pengantar Redaksi**

Upaya Merajut Kerjasama Antarumat Beragama

*Pimpinan Redaksi* \_\_\_\_ 5

### **Gagasan Utama**

Agama dan Dialog Peradaban

*Syukri* \_\_\_\_ 9

Dialog Aksi Antarumat Beragama: Strategi Membangun Perdamaian dan Kesejahteraan Bangsa

*Lathifatul Izzah el Mahdi* \_\_\_\_ 29

Pluralitas Bukan Sekedar Diversitas: Telaah atas Kondisi Keberagamaan di Amerika

*Mukti Ali* \_\_\_\_ 50

Dinamika Hubungan Kaum Muslim dan Umat Hindu di Pulau Lombok

*Gazi Saloom* \_\_\_\_ 70

FKUB sebagai Forum Kerjasama Antarumat Beragama

*A. Salim Ruhana* \_\_\_\_ 80

### **Penelitian**

The Relationship between Moslems and Christians: Respond to The Marriage Between its Member of Religious Community

*Benny Ferdy Malonda* \_\_\_\_ 92

Kerjasama Antarumat Beragama di Berbagai Daerah Indonesia

*Nuhrison M. Nuh dan Kustini* \_\_\_\_ 111

Piagam Madinah dan Resolusi Konflik: Model Penataan Hubungan Antarumat Beragama

*Ridwan* \_\_\_\_ 141

Kerjasama Antarumat Beragama dalam Wujud Kearifan Lokal di  
Kabupaten Poso

*Haidlor Ali Ahmad* \_\_\_\_ 162

Kerjasama Antarumat Beragama di Kecamatan Astanaanyar, Kota  
Bandung

*Suhanah* \_\_\_\_ 181

### **Tokoh**

Mukti Ali dan Dialog Antar Agama: Biografi dan Pemikiran

*Arifinsyah* \_\_\_\_ 193

### **Analisis Buku**

Perjumpaan di Serambi Iman

*Achmad Rosyidi* \_\_\_\_ 216

## Merajut Kerjasama Antarumat Beragama di Indonesia

### Pimpinan Redaksi

Negara Indonesia berdiri dengan latarbelakang masyarakat yang demikian majemuk. Selain penduduk asli Nusantara yang telah memiliki kepercayaan, adat istiadat dan kebudayaan yang beragam, juga diperkaya dengan agama dan kebudayaan dari bangsa luar yang singgah, menetap, dan bahkan yang menjajah kepulauan Nusantara ini.

Tidak dapat diingkari sifat kemajemukan bangsa ini, selain diyakini sebagai takdir Ilahi juga letak strategis Indonesia dalam pergaulan dunia internasional. Posisi letak Indonesia diantara dua samudera (Pasifik dan Hindia), dan diantara dua benua (Australia dan Asia) yang menjadikannya sebagai lalu lintas antarbangsa. Dengan posisi tersebut sangat dimungkinkan tumbuh dan berkembang kemajemukan dan lapisan sosial didasarkan pada agama dan budaya. Diawali pengaruh India yang mengembangkan agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha, Tionghoa dengan agama Khonghucu-nya, Arab dengan agama dan kebudayaan Islam-nya, Barat dengan agama dan kebudayaan Kristen-nya. Kemajemukan pun tidak dapat dihindari, baik dalam agama maupun kebudayaan, di tengahnya kepercayaan, adat istiadat dan kebudayaan asli Nusantara yang oleh *Bleeker* disebut agama asli.

Kemajemukan dalam agama telah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, dan terus berkembang dari waktu ke waktu hingga sekarang. Yang menarik dalam kehidupan beragama ialah tidak terjadi dengan cara kekerasan. Ini merupakan bukti, kemajemukan dalam agama tidak menjadi halangan untuk hidup berdampingan antarumat beragama, dan bahkan menghasilkan karya besar konsensus nasional, dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konsensus mana terwujud dengan disepakatinya Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara, serta UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Dalam falsafah dan dasar negara Indonesia terdapat sila pertama dari Pancasila yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam konstitusi negara Indonesia, UUD 1945 terdapat jaminan kebebasan bagi setiap pemeluk agama untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Perlindungan terhadap agama-agama di Indonesia lebih dipertegas lagi dengan UU No. 1/PNPS/1995 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Dengan falsafah dan dasar negara Indonesia maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak cukup hanya pengakuan beragama dan mengamalkan agama yang diyakini secara sendiri-sendiri, tetapi perlu kerjasama antarumat beragama. Faktor inilah yang belum terungkap secara optimal selama ini. Untuk itulah diperlukan wawasan baru dalam keagamaan dan kebangsaan. Memang kerjasama antarumat beragama telah dirintis sejak tahun 1970-an, namun terkesan masih bersifat "formal" jika ingin menghindari kata "semu". Oleh karena itu, sangat dibutuhkan format kerjasama antarumat beragama yang membudaya dalam masyarakat. Tidak cukup hanya dengan mengadakan dialog dan kunjungan bersama antara pemuka agama ke daerah-daerah.

Dialog di tengah-tengah kemajemukan keyakinan dan agama merupakan upaya dan sekaligus langkah strategis dalam menciptakan kerjasama antarumat beragama. Dialog dapat meminimalisir kecurigaan atas intrevensi dan ekspansi agama dari suatu umat beragama ke umat beragama lainnya. Dialog juga dapat menjembatani harmonisasi kerukunan antarumat beragama.

Pada dasarnya, agama merupakan unsur penting dalam kemajemukan bangsa Indonesia. Hal ini tampak dari banyaknya agama

yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu (UU No.1/PNPS/1965). Agama diyakini pemeluknya memiliki banyak fungsi, seperti fungsi edukasi, perdamaian, pengendalian sosial, pemupuk rasa solidaritas, transformatif, kreatif, dan sublimatif. Dalam konteks inilah agama tidak mungkin dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Pertanyaannya ialah bagaimana antarumat beragama dapat bekerjasama tanpa curiga satu dengan yang lainnya. Kemajemukan dapat memberi makna positif dalam banyak hal, tetapi juga sekaligus dapat menghambat kerjasama antar penganut agama. Hal ini misalnya karena terjadi disharmoni, tidak adanya penyesuaian antarmanusia dengan lingkungannya, diskriminasi terhadap suatu etnis, kelompok dan umat, dan sikap eksklusivisme yang bersumber pada superioritas diri.

Hubungan antarumat beragama di Indonesia dikenal rukun. Namun, bukan berarti ada kerjasama yang luhur dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi rukun karena tidak ada komunikasi, yang berarti kerukunan pasif dan penuh kehati-hatian, dengan kata lain “kerukunan semu”. Sebagai suatu bangsa yang penduduknya multiagama seharusnya terjadi kerjasama partisipatif aktif dalam segala hal. Di sini diperlukan sikap kejujuran, keterbukaan, kedewasaan, pemikiran global yang bersifat inklusif dan kesadaran kebersamaan dalam mengarungi sejarah merupakan modal yang sangat menentukan bagi terwujudnya sebuah bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, yaitu menyatu dalam kemajemukan, dan majemuk dalam kesatuan.

Untuk memperkecil masalah yang diakibatkan oleh pengaruh negatif dari kemajemukan bangsa, antara lain dengan upaya mendekatkan dari segala bentuk kesenjangan, semua kemajemukan dipandang sebagai milik bangsa, milik bersama, menumbuhkembangkan: spirit keagamaan, nasionalisme, humanisme, dan dialog, membangun pola interaksi dan komunikasi antarumat beragama. Sikap inilah yang harus dikembangkan dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat untuk merajut kerjasama antarumat beragama.

Namun, disadari bahwa penelitian dan tulisan bagaimana format kerjasama antarumat beragama masih merupakan hal yang langka. Oleh karena itu, jurnal HARMONI Edisi ke-30 ini menyajikan tulisan-tulisan

tentang gagasan dan hasil penelitian seputar kerjasama antarumat beragama.

Gagasan-gagasan utama dalam jurnal ini diawali tulisan “Agama dan Dialog Peradaban” oleh Syukri, “Dialog Aksi Antarumat Beragama: Strategi Membangun Perdamaian dan Kesejahteraan Bangsa” oleh Lathifatul Izzah el Mahdi, “Pluralitas Bukan Sekedar Diversitas: Telaah atas Kondisi Keberagamaan di Amerika” oleh Mukti Ali, “Dinamika Hubungan Kaum Muslim dan Umat Hindu di Pulau Lombok” oleh Gazi Saloom, dan tulisan A. Salim dengan bahasan mengenai FKUB.

Di samping itu, terdapat tulisan hasil penelitian dalam tema besar kerjasama antarumat beragama. Benny Ferdy Malonda dengan *tulisan berjudul “The Relationship Between Moslems and Christians: Respond to the Marriage between its Member of Religious Community.”* Nuhriison M. Nuh dan Kustini menyajikan tulisan berjudul “Kerjasama Antarumat Beragama di Berbagai Daerah Indonesia”, “Piagam Madinah dan Resolusi Konflik: Model Penataan Hubungan Antarumat Beragama” oleh Ridwan, “Kerjasama Antarumat Beragama dalam Wujud Kearifan Lokal di Kabupaten Poso” oleh Haidlor Ali Ahmad, dan “Kasus Kerjasama Antarumat Beragama di Kecamatan Astanaanyar Bandung” oleh Suhanah. Tulisan ini dilengkapi oleh profil tokoh yang berperan besar menciptakan dialog dan kerjasama antarumat beragama yang dijuluki Bapak Perbandingan Agama dari Indonesia, yaitu dengan judul “Mukti Ali dan Dialog Antaragma : Biografi dan Pemikiran” karya. Dan di bagian akhir, analisis buku yaitu “Perjumpaaan di Serambi Iman” karya Nicholas J. Wolly, yang disarikan oleh Achmad Rosidi.

Selamat membaca! (YA)

## Agama dan Dialog Peradaban

Syukri

Mahasiswa S-3  
PPs. IAIN SU dan  
Dosen Fak. Ushuluddin  
IAIN Sumatera Utara.

### Abstract:

*This paper intends to discuss upon "the clash of civilization" in which the researcher believes that it could be prevented with a dialogue between civilization concepts or "dialogues of civilizations". Based on a number of literatures, the paper offers a concept, dialogue pattern and its realization, how should we position religion in civilizational dialogue, and what benefits does it give to mankind.*

*The conclusion of this paper is a) Religious study and civilizational dialogue do not only reconstruct mankind's historic victory, but it also projects the future as well ; b) Civilizational dialogue as the most appropriate alternative to develop living in harmony and peace for all religious groups ; and c) The model implemented is dialog-karya, that involves any form of cooperation, social relation between different followers, expected to bring about cooperation and social relationship.*

**Keywords:** *civilization, dialogue, dialog karya*

### Pendahuluan

Agama sebagai suatu jalan menuju Tuhan ternyata bukan saja menyediakan ruang *privacy* bagi teraktualisasikannya potensi spiritual manusia, namun ia juga "ditantang" untuk berdialog dengan kecerdasan, pergolakan fisik dan perubahan mental pemeluknya. Watak dialogis agama itulah, salah satu hal, yang kelak mengilhami manusia untuk membangun suatu peradaban (*civilizations*).

Agama, oleh karenanya, telah dipelajari, dikaji, diperbincangkan dan diperdebatkan, bahkan agama dikritik oleh manusia sejak dahulu. Robert John Ackermann mengatakan bahwa “*Kritik memang tidak membuat agama layu, tetapi agama yang tidak dapat melancarkan kritik berarti sudah mati*”.<sup>1</sup> Memang agama dari satu sisi menjadi sumber kritik, terutama kritik sosial yang abadi, tetapi umumnya agama tidak sama dengan kritik sosial. Agama juga menjadi sumber integrasi dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Agama yang dipahami secara sempit akan menjadi sumber konflik, tetapi kalau agama dipahami secara substantif integratif dan universal akan melahirkan peradaban. Dengan demikian agama yang dipelajari, diperbincangkan, dan diamalkan oleh penganutnya secara sungguh-sungguh, maka ia akan berdamai dan berperadaban, karena agama mempunyai peranan yang urgen dalam memberi arah dan arti bagi kehidupan manusia.

Agama bukan hanya berfungsi sebagai wacana spiritual yang menghadirkan rasa aman dan damai, tetapi ia juga bisa menampilkan sosoknya yang seram dan menakutkan. Agama bisa meletupkan konflik dan pertikaian peradaban, ketika diinterpretasi sesuai dengan kepentingan sepihak umat atau kelompok agama. Interpretasi yang subjektif itu dapat memberi wewenang kepada para pemeluk agama untuk membunuh dan mengorbankan perang atas nama Tuhan dan kitab suci. Konflik-konflik bisa terjadi sepanjang garis pemisah agama dan kebudayaan.<sup>3</sup>

Konflik antar peradaban, khususnya antara Timur versus Barat, atau antara Islam dan Kristen semakin hangat diperbincangkan, dan banyak orang yang mengasosiasikan dengan perwujudan dari “benturan antar peradaban” yang didengungkan oleh Samuel Huntington beberapa tahun yang lalu. Banyak yang cemas bahwa benturan ini akan meledak dan menjatuhkan martabat dan derajat umat manusia ke jurang tanpa dasar. Tetapi benarkah “*doomed scenario*” ini adalah sebuah keniscayaan?

Melalui makalah ini akan merespon benturan ditengah-tengah peradaban itu, karena benturan peradaban “*clash of civilizations*” bisa dicegah dan dibendung dengan dialog antar peradaban “*civilizations dialogues*”. Lalu seperti apakah konsep, pola dan realisasi dialog antar peradaban ini, dimana posisi agama dalam dialog peradaban ini, serta apa

manfaatnya untuk diperbicangkan dan diperdebatkan bagi umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Makalah ini akan merespon persoalan tersebut dengan judul: “*Agama dan Dialog peradaban*” bi bawah bimbingan Syahrin Harahap, Gurubesar IAIN dan UNIVA Sumatera Utara Medan.

## Memahami Makna Agama

Agama merupakan modal keyakinan yang memiliki sumber *élan vital* rohaniah yang sangat besar makna dan pengaruhnya dalam pembentukan alam pikiran dan sikap hidup manusia, dibanding dengan sumber-sumber keyakinan lain, seperti politik dan ekomomi. Oleh sebab itu usaha-usaha politik sering dilancarkan dengan memanfaatkan potensi agama.<sup>4</sup> Karena itu, dalam masyarakat religius, segala program yang dilancarkan melalui agama akan merupakan jalan yang paling pendek dan mulus untuk ditempuh. Sebaliknya, setiap langkah atau program yang mengabaikan agama sama saja dengan menegakkan benang basah. Dengan demikian agama selalu bermakna (*meaning*) dalam segala rencana, langkah dan program yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini.

Menurut Michael Keeni, “pada zaman kita yang semakin sekuler ini agama memainkan peranan penting terhadap kehidupan berjuta-juta manusia...Agama mengambil bagian pada saat-saat yang paling penting dan pada pengalaman-pengalaman hidup<sup>5</sup>...Agama juga memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan. kita. Adakah kekuatan tertinggi lain yang mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan kita? Bagaimanakah kehidupan dimulai? Apa arti semua ini?<sup>6</sup> Semuanya akan dijawab oleh agama, karena agama yang dapat merespon dan memberi makna atas semua persoalan manusia di dunia ini, dari persoalan kelahiran hingga kematian. Bahkan agama berada dalam kehidupan yang paling khusus maupun pada saat-saat yang paling mengerikan dan menakutkan.

Dengan demikian makna agama dimaksudkan dalam tulisan ini bukan hanya dipahami atas dasar keyakinan saja, tetapi juga merespon kebutuhan manusia terhadap makna. Agama tidak bersifat individualistik saja, melainkan bersifat sosial, kolektif, budaya dan peradaban. Kerena itulah makna agama sesuai kata Parsons sebagai titik artikulasi sistem

kultural (*cultural system*) dan sosial, dimana nilai-nilai dari sistem budaya terjalin dalam sistem sosial dan diwariskan, diinternalisasikan dari generasi terdahulu kegenerasi berikutnya. Dengan kata lain agama juga merupakan sarana internalisasi nilai budaya yang terdapat di masyarakat kepada sistem kepribadian individu.<sup>7</sup>

### **Makna Dialog peradaban**

Istilah dialog berasal dari bahasa Yunani "*dialektos*"<sup>8</sup>. Secara harfiah kata dialog ini berarti "dwi-cakap". Percakapan antara dua orang atau lebih. Dialog juga berarti tulisan dalam bentuk percakapan atau pembicaraan ; diskusi antar orang-orang atau pihak-pihak yang berbeda pandangan. seperti dialog-dialog yang dikemukakan oleh Socrates,(469-399 SM).<sup>9</sup> Bahkan dialog bukan hanya dilakukan dengan metode perbincangan atau diskusi saja, melainkan dapat juga dilakukan dengan metode tulisan, atau dalam bentuk karangan prosa atau puisi untuk menyatakan berbagai pandangan yang berbeda seperti dialog-dialog Plato (427-347 SM), dalam karya tulisnya yang berjumlah 42 buah.<sup>10</sup> Sebagian besar Karyanya dituliskan dalam bentuk dialog diwariskannya kepada generasi selanjutnya sudah cukup banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Arab, sehingga dapat dibaca, dipahami dan diteliti, bahkan dapat dipraktekkan oleh generasi sekarang.

Dialog dalam bentuk karangan belum kehilangan aktualisasinya, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya *dialogus in Limbo* (1926) oleh George Santayana (1863-1952) yang sangat terkenal itu. Dalam pementasan drama, dialog merupakan bentuk mutlak yang merupakan hakikat drama. Tiada pula roman tanpa dialog.<sup>11</sup> Sedangkan dalam konteks agama, banyak sekali orang yang menyanjung dialog. Macam-macam pridikat yang diberikan kepadanya; dialog sebagai langkah iman; dialog sebagai suatu model hubungan manusiawi antaragama; dialog sebagai cara baru beragama; dialog sebagai fungsi kritis beragama dan sebagainya.<sup>12</sup>

Sedangkan istilah peradaban sering dipandang sebagai sinonim "kebudayaan". Spengler membedakan antara keduanya, seraya menemukan peradaban sebagai tahap final dalam perkembangan masyarakat. Alfred Weber membedakan antara "proses peradaban" dan "proses kebudayaan" yang pertama berkelanjutan dan yang belakangan

sporadis.<sup>13</sup> peradaban bersifat internasional, sedangkan kebudayaan bersifat lokal. Peradaban hanya satu yaitu peradaban milik umat manusia sedunia, sementara kebudayaan sangat beragam, setiap umat beragama memiliki kebudayaan masing-masing.<sup>14</sup>

Kata peradaban dalam bahasa Arab disebut "*al-Hadarah*", dalam bahasa Inggris disebut "*civilizations*". Sedangkan Kebudayaan dalam bahasa Arab disebut "*al-tsaqafah*", dalam bahasa Inggris "*culture*". Di Indonesia, sebagaimana juga di Arab dan Barat, masih banyak orang yang mensinonimkan dua kata ini, yakni kata peradaban sering diartikan dengan kebudayaan. Namun dalam perkembangan ilmu Antropologi sekarang, kedua istilah itu dibedakan.<sup>15</sup> Kebudayaan adalah bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat. Sedangkan manifestasi-manifestasi kemajuan mekanis dan teknologis lebih berkaitan dengan peradaban. Kalau Kebudayaan lebih banyak direfleksikan dalam seni, sastra, religi (agama) dan moral, maka peradaban terefleksi dalam politik, ekonomi, dan teknologi.<sup>16</sup>

Istilah *civilization* yang, menurut Huntington sebagaimana dikutip oleh Azyumardi Azra, mengalami perbenturan, mengandung aspek dan dimensi yang sangat luas, sejak kebudayaan (*culture*), sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan sains, teknologi, kemiliteran, dan lain-lain. Memandang luasnya aspek peradaban ini, maka jika memang ada "benturan", hal tersebut terutama terjadi pada bidang politik dan militer yang dalam kasus-kasus tertentu berasal dari atau melibatkan faktor agama- dalam hal ini Kristen dan Islam.<sup>17</sup>

Dari pengertian dialog dan peradaban di atas, dapat dipahami bahwa makna "Dialog peradaban" dalam tulisan ini adalah membicarakan dan mendiskusikan tentang peradaban, terutama tentang adanya benturan atau konflik yang terjadi ditengah-tengah peradaban, bukan benturan antar peradaban, karena tidak ada pertentangan Barat dan Islam soal peradaban.<sup>18</sup> Akan tetapi benturan dibawah peradaban adalah pasti ada, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang militer dan kebudayaan yang melibatkan atas nama agama, khususnya Barat versus Timur atau antara Kristen dan Islam, benturan seperti ini yang yang diperbincangkan.

Namun perlu dipahami bahwa dialog peradaban berbeda dengan dialog Agama-Agama. Jika dialog peradaban lebih cenderung membinc-

cangkan tentang kemajuan mekanis dan teknologis yang berkaitan dengan bidang politik, ekonomi, teknologi, dan militer. Sedangkan Dialog Agama-Agama lebih cenderung membicarakan tentang agama-agama besar dunia yang berkaitan dengan aspek ketuhanan, moral, etika, keyakinan, ritual, symbol-symbol agama, dan lain sebagainya. Akan tetapi dialog peradaban tidak terlepas dengan dialog agama-agama, karena setiap penganut agama, baik, Yahudi, Kristen maupun Islam memiliki suatu kebudayaan masing-masing, dan setiap membicarakan kebudayaan tidak terlepas dalam melibatkan atas nama agama.

### **Latar Belakang Dialog Peradaban**

Dialog mengenai peradaban di anggap menarik kiranya bukan karena fungsinya dalam membantu melakukan rekonstruksi terhadap kejayaan masa lalu umat manusia. Perbincangan mengenai peradaban menarik dan diperlukan untuk melakukan proyeksi terhadap masa depan umat manusia. Dengan demikian, peradaban tidak lagi dipandang sebagai fenomena etnis dan antropologis, melainkan sebagai bagian dari gejala politik dan ekonomi dunia. Maka wajar saja apabila analisis mengenai konflik dan kerjasama menjadi bagian organik dari cara pandang orang terhadap masa depan peradaban dunia.<sup>19</sup>

Oleh karena itu Samuel P. Huntington, seorang professor ilmu pemerintahan dari Universitas Harvard menyulut polemik mengenai tidak terlaksananya konflik antara peradaban di dalam peta politik dunia masa mendatang. Masa depan politik dunia, katanya dalam sebuah artikel di majalah *Foreign Affairs* Musim panas 1993, akan didominasi oleh konflik antar bangsa yang berbeda peradaban. Konflik tersebut menjadi gejala terkuat yang menandai runtuhnya polarisasi ideologi dunia kedalam konumisme dan kapitalisme, bersamaan dengan runtuhnya struktur politik mayoritas Negara-negara Eropa Timur.<sup>20</sup>

Memang satu sisi dapat dibenarkan tentang teori Samuel Huntington tentang benturan peradaban (*the clash of civilizations*),<sup>21</sup> hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah peradaban dunia terjadi konflik antar peradaban, khususnya antara Islam versus Barat, hal ini dapat dilihat bersumber dari persaingan, konflik, dan bahkan perang di antara kedua

dunia ini, khususnya di Timur Tengah dan Eropa. Konflik dan benturan itu mulai terjadi sejak Perang Salib (*crusade*) pada abad ke -11 dan ke-12, penaklukan kembali Andalusia, dan ekspansi Dinasti Turki Usmani ke Eropa pada abad ke-15 dan ke-16. Semua benturan militer yang melibatkan agama ini terjadi ketika kekuatan-kekuatan muslim memegang hegemoni dan dominasi dalam percaturan politik internasional.

Selanjutnya, sejak abad ke-17 khususnya, giliran Negara-negara Eropa (Barat) yang menciptakan konflik dan benturan peradaban dengan melakukan ekspansi ekonomi, politik, dan militer ke kawasan dunia muslim yang sedang mengalami disintegrasi. Imperialisme dan kolonialisme Barat ini berakhir setelah Perang Dunia II dengan meninggalkan keterbelakangan ekonomi, sosial, dan politik di dunia muslim; sebaliknya, hegemoni dan dominasi Barat yang sejak itu dipimpin Amerika Serikat. Bahkan di Abad sekarang ini (akhir tahun 2008 awal 2009) benturan antara Kristen dan Islam tetap saja terjadi, hal ini dapat terbukti adanya serangan tentara Israel ke Palistina di Jalur Gaja semakin meningkat dan sulit dikendalikan. Semuanya ini kelihatan disebabkan oleh faktor politik dan ekonomi yang mengatasnamakan agama yang didalangi oleh Amerika Serikat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa benturan antar peradaban yang didengungkan oleh Samuel Huntington beberapa tahun yang lalu, banyak yang cemas bahwa benturan ini akan meledak dan meluas serta membawa kehancuran dan menjatuhkan peradaban umat manusia ke jurang tanpa dasar.

Namun di satu sisi lain bahwa asumsi yang dikemukakan oleh Samuel tersebut di atas, sangat berbeda dengan Dewi Fortuna Anwar. Ia menilai bahwa dengan berakhirnya perang dingin, kecendrungan yang terjadi bukanlah pengelompokkan masyarakat ke dalam entitas tertinggi yaitu pengelompokkan peradaban, tetapi justru perpecahan menuju entitas yang lebih kecil lagi, yaitu berdasarkan suku dan entisitas. Hal ini jelas sekali terlihat pada disintegrasi Uni Sovyet, yang secara ironis justru disatukan oleh budaya dan peradaban yang sama.

Berdasarkan keterangan di atas, sebenarnya banyak faktor yang melatar belakangi munculnya dialog dibawah peradaban,<sup>22</sup> di antaranya adalah karena adanya konflik kebudayaan agama atau adanya benturan

di tengah-tengah peradaban itu sendiri menimbulkan perlunya dialog antaragama dan peradaban untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, hanya dengan dialog sebagai satu-satu jalan menemukan titik temu solusi terhadap konflik kebudayaan agama, sebab benturan di bawah peradaban (*clash of civilizations*) bisa dicegah dengan dialog antar peradaban (*civilizational dialogues*). Dengan dialog antar peradaban dunia akan saling memberi informasi tentang agama dan budaya masing-masing.

Syahrin Harahap, menjelaskan bahwa peradaban dunia telah dibangun oleh umat manusia secara bersama-sama melalui dialog ditemukan di Yunani sebelum Masehi. Terjadinya dialog antara umat Islam yang disebut di Yunani adalah di Iskandariyah. Islam mengambil peradaban Yunani melalui mediasi Kristen. Islam dan Kristen saling pinjam meminjam peradaban Yunani. Sebab peradaban Yunani adalah peradaban manusia yang tersimbul dalam Islam, dan peradaban manusia yang tersimbul dalam Kristen.<sup>23</sup> Oleh karena itu tidak ada yang dinamakan peradaban Kristen atau peradaban Islam, dan adalah keliru menganggap peradaban Barat sebagai peradaban Kristen, atau peradaban Muslim sebagai peradaban Islam.<sup>24</sup> Justru yang ada adalah peradaban milik bersama umat manusia. Menghargai hak-hak hidup manusia dan keadilan adalah suatu peradaban umat manusia.

Faktor-faktor tersebarnya peradaban umat manusia, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan Yunani, Helenisme, dan Helenistik, ke penjuru dunia, baik dunia Barat modern atau Kristen dan peradaban dunia Timur atau muslim disebabkan banyak faktor historis yang melatar belaknginya. Di antaranya, faktor yang terpenting adalah: "Terletak pada penaklukan yang dilakukan oleh Alexander Agung dan para penggantinya, yang menyebarkan ilmu pengetahuan Yunani ke Persia dan India, dimana ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani diperkaya dengan pemikiran-pemikiran asli".<sup>25</sup> Akan tetapi peradaban Muslim pun selektif dalam memilih elemen-elemen yang diwarisi dari sains-sains Yunani, Persia, Cina, dan India. Begitu pula, peradaban Barat modern pun selektif dalam mewarisi sains Islam.<sup>26</sup>

Osman Bakar menjelaskan bahwa bukti empirik terbaik tentang dimensi ganda dari sains ini adalah fakta historis bahwa tak ada satu pun budaya atau peradaban yang dikenal pernah sepenuhnya mewarisi tradisi ilmiah dari para pendahulunya, apalagi seluruhnya.<sup>27</sup> Setiap peradaban

memilih mewarisi dari berbagai tradisi ilmiah peradaban-peradaban lainnya, hanya elemen-elemen yang dipandanginya sesuai dengan pandangan dunianya dan penting dari sudut-pandang sistem nilainya.<sup>28</sup> Oleh karena itu, akan baiklah sekiranya ada dialog antar agama yang membicarakan persoalan agama dan sains.<sup>29</sup>

### **Tujuan dan Manfaat Dialog Peradaban**

Dialog peradaban merupakan usaha yang membutuhkan perencanaan yang serius dan hati-hati, karena salah satu tujuan dari dialog peradaban adalah menemukan jalan kebenaran. Dialog pada mulanya menunjuk pada debat dengan tujuan utama menolak argumen lawan atau membawa lawan kepada kontradiksi-kontradiksi, dilema, atau paradoks. Atau seni bertukar pendapat. Secara umum, seorang dialektikawan adalah orang yang tidak membiarkan sesuatu tidak dipersoalkan.<sup>30</sup> Namun pada perkembangan selanjutnya dialog bukan debat, melainkan bertujuan saling memberi informasi tentang agama dan peradaban masing-masing, baik mengenai persamaan maupun perbedaannya.

Memang membicarakan tentang persamaan dan perbedaan budaya<sup>31</sup> dan peradaban antarumat beragama sangatlah sulit, karena satu sisi, misalnya kebudayaan Islam dan kebudayaan Barat memiliki cara pandang dunia yang berbeda, sementara keduanya di sisi lain, dalam era globalisasi kini, mendapat terkanan untuk mencapai kesepakatan dan mendapat cara-cara untuk bisa hidup damai berdampingan. Oleh karena itu kata Basam Tibi dalam satu tulisannya tentang "*Moralitas Internasional Sebagai Suatu Landasan Lintas-Budaya,*" bahwa cara untuk mencapai tujuan hidup damai berdampingan tersebut adalah dengan dialog antar –budaya.<sup>32</sup>

Berdasarkan keterangan Tibi di atas, dapat dipahami bahwa tujuan dialog peradaban adalah membuat saling pengertian guna menegakkan perdamaian di dunia. Konsep kerjasama dan dialog peradaban itu diartikulasikan oleh Tibi secara vokal. Tibi menyebut moralitas internasional (*international morality*) sebagai dasar untuk membangun dialog lintas budaya dan peradaban. Namun wacana dan pola apa yang yang mesti digunakan dalam dialog peradaban ini? Oleh sebab itu, harus ada

kesepakatan atau harus ada suatu konsensus bersama tentang bentuk wacana yang akan dapat disepakati oleh semua pihak antar umat beragama di dunia.

Untuk mencapai tujuan dialog peradaban, tentunya harus memiliki bentuk dialog, yaitu dialog formal dan dialog karya. Dialog Formal adalah dialog mengenai suatu doktrin tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak. Sedangkan dialog karya adalah mencakup segala bentuk pergaulan kerjasama, hubungan sosial antar penganut yang berbeda-beda agama.<sup>33</sup> Dialog karya lebih sesuai untuk dialog peradaban, Sedangkan dialog formal lebih sesuai untuk dialog agama-agama. Kedua bentuk dialog ini memiliki tujuan dan manfaat masing-masing. Dengan dialog peradaban dan dialog agama semuanya bermanfaat bersama menuju jalan kebenaran. Bahkan satu cara mengungkapkan kerukunan dan sekaligus meneguhkannya adalah menggiatkan dialog dan kerjasama.<sup>34</sup>

### **Posisi Agama-Agama dalam Dialog Peradaban**

Agama-agama besar di dunia, seperti; Hindu, Buddha, khususnya antara Yahudi, Kristen, dan Islam tidak pernah usang dan berakhir untuk diperbincangkan dalam sejarah peradaban manusia. Bukan hanya dalam suatu doktrin tertentu saja, melainkan dalam rangka menyelenggarakan dialog dan kerjasama, bahkan juga dalam upaya mempersoalkan perkembangan spesies makhluk Tuhan bernama manusia. Lebih-lebih ketika peradaban memiliki unsur masyarakat manusia, dan agama juga tidak terlepas dari manusia. Karena manusialah satu-satu spesies makhluk Tuhan yang memiliki budaya dan peradaban (*homo civilizations*), serta hanya manusialah satu-satu yang memiliki agama (*homo religius*). Oleh sebab itu posisi agama-agama tidak bisa lepas dalam peradaban manusia yang mesti diperbincangkan oleh manusia yang beragama itu sendiri.

Posisi agama-agama sangat penting dalam dialog peradaban, karena dengan dialog peradaban adalah sebagai salah satu cara yang paling tepat untuk membudayakan kehidupan rukun dan harmonis di antara seluruh umat beragama, yang sekarang berada dalam era peradaban globalisasi dan pluralitas yang heterogen, agama harus dihayati dalam semangat dialog peradaban, baik dialog vertikal (antara individu dengan Tuhannya), maupun dialog horizontal (antar sesama manusia). Dialog Vertikal akan

membuahkan kehidupan yang suci, indah, dan jauh dari kesengsaraan, sedang dialog korizontal akan menciptakan ketertiban, keserasian, kedamaian, kerjasama dan sebagainya, disinilah posisi agama-agama dan umat beragama melakukan dialog peradaban.

Dalam membicarakan tentang posisi agama-agama dalam dialog peradaban dapat dibuktikan dengan munculnya Gerakan Dialog Antar Agama,<sup>35</sup> di kawasan regional Asia Tenggara yang rentan terhadap konflik antar umat beragama, terutama Kristen-Islam, adalah wilayah bagian Selatan Philippina, yaitu daerah Mindanao. Dalam Gerakan Dialog Antar Agama ini, para peserta diarahkan agar masing-masing memfokuskan diri pada salah satu dari tiga aspek yang digelar, yaitu: *Pertama*, Konflik Global, khususnya di Asia dan menyangkut hubungan Islam dan Kristen. *Kedua*, Islam dan Kristen sebagai agama-agama perdamaian. *Ketiga*, Islam dan Kristen tampil bersama menseponsori perdamaian.<sup>36</sup> Dalam dialog ini kelihatannya posisi agama-agama tetap diperbincangkan oleh umat Islam dan Kristen, dengan demikian agama-agama, khususnya Islam dan Kristen tidak pernah luput untuk didialogkan dalam pentas peradaban umat manusia sepanjang sejarah.

Bahkan dalam pertemuan-pertemuan Islam dan Kristen, ada terbentuk semacam Forum dialog yang dipelopori oleh *World Council of Churches (WCC)*,<sup>37</sup> yang membahas empat persoalan penting untuk didiskusikan, yaitu (1) tugas-tugas agama yang digariskan masing-masing kitab suci, (2) persoalan-persoalan yang muncul akibat percampuran tempat tinggal, (3) masalah misi dan perpindahan agama, (4) kemungkinan dilaksanakannya doa dan sembahyang bersama.<sup>38</sup> Dalam forum ini juga kelihatannya posisi agama-agama tetap menjadi salah satu agenda dialog. Dengan kata lain agama-agama tidak pernah lepas dari perbincangan umat manusia. Karena kata Nurcholish Madjid dalam bukunya "*Islam Doktrin dan Peradaban*" bahwa agama tidaklah cukup hanya dipahami sebagai formula-formula abstrak tentang kepercayaan dan nilai. Ia menyatu dan menyatakan diri dalam hidup nyata para pemeluknya. Dan sebuah agama dapat hidup hanya sebanding dengan kematangan jiwa para pemeluknya.<sup>39</sup>

Dalam dialog peradaban, bahwa agama Kristen dan Islam memiliki peran dari segi persamaan, dan itu sudah merupakan suatu kemestian suci, karena agama Islam adalah kelanjutan dari agama Kristen (dan Yahudi)

dalam rangkaian agama Nabi Ibrahim as. Tetapi jika agama Islam berbeda dari agama Kristen, maka hal itu bukan saja suatu kenyataan yang dengan mudah dapat disaksikan sehari-hari, tetapi juga logis klaim Islam sebagai koreksi terhadap Kristen (dan Yahudi). Justru karena adanya persamaan dan perbedaan antara agama Kristen, Yahudi, dan Islam diperlukan dialog peradaban sebagai cara terbaik dalam membuat saling pengertian guna menegakkan perdamaian di atas dunia ini, oleh sebab itu tidak ada seorangpun dalam umat beragama di dunia yang bisa memungkiri manfaat dari dialog antar peradaban demi menjaga pluralitas, demi perdamaian dunia, guna menciptakan saling saling toleransi, kerukunan, dan saling pengertian antar semua makhluk ciptaan Tuhan, untuk mewujudkan dan menjaga pluralitas inilah peran agama masing-masing sangat dibutuhkan dalam dialog peradaban.

Dengan semua agama<sup>40</sup> itulah setiap pemeluk agama dapat berdialog sesama makhluk Tuhan. Lebih dari itu, menjadikan dialog peradaban sebagaimana diajarkan agama sebagai suatu "idiologi", sebagai pandangan hidup yang total.<sup>41</sup> Dengan demikian, adanya suasana dialogis dan penuh toleransi bukan sekedar bersifat semu dan penuh kepura-puraan, melainkan bersifat intrinsik yang tumbuh dari kesadaran diri mereka sendiri, sehingga memiliki akar yang kukuh dalam sikap dan kedirian mereka.<sup>42</sup>

Oleh sebab itu dalam dialog peradaban, setiap peserta dalam dialog, baik dialog tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi dan politik maupun tentang agama sebagai suatu idiologi harus dilaksanakan atas dasar saling percaya. Sikap saling percaya ini semua agama-agama dunia mengajarkannya.

Para penganut agama yang yang memasuki arena dialog antar peradaban harus bersifat kritis, baik kepada agama yang dianut oleh partner dialog maupun terhadap agama yang ia anut. Mereka yang tidak kritis pada umumnya mempunyai pendirian bahwa agama yang mereka anut bisa menjawab dan menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi manusia. Dalam dialog antar agama dan peradaban, setiap peserta dialog tidak boleh membandingkan idealismenya dengan partner dialog lainnya, yang memungkinkan adalah membandingkan yang ideal dengan yang ideal lainnya. Dengan kata lain posisi agama-agama sangat penting dalam mempersiapkan dialog peradaban secara professional dan proporsional.

## Penutup

Berdasarkan uraian dan argumentasi di atas, sebagai kesimpulan dapat dikemukakan bahwa: a) mengkaji agama dan dialog peradaban merupakan hal menarik bukan hanya karena fungsinya dalam membantu melakukan rekonstruksi terhadap kejayaan masa lalu umat manusia, akan tetapi perbincangan mengenai agama dan dialog peradaban menarik dan diperlukan untuk melakukan proyeksi terhadap masa depan umat manusia dan umat beragama; b) dialog peradaban adalah sebagai salah satu cara yang paling tepat untuk membudayakan kehidupan rukun dan harmonis di antara seluruh umat beragama yang sekarang berada dalam era peradaban globalisasi dan pluralitas. Tujuannya antara lain adalah mempertemukan hati dan pikiran antarpelbagai agama dan peradaban untuk menyelesaikan benturan yang terjadi, sebab benturan di tengah-tengah peradaban (*clash under of civilization*) dapat dicegah dan di atasi dengan dialog antar peradaban (*civilization dialogues*).

Pola dialog peradaban lebih tepat dengan dialog karya, karena terdapat upaya kerjasama dan hubungan sosial; c) peradaban dunia telah dibangun oleh manusia secara bersama-sama melalui dialog, ditemukan di Yunani Sebelum Masehi. Terjadinya dialog antara Umat Islam pada masa Iskandariyah. Yunani memberi kontribusi peradaban kepada Kristen dan Islam. Islam mengambil melalui mediasi Kristen dengan cara saling pinjam meminjam dalam arti peradaban; d) fakta historis menunjukkan bahwa tak ada satupun peradaban yang dikenal pernah sepenuhnya mewarisi tradisi ilmiah dari para pendahulunya. Namun peradaban Islam tetap selektif memilih elemen-elemen yang diwarisi dari sains Yunani. Peradaban Baratpun selektif dalam mewarisi sains Islam, karena itu perlu dialog; e) posisi agama-agama dalam dialog peradaban tetap aktual diperbincangkan oleh umat beragama khususnya Kristen dan Islam, hal ini dibuktikan dengan banyaknya muncul gerakan atau forum-forum dialog agama dan peradaban yang tidak pernah luput mendialogkan agama. \*\*\*

## Catatan Akhir

<sup>1</sup> Lihat, Robert John Ackermann, *Religion as Critique*, (New York: The University of Massachusetts Press Post Office Box, 1985), hlm., 5.

<sup>2</sup> Agama sebagai sumber integrasi merupakan fenomena yang universal yang telah ada bersama dengan adanya manusia, maka tentu tidak menutup kemungkinan fenomena ini dipahami berbeda oleh mereka yang berasal dari lingkup wilayah dan periode waktu yang berlainan, seperti yang ditawarkan oleh Walter H. Capps bahwa agama (religion) sebagai "a set of belief, symbol and practices, which is based on the idea of the sacred, and which unites believers into a socio-religious community". (seperangkat kepercayaan, perlambang dan praktek, yang di dasarkan atas ide tentang yang sakral, dan mengintegrasikan mereka yang percaya ke dalam komunitas sosio-religius). Lihat, Walter H. Capps, *Religious Studies: The Making of a Discipline*, (Minneapolis: Fortress Press, 1995), hlm., 203.

<sup>3</sup> Konflik-konflik yang dimaksudkan adalah konflik-konflik berdarah yang terjadi di India antara umat Islam dan Hindu, pertempuran antara Yahudi Israel dan Kaum Muslim Palestina, pertempuran antara Kristen Katolik dan Protestan di Irlandia Utara, demikian juga pertikaian yang memuncak di Lebanon antara milisi Syi'ah dan Druz, pembasmian etnis Bosnia- Herzegovina oleh etnis Serbia, pertentangan masyarakat Persia di Iran dan masyarakat Arab di Saudi Arabia di zaman Ayatullah Komeini, penindasan suku Aborringin oleh warga kulit putih Australia, Senketa yang terjadi antara pemerintah Filipina dan kaum muslimin Moro, pertentangan cultural yang terjadi antara suku Kreol dan budaya Perancis di Amerika Latin, sekedar contoh rawan dan riskannya "garis" yang memisahkan agama yang satu dengan agama yang lain, kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. Lihat, M. Nasir Tamara, (Ed.) *Agama Dan Dialog Antar peradaban*, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1996), hlm., xix.

<sup>4</sup> Istilah "agama" Inggris: religion. Latin: religio, Tetapi mengenai pengertian kata ini terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kata ini berhubungan dengan kata kerja Latin religare yang berarti "mengikat dengan kencang" atau kata kerja relegere yang berarti "membaca kembali" atau "membaca berulang-ulang dan penuh perhatian". Agama berkaitan dengan masalah hubungan manusia dan dunianya dengan Allah. Segala sesuatu menerima eksistensinya dari Allah karenanya berasal dari Allah. Segala sesuatu juga berjuang untuk kembali kepada Allah. Namun manusia adalah satu-satunya makhluk yang menjalankan agama. Lihat, Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm., 12-13.

<sup>5</sup> Lihat, Michael Keeni, *Agama-Agama Dunia*, (Yogyakarta: Penerbit, Kanisius Anggota IKAPI, 2006), hlm., 6.

<sup>6</sup> Keeni, *Agama, Ibid.*, hlm., 6.

<sup>7</sup> Baca, Talcott Parsons, (et.al), eds. *Theoris of Society*, (New York: Pree Press, 1963), hlm., 326.

<sup>8</sup> Kata Dialog dalam “Kamus Filsafat” Inggris: *dialectic*; dari kata Yunani : dialektos (pidato, pembicaraan, perdebatan. Seni atau ilmu dialektika berawal dari penarikan pembedaan-pembedaan yang ketat. Dialektika kiranya dimulai oleh Zeno, Socrates, dan Plato. Peranan dialektika, interpretasi mengenai hakikatnya, dan penghargaan atas kegunaannya sangat bervariasi sepanjang sejarah filsafat. Ini dikarenakan perbedaan atau pendapat setiap filosof. Lihat, Bagus, *Kamus*, op.cit., hlm., 161.

<sup>9</sup> Dalam dialog-dialog Socrates memakai metode dialektik. Ia melibatkan diri dalam argumentasi; dalam analisis yang tidak kenal lelah tentang apa saja. Socrates yakin bahwa cara yang paling baik untuk mendapatkan pengetahuan yang diandalkan adalah dengan melakukan dialog atau pembicaraan yang teratur (*disciplined conversation*), dengan memainkan peranan seorang “*intellectual midwife*” (orang yang memberi dorongan/rangsangan kepada seseorang untuk melahirkan pengetahuan yang terpendam). Horald H. Titus, et.al., *Living Issues in Philosophy*, (California:Publishing Company, 1979), Lihat, hlm., 15-16.

<sup>10</sup> Lewat hasil karya tulis Plato yang cukup banyak dan yang sebagian besar dalam bentuk dialog dengan gaya bahasa yang sangat indah dan menawan hati, Plato bukan hanya terkenal sebagai seorang filsuf yang agung, melainkan juga sebagai seorang sastrawan yang mengagumkan. Semua karya Tulis Plato dalam bentuk dialog yang diwariskannya kepada kita masih cukup lengkap dan dalam kondisi yang baik. J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), Hlm., 44.

<sup>11</sup> Lihat, Burhanuddin Daya, *Agama Dialogis, Merenda Dialektika Idealita dan Realita Hubungan Antaragama*, (Yogyakarta: LKiS, Cetakan, I. 2004), hlm., 20.

<sup>12</sup> Daya, *Agama, ibid.*, hlm., 20.

<sup>13</sup> Lihat, Bagus, *Kamus, op.cit.*, hlm., 816.

<sup>14</sup> Penjelasan ini disampaikan oleh Syahrin Harahap, pada seminar mata kuliah Program Doktor (S-3) “Agama dan Modernisme” pada hari sabtu, tanggal 17 Januari 2009 di Kampus Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan.

<sup>15</sup> Melihat berbagai konsep mengenai kebudayaan dan peradaban di atas, terlihat bahwa Thaha Husein juga cenderung menganggap bahwa antara peradaban dan kebudayaan mempunyai perbedaan . Perbedaan itu lebih luas, atau dengan istilah Ziya Gokalp, bersifat internasional, ketika ia mengatakan “*al-Hadarah*” (peradaban) yang terdiri di atas kebudayaan dan ilmu” (Thaha Husen, 1973:12). Di samping itu, peradaban dipandang sebagai suatu yang skuler, terpisah dari agama, sehingga tidak ada halangan bagi ummat Islam mengambil peradaban Barat, sebab itu bukan peradaban Kristen. Sedangkan budaya dipandang sebagai produk manusia dan bersifat nasional. Dengan demikian,

ajaran agama yang merupakan hasil ijtihad manusia dipandang sebagai budaya. Lihat, E.W. Lane, "Arabic English Lexicon", Vol. V. hlm., 2155-2156, dalam Syahrin Harahap, *Al-Qur'an dan Sekularisasi, Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Thaha Husein*. (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, anggota IKAPI, 1994), hlm., 64.

<sup>16</sup> Lihat, Effat al-Sharqawi, *Filsafat Kebudayaan Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, Cetakan Pertama, 1989), hlm., 5.

<sup>17</sup> Lihat, Azyumardi Azra, *Konflik Baru Antar peradaban, Globalisasi, Radikalisasi, & Pluralis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) Cetakan I, hlm., 10.

<sup>18</sup> Keterangan kuliah Semester III S-3 Syahrin Harahap. *Op.cit.*

<sup>19</sup> peradaban umumnya dipahami sebagai entitas sosial sangat besar dan komprehensif yang timbul melebihi individu, keluarga atau bahkan Negara. peradaban cenderung dipertentangkan dengan feodalisme atau "zaman jahiliyah." peradaban juga sering dikaitkan dengan tersosialisasinya sejumlah nilai yang merangsang timbulnya "perpecahan." Antitesis dari peradaban, ternyata bukanlah "barbarisme" yang menjadi konsep klasik itu, tidak juga konsep abad ke-18 tentang "negara yang tak tercerahkan" yang mendahului masa "pencerahan", melainkan lebih merupakan fenomena etnis dan antropologis yang kemudian disebut dengan masyarakat primitif. Tamara, Agama, *op.cit.*, hlm., xiv-xv.

<sup>20</sup> Tamara, Agama, *ibid.*, hlm. xvii.

<sup>21</sup> Menghadapi kecenderungan ini, banyak kalangan percaya bahwa cara yang paling mungkin untuk mencegah terjadinya "clash of civilizations" adalah melalui "dialog antar peradaban-peradaban" (civilizational dialogues). Sejak pertengahan 1990-an ketika argument Huntington semakin populer dan apalagi setelah Peristiwa 11 September, berbagai dialog peradaban-khususnya di antara Islam dan Kristen atau Barat dan Timur – telah diselenggarakan. Tetapi, harus diakui, perkembangan pada tingkat internasional justru seolah-olah membenarkan teori Huntington; dunia cenderung semakin terpolarisasi dan mengarah menuju konflik antar-peradaban yang lebih intens, sebagaimana terlihat dalam perkembangan pada masa pasca peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat yang diikuti dengan operasi Militer Amerika di Afganistan, Lihat, Azra, *Konflik, op.cit.*, hlm., 13-14.

<sup>22</sup> Banyak faktor yang melatar belakangi dialog antaragama dikembangkan antara lain Konflik dan ketegangan di mana-mana timbul dan dijumpai sampai sekarang. Kristen-Muslim di Filipina, Sikh-Hindu dan Muslim di India, Hindu-Buddha di Srilangka, Kristen-Muslim di Libanon, Yahudi dan masyarakat Arab di Palestina, Katolik Protestan di Irlandia Utara; konflik dan bentrokan ras di Chicago, Boston, Durban, London, Karachi, Ahmedabad, Uckland Poso, Maluku, dan di pelbagai kota serta daerah lainnya. Hal-hal di atas, baik "sendiri-sendiri" maupun sebagai satu kesatuan, merupakan alasan akan pentingnya dialog

dilakukan. Dialog terlaksana bukan karena memenuhi kepentingan sepihak. Dialog selalu berlandaskan kepentingan bersama semua pihak yang terlibat dalamnya. Simbol “kita” dan “mereka” dalam dialog harus dilebur menjadi “kita semua”. Lihat, Daya, Agama, *op.cit.*, hlm., 24.

<sup>23</sup> Perjelasan Syahrin Harahap ketika memberi kuliah pada semester III Program Doktor (S-3) Agama dan Filsafat Islam pada hari Jum.at, tanggal 30 Januari 2009 di Kampus PPsN IAIN SU. Keterangan lebih lanjut dapat dibaca buku Syahrin Harahap “Al-Qur’an dan Skularisasi, Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Thaha Husein” dalam Kata Pengantar Harun Nasution, dijelaskan bahwa Dalam sejarah, antar dunia Islam dan Eropa, sejak semula telah terjadi kontak yang terus menerus. Islam dating di permulaan abad ketujuh Masehi dan cepat meluas daerah kekuasaannya sehingga mencakup Yordania, Palestina, Suria, Irak dan Mesir, yang ketika itu berada dibawah kekuasaan Kerajaan Bizantium yang berpusat di Eropa. Inilah kontak pertama antara Islam dan Eropa. Dalam waktu bersamaan, Kerajaan Persia juga dikuasai. Di daerah-daerah Bizantium dan Persia ini, telah berkembang peradaban Yunani, yang dibawa ke sana oleh ekspansi Aleksander Yang Agung pada abad keempat sebelum masehi. Ajaran al-Qur’an yang memberi kedudukan tinggi pada akal dan ayat-ayat al-Qur’an yang mengandung dorongan untuk meneliti alam sekitar, membuat ulama abad kedelapan dan kesembilan Masehi tidak segan-segan mempelajari falsafat dan sains Yunani di pusat-pusat peradaban Yunani yang terdapat di daerah-daerah yang baru dikuasai, seperti Aleksandria di Mesir, Antakia di Suria, Jundaisyapur di Irak dan Baktra di Persia. Lihat, Kata Pengantar Harun Nasution dalam buku Syahrin Harahap, Al-Qur’an, *Op.cit.*, hlm., xi.

<sup>24</sup> Lihat, Ziya Gokalp, dalam Syahrin Harahap, Al-Qur’an, *Ibid.*, hlm., 63.

<sup>25</sup> Mehdi Nakosteen, *Kontribusi Islam Atas Dunia Intelektual Barat. Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1964), hlm., 20.

<sup>26</sup> Osman Bakar, *Islam and Civilizational Dialogue: Quest for a Truly Universal Civilization*. (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1997), hlm., 32.

<sup>27</sup> Osman Bakar, *Tauhid and Science: Islamic Perfection on Religions and Science*, (Malaysia: Darul Ehsan, 2008), hlm., 37. Lihat juga Osman Bakar (terj.), Yuliani liputo, et.al., *Tauhid dan Sains: Perspektif Islam tentang Agama dan Sains*, (Bandung: Pustaka Hidayah, IKAPI, 2008), hlm., 38.

<sup>28</sup> Bakar, Tauhid, *ibid.*, hlm., 38.

<sup>29</sup> Dialog-dialog antar agama tentang tema agama dan sains masih relative belum banyak dilakukan, tetapi tampaknya sudah mulai meningkat. Dewasa ini, sebuah organisasi terkemuka yang mempromosikan berbagai aktivitas dialog tentang agama dan sains di seluruh dunia adalah The John Templeton Foundations yang memberikan dana bantuan untuk riset dan penghargaan bagi kontribusi penting dalam memajukan dan meningkatkan pemahaman tentang Tuhan, agama,

dan sains. Jumlah dana nilai uang Hadiah Temleton ditetapkan melebihi Hadiah Nobel. Filosofi Yayasan ini dalam memajukan pemahaman tentang agama dan sains tampaknya bias ke arah teori evolusi. Lihat, Bakar, Tauhid, *ibid.*, hlm., 40.

<sup>30</sup> Lihat, Bagus, *Filsafat, op.cit.*, hlm., 161-162.

<sup>31</sup> Perbedaan budaya bukanlah hal baru, perbedaan tersebut sama tuanya dengan sejarah umat manusia. Sejarah umat manusia adalah gabungan antar sejarah perbenturan dan pertukaran antar budaya dan peradaban. Mustahil memahami suatu peradaban manusia manapun yang pernah ada dengan cara terisolasi, yaitu hanya mempertimbangkan keadaannya sendiri tanpa pengaruh budaya dari kelompok lain. Hal ini juga berlaku bagi peradaban Barat dan Islam. Lihat, Basam Tibi, "Moralitas Internasional Sebagai suatu landasan Lintas-Budaya" dalam, Madjid, et.al, *Agama, op.cit.*, hlm., 143-144.

<sup>32</sup> Tibi, *ibid.*, hlm., 143.

<sup>33</sup> Zakiyah Drajat, (et.al), *Perbandingan Agama*, (Jakarta: Penerbit, Bumi Aksara, Departemen Agama RI, 1996), hlm., 144.

<sup>34</sup> A.A. Yewangoe, *Agama Dan Kerukunan*, (Jakarta: Penerbit, PT. BPK Gunung Mulia, Cetakan Kedua, 2002), hlm., 105. Dapat juga dilihat, Djaka Soetapa, *Dialog Kristen – Islam: Suatu Uraian Teologis*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Inovasi Pendidikan Duta Wacana, 1987), hlm., 7.

<sup>35</sup> Gerakan Dialog Antar agama di wilayah ini cukup hidup. Baru-baru ini, tepatnya tanggal 18-20 Agustus 2003, di Weatin Philipine Plaza Hotel, terselenggara sebuah pertemuan penting antara para ulama, guru, dan imam kaum muslimin dengan para Bishop dan Pendeta Protestan serta Bishop dan Pastus Katolik, diikuti juga oleh pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Sebanyak 69 orang pimpinan muslim, 68 Katolik, dan 35 orang Protestan yang datang dari Indonesia, India, Malaysia, Uzbekistan, Bangladesh, Thailand, Sri Langka, Singapore, Japan, Taiwan, Hongkong, East Timor, Myanmar, Libya, Amirika Serikat, Inggris, Vatikan, dan Philippina, sendiri, duduk bersama dan secara terbuka membicarakan "Seeking Peace and Development through an Authentic Cristian and Muslim Dialogue of Life in Asia" Lihat, Daya, *Agama, op.cit.*, hlm., 69.—70.

<sup>36</sup> Daya, *Agama, ibid.*, hlm., 70.

<sup>37</sup> Forum ini pertama sekali diselenggarakan di Cartigny, dekat Jeneva, tahun 1969 yang dihadiri 22 orang muslim dan Kristen selama 4 hari. Kesempatan ini mereka manfaatkan untuk membahas pentingnya saling bertemu, perihal yang dimiliki oleh kedua pihak, yang secara umum mendukung pengembangan kebersamaan, persoalan-persoalan yang dihadapi dunia modern. Lihat, Daya, *Agama, op.cit.*, hlm., 89.

<sup>38</sup> Lihat, Daya, *Agama, ibid.*, hlm., 89.

<sup>39</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Dan peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*, (Jakarta: Yayasan Wakaf, Paramadina, 1992), hlm., 582.

<sup>40</sup> Semua agama, harus secara meluas mengadakan dialog-dialog antara sesama pemeluk, dengan masyarakat pemeluk agama lain, dan dengan lingkungannya yang lebih luas; jika mungkin, atas dasar beberapa titik temu dalam ajaran; dan jika tidak mungkin, maka cukup atas dasar titik temu dalam pengalaman nyata. Lihat, Madjid, Islam, *ibid.*, hlm., 578.

<sup>41</sup> Lihat, Qamaruddin, SF (Ed.), *Melampaui Dialog Agama*, (Jakarta: Penerbit, Buku Kompas, 2002), cetakan, 1, hlm., 14.

<sup>42</sup> Qamaruddin, *Melampaui*, *ibid.*, hlm., 14.

### Daftar Pustaka

- Ackermann, John, Robert, *Religion as Critique*, (New York: The University of Massachusetts Press Post Office Box, 1985).
- al-Shaqawi, Effat, *Filsafat Kebudayaan Islam*, (Bandung: Penerbit, Pustaka, Cetakan Pertama. 1986).
- Azra, Azyumardi, *Konflik Baru Antar peradaban, Globalisasi, Radikalisasi & Pluralis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Penerbit, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Kelima, 2006).
- Bakar, Osman, *Islam and Civilizational Dialogue: Quest for a Truly Universal Civilization*, (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1997).
- \_\_\_\_\_, *Tauhid and Science: Islamic Perspectives on Religion and Science*, (Malaysia: Darul Ehsan, 2008).
- Capp, H. Walter, *Religious Studies: The Making of a Discipline*, (Minneapolis: Fortress, 1995).
- Daya, Burhanuddin, *Agama Dialogis, Merenda Dialektika Idealita dan Realita Hubungan Antaragama*, (Jakarta: LKiS, 2004).
- Harahap, Syahrin, *Al-Qur'an dan Sekularisasi: Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Thaha Husein*, (Yogyakarta: PT.Tiara Wacana Yogya, IKAPI, 1994).

- Kato, Hisanori, *Agama dan peradaban*, (Jakarta: Penerbit, PT. Dian Rakyat, Cetakan Pertama, 2002).
- Keene, Michael, *Agama-Agama Dunia*, (Yogyakarta: Penerbit, Kanisius Anggota IKAPI, 2006).
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*, (Jakarta: Yayasan Wakap, Paramadina, 1992).
- Nakosteen, Mehdi, *Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat, Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).
- Pals, Daniel, L, *Seven Theories of Religion*, (New York: Oxford University Press, Inc., 1996).
- Qomaruddin, SF, (Ed.), *Melampaui Dialog Agama*, (Jakarta: Penerbit, Buku Kompas, Cetakan Pertama, 2002)
- Soetapa, Djaka, *Dialog Kristen – Islam: Suatu Uraian Teologis*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Inovasi Pendidikan Duta Wacana, 1987).
- Titus, Horald, H. (et.al), *Living Issues in Philosophy*, (California: Publising Company, 1979).
- Tamara, M. Nasir, (Ed), *Agama dan Dialog Antar peradaban*, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1996).
- Yewangoe, A.A., *Agama dan Kerukunan*, (Jakarta: Penerbit, PT. BPK Gunung Mulia, Cetakan kedua, 2002).

## Dialog Aksi Antarumat Beragama: Strategi Membangun Perdamaian dan Kesejahteraan Bangsa

Lathifatul Izzah  
el Mahdi

*Alumnus program Agama  
dan Filsafat Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta*

### **Abstract:**

*In the early of twenty first century, this nation is castigated by various problems. The problems include development, stagnancy, violence, injustice, education, narcotic drugs, poverty, plurality, natural disaster, economic crisis, and global challenge, such as humanity values and modernity challenges in general.*

*The problems should be under responsibility of every one, including religious leaders and their adherents. Solving those problems require the integrity and willingness of religious followers to work hand in hand, and cooperate with everyone involved without referring to social status, race, tribe, gender, and groups. For the purpose, this article elaborates the important meaning of dialogue in action (interfaith cooperation and dialogue) in developing a national peace and prosperity.*

*In conclusion, a relevant dialogue according to the recent global era is dialogue in action or a dialog followed up with cooperation. Dialogue in action should be done based on values of pluralism, interfaith, equality, justice, democracy, and religion*

**Keywords:** *interfaith, dialogue, dialog-aksi, peace*

### **Pendahuluan**

**A**gama bisa dihayati dengan semangat dialog vertikal (antara individu dengan Tuhannya) dan dialog horizontal (antara sesama manusia). Dialog vertikal akan membuahkan kehidupan yang suci, indah, dan jauh dari kesengsaraan. Sedangkan dialog horizontal akan menciptakan ketertiban, keserasian, kedamaian, kerjasama dan sebagainya.

Dialog harus diakui sebagai salah satu cara penting untuk membudayakan hidup rukun dan harmonis di antara seluruh umat beragama. Setiap agama memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai problematika kehidupan umat manusia dan bangsa. Dengan dialog, diharapkan dapat saling membantu membangun bangsa dan menghadapi persoalan hidup.

Hans Kung dalam buku *Global Responsibility: In Search of a New World Ethic*,<sup>1</sup> memberikan tesis yang sangat mengesankan: *no ordering of the world without a world ethic; no peace among the nations without peace among the religions; no peace among the religions without dialogue among the religions* (tidak ada suatu tatanan dunia yang sukses jika tidak dilengkapi dengan etika dunia; tidak ada perdamaian antar negara-negara tanpa adanya perdamaian antar agama-agama; tidak ada perdamaian antar agama-agama tanpa adanya dialog antar agama-agama).

Tulisan ini berusaha memaparkan model dialog antarumat agama sebagai syarat membangun bangsa dengan cara menguraikan beberapa persoalan. Diantaranya hubungan pemerintah, dialog, dan harmonisasi antarumat beragama. Kemudian juga mengenai makna, tujuan, kode etik, faktor penghambat dan pendorong dialog. Berikutnya adalah beberapa lembaga dialog yang sudah berdiri di Indonesia dan model dialog dalam membangun perdamaian dan kesejahteraan bangsa.

### **Pemerintah, Dialog, dan Harmonisasi Hubungan Antarumat Beragama**

Pluralitas bagi masyarakat Indonesia sarat dengan warna ketegangan. Untuk itu pemerintah sangat berkepentingan untuk mengurangi ketegangan itu dengan tujuan untuk menumbuhkan hubungan yang harmonis antarumat beragama. Setiap pemeluk agama wajib turutserta mewujudkan terbinanya sikap *ko-eksistensi* dan saling menghargai.

Metode dialog merupakan bentuk aktivitas yang memupuk keterbukaan. Dialog dinilai penting untuk menyingkap ketertutupan yang selama ini menyelimuti hubungan antaragama.<sup>2</sup> Pengalaman Orde Baru menunjukkan bahwa sikap saling tertutup antaragama mudah memicu kesalahpahaman. Akibatnya, umat beragama mudah terjerembab ke dalam prasangka yang berakibat kontraproduktif bagi hubungan antarumat beragama.

Untuk meminimalisir dampak negatif ketertutupan itu pemerintah membentuk forum Musyawarah Antaragama pada tahun 1967,<sup>3</sup> meskipun upaya tersebut belum menghasilkan kesepakatan yang sangat memuaskan, tetapi keberaniannya untuk mengumpulkan tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia merupakan langkah maju.<sup>4</sup> Kemudian pada tahun 1970 dilakukan hal serupa hingga akhirnya keluarlah Keputusan Menteri Agama No. 77 dan 78 tahun 1978 tentang petunjuk kegiatan penyebaran agama. Pemerintah juga membentuk majelis agama-agama untuk menambah keharmonisan hubungan antaragama,<sup>5</sup> yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI).<sup>6</sup>

Para tokoh agama dan aktivis merintis tradisi dialog dengan cara membangun lembaga-lembaga dialog yang menampung para aktivis yang memiliki aspirasi sama. Pada masa Orde Baru dialog bersifat formil-birokratis. Topik perbincangan mereka lebih kaya dari sekedar toleransi. Mereka mengembangkan “dialog agama” dalam berbagai bentuk dan coraknya. Pertemuan agama-agama yang hanya bersifat formal dan kurang melibatkan hati nurani dapat menimbulkan ketidakjujuran dan ketidakterbukaan. Padahal hati nurani, kejujuran dan keterbukaan merupakan faktor penting sebagai sarana membangun kerukunan yang sejati. Tanpa hal tersebut yang muncul adalah bentuk kerukunan semu yang membuat hubungan agama-agama di Indonesia dalam suasana rawan konflik.

Dialog agama atau iman yang dikembangkan belakangan ini telah melampaui formalisme yang semu. Para peserta dialog pada tingkat tertentu memandang bahwa iman bisa didialogkan oleh manusia, antarsesama manusia dan dengan bahasa manusia. Dalam konteks inilah para aktivis dialog agama meyakini bahwa dialog antariman itu bukan hanya perlu, tapi juga penting untuk melahirkan pemahaman yang benar terhadap keyakinan saudara mereka dari lain agama. Dengan dialog setiap pihak mengetahui masalah-masalah yang muncul atau dihadapi oleh masing-masing agama sehingga dapat menimbulkan perasaan simpati dan/atau empati, yakni perasan terlibat untuk ikut membantu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh penganut agama lain.<sup>7</sup>

## Makna dan Tujuan Dialog

Hidup berdampingan antarumat beragama dengan toleransi dan penuh kedamaian adalah baik, tetapi belum dikatakan dialog antarumat beragama. Dialog antarumat beragama bukan hanya saling memberi informasi tentang mana yang sama dan mana yang berbeda antara ajaran agama yang satu dengan lainnya. Juga bukan merupakan suatu usaha agar orang yang berbicara menjadi yakin akan kepercayaannya, kemudian menjadikan orang lain mengubah agamanya kepada yang ia peluk. Dialog tidak dimaksudkan untuk konversi, yaitu menarik orang lain supaya menerima kepercayaan yang ia yakini, sekalipun konversi semacam ini menggembirakan orang yang beragama lain.

Dialog agama bukan suatu studi akademis terhadap agama, juga bukan merupakan usaha untuk menyatukan semua ajaran agama menjadi satu. Dialog antarumat beragama bukan suatu usaha untuk membentuk agama baru yang dapat diterima oleh semua pihak. Dialog bukan berdebat adu argumentasi antarumat beragama untuk mencari yang menang dan ada yang kalah. Dialog bukanlah suatu usaha untuk meminta pertanggungjawaban kepada orang lain dalam menjalankan agamanya.<sup>8</sup> Dialog berupaya memberikan pemahaman dan pengertian tentang ajaran dan kehidupan.

Secara etimologis dialog berarti percakapan atau diskusi antar orang-orang yang berbeda pendapat.<sup>9</sup> Dialog sebenarnya berarti "*dialeghé*" yaitu sedang berbicara, berdiskusi dan beralasan mengenai seluruh aspek persoalan. Maka terjadi kondisi saling mengoreksi menyelesaikan suatu permasalahan baru.<sup>10</sup> Kata yang sama adalah *concourse*, yang berarti berlari bersama, bergerak bersama, bergerak maju bersama, bukan hanya berbicara satu sama lain.<sup>11</sup>

Secara terminologis dialog adalah komunikasi dua arah antar orang-orang yang berbeda pandangan mengenai suatu subjek dengan tujuan untuk memahami secara lebih baik kebenaran subjek tersebut dari orang lain.<sup>12</sup> Namun demikian terdapat beberapa rumusan pengertian dan uraian serta pemahaman tentang dialog antarumat beragama. Dialog dapat didefinisikan sebagai pertukaran ide yang diformulasikan dengan cara yang berbeda-beda.<sup>13</sup> Dialog merupakan pertukaran timbal balik dari pandangan-pandangan antara orang-orang yang telah memiliki satu

kepedulian murni terhadap satu sama lain dan mereka yang terbuka untuk belajar satu sama lainnya.<sup>14</sup>

Dialog antarumat beragama diartikan sebagai bahasa kasih sayang Tuhan yang diekspresikan dalam hidup. Dialog merupakan pertemuan hati dan pikiran antarpemeluk agama yang berbeda. Hal itu dapat membawa para peserta dialog lebih dekat kepada Tuhan.<sup>15</sup> Kecenderungan dialog itu sesungguhnya tidak berhenti hanya sebagai suatu gaya hidup (*life-style*), tetapi juga difikirkan untuk menjadi suatu pandangan hidup (*way of life*).<sup>16</sup> Oleh karena itu dalam ranah politik, dialog berarti proses demokrasi.<sup>17</sup>

Dari berbagai pengertian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa dialog agama adalah pertemuan hati dan pikiran antarpemeluk berbagai agama, komunikasi antara orang-orang yang percaya pada agama sebagai jalan bersama untuk mencapai kebenaran dan kerjasama menyangkut kepentingan bersama. Dengan dialog terjadi perjumpaan antarpemeluk agama tanpa merasa rendah dan merasa tinggi, serta tanpa agenda atau tujuan yang dirahasiakan.<sup>18</sup>

Dialog sebagai wahana refleksi bersama yang mempunyai daya kritis, baik bagi dimensi praktis maupun refleksi, baik dalam hidup keagamaan pribadi maupun kelompok. Dengan semangat mencari kebenaran terus-menerus, dialog antaragama mempunyai fungsi kritis *ad intra* (ke dalam) dan ke luar (*ad extra*).<sup>19</sup> Dialog bertujuan pada penciptaan kerukunan, pembinaan toleransi dan kesejahteraan bersama, membudayakan keterbukaan, mengembangkan rasa saling menghormati, saling mengerti, membina integrasi, berkoeksistensi di antara penganut pelbagai agama dan sebagainya.

Selain itu, dialog bisa mencapai tujuan yang lebih penting dari koeksistensi, yaitu pro-eksistensi. Dalam ko-eksistensi dialog hanya mengutamakan terciptanya toleransi sebagai satu-satunya tujuan. Pro-eksistensi lebih dari sekedar toleransi, yaitu selain mencari dan mengumpulkan segala persamaan doktriner, tradisi, semangat dan sejarah, juga berupaya mencari unsur-unsur yang meliputi perbedaan, bahkan yang menyimpan konflik pun harus dinyatakan.<sup>20</sup>

Dialog itu mempunyai tujuan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, mendukung dan mensukseskan pembangunan nasional, memerangi kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. Dialog mendukung terwujudnya kesejahteraan semua penduduk, menghilangkan kesenjangan dan menegakkan kemanusiaan dan keadilan.<sup>21</sup>

### **Kode Etik dan Prinsip Berdialog**

Agar menghasilkan hubungan inklusif antaragama melalui media dialog itu, Leonard Swidler menyarankan agar dialog dilakukan dengan berpegang teguh pada sepuluh prinsip dasar dialog yang disebutnya sebagai *the dialogue decalogue*.<sup>22</sup>

Burhanuddin Daya menambahkan empat butir, yakni: (1) dialog antaragama harus dipersiapkan secara profesional dan diorganisir secara rapi; (2) dialog antaragama yang sesungguhnya harus disertai oleh lapisan elit agama, terutama kalau dialog itu adalah dialog teologis; (3) dialog harus dilakukan dalam konteks tertentu; (4) peserta dialog harus mempunyai semangat ingin tahu nilai-nilai, ritus-ritus, dan simbol-simbol agama lain atau agamanya sendiri, dari segi kelemahan, kekuatan atau hal-hal yang konstan dan mungkin dapat berubah.<sup>23</sup>

Dalam berdialog, peserta harus memiliki komitmen terhadap agama yang dianutnya.<sup>24</sup> Dialog antarumat beragama hanya akan efektif dan konstruktif apabila konteks sejarah dan latar belakang pelaku dialog tidak dikesampingkan, karena dialog dapat dilakukan antarpenganut agama dan bukan antarumat beragamanya sendiri.<sup>25</sup> Semangat apresiatif terhadap pandangan mitra dialog, baik intra maupun ekstra umat beragama menjadi syarat utama. Dalam dialog, setiap partisipan harus mendengarkan pihak lain secara terbuka dan simpatik sehingga dapat memahami secara tepat posisi pihak lain dan sedapat mungkin seolah-olah terlibat memahaminya dari dalam.<sup>26</sup>

Proses dialog apapun mendambakan suatu hubungan sederajat. Setiap komunitas bisa saling menerima dan menghormati satu sama lain dengan term-term yang disetujui.<sup>27</sup> Ketegangan antara Islam dan Kristen misalnya disebabkan sikap interaksi superior-inferior. Maka, masing-masing peserta dialog harus bebas mendefinisikan dirinya sendiri.<sup>28</sup>

Hal yang penting dalam dialog adalah sikap mengkritisi diri sendiri (*auto-critic*) dan tradisi-tradisinya.<sup>29</sup> Seperti yang diungkapkan Josev van Ess, jangan memulai dialog antarumat beragama sebelum melakukan refleksi dan kritik terhadap diri sendiri.<sup>30</sup> Seperti juga yang dikatakan oleh Emha Ainun Najib, kita harus belajar untuk menertawakan diri sendiri dalam soal agama dan bahkan dengan Tuhan sekalipun, sebab tradisi ini penting supaya kita terlatih untuk berbeda.<sup>31</sup>

### **Faktor Penghambat dan Pendorong Dialog**

Beberapa faktor pendukung berkembangnya dialog antarumat beragama antara lain; a) aspek ideologi, Pancasila sebagai dasar negara. Secara ideologis, Pancasila yang memuat nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan, sangat mendorong munculnya budaya dialog di kalangan masyarakat Indonesia; b) sistem politik yang demokratis. Sistem dan budaya politik yang demokratis sangat mendukung perkembangan budaya dialog, karena demokrasi mengandaikan penyelesaian konflik tanpa kekerasan; c) nilai ajaran agama. Pada dasarnya semua agama mengajarkan pada umatnya saling menyayangi satu sama lain, tanpa membedakan asal-usulnya. Sehingga tidak dibenarkan menghadapi masalah dengan menggunakan kekerasan. Islam misalnya, sangat mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Nilai ajaran yang mulia tersebut akan menyuburkan budaya dialog, jika diharapkan dalam berinteraksi dengan sesama dan berorganisasi, bukan dijadikan sebagai alat untuk legitimasi tindakannya saja; d) budaya lokal. Bangsa Indonesia kaya akan tradisi dan budaya lokal. Setiap masyarakat mempunyai adat atau mekanisme tersendiri dalam menyelesaikan segala persoalan yang mereka hadapi. Budaya lokal ini akan menjadi modal yang sangat berharga untuk mengembangkan dialog, khususnya dialog antarumat beragama di masyarakat, jika ia dijaga, dikembangkan, diselesaikan dengan konteks perubahan zaman; e) pengaruh globalisasi. Globalisasi tidak dapat dihindari mengakibatkan manusia semakin tergantung satu sama lain. Kesadaran akan adanya desa global (*global village*)<sup>32</sup> menunjukkan betapa kecilnya dunia ini, sehingga mendorong kelompok-kelompok agama di dunia untuk semakin memberi perhatian yang besar terhadap dialog antarumat beragama untuk kepentingan manusia di dunia ini.

Adapun faktor penghambat lajunya dialog antarumat beragama antara lain; a) gerakan misi dan dakwah yang masih menempatkan kuantitas umat sebagai tujuan utama. Misalnya agama Kristen dan Islam, mereka sama-sama mempunyai tugas untuk mengajak seluruh umat manusia agar mengikuti ajarannya. Memang agama memerlukan *marketing*<sup>33</sup> (pemasaran) untuk memberikan informasi, tetapi bukan dengan melakukan intervensi yang mengganggu kebebasan orang untuk menentukan pilihan beragama atau tidak. Dalam kalangan misionaris Kristen masih didominasi oleh kalangan evangelis dan *mubaligh* dalam Islam, serta kaum eksklusif,<sup>34</sup> sehingga sangat sulit untuk mengembangkan dialog lebih jauh. Khutbah-khutbah yang diseruhkan di tempat-tempat suci itu sangat normatif yang acapkali cenderung menciptakan permusuhan. Secara tidak langsung masyarakat didominasi oleh perasaan permusuhan pemeluk agama lain, bahkan antarliran dalam satu agama; b) kecenderungan stereotip dan parasangka terhadap agama lain, bahkan pada motif dialog itu sendiri, terutama di kalangan muslim. Hal itu diakui wajar terjadi, karena memang inisiatif dialog kebanyakan dilakukan dan didukung secara penuh oleh kalangan Kristen.

Faktanya selama ini mengatakan bahwa dialog antarumat beragama selalu diprakarsai oleh orang-orang Kristen, karena mereka memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk berdialog, sehingga muncul kecurigaan dialog itu untuk kepentingan terselubung para misionaris dan evangelis.<sup>35</sup>

Kecurigaan muncul karena agama dimanipulasi untuk kepentingan politik. Beban sejarah antagonistik dan konflik membuat kaum Muslim dan Kristen tidak mudah untuk bekerjasama.<sup>36</sup> Padahal stereotip itu mengandung justifikasi nilai yang merendahkan, sehingga membuat mereka saling menjauh satu sama lain.<sup>37</sup>

Klaim membenarkan diri sendiri dan paling sempurna (*truth claim*)<sup>38</sup> mengakar kuat pada masyarakat menjadikan agama mudah diseret ke ranah konflik. Klaim kebenaran suatu agama menggiring pada berkembangnya gerakan fundamentalisme akibat dari ketertutupan (eksklusivisme),<sup>39</sup> sehingga kondisi dialogis sulit direalisasikan.

Idiom-idiom seperti kata *sabilillah*, *jihad*, dan *syahid* dipolitisir sedemikian rupa sehingga perlu dikritisi.<sup>40</sup> Kondisi tidak kritis dan gersang di kalangan pemeluk agama di tingkat bawah sering dimanfaatkan para

elit politik, untuk memuluskan tujuan-tujuan politisnya yang berdampak pada pendangkalan agama.<sup>41</sup>

Faktor lain adalah munculnya perasaan takut yang melanda sebagian besar umat beragama. Faktor ini menjadi penghalang dialog antarumat beragama yang sulit diatasi<sup>42</sup> disebabkan oleh prasangka, kecurigaan dan stereotip seperti yang tersebut di atas. Ketakutan juga muncul karena minimnya pengetahuan dan internalisasi nilai-nilai agama sendiri dan minimnya pengetahuan tentang agama lain.

### Macam-macam Dialog

Dialog bisa berbentuk tertulis dan tidak tertulis atau lisan. Dalam bentuk tulis, seperti publikasi rutin yang dilakukan oleh berbagai kalangan yang khusus membicarakan tentang dialog antarumat beragama. Seperti jurnal *Islam-Christian* dari *Pontifical Institute for Arabic and Islamic Studies* (PISAI) di Roma yang terbit setiap tahun sejak 1975. kemudian jurnal *the Muslim World* yang terbit empat bulan sekali sejak tahun 1910. lalu jurnal *Islam and Christian-Muslim Relations* yang terbit tiga kali dalam setahun. Ada juga Jurnal *Numen*, yang mengangkat tema tentang sejarah agama-agama yang dimotori oleh IAHR (*International for Association for the History of Religions*) dengan Brill Academic Publisher pada tahun 1994<sup>43</sup>.

Selain itu biasanya pertemuan-pertemuan internasional berhasil mengeluarkan statemen atau memorandum yang disampaikan ke publik. Hal ini memungkinkan berlangsungnya diskusi yang berkesinambungan. Dialog jenis ini tentunya akan mendapat reaksi secara tertulis pula yang dapat menghilangkan kesalahpahaman dan membantu menemukan bahasa dialog yang tepat.<sup>44</sup> Dialog semacam ini sangat membantu mensosialisasikan wacana dan membentuk opini publik.

Dialog lisan pun berkembang berbagai forma (bentuk). Menurut Burhanuddin Daya,<sup>45</sup> dialog antarumat beragama terbagi menjadi: dialog kehidupan, dialog perbuatan, dialog kerukunan, dialog *sharing* pengalaman agama, dialog kerja sosial, dialog antarmonastik, dialog do'a bersama, dialog teologis, dialog terbuka, dialog tanpa kekerasan, dialog aksi, dan sebagainya.<sup>46</sup>

Azyumardi Azra mengomentari pemikiran Kimbal dengan memberi kerangka dialog dalam beberapa bentuk yang distingtif, tetapi

saling berkaitan satu sama lain.<sup>47</sup> Bentuk-bentuk itu diantaranya; *pertama* yaitu dialog Parlementer (*parliamentary dialogue*), yakni dialog yang melibatkan ratusan peserta.<sup>48</sup> Ini berarti pertemuan-pertemuan yang terorganisir secara resmi, baik tingkat nasional, regional maupun internasional. Misalnya dialog yang diadakan oleh *Indonesia Conference on Regional and Peace* (ICRP) untuk tingkat nasional, *Asian Conference on Religion and Peace* (ACRP) dan *Dialog Interfaith Cooperation* yang diadakan di Yogyakarta untuk tingkat regional, *World Conference on Religion and Peace* (WCRP) dan *The World Congress of Faiths* untuk tingkat Internasional. *Kedua*, dialog kelembagaan (*Institutional Dialogue*), yaitu dialog yang diwakili berbagai organisasi agama. Misalnya dialog lembaga seperti MUI, PGI, KWI, PHDI, WALUBI dan MATAKIN. *Ketiga*, dialog teologi (*theological dialogue*) yakni dialog yang mencakup pertemuan-pertemuan, baik reguler maupun tidak untuk membahas persoalan-persoalan teologis filosofis.<sup>49</sup> *Keempat*, dialog dalam masyarakat (*dialogue in community*) dan dialog kehidupan (*dialogue of life*). Dialog dalam kategori ini umumnya berkonsentrasi pada penyelesaian hal-hal praktis dan aktual. Artinya banyak pertemuan dan kontak dalam kehidupan sehari-hari seperti di sekolah, di pekerjaan, toko, dan rumah sakit. Dan yang paling sederhana adalah dialog di rumah sakit. Dialog ini sering menumbuhkan pengetahuan tentang orang lain, meski masih dalam permukiman, karena memang dialog bukan hanya aktivitas pertemuan atau konferensi. Dan *kelima*, dialog kerohanian (*spiritual dialogue*). Dialog ini bertujuan untuk menyuburkan dan memperdalam kehidupan spiritual di antara berbagai agama. Misalnya orang-orang dari berbagai agama mengadakan perkumpulan selama beberapa hari untuk berdo'a, meditasi, dan refleksi serta *shering* tentang pengalaman hidup sehari-hari berkaitan dengan hubungan antarumat beragama.<sup>50</sup>

Di antara berbagai bentuk dialog tersebut, terdapat kecenderungan bahwa dialog paling tepat untuk dikembangkan pada saat ini. Umat beragama tidak hanya mendambakan adanya ko-eksistensi damai atau toleransi pasif, tetapi lebih aktif. Penganut setiap agama menghidupkan idealitas dan nilai-nilai tertinggi agamanya sendiri, sembari menghormati penganut agama lain. Dialog ini memberi tekanan pada terciptanya jema'ah umat beriman yang bersama-sama hidup rukun dan bekerjasama, bukan pada dialog sebagai diskusi mengenai perbedaan dalam dogma atau praktek keagamaan.

## Lembaga Dialog Antarumat Beragama

Dialog mempersyaratkan kerjasama antarumat beragama merupakan hal yang bertautan. Yang satu mengandalkan yang lain.<sup>51</sup> Tidak ada kerjasama tanpa didahului oleh dialog. Dialog yang tidak berlanjut pada kerjasama merupakan dialog setengah hati. Hazrat Inayat Khan telah memberi contoh bagaimana sebuah dialog (*spiritual*) keagamaan yang menemukan penguatan kerja sosial. Sebagai sufi, ia tidak segan-segan menceburkan dirinya dalam aktivitas sosial.

Di Indonesia berbagai lembaga dialog mulai pula mengarah pada aksi-aksi kolaboratif yang melibatkan berbagai agamawan. Mereka tidak berhenti sekedar berdiskusi, seperti yang dilakukan oleh *Institut for Interfaith Dialogue in Indonesia* atau Dialog Antar Iman, disingkat Interfidei/Dian di Yogyakarta.<sup>52</sup> Terdapat pula Forum Persaudaraan Antar-Umat Beriman (FPUB) di Yogyakarta tahun 1997. Peran forum dialog ini nampak saat terjadinya gempa besar di Yogyakarta tahun 2006.<sup>53</sup>

Lembaga Paramadina di Jakarta didirikan oleh Nurcholish Madjid dan kawan-kawan pada tahun 1986. Ini merupakan ajang pertemuan berbagai kalangan agama untuk berdialog secara bebas dan terbuka, namun tetap dalam suasana kekeluargaan dan persaudaraan. Lembaga ini juga mendirikan Sosma (Sosial Paramadina) yang mengkhususkan diri pada kegiatan pelayanan dan aksi sosial. Menyusul kemudian Masyarakat Dialog Antar Agama atau MADIA, sebuah lembaga yang berkiprah pada berbagai kolaborasi kegiatan dialog antarumat beragama. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sering mengadakan seminar antar umat beragama. UIN menaungi lembaga kajian kerukunan *Center for the Study of Religion and Socio-Cultural Diversity* (CRSD).

Sebut saja Yayasan Padi Kasih, yaitu lembaga di Jakarta yang pernah mengorganisasi kegiatan Festival Pluralisme yang melibatkan banyak lembaga dengan *concern* serupa. Kegiatan-kegiatan lain lembaga ini mengarah pada program sosial antaragama. Kemudian ada *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP),<sup>54</sup> yang dibentuk pada bulan Juli 2000 juga di Jakarta. Meski baru sekitar 3 tahun berdiri, lembaga ini sudah berkiprah banyak sekali dalam kegiatan antaragama.<sup>55</sup>

Sementara itu di luar Jakarta, kegiatan serupa juga berkembang pesat. Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdapat wadah *Center for the Study of Religion and Socio-Cultural Diversity* (CRSD)<sup>56</sup> dan *Dialog Center*

(DC). Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, ada program *Religious Studies* dan Pusat Studi Pengembangan Perdamaian (PSPP) yang juga banyak melakukan kegiatan terkait dengan hubungan antaragama semacam seminar, workshop, dan lain-lain. Di Universitas Gadjah Mada terdapat *Center for Religious and Cross-Culture Studies* dan ICRS (*Indonesian Consortium for Religious Studies*) yang menyelenggarakan program-program yang mengarah ke pengertian antarumat beragama. Paul Knitter dan Hans Küng pernah mengajar di sini. Terdapat forum lembaga yang terdapat di Malang Jawa Timur, yaitu kegiatan yang dilakukan di Gereja Kristen Jawi Wetan. Mereka secara rutin mengadakan pelatihan bagi para pendeta di seluruh Indonesia tentang Islam, dengan para pengajar tokoh-tokoh Islam, untuk memberi pengertian yang benar tentang agama Islam. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga mengirim para pendeta ke pesantren-pesantren untuk lebih mengenal Islam dan masyarakat Islam. Mereka berdialog dengan para santri dan kiai. Sebaliknya, mereka juga mengundang tokoh-tokoh Islam untuk “nyantri” atau menetap selama beberapa hari di lembaga tersebut untuk berdialog dengan kalangan gereja. Semua itu tidak mungkin dilakukan jika tidak dimotivasi oleh iklim dialogis antarumat beragama dan niat untuk menjalin kerjasama.<sup>57</sup>

### **Dialog Aksi dalam Membangun Perdamaian dan Kesejahteraan Bangsa**

Di awal abad XXI bangsa ini banyak didera berbagai persoalan sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan sebagainya. Persoalan tersebut menjadi agenda besar bangsa. Jika agenda tersebut dirinci, misalnya berbentuk pembangunan, penindasan, kekerasan, ketidakadilan, sindikat obat-obatan yang terlarang, kemiskinan, pluralitas, penanggulangan bencana, keterbelakangan dan agenda global (gelombang modernisasi) dan menguatnya perlindungan hak-hak azasi manusia.<sup>58</sup>

Persoalan di atas merupakan persoalan seakaligus tanggung jawab agama-agama dan umat beragama. Dalam penanganannya membutuhkan ketulusan niat dan i'tikad para penganut agama untuk bergandengan tangan dan bekerjasama, sehingga agama-agama tidak lagi menjadi kekayaan pribadi, institusi, atau golongan, tetapi kekayaan bersama.

Dialog aksi (dialog yang dilanjutkan dengan kerjasama antarumat beragama) sering dilakukan oleh LBKUB (Lembaga Bhakti Kemanusiaan Umat Beragama) di Boyolali, sebuah lembaga dialog yang berdiri pada pertengahan tahun 1998. Lembaga ini berusaha mengembagkan satu bentuk dialog kehidupan dan dialog aksi (dialog dan kerjasama), dimana masing-masing peserta dialog memulai perbincangan dengan keberanian meletakkan iman pada posisi yang setara dan melakukan aksi bersama, untuk pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, pembangunan dan sebagainya.

Strategi dialog dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat didasarkan pada nilai-nilai pluralisme, *interfaith*, kesetaraan, keadilan, demokrasi, dan agama. Pola yang ditempuh adalah pola pendampingan,<sup>59</sup> dengan pendekatan *andragogis partisipatoris*.<sup>60</sup>

Dalam melaksanakan programnya, LBK-UB juga menggunakan metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*), metode FGD (*Focus Group Discussion*) dan metode SOTARAE (Situasi Objek Tema Analisis Rangkuman Aksi Evaluasi). Metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*) dinilai bisa membantu masyarakat dalam memperkenalkan masalah yang ada di lingkungan masyarakatnya. Metode tersebut bertujuan membantu masyarakat mengidentifikasi kebutuhan yang mendesak di masyarakat dan mengidentifikasi potensi atau sumber daya yang dimiliki masyarakat. Instrumen yang digunakan dalam metode ini antara lain peta desa (*mapping*), analisa stakeholder, analisa kedekatan informasi dan lain-lain.

Instrumen-instrumen tersebut membantu masyarakat mengungkapkan pendapatnya mengenai desa dan potensinya. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan yang akan dilaksanakan nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga tujuan dan manfaat pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat secara maksimal, dan terdapat pemerataan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Metode *Focus Group Discussion* (FGD) adalah metode yang dipakai untuk mengajak masyarakat berdialog, berdiskusi, dan diberi angket untuk mengungkap permasalahan program. Metode ini memungkinkan berlangsungnya umpan balik secara cepat antarelemen masyarakat, baik masyarakat awam, tokoh masyarakat (agama), BPD, perangkat desa,

kelompok masyarakat, LBK-UB maupun lembaga mitra sehingga memberikan kesempatan penyesuaian strategi yang diperlukan.

Kemudian metode SOTARAE (Situasi Objek Tema Analisis Rangkuman Aksi Evaluasi) yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa media, misalnya media cerita bergambar, poster, drama radio dan radio spot. Media ini dipakai agar masyarakat mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan lewat media tersebut.

Dari pendekatan dan metode-metode yang dinilai strategis itulah, selanjutnya program kegiatan, misalnya program padat karya pangan, pengembangan kapasitas, pengembangan perdamaian, program finansial mikro, dan sanitasi lingkungan dilaksanakan.

Perlu diingat, dalam pelaksanaan program atau dialog aksi tidak bisa dilakukan hanya sekali, namun dilakukan dalam beberapa tahapan dan berkelanjutan. Dukungan media dan sarana sangat penting untuk memperlancar dialog aksi. Seluruh elemen masyarakat tanpa memandang jenis kelamin dan agama, suku, dan golongan juga harus dilibatkan. Tanpa sengaja dalam pelaksanaan program tersebut terjadi interaksi dan dialog antarelemen masyarakat, sehingga dialog aksi dan dialog kehidupan umat beragama teraplikasikan dalam sehari-hari.

## Penutup

Dialog yang relevan dengan era global saat ini adalah dialog aksi atau dialog dan ditindaklanjuti dengan kerjasama, meskipun tidak menutup kemungkinan dialog-dialog lain juga diperlukan. Dialog aksi hendaknya dilakukan dengan mendasarkan pada nilai-nilai pluralisme, *interfaith*, kesetaraan, keadilan, demokrasi, dan agama. Dialog sebaiknya melibatkan seluruh elemen masyarakat, laki-laki dan perempuan tidak memandang agama, status sosial, suku, ras, dan golongan dalam setiap proses pembangunan dan perubahan sosial di masyarakat. Dialog aksi harus tetap memperhatikan kearifan lokal dan mengoptimalkan potensi lokal; menumbuhkembangkan institusi lokal sebagai subyek (pelaku) dalam melakukan perubahan sosial (*social transformation*); mendorong proses interaksi untuk mengembangkan wawasan, sikap, dan ketrampilan masyarakat, pranata, karakteristik, dan tokoh-tokoh lokal melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan.\*\*\*

## Catatan Akhir

<sup>1</sup> Hans Küng, *Global Responsibility: in Search Without a World Ethic* (New York: Crossroad, 1991), h. 504.

<sup>2</sup> Nurcholish Madjid, dkk., *Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-pluralis* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina Kerjasama dengan The Asia Foundation, 2004), h. 200.

<sup>3</sup> Pararelitas gerakan hubungan antaragama dunia telah pula memberikan inspirasi signifikan terhadap terkonstruksinya Wadah Musyawara Antaragama. Wadah ini hanya sebagai lintasan, bahwa pada saat pra dan pasca kemerdekaan telah terbentuk juga lembaga atau badan hubungan antaragama dunia diantaranya; The International Association for Religious Freedom, The World Congress of Faith yang terinspirasi oleh Sir Francis Young Husband yang didirikan pada tahun 1936, Temple of Understanding yang disponsori oleh Judith Holisster didirikan tahun 1960. Judo Poerwowidagdo, *Indonesian: Living Together in a Majority Muslim Population*, Inggris, No. 3, Concilium, 1994, h. 25-26.

<sup>4</sup> Olaf Schuman, "Christian Muslim Encounter in Indonesia", dalam Haddad and Haddad, *Christian Muslim Encounter* (Florida: University Press of Florida, 1995), h. 289.

<sup>5</sup> Dalam upaya untuk membentuk hubungan yang baik dan bersahabat antarumat beragama khususnya antara Islam dan Kristen, maka pemerintah mengusulkan dialog yang dilaksanakan Majelis Konsultasi Antaragama. Dalam majelis ini para pemimpin kelompok-kelompok agama akan bekerjasama dan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik agama-agama, untuk sampai pada pembentukan majelis konsultasi antaragama, Menteri Agama telah membentuk Komite Antaragama di Departemen Agama. Komite ini terdiri dari Inspektur Jenderal sebagai ketua dan direktur jenderal dari kelima agama sebagai anggotanya. Saiful Muzani (ed), *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution* (Bandung: Mizan, 1996), h. 264.

<sup>6</sup> Esensi dari keputusan Menteri tersebut mengandung beberapa poin signifikan dan strategis, pertama aktivitas dakwa dan misi tidak boleh ditujukan kepada orang yang telah memeluk satu agama, kedua aktivitas dakwah dan misi tidak boleh menggunakan cara-cara yang tidak fair dan terselubung, seperti dengan memanfaatkan jasa makan, pakaian, medis dan sebagainya untuk memberikan suport kepada seseorang agar konversi dari agamanya, ketiga aktivitas dan misi tidak boleh dilakukan melalui door to door, dan keempat fasilitas dan sumber daya manusia yang berasal dari luar negeri tidak boleh didistribusikan untuk menggalang invasi agama tanpa ada persetujuan pemerintah. Tarmizi Taher, *Aspiring for the Middle Path Religious Harmony in Indonesia* (Jakarta: CENSIS, 1997), h. 41.

<sup>7</sup> Nurcholish Madjid, dkk., *Op.Cit.*, 200-202

<sup>8</sup> Burhanuddin Daya dan Herman Leonard Beck (red). *ILmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda* (Jakarta: INIS, 1992), h. 208.

<sup>9</sup> *Oxford advanced Learner's Dictionary*, edisi ke 4 (Oxford: Oxford University Press, 1989), h. 331.

<sup>10</sup> A. Mukti Ali, "Agama, Moralitas dan Perkembangan Kontemporer" dalam Mukti Ali, dkk, *Agama dalam Pergumulan Masyarakat Dunia* (Yogyakarta: Tiara wacana: 1997), h. 7.

<sup>11</sup> *Ibid.* h. 8.

<sup>12</sup> W. Montgomery Watt, *Islam and Christianity Today: A Contribution to Dialogue*, Trjrn. Eno Syafrudien (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1991), h. 7.

<sup>13</sup> Josef Van Ess, "Islam dan Barat dalam Dialog", dalam Nurcholish Madjid, dkk., *Agama dan Dialog Antarperadaban* (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 170.

<sup>14</sup> Leonard Swidler, "A. Dialogue on Dialogue", dalam Leonard Swidler, dkk., *Death or Diaogue?, From the Age of Monologue to the Age of Dialogue* (Philadelphia: Trinity Press International, 1990), h. 57.

<sup>15</sup> Sebastian d' Ambar, *Life in Dialogue: Pathways to Inter-religious Dialogue and the Vision-Experience of the Isamic-Christian Silsilah Dialogue Movement* (Philipina: Silsilah Publications, 1991), h. 43.

<sup>16</sup> Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed), Pengantar Editor, dalam *Passing Over: Melintasi Batas Agama* (Jakarta: Gramedia dan Paramadina, 1998), h. xiii.

<sup>17</sup> Th. Sumartana, "Pluralisme, Konflik dan Dialog: Refleksi Tentang Hubungan Antaragama di Indonesia", dalam Th. Sumartana dkk, *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 87.

<sup>18</sup> Burhanuddin daya, *Ilmu Perbandingan Agama...*, *Op.Cit.*, h. 208.

<sup>19</sup> St. Sunardi, "Dialog: Cara Baru Beragama (Sumbangan Hans Kung bagi Dialog Antaragama)", dalam Abdurrahman Wahid, dkk, *Dialog: Kritik dan Identitas Agama* (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993), h. 78.

<sup>20</sup> Burhanuddin Daya, *Agama Dialogis...*, *Op.Cit.*, h. 72

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 39-40.

<sup>22</sup> Lihat Leonard Swidler, "the Dialogue Decalogue, Ground Rules for Interreligious Dialogue", dalam James H. Kroeger, M.M., *Interreligious Dialogue*, Davao City, 1990, h. 95-98.

<sup>23</sup> Burhanuddin Daya, *Agama Dialogis Merada Dialektika Idealitas dan Realitas Hubungan Antaragama* (Yogyakarta: Mataram-Minang Lintas Budaya, 2004), h. 72.

<sup>24</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Berbagai Agama* (Bandung: Mizan, 1997), h. 43.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 58.

<sup>26</sup> Zakiyuddin Baidhawi, Trilogi Agama Ibrahim: Dasar Pijak bagi Dialog Antara Yahudi, Kristen, dan Islam", dalam Profetika Jurnal Studi Islam, Vol. I No. Januari 1999, h. 82.

<sup>27</sup> Alwi Sihab, *Op.Cit.* h. 113.

<sup>28</sup> WCC, "Guidelines on Dialogue with People of Living Faith and Ideologies", cet 5 (Geneva: WCC, 1993), h. 18.

<sup>29</sup> Leonard Swidler, "A Dialogue on Dialogue", dalam Leonard Swidler, dkk, *Death or Dialogue?...*, h. 64-66.

<sup>30</sup> Josef van Ess, *Op.Cit.*, h. 168.

<sup>31</sup> Emha Ainun Najib, "Dialog Antaragama dan Batas-batasnya", dalam Abdurrahman Wahid, dkk, *Dialog: Kritik dan Identitas Agama* (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993), h. 160

<sup>32</sup> Lester R. Kurtz, *Gods in the Global Village: The World's Religions in Sociological Perspective* (California: Pine Forge Press, 1995), h. 1

<sup>33</sup> R. Tockary, "Ke Mana Arah dan Tujuan Dialog Antariman" dalam *Newsletter Interfidei*, edisi Khusus 2002, h.14.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 114. Bandingkan dengan hasil penelitian PPIM dan Litbang Depag yang menyimpulkan bahwa pandangan keagamaan kalangan penyiar agama secara umum tergolong modern, hanya saja sikap umum ini semakin terdorong ke arah yang lebih eksklusif. Uraian lebih detailnya lihat Burhanuddin Daya dkk (ed), *Sistem Siaga Dini Terhadap Kerusuhan Sosial* (Jakarta: Balitbang DEPAG dan PPIM, 2000), h. 131-139.

<sup>35</sup> Ayatullah Siddiqi, "Christian-Muslim Dialogue: Problems and Challenges", dalam M. Darrol Bryant & S. A. Ali (ed), *Muslim-Christian Dialogue: Promise and Problems* (Minnesota: Paragon House, 1998), h. 78.

<sup>36</sup> Zainuddin Sadar, "Era Posmodernisme" dalam Munawar Ahmad Anes, dkk, *Christian-Muslim Relation: Yesterday, Today, Tomorrow*, terjm. Ali Noer Zaman, "Dialog Muslim-Kristen Dulu, Sekarang, Esok" (Yogyakarta: Qolam, 2000), h. 70.

<sup>37</sup> Josef Van Ess, "Islam dan Barat dalam Dialog", dalam Nurcholish Madjid, dkk., *Agama dan Dialog Antar peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 90.

<sup>38</sup> John Hick, "Religious Pluralism", Frank Whaling (ed), *The World's Religious Traditions* (Edinbrugh: TRT Clark, 1984), h. 150.

<sup>39</sup> Johan Meuleman, "Sikap Islam Terhadap Perkembangan Kontemporer", dalam A. Mukti Ali, dkk, *Agama dalam Pergumulan Masyarakat Dunia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), h. 28.

<sup>40</sup> Ma'arif Jamuin, *Manual Advokasi Resolusi Konflik Antaretnik dan Agama* (Surakarta: Ciscore Offset, 1996), h. 6.

<sup>41</sup> Lihat Abdurrahman Wahid, "Dialog Agama dan Masalah Pendangkalan Agama", dalam Kommaruddin Hidayat, Ahmad Gaus AF, (ed.), dkk, *Passing Over: Melintasi Batas Agama* (Jakarta: Gramedia dan Paramadina), h. 51-59.

<sup>42</sup> Pengantar, dalam Abdurrahman Wahid, dkk, *Dialog: Kritik dan Identitas Agama* (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993), h.88.

<sup>43</sup> Executive Comunittee IAHR, "Prosedure Concerning Numen: International Review for the History of Religions" [www.iahr.dk/numen.htm](http://www.iahr.dk/numen.htm) diakses 28 Juni 2009.

<sup>44</sup> Michel L. Fitzgerald dan Robert Caspar, *Sign of Dialogue: Christian Encounter with Muslims* (Philipina: Silsilah Publications, 1992), h. 102

<sup>45</sup> Burhanuudin Daya, *Agama Dialogis...*, *Op.Cit.*, h. 67

<sup>46</sup> J.B. Banawiratman dan Franz Magniz-Suseno, “Dinamika Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia Tinjauan Kristen Katholik”, dalam Mursyid Ali, *Dinamika Kerukunan Hidup beragama Menurut Perspektif Agama-Agama Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Beragama* (Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2000), h. 94

<sup>47</sup> Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 62-64.

<sup>48</sup> Misalnya dialog yang diadakan Parlemen Agama-agama tahun 1983 dan 1993, di Chicago Amerika Serikat. Dialog tahun 1993 dihadiri kurang lebih 6.500 orang dari berbagai agama dan aliran kepercayaan yang berhasil mengeluarkan Deklarasi Etika Global (Erklärung zum Weltethos; Declaration toward a Global Ethic). Hans Küng and Karl-Josef Kuschel, *A Global Ethic the Declaration of the Parliament of the World's Religions* (New Yorks: Continuum, 1993), h. 96-97.

<sup>49</sup> Dialog jenis ini pada umumnya diselenggarakan kalangan intelektual atau organisasi-organisasi yang dibentuk untuk mengembangkan dialog antarumat beragama, seperti Interfidei, MADIA, Paramadina dan lain-lain.

<sup>50</sup> Kedua versi model dialog tersebut bandingkan dengan model dialog dari pandangan gereja yang ditulis Ignatius L. Madya Utama, yang membagi dialog menjadi empat model dialog, pertama dialog kehidupan, dimana orang berjuang untuk hidup dalam semangat keterbukaan dan bertetangga, saling membagi pengalaman kegembiraan dan kedukaan, permasalahan-permasalahan serta keprihatinan-keprihatinan manusiawi. Kedua dialog tindakan, dimana orang-orang Kristiani dan orang-orang yang beragama lain bekerjasama bagi terwujudnya kemajuan dan pembebasan rakyat secara utuh. Ketiga dialog pengalaman religius, orang-orang yang berdialog berakar pada tradisi keagamaan mereka masing-masing dan berbagi kekayaan rohani mereka. Misalnya hal-hal yang berhubungan dengan do'a dan kontemplasi, iman dan cara-cara mencari Allah atau Yang Mutlak, dan keempat dialog dalam pembicaraan teologis, dimana para spsialis agama berusaha memperdalam pemahaman mereka mengenai warisan-warisan religius mereka, serta saling menghargai nilai-nilai kerohanian yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Ignatius L. Madya Utama, “Peranan Pemimpin Kampus dalam Membangun Suasana Kerukunan Antar Umat Beragama di Kalangan Civitas Akademik Perguruan Tinggi”, dalam M. Zainuddin Daulay (ed) *Mereduksi Eskalasi Konflik Antarumat Beragama di Indonesia...*, h. 72-73.

<sup>51</sup> M. Amin Abdullah, “Kebebasan Beragama Atau Dialog Antaragama 50 Tahun Hak Asasi Manusia”, dalam J.B. Banawiratman, dkk. (red.), *Hak Asasi Manusia Tantangan Bagi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), h. 58.

<sup>52</sup> Untuk lebih jelasnya lihat Eka Darmaputra, “Dian/Interfidei: Sebuah Sumbangan Dialog”, dalam Abdurrahman Wahid, dkk., *Dialog: Kritik dan Identitas Agama* (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993), h. 278.

<sup>53</sup> Sularto, “Dialog Antaragama Mencari Model Hubungan Antarkelompok”, *Kompas*, 26 Oktober 2007.

<sup>54</sup> Nurchilish Madjid, *Fiqh Lintas...*, *Op. Cit.* h. 239

<sup>55</sup> Nama-nama seperti Djohan Effendi, Musdah Mulia, Ulil Abshar Abdalla, Chandra Setiawan dan lain-lain terlibat dalam kegiatan lembaga ini.

<sup>56</sup> Profil Center for the Study of Religion and Socio-Cultural Diversity (CRSD) of IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

<sup>57</sup> Nurchilish Majid, *Fiqih Lintas...*, *Op. Cit.* h. 240.

<sup>58</sup> Spiritualisme atau spiritualitas adalah dorongan bagi seluruh tindakan manusia, maka spiritualitas baru bisa dikatakan sebagai dorongan bagi respons terhadap problem-problem masyarakat kontemporer. Spiritualitas baru berbeda dengan bentuk isme-isme yang lebih berupa ajaran formal. Dewan Redaksi, *Spiritualisme Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat* (Yogyakarta: Interfidei, 1994), h.165.

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Direktur LBK-UB Boyolali, 12 September 2004.

<sup>60</sup> Pendekatan andragogis partisipatoris adalah pendekatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat baik dengan lembaga mitra, kelompok masyarakat, umat, maupun institusi-institusi lokal. Laki-laki dan perempuan tidak memandang agama, status sosial, suku, ras, dan golongan berperan aktif dalam setiap proses pembangunan dan perubahan sosial di masyarakat.

### Daftar Pustaka

- A. Mukti Ali, "Agama, Moralitas dan Perkembangan Kontemporer" dalam Mukti Ali, dkk, *Agama dalam Pergumulan Masyarakat Dunia*, Yogyakarta: Tiara wacana: 1997.
- Abdurrahman Wahid, "Dialog Agama dan Masalah Pendangkalan Agama", dalam Komaruddin Hidayat, Ahmad Gaus AF, (ed.), dkk, *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, Jakarta: Gramedia dan Paramadina, 1998.
- \_\_\_\_\_, dkk, *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993.
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Berbagai Agama*, Bandung: Mizan, 1997.
- Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Burhanuddin Daya, *Agama Dialogis Merada Dialektika Idealitas dan Realitas Hubungan Antaragama*, Yogyakarta: Mataram-Minang Lintas Budaya, 2004.
- \_\_\_\_\_, dan Herman Leonard Beck (red). *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda*, Jakarta: INIS, 1992.
- \_\_\_\_\_, dkk (ed), *Sistem Siaga Dini Terhadap Kerusuhan Sosial*, Jakarta: Balitbang DEPAG dan PPIM, 2000.
- Dewan Redaksi, *Spiritualisme Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat*, Yogyakarta: Interfidei, 1994.

- Eka Darmaputra, "Dian/Interfidei: Sebuah Sumbangan Dialog", dalam Abdurrahman Wahid, dkk., *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993.
- Emha Ainun Najib, "Dialog Antaragama dan Batas-batasnya", dalam Abdurrahman Wahid, dkk., *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993.
- Ess, Josef Van, "Islam dan Barat dalam Dialog", dalam Nurcholish Madjid, dkk., *Agama dan Dialog Antarperadaban*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Executive Committee IAHR, "Prosedure Concerning Numen: International Review for the History of Religions" [www.iahr.dk/numen.htm](http://www.iahr.dk/numen.htm) diakses 28 Juni 2009.
- Fitzgerald, Michel L. dan Robert Caspar, *Sign of Dialogue: Christian Encounter with Muslims*, Philipina: Silsilah Publications, 1992.
- Küng, Hans, *Global Responsibility: in Search Without a World Ethic*, New York: Crossroad, 1991.
- \_\_\_\_\_, and Karl-Josef Kuschel, *A Global Ethic the Declaration of the Parliament of the World's Religions*, New Yorks: Continnum, 1993.
- Hick, John, "Religious Pluralism", Frank Whaling (ed), *The World's Religious Traditions*, Edinbrugh: TR T Cark, 1984.
- Ignatius L. Madya Utama, "Peranan Pemimpin Kampus dalam Membangun Suasana Kerukunan Antar Umat Beragama di Kalangan Civitas Akademik Perguruan Tinggi", dalam M. Zainuddin Daulay (ed) *Mereduksi Eskalasi Konflik Antarumat Beragama di Indonesia*
- J.B. Banawiratman dan Franz Magniz-Suseno, "Dinamika Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia Tinjauan Kristen Katholik", dalam Mursyid Ali, *Dinamika Kerukunan Hidup beragama Menurut Perspektif Agama-Agama Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Beragama*, Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2000.
- Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed), *Pengantar Editor, dalam Passing Over: Melintasi Batas Agama*, Jakarta: Gramedia dan Paramadina, 1998.
- Kurtz, Lester R., *Gods in the Global Village: The World's Religions in Sociological Perspective*, California: Pine Forge Press, 1995.
- M. Amin Abdullah, "Kebebasan Beragama Atau Dialog Antaragama 50 Tahun Hak Asasi Manusia", dalam J.B. Banawiratman, dkk. (red.), *Hak Asasi Manusia Tantangan Bagi Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Ma'arif Jamuin, *Manual Advokasi Resolusi Konflik Antaretnik dan Agama* Surakarta: Ciscore Offset, 1996.
- Meuleman, Johan, "Sikap Islam Terhadap Perkembangan Kontemporer", dalam A. Mukti Ali, dkk., *Agama dalam Pergumulan Masyarakat Dunia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Nurcholish Madjid, dkk., *Fiqih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-pluralis*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina Kerjasama dengan The Asia Foundation, 2004.

- Oxford advanced Learner's Dictionary, edisi ke 4*, Oxford: Oxford University Press, 1989.
- Poerwowidagdo, Judo, *Indonesian: Living Together in a Majority Muslim Population*, Ingggris, No. 3, Concilium, 1994.
- Profil Center for the Study of Religion and Socio-Cultural Diversity (CRSD) of IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- R. Tockary, "Ke Mana Arah dan Tujuan Dialog Antariman" dalam *Newsletter Interfidei*, edisi Khusus 2002.
- Saiful Muzani (ed), *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*, Bandung: Mizan, 1996.
- Schuman, Olaf, "Christian Muslim Encounter in Indonesia", dalam Haddad and Haddad, *Christian Muslim Encounter*, Florida: University Press of Florida, 1995.
- Sebastian d'Ambar, *Life in Dialogue: Pathways to Inter-religious Dialogue and the Vision-Experience of the Islamic-Christian Silsilah Dialogue Movement*, Philipina: Silsilah Publications, 1991.
- Siddiqui, Ayatullah, "Christian-Muslim Dialogue: Problems and Challenges", dalam M. Darrol Bryant & S. A. Ali (ed), *Muslim-Christian Dialogue: Promise and Problems*, Minnesota: Paragon House, 1998.
- St. Sunardi, "Dialog: Cara Baru Beragama (Sumbangan Hans Kung bagi Dialog Antaragama)", dalam Abdurrahman Wahid, dkk, *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993.
- Sularto, "Dialog Antaragama Mencari Model Hubungan Antarkelompok", *Kompas*, 26 Oktober 2007.
- Swidler, Leonard, "the Dialogue Decalogue, Ground Rules for Interreligious Dialogue", dalam James H. Kroeger, M.M., *Interreligious Dialogue*, Davao City, 1990.
- Tarmizi Taher, *Aspiring for the Middle Path Religious Harmony in Indonesia*, Jakarta: CENSIS, 1997.
- Th. Sumartana, "Pluralisme, Konflik dan Dialog: Refleksi Tentang Hubungan Antaragama di Indonesia", dalam Th. Sumartana dkk, *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Watt, W. Montgomery, *Islam and Christianity Today: A Contribution to Dialogue*, *Trjm. Eno Syafrudien*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1991.
- WCC, "Guidelines on Dialogue with People of Living Faith and Ideologies", cet 5, Geneva: WCC, 1993.
- Zainuddin Sadar, "Era Posmodernisme" dalam Munawar Ahmad Anes, dkk, *Christian-Muslim Relation: Yesterday, Today, Tomorrow*, *terjm. Ali Noer Zaman*, "Dialog Muslim-Kristen Dulu, Sekarang, Esok", Yogyakarta: Qolam, 2000
- Zakiyuddin Baidhawi, *Trilogi Agama Ibrahim: Dasar Pijak bagi Dialog Antara Yahudi, Kristen, dan Islam*, dalam *Profetika* Jurnal Studi Islam, Vol. I No. Januari 1999.

## Pluralitas Bukan Sekedar Diversitas: Telaah atas Kondisi Keberagaman di Amerika

Mukti Ali

*Dosen STAIN Salatiga  
Mendapat gelar master di  
bidang Pengkajian Amerika  
dari UGM Yogyakarta  
Sedang Menempuh Kuliah  
Doktoral di PPs Ilmu  
Komunikasi Universitas  
Padjajaran Bandung*

### **Abstract:**

*This research is based on literature approach using qualitative method. Theoretically, this research uses social theories of cultural encounter such as assimilation theory, melting pot, salad bowl and contemporary discourses of multiculturalism.*

*America is a pluralistic country with people living in diverse ethnics and cultures. The reality of plurality occurring in America does not only show diversity, but also tolerance, mutual understanding and work together in their diversity manifested in sense of harmony relationship.*

*Historically, the development of religions in America is interesting. Several religions had come together along with the wave of immigration from all over the world. This historical background caused those religions to live in the daily life of American people. Then, the typology of the US religions is pluralistic due to the freedom of every religion to spread in that country such as Christian, Jews, Islam, Hindu, Buddha, Shikh, Confucianism, etc. Even the Civil Religion becomes a religion embraced and expressed by some American people.*

**Keywords:** *Pluralism, assimilation, melting pot, salad bowl, denomination, civil religion*

### **Pendahuluan**

Mengacu pada Kamus Filsafat Lorens Bagus (1996), pluralisme (*pluralism* dalam bahasa Inggris, dan *pluralis* dalam bahasa Latin) berarti jamak. Pluralisme dicirikan oleh keyakinan-keyakinan seperti berikut; *Pertama*, realitas fundamental bersifat jamak; berbeda

dengan dualisme (yang menyatakan bahwa realitas fundamental ada dua) dan monisme (yang menyatakan bahwa realitas fundamental hanya satu). *Kedua*, ada banyak tingkatan hal-hal dalam alam semesta yang terpisah, yang tidak dapat direduksi, dan pada dirinya independen. Dan *Ketiga*, alam semesta pada dasarnya tidak ditentukan dalam bentuk; tidak memiliki kesatuan atau kontinuitas harmonis yang mendasar, tidak ada tatanan koheren dan rasional fundamental.

Gagasan pluralisme, terutama pada persoalan agama bertujuan untuk menghargai keberbedaan yang terdapat pada ajaran-ajaran agama. Keberbedaan tersebut kadangkala melahirkan sesuatu kekacauan yang tak jarang berakhir pada konflik yang berdarah-darah. Pluralisme agama mencoba menjembatani kedamaian secara global yang disusun dari setiap puing-puing parsial yang berbeda. Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan lebih sering dijadikan penyebab konflik dibandingkan melahirkan sebuah simfoni dan harmoni kekuatan.

## Pembahasan

Secara umum, orang yang beragama -atau pun tidak- jelas menginginkan rasa aman dalam menjalankan aktivitas keberagamaannya; orang Kristen nyaman dalam kebaktian, orang Islam khusyu dalam shalatnya, Hindu tenang dalam nyepinya, Pendeta dan kiayi atau pembawa misi agama berkeinginan dalam penyebaran ajaran Tuhannya tidak merasa was-was, selain berkeinginan agar uraian dan tuturan misinya dapat diterima oleh semua manusia, tanpa ada satu pihakpun yang merasa terusik dengan misinya, serta ia terbebas dari intimidasi orang-orang yang memang sengaja membuat keadaan menjadi tidak aman. Seorang penganut agama berkeinginan tidak lagi hidupnya dibayang-bayangi teror dari orang-orang yang senang membuat keonaran, kekerasan, dan ancaman atas nama agama. Bahkan secara kelompok pun mereka mengharapkan tidak terjadinya pertikaian atau konflik, apa lagi konflik yang dinegasikan pada eksistensi sebuah agama. Karena semuanya meyakini bahwa agama dilahirkan untuk menjadikan manusia menempati posisi yang tertinggi.

Tidak ketinggalan, apa yang dilakukan oleh ilmuwan atau para teolog guna menemukan jawaban atas persoalan yang sering dihadapi para penganut agama. Mereka melakukan pencarian melalui pikirannya

bagaimana agar agama tidak menjadi faktor yang menyebabkan konflik sosial, terlebih bermula pada konflik teologis. Karena agama tidak saja diyakini sebagai domain positif, melainkan agama kadang dipahami mampu menegasikan yang 'negatif' membunuh, perang yang dilabeli isyu-isyu sara, sehingga faktanya banyak konflik yang dilandaskan pada agama.

Selain semua itu, ada wilayah yang memang tidak bisa dipungkiri bahwa agama yang lahir dan hadir bersamaan dengan sejarah hidup manusia, sering mengundang dan menimbulkan berbagai persoalan, karena pada kenyataannya agama terlahir memiliki berbagai macam wajah dan corak yang berbeda.

Hal ini biasanya yang selalu menjadi bahan pemikiran dari setiap mereka yang menganggap bahwa kejamakkan, kemajemukan sebagai sebuah kejadian yang tidak mungkin tidak terjadi. Bahkan hal ini tidak dianggap oleh sebagian saja dari mereka, akan tetapi ini menjadi wilayah universal, yaitu, sebagai sebuah teka-teki yang dimiliki dan dirasakan oleh semua manusia. Dapat dirasakan dan dapat diterima oleh semua pemeluk agama, apapun agama yang mereka anut, mereka pasti memikirkan bagaiman solusi yang dapat memecahkan berbagai persoalan yang selalu dilandaskan pada agama, sehingga dari sekian banyak persoalan yang timbul dalam kehidupan umat beragama, katagorisasi 'perbedaan' dan 'persamaan' muatan ajaran agama yang paling banyak menimbulkan persoalan dan konflik. Baik secara historis maupun secara doktrinal, agama dipandang sebagai kebenaran yang mutlak, karena memang agama lahir dari Yang Mutlak (*divine*).

Pluralisme menjadi sebuah kata kunci untuk membuka dan mencapai suatu penyelesaian guna menangguk kehidupan yang harmonis sesuai dengan apa yang diinginkan oleh semua lapisan masyarakat. Tapi, tidak serta merta secara buta tanpa mengkritisi sepak terjang yang dilakukan oleh ide pluralisme tersebut. Karena sedikit saja tergelincir dalam pemaknaan, maka pluralisme akan memiliki nilai yang ambivalen bahkan akan terjerembab sehingga pluralisme hilang dengan kepluralannya yang tanpa makna. Melalui pemaknaan pluralisme yang pas, penulis berkeyakinan segala persoalan akan mendapatkan solusinya, karena sebuah penerimaan akan lahir sendirinya setelah melakukan kajian dan

perenungan-perenungan yang imajinatif serta melakukan reaktualisasi dan introspeksi diri secara bijak.

Perbedaan dan atau persamaan adalah sebuah turunan dari pluralisme yang beranggapan bahwa hakikat dari sesuatu adalah plural, atau lebih berarti bahwa segala sesuatu tidak satu dan juga bukan dua, akan tetapi banyak. Segala sesuatunya tidak saja hanya *ya* atau *tidak*, besar atau kecil, baik atau buruk, bagus atau jelek, dan sebagainya sesuai dengan pandangan yang mengatakan sesuatu itu pasti ada dua sisi dualisme. Begitu juga dengan pandangan monistik, yaitu pandangan bahwa sesuatunya adalah tunggal.

Untuk lebih memudahkan dalam memahami pluralisme, penulis akan memberikan sebuah analogi, yang ini mungkin sudah menjadi stereotipe para aktivis pluralisme, walaupun berbeda pada persoalan analoginya, akan tetapi konteksnya ingin menggambarkan realitas pluralitas yang ada. Terutama dalam mempertemukan pemahaman teologi yang bertitik temu pada Tuhan yang Esa. Gambaran tersebut misalnya pada kebenaran sesuatu benda, yang secara *dzahiri* satu objek. Seekor gajah bisa memiliki penjelasan yang berbeda, walau tujuan dari penjelasan yang berbeda itu adalah kebenaran. Tapi apakah kebenaran harus memiliki kesamaan penjelasan? Tentu tidak. Jika seekor gajah itu dipandang dari belakang, maka gajah itu akan dijelaskan sesuai dengan apa yang dilihat dari belakang: Gajah adalah binatang yang memiliki ekor panjang, berkaki besar dan struktur kakinya menyerupai dua benteng yang kokoh. Jika gajah itu dipandang dari arah depan, maka penjelasan tentang gajah tersebut adalah memiliki dua mata yang sipit, memiliki belalai panjang bagai meriam dalam peperangan, berdaun telinga lebar bagaikan baling-baling penggerak kapal induk bagi negara yang memilikinya, dan lain sebagainya, sesuai dengan apa yang dilihatnya. Begitu pun penjelasan tentang gajah dari dua sudut lain yang berbeda, samping kiri dan samping kanan. Penjelasanannya akan berbeda pula dengan yang lainnya.

Kemudian dari analogi tersebut di atas timbul pertanyaan. Apakah nilai kebenaran penjelasan tentang gajah tersebut terletak pada salah satu penjelasan saja. Apakah yang menjelaskan gajah dari belakang sajakah yang benar, atau apakah kebenaran terletak pada hasil pandangan dari depan, kiri, dan kanan saja. Bagi penulis dari sudut manapun ia

memandang hasilnya dianggap benar, karena memang benar adanya secara partikular dan akan terakumulasi dalam kebenaran yang universal. *Alih-alih* kalau memang salah, salahlah semua penjelasan tentang gajah tersebut.

Gambaran lain sesuai dengan apa yang pernah dilontarkan oleh Hans Kung' bahwa; tak ada satu agamapun yang benar (atau semua agama-agama tidak benar), hanya ada satu agama yang benar (atau semua agama lainnya tidak benar), setiap agama adalah benar (atau semua agama sama-sama benar), hanya ada satu agama yang benar dalam arti semua agama lainnya mengambil bagian dalam kebenaran agama yang satu itu. (dalam Sarapung, dkk. 2004:78)

Maka dapat ditarik benang merah, bahwa pluralisme adalah sebuah faham tentang keberagaman cara pandang untuk mengatakan bahwa segala sesuatunya adalah jamak dan beragam. Aliran pemahaman ini dilawankan sekaligus sebagai reaksi penolakan atas 'monisme' yang beranggapan bahwa hakikat sesuatu adalah tunggal atau juga faham dualisme yang beranggapan bahwa hakikat sesuatu terdiri dari dua hal.

Analog ini dimaksudkan adanya keterlibatan secara total untuk mendefinisikan Yang Mutlak (Tuhan) melalui bahasa agama masing-masing. Pluralisme bukan relativisme, pluralisme bukan kosmopolitanisme, bahkan pluralisme bukan sekedar kemajemukan pasif atau diversitas.

Alwi Shihab (1997:41-43) memberi batasan penting yang semestinya diperhatikan. Artinya pembatasan Shihab terhadap pluralisme ketika diterapkan, maka pluralisme harus didasarkan pada satu hal penting, yaitu komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing. Artinya, ketika seorang pluralis berinteraksi dengan aneka ragam agama, ia tidak saja dituntut untuk membuka diri, belajar dan menghormati agama lain, namun ia juga dituntut untuk mempertahankan komitmennya terhadap agama yang dianutnya. Dengan demikian melalui pluralisme seperti ini, maka para penganut dari setiap agama tidak terjebak ke dalam relativisme agama-agama.

## Persentuhan Warna Ide Pluralisme

Pluralisme adalah satu ideologi yang pada intinya tidak menerima satu hal, tetapi dalam fungsinya ia menerima banyak hal. (Miller dalam Mindrop, 1999). Pada konteks budaya, pluralisme dapat diartikan sebagai perbedaan budaya dalam suatu area yang dapat diartikan sebagai perbedaan kelompok suku bangsa atau etnis, agama, atatus daerah urban, pekerjaan, pendapatan, atau tingkat kebiasaan hidup (Kisser dalam Maharani,1999)

Amerika dalam hal ini, yang tidak bersifat seragam harus tetap mempertahankan pluralisme. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga integrasi bangsa karena dari sini akan muncul dengan sendirinya loyalitas masyarakat yang tinggi terhadap negara dan bangsanya sebab keberadaan mereka baik secara pribadi maupun kelompok diperlakukan secara sama. Akibat yang lebih jauh adalah di dalam masyarakat tercipta persatuan dan kesatuan yang benar-benar alami dan tidak dipaksakan oleh siapapun.

Membaca peta budaya Amerika yang terdiri dari berbagai etnis dan karakter unik yang mengharuskan ditawarkannya berbagai analisa dan teori sosial yang mampu membaca persoalan-persoalan yang terjadi pada masyarakat. Salah satunya teori pembauran atau asimilasi. Asimilasi kelompok etnis Amerika bukan merupakan proses satu jalan. Banyak dari penggunaan bahasa daerah, makanan, musik dan ciri budaya lain dari masyarakat Amerika sekarang yang dulunya pernah menjadi ciri khas etnis, sekarang menjadi bagian dari warisan umum. Gershwin, keluarga Kennedy, Andrew Carnegie, Joe DiMaggio, dan O.J Simpson, lebih merupakan fenomena Amerika daripada sebagai tokoh etnis. Kelompok-kelompok tersebut belum lebur ke dalam suatu tempat berbaurnya bangsa-bangsa, tetapi baik mereka sendiri, maupun Negara itu, sudah tidak sama seperti dulu. (Sowell, 1989:30)

Asimilasi adalah proses sosial yang tumbuh jika; 1). Golongan-golongan manusia yang berlatar belakang berbeda, 2). Bergaul langsung secara intensif untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga 3). Setiap kebudayaan dari tiap-tiap golongan berbaur menyesuaikan diri menjadi kebudayaan campuran (Koentjoroningrat dalam P. Haryono, 1993:14)

Jika diperhatikan, orang-orang yang sudah menyatakan dirinya sebagai orang Amerika akan sangat berbeda dengan ketika mereka berada di tempat asalnya, meskipun masih banyak yang meningkat dengan cara melanggar hukum yang menghalanginya. Hal ini sering harus dilakukan dengan pemberontakan fisik untuk mematahkan kekuatan dan menundukan kekuasaan kelompok yang dahulu menang dan sekarang memegang kekuasaan negara, jika hubungan ini terdapat pada bidang di luar politik misalnya (Malamud 1979;129)

Tidak semua hubungan ini selalu menjurus kepada konflik atau permusuhan. Seringkali hubungan itu justru dapat menjadikan faktor kebersamaan yang saling menguntungkan dan dapat melancarkan poses yang mengarah kepada kehidupan bersama secara rukun dan serasi. Ada kalanya hubungan yang baik kini dapat mencapai taraf integrasi. Setiap kelompok tetap hidup atas identitasnya sendiri dan hubungan di antaranya tetap dilakukan dengan baik. Mereka saling mengisi dengan tidak mempermasalahkan perbedaan di antara mereka dan secara ideal mereka menganggap bahwa tarap integrasi saja tidak cukup.

Sementara dalam sistem nilai, mereka beranggapan bahwa yang perlu dicapai ialah tarap pembauran sosial atau asimilasi. Kedua pihak melebur menjadi satu kolektivitas dengan menghilangkan segala faktor yang semula menjadi unsur pemisah (Gordon, 1964:67)

Selain teori Asimilasi, teori *melting pot* juga pernah meradang dalam membaca karakter Amerika. *Melting pot* adalah wacana yang diperdebatkan juga ketika melihat fakta budaya di Amerika. Teori ini walaupun secara frasenya belum terpopulerkan, akan tetapi pada praksisnya sudah dilakukan oleh Crevecour tahun 1780. Ia dan generasi seterusnya menghendaki adanya upaya untuk memadukan, menggabungkan, membaurkan, meleburkan dan bahkan mencairkan aneka kelompok etnis Amerika menjadi satu bangsa yang majemuk.

Sementara yang mempopulerkan teori ini adalah Israil Zangwill melalui drama *The Melting Pot*-nya pada tahun 1908, yang menggambarkan peristiwa di kota imigran, New York City, David Quixano seorang Yahudi kelahiran Rusia, dan Vera Revendal, seorang Kristen kelahiran Rusia yang saling jatuh cinta. Meskipun keduanya dihalang-halangi oleh keluarganya masing-masing, mereka bertekad bulat untuk kawin.

Perkawinan pun tertunda walau pada akhirnya terjadi juga. Zangwill ingin membahasakan bahwa perkawinan antarbangsa merupakan tradisi Amerika. Lebih jauh, dan bukan sekedar perkawinan antar bangsa, Zangwill juga ingin mengatakan bahwa pribadi Amerika yang sejati, yang terbaik, dan yang nyata haruslah orang Amerika keturunan leluhur campuran (Mann:116-125)

Pada konsep ini masing-masing kelompok etnis dengan budaya sendiri menyadari adanya perbedaan antara sesamanya, namun dengan menyadari perbedaan-perbedaan tersebut, mereka dapat membina hidup bersama dengan tujuan yang sama menuju Amerikanisasi. Peleburan unsur-unsur budaya etnis yang spesifik menjadi suatu bentuk yang berbau budaya Amerika seperti orientasi menuju modernisasi.

Tidak jauh dari teori-teori di atas. Terdapat analisa yang lebih menarik, *Salad Bowl*. Gagasan ini lebih maju dalam menjawab realitas etnis Amerika. Dalam kehidupan sehari-hari hal ini berarti masing-masing kelompok etnis dapat hidup berdampingan secara damai dan secara keseluruhannya merupakan suatu perpaduan yang masing-masing berdiri sendiri. Tentunya konsep *Salad Bowl* belum merupakan suatu tujuan yang optimal di dalam memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang terdapat di dalam masing-masing budaya dari kelompok etnis yang memilikinya. Bisa saja masing-masing kelompok etnis hidup berdampingan tetapi tidak saling peduli satu dengan yang lainnya. Masing-masing mengurus dirinya sendiri dan dapat hidup bersama-sama sepanjang yang satu tidak mengganggu kelompok lainnya (Tilaar, 2004:133-140)

Sehingga dari kesemuanya memiliki perbedaan yang terletak pada sikap masing-masing kelompok etnis dengan kelompok lainnya. *Salad bowl* tidak dipedulikannya sebuah komitmen untuk mengetahui dan saling berbagai unsur-unsur kebudayaan yang dimiliki dengan kelompok lain, maka di dalam *melting pot*, dan Asimilasi terasa adanya sesuatu kekuatan untuk mensintesisakan kebudayaan dari masing-masing kelompok kepada apa yang disebut dengan budaya Amerika.

Pada intinya semua teori maupun kenyataannya ada sebuah keinginan untuk meletakkan perbedaan pada tempatnya, dan tidak menjadikan faktor yang menimbulkan pergolakan. Kenyamanan dan harmonisasi adalah cita-cita semua manusia yang berdiri di atas identitas perbedaan.

## **Agama dan Konstitusi Amerika**

Sebuah cita-cita yang nyata bagi manusia untuk memiliki kehidupan yang layak dan memiliki nilai-nilai humanis yang tinggi. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, baik secara biologis maupun secara pikir (intelektual) yang memposisikan identitas manusia yang tidak bisa ditawar-tawar, dan ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Manusia secara biologis adalah bangunan struktur tubuh yang puna dan secara intelektual manusia adalah yang menggunakan rasio berpikir. Sehingga wajarlah kemudian manusia di kemudian hari memiliki rotasi keinginan serta kehendak yang logis.

Selain dua wilayah yang mengukuhkan manusia akan eksistensinya, manusia juga memiliki legitimasi yang kuat bersumber dari ajaran dan janji Tuhan. Tuhan menunjuk manusia sebagai manifestasi diri-Nya. Tuhan melimpahkan dan memberikan tanggung jawab pada manusia bukan tanpa alasan. Tuhan memiliki motivasi akan kemampuan manusia untuk memecahkan berbagai persoalan yang akan selalu hadir sejalan dengan napas manusia di dunia.

Hal yang lebih penting lagi, bagi manusia adalah bagaimana memaknai hidup yang dianugerahkan Tuhannya, kebebasan, kemerdekaan, hak asasi sekaligus sebagai sifat independensi. Manusia dituntut untuk mampu mengatur kehidupan, karena setiap manusia baik yang lahir di Timur, Barat, Selatan, dan Utara. Lahir dari bangsa dan warna kulit yang berbeda, serta kelainan berbahasa. Menjadikan manusia benar-benar sebagai sosok yang individual, independen, serta privat. Termasuk dalam hal ini yang berkaitan dengan ideologi keyakinan (agama).

Selain kepentingan individu, independen, dan privat tersebut, manusia juga berpikir tentang persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri. Dari sini kemudian manusia membutuhkan keikutsertaan individu lain untuk sama-sama menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan tersebut, maka sebuah komuni dibutuhkan. Amerika (dalam bentuk negara) dapat meramalkan secara filosofis akan realitas kehidupan kemudian. Maka dalam bentuk konstitusi negaranya, Amerika mampu memindahkan realitas kehidupan masyarakatnya dalam untaian isi konstitusi tersebut.

Sesuai dengan landasan di atas tersebut bahwa konstitusi dan *Bill of Right* serta ratifikasi yang sangat fleksibel, menjadikan rakyat Amerika menemukan kejelasan, ketenangan dan kekhusuan dalam bertindak, terutama dalam melakukan ritual-ritual keagamaan dan keyakinannya, selain kebebasan dalam berbicara, berkumpul, dan juga kebebasan untuk menemukan kesejateraan sesuai dengan usahanya.

Kebebasan menjalankan ajaran agama adalah realisasi dari konstitusi Amerika yang sangat jelas dirasakan oleh masyarakatnya. Beragamnya agama di Amerika sebagai bukti adanya kesadaran individu masyarakat akan pluralisme keberagamaan masyarakat Amerika.

Tercermin dari apa yang dirasakan dan disaksikan oleh praktisi proyek pluralisme, Diana L. Eck. Eck (2005) dengan cermat menggambarkan bagaimana pluralitas dan kebebasan menganut sebuah agama menjadi wilayah individu. Ia mensinyalir bahwa keragaman agama sudah menjadi ciri khas yang melekat pada bangsa Amerika, dan tahap yang paling menarik serta penting dari sejarah bangsa Amerika sudah terbentang di depan. Prinsip-prinsip dasar berdirinya Amerika akan diuji kekuatan dan visinya dalam Amerika baru yang religius, dan kini Amerika memiliki peluang untuk menciptakan masyarakat multireligius yang positif dari struktur demokrasi, tanpa sifat patriotik yang berlebihan dan kekuasaan agama yang terbukti menodai sejarah umat manusia.

Fenomena yang digambarkan di atas adalah bagian terkecil dari beberapa bukti kebebasan warga Amerika dalam menjalankan keagamaannya dan ini adalah bukti betapa luasnya teropongan tokoh-tokoh, pendiri, pemimpin, penguasa, rakyat, dan bangsa Amerika terhadap apa dan bagaimana kehidupan masyarakat Amerika kemudian. Amerika akan besar oleh keberbedaan dari tiap-tiap warganya. Sehingga jelaslah bahwa warganya harus mendapat kebebasan demi tercapainya tujuan dan cita-cita dari sebuah bangsa dan negara Amerika (*American Dream*).

Polarisasi dan warna kehidupan di Amerika jelas implikasi dari masyarakat beragama, walaupun hanya parsial-parsial kecil yang menyeruak kepermukaan, karena masyarakat Amerika lebih suka mengedepankan nilai-nilai humanitasnya dibandingkan mendompleng agama sebagai 'alasan' dalam bertindak. Kesadaran masyarakat Amerika untuk berhati-hati dalam memposisikan agama pada wilayah publik adalah

manifestasi dari masyarakat yang betapa harus sakralnya sebuah nilai agama. Manifestasi lain dari masyarakat Amerika yang religius adalah menciptakan sebuah negara yang damai, aman, dan sejahtera yang bersesuaian dengan ajaran dan nilai agama yang mereka peluk, baik agama mayoritas yaitu ajaran Kristianiti maupun agama minoritas.

Keterkaitan agama pada sebuah negara melalui konstitusi, atau persoalan hubungan antara agama dengan politik di Amerika Serikat dijelaskan oleh Benton Johnson dalam tulisannya, *“Religion and Politics in America: the Last Twenty Years”*, mengatakan, bahwa pandangan yang menyebutkan agama tidak mempunyai pengaruh apapun dalam kehidupan politik Amerika Serikat adalah sebuah penilaian yang distorsif. Menurut Johnson, kenyataan di lapangan secara agak mengejutkan justru menunjukkan potret yang sebaliknya. (Johnson dalam Bahtiar Effendy, 2001)

Jelas, dalam kontek Amerika, nilai-nilai agama yang sangat berpengaruh itu adalah Kristen –baik Katolik maupun Protestan. Karenanya, tak salah kiranya kalau almarhum Muhammad Natsir menyebut dan sering diceritakan oleh almarhum Nurcholish Madjid dalam berbagai kesempatan- Amerika Serikat bukan sebagai negara ‘sekular’, tetapi negara Kristen.

Tapi harus diakui bahwa fenomena seperti ini tidak terjadi secara merata dan seragam. Alih-alih, perkembangan seperti itu terjadi dalam intensitas dan variasi bentuk dan model yang berbeda. Dengan pemahaman seperti itu, yang ingin ditekankan adalah bahwa agama, khususnya dalam kaitannya dengan nilai-nilai universal yang dikandungnya, bukanlah sesuatu yang bersifat ‘pribadi’ (private). Namun, agama pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat ‘publik’ (public).

Sehingga tidak salah kiranya untuk mengatakan bahwa agama dapat dipandang sebagai instrumen ilahiyah untuk memahami dunia. Apa pun agamanya dalam persoalan ini, tidak akan menafikan kebenaran dan harus menerima premis tersebut. secara teologis hal itu dikarenakan watak agama yang *omnipresent*. Agama, baik melalui simbol-simbol atau nilai-nilai yang dikandungnya hadir di mana-mana. Agama ikut mempengaruhi bahkan membentuk struktur sosial, budaya, ekonomi, politik, dan kebijakan umum.

Lantas, kenapa kemudian agama seakan harus menjadi wilayah *private* semata. Padahal agama tidak harus kehilangan kesakralannya ketika menjadi objek 'perdebatan' atau sesuatu yang dapat diperdebatkan secara publik dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Amerika harus bangga dengan kekristenannya, Budhanya, Hindunya, Yahudinya, atau agama lainnya ketika berlaku adil, bijak, dan humanis. Amerika tidak semestinya harus memosisikan agama pada ranah sakralnya melalui wilayah privatnya.

Tentu saja di Amerika bukan saja mereka semua beragama, melainkan ada juga aliran sekularisasi yang kuat di antara para imigran baru. Banyak orang yang datang ke Amerika dari kalangan masyarakat tradisional Muslim, Hindu, atau Budha dapat bernapas lega, mensyukuri bukan saja kebebasan beragama di tempat baru ini, tetapi juga kebebasan untuk tidak menjalankan agama, dan kebebasan untuk menjadi sekular di dalam kehidupan serta pemikiran mereka. Tetapi menjadi sekular saja tidak secara otomatis menempatkan seseorang di luar aliran pemikiran-pemikiran agama, simbolisasi, serta stereotip yang mulai mendapat perhatian utama dalam masyarakat Amerika. (Eck.:48)

Kaum Pluralis dan Piagam Williamsburg mengusulkan untuk menekankan identitas bersama tanpa mengorbankan identitas dari banyak suara yang berbeda. Bersama-sama mereka membawa unsur utama yang luas dan beraneka ragam dari komunitas-komunitas keagamaan, termasuk umat Muslim dan Budha, guna menegaskan kembali komitmen mendasar terhadap kebebasan agama dan menemukan cara-cara untuk dapat hidup berdampingan dengan perbedaan-perbedaan yang ada.

### **Civil Religion Amerika**

Istilah *Civil religion* pada awalnya digunakan oleh Rousseau dalam bukunya *The Social Contract* yang membuat garis besar tentang dogma-dogma *civil religion* yang sederhana, yaitu eksistensi Tuhan, kehidupan yang akan datang, pahala bagi kebajikan dan hukuman bagi sebaliknya, dan penyingkiran sikap keagamaan yang tidak toleran. Semua opini keagamaan lainnya berada di luar tanggung jawab negara dan boleh dianut bebas oleh warga negara.

Berbeda dengan Andrew Shanks (2003) memaknai *civil religion* sebagai tidak menghalangi kesetiaan seseorang kepada tradisi konfensionalnya, gerejanya, atau yang lain, *civil religion* dituntun oleh kesetiaan lain yang memotong rangkaian pengakuan: hasilnya tercipta sebuah kesetiaan pada apapun yang ditunjukkan bagi keterbukaan sejati dalam lingkup budaya politik di sekitarnya.

Sedangkan menurut Robert Bellah, *civil religion* dalam *Civil Religion in America* (1974) ketika melihat realitas keagamaan masyarakat Amerika yang difokuskan pada ungkapan atau teks pidato para *the founding* Amerika. Bellah jelas menggunakan istilah ini begitu menarik. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah sebuah manifestasi dari kesalihan sejati.

Memang, di Amerika tidak pernah melahirkan peristilahan tersebut secara teoritis, akan tetapi pada wilayah praksisnya Amerika banyak ditemukan dalam kehidupan keagamaannya, terlebih pada mereka penggagas *New World* tersebut. Sebut saja Benjamin Franklin dalam otobiografinya;

“... saya tidak pernah tak memegang teguh beberapa prinsip keagamaan. Misalnya, saya tidak pernah meragukan eksistensi Tuhan; bahwa Ia menciptakan dunia dan mengaturnya dengan kebijaksanaan-Nya; bahwa pelayan yang paling disukai oleh Tuhan adalah berbuat baik kepada manusia; bahwa jiwa kita abadi; dan bahwa semua kejahatan memperoleh hukuman, dan kebajikan akan beroleh pahala, baik di dunia ini atau di akhirat kelak. Hal-hal tersebut saya junjung tinggi sebagai esensi setiap agama; dan dapat ditemukan dalam semua agama yang ada di negara kita, saya menghargai semua itu, meskipun dengan tingkat penghargaan yang berbeda-beda, sebagaimana saya dapati mereka kurang atau lebih bercampur dengan hal-hal lain, yang cenderung tidak membangkitkan, memajukan atau menegaskan moralitas, yang secara prinsipil memisah-misahkan kita, dan membuat kita menjadi tidak ramah terhadap orang-orang lain. (dalam Bellah:245-246)

Alasan untuk meyakini dianutnya *civil religion* di Amerika, sejak awal abad-19 lebih dominannya watak aktivis, moralistik dan sosialnya, daripada watak kontemplatif, teologis dan spiritualnya. Sementara De Tocqueville berbicara tentang agama gereja Amerika sebagai ‘sebuah lembaga politik yang memiliki pengaruh kuat terhadap pemeliharaan

suatu pemerintahan Republik Demokratis di kalangan bangsa Amerika'(1954:310), dengan memberi landasan konsensus moral yang kuat di tengah-tengah kondisi politik yang terus mengalami perubahan. Sedangkan pada tahun 1902, Henry Bary berbicara tentang agama gereja Amerika sebagai 'puisi kewarganegaraan.

Memang benar bahwa hubungan antara agama dan politik di Amerika berlangsung amat mulus. Hal itu sebagian besar disebabkan oleh tradisi yang dominan. Sebagaimana ditulis oleh De Tocqueville berikut; bagian besar Amerika dihuni oleh orang-orang yang setelah melepaskan diri dari otoritas Paus, tidak mengakui supremasi keagamaan lainnya. Ke wilayah dunia baru mereka membawa satu bentuk agama Kristen, yang tidak bisa digambarkan lebih baik kecuali dengan menyebutnya sebagai agama demokrat dan republik.(1954:331)

Gereja-gereja tidak menentang revolusi atau pun pembentukan lembaga-lembaga yang demokratis. Bahkan, ketika sebagian gereja menentang pelembagaan sepenuhnya kebebasan beragama, gereja-gereja itu menerima hasil akhirnya dengan senang hati dan tanpa nostalgia tentang sebuah 'kerajaan masa lalu'. *Civil religion* Amerika tidak pernah bersikap anti gereja (anti clerical) atau berwatak sangat militan. Sebaliknya, *civil religion* secara selektif mengambil unsur-unsur tradisional sedemikian rupa sehingga orang-orang Amerika pada umumnya tidak melihat adanya pertentangan antara keduanya. Dengan demikian, *civil religion* mampu berkembang tanpa harus bersaing dengan simbol-simbol solidaritas nasional gereja yang berpengaruh kuat serta mampu memobilisasi dorongan pribadi secara mendalam demi pencapaian tujuan nasional.

Prestasi semacam itu bukan berarti dapat diraih dengan mudah. Tampaknya masalah *civil religion* cukup bersikap umum di dalam masyarakat-masyarakat Amerika. Bagaimana masalah itu dapat atau tidak dapat diatasi akan berpengaruh terhadap kehidupan Amerika.

*Civil religion* Amerika masih sangat hidup, walaupun tidak selalu dijalankan demi tujuan-tujuan yang pantas didukung. Di dalam negeri, tipe ideologi Legiun Amerika, yang menggabungkan Tuhan, negara dan bendera, telah dimanfaatkan.

Secara nyata, *civil religion* terlibat dalam isu-isu moral dan politik yang paling mendesak dewasa ini. Tetapi, agama civil juga terbelenggu dalam jenis krisis lainnya yang bersifat teoritis dan teologis, yang pada saat ini hal tersebut umumnya tidak disadari oleh *civil religion*. 'Tuhan' jelas merupakan sebuah symbol utama dalam *civil religion* sejak permulaan, dan tetap berlaku hingga dewasa ini. Dalam *civil religion*, simbol itu merupakan posisi sentral, seperti juga dalam agama Yahudi, Kristen, Islam, dan agama-agama lain.

Pada abad ke-18 hal itu tidak menimbulkan persoalan. Karena dalam *civil religion* tidak ada kredo formal tentang makna 'Tuhan'. Jika simbolisme Tuhan mengharuskan formulasi akan ada konsekuensi-konsekuensi yang nyata pada kehidupan Amerika. Mungkin konsekuensi-konsekuensi itu berupa alienasi kelompok-kelompok masyarakat. *Civil religion* telah menjadi titik artikulasi antara komitmen terdalam tradisi religius dan filosof Barat dan keyakinan umum rakyat Amerika yang awam.

## Penutup

Amerika adalah realitas negara yang terdiri dari berbagai bentuk agama. Jumlah penduduk Amerika 293.027.570 jiwa, sedangkan menurut jumlah berdasarkan pemeluk agama; Kristen di AS terus menurun. 86,2% menyebut dirinya Kristen pada 1990 dan 76,5% menyebut dirinya Kristen pada 2001. Anggota keagamaan pada 2001 ialah Protestan 52%, Katolik 24,5%, tidak ada 13,2%, Yudaisme 1,3% dan 0,5-0,3% Muslim, Buddha, Agnostik, Ateis, Hindu dan Universalis Unitarian. (<http://wikepedia.org>).

Keberagaman agama (pluralitas agama) seakan sudah menjadi tipologi masyarakat yang mempunyai kesadaran tinggi akan perbedaan. Karena nilai perbedaan bukan berarti harus menghalangi tujuan utama hidup dan sekaligus harus menghilangkan perbedaan dengan menggantinya dengan nilai persamaan. Padahal persamaan bukan berarti sebuah jaminan untuk sampai pada tujuan kehidupan. Persamaan atau perbedaan adalah sebuah proses pilihan yang harus berakhir pada nilai kehidupan yang di dalamnya terdapat nilai kesejahteraan, ketenangan, kedamaian, serta keamanan bagi setiap diri dan individu masyarakat.

Amerika dengan berbagai penilaian yang prejudis-baik itu skuler, kapitalis, bahkan ateis- menyimpan dimensi yang sangat berharga guna

membentuk dan menumbuhkan harmonisasi kehidupan, toleran, dialogis, bahkan lebih dari itu, mereka mampu berperan aktif dalam menjaga nilai-nilai agama. Baik agama yang dianutnya maupun yang dianut oleh orang lain. Hal ini tidak akan terjadi jika pemahaman tentang nilai-nilai pluralistik tidak dipahami dan dimiliki oleh bangsa Amerika.

Persoalannya adalah tingkatan pluralisme mana yang mereka pahami. Pluralisme religius normative, pluralisme religius soteriologis, pluralisme religius epistemologis, pluralisme religius aletis, dan pluralisme religius deontik.

Kebebasan juga pada akhirnya akan membawa pada realitas pluralisme, karena kebebasan berarti memberikan di luar dirinya untuk berbeda dengan apa yang ada pada yang diyakininya. Menganut salah satu agama adalah kebebasan individu yang sarat dengan nilai pluralisme.

Seperti konsep pluralisme yang ditawarkan oleh Horace Kallen (dalam Eck, 90) bahwa, salah satu kebebasan yang dihormati oleh Amerika adalah untuk menjadi diri sendiri, tanpa menghilangkan ciri khas dari kebudayaan seseorang. Kallen memandang pluralitas dan kesatuan Amerika dalam gambaran simfoni dan bukan tungku pelebur (*melting pot*). Amerika adalah sebuah orkes simfoni, yang bukan menyerukan keseragaman, melainkan keselarasan, dengan semua nada yang khas dari masing-masing kebudayaan yang beragam.

Lebih jauh Kallen menggambarkan hal ini dengan pluralisme budaya. Pluralisme budaya melindungi hak asasi yang diwarisi dari leluhur mereka dan seseorang mempunyai hak untuk berbeda, tidak hanya dalam hal pakaian dan penampilan di depan umum, tetapi juga dalam agama dan keyakinan, yang dipersatukan hanya dengan partisipasi dalam perjanjian bersama sebagai warga negara. Peradaban Amerika merupakan keragaman dalam kesatuan, sebuah orkestra umat manusia. Kallen mensinyalir dengan panjang dalam persoalan simfoni keberbedaan seperti dalam sebuah orkestra, setiap jenis alat musik mempunyai bunyi dan nada yang spesifik, berdasarkan substansi dan bentuknya; sebagaimana setiap jenis instrumen itu mempunyai nada dasar dan melodi yang khusus di dalam keseluruhan simfoni, demikianlah di dalam masyarakat setiap kelompok etnik merupakan instrumen alami. Semangat dan kebudayaan kelompok etnik tersebut merupakan nada dasar dan melodinya. Harmoni

kesatuan, serta keselarasan mereka semua menghasilkan sebuah simfoni peradaban, dengan perbedaan ini: sebuah simfoni musik ditulis sebelum dimainkan; sedangkan dalam simfoni perbedaan, permainannya sekaligus merupakan proses penulisannya, sehingga tidak ada yang pasti dan tak terhindarkan tentang perkembangannya seperti di dalam musik. Jadi dalam batas-batas yang ditentukan oleh alam mereka mungkin bervariasi menurut kehendaknya, dan ukuran serta variasi dari keselarasan mungkin menjadi lebih luas, lebih kaya dan lebih indah. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kelas-kelas yang dominan di Amerika menginginkan masyarakat yang seperti ini. (dalam Eck, 91)

Realitas inilah yang harus ditangkap oleh masyarakat Amerika sebagai masyarakat yang kaya akan harmoni perbedaan terutama dalam perbedaan agama. Jika apa yang dilontarkan oleh Kallen menjadi sebuah jawaban akan persoalan-persoalan keberbedaan dan sekaligus menjadi sebuah pemahaman bersama (*common sense*), maka dapat dipastikan sebuah harmoni dan kekayaan budaya yang berjalan menuju masyarakat inklusif dan kaya akan variasi budaya.

Nampaknya Kallen sangat rindu akan warna kebersamaan dalam masing-masing identitas dirinya, tanpa harus mempersoalkan perbedaan yang mestinya memang tidak menjadi penghalang dalam merealisasikan kebersamaan. Lebih tegasnya Kallen ingin mengatakan bahwa perbedaan bukan berarti harus memisahkan, akan tetapi sebaliknya, perbedaan juga sekaligus mampu membentuk penyatuan yang sangat kuat.

Bersesuaian dengan apa yang dianalisis oleh Will Herberg (1983) tentang keberadaan dan kedudukan agama di Amerika. Bagi Herberg agama adalah cara hidup Amerika, yang komponennya adalah demokrasi politik, usaha yang bebas di bidang ekonomi, serta kesetaraan sosial. Herberg menulis bahwa agama bukan melulu suatu agama tertentu, melainkan agama seperti apa adanya, agama dalam pengertian umum dan bukan parsial. Agama dalam pengertian umum adalah apapun bentuk agamanya.

Herberg berargumentasi bahwa pluralisme agama di Amerika bukan sekedar fakta statistik yang terdiri dari berbagai agama. Ini adalah bagian yang mendasar dalam pola pikir Amerika. Setiap orang dipandang religius di dalam konteks dan pengetahuan dari orang beragama lainnya.

Jadi di Amerika pluralisme agama bukan sekedar fakta historis dan politis semata; di dalam pemikiran orang Amerika, ini merupakan syarat utama dari berbagai hal, sebuah aspek yang esensial dalam cara hidup Amerika, dan oleh karena itu dengan sendirinya merupakan aspek dari keyakinan keagamaan. Dengan kata lain, orang Amerika percaya bahwa pluralitas kelompok-kelompok agama adalah kondisi wajar dan sah. Betapa pun keterkaitannya dengan gerejanya sendiri, betapapun dia tidak begitu menghargai keyakinan dan ibadah agama lain, seorang Amerika cenderung untuk benar-benar merasa bahwa keseragaman agama secara total, walaupun agamanya sendiri akan diuntungkan, akan menjadi sesuatu yang tidak diinginkan serta keliru, bahkan dianggap sungguh-sungguh tidak beralasan. Pluralisme agama-agama dan gereja-gereja merupakan sesuatu yang sudah jelas kebenarannya bagi orang Amerika. (Herberg, 85)

Jika kita meramalkan kemungkinan atas dasar pandangan Herberg pada tahun 50-an, barangkali kita akan menyatakan bahwa pada milenium yang baru ini keanekaragaman agama akan menjadi fakta yang menonjol di dalam kehidupan warga negara di Amerika, yang maknanya jauh lebih besar dari pada keanekaragaman etnik maupun asal-usul kebangsaan. Mulai sekarang, pluralisme agama yang meluas akan menjadi isu yang penting bagi Amerika.

Dengan demikian, maka pluralitas keberagaman di Amerika sangat jelas terbaca. Ketika dekade 1960-an berakhir, suku-suku pribumi Amerika memulai secara jelas diwakili oleh organisasi-organisasi antar suku, seperti Gerakan Bangsa Indian Amerika (American Indian Movement); lalu dalam kehidupan beragama orang Hispanik terdapat bentuk-bentuk agama Katolik, Protestan, Injili, dan Pantekosta.

Analisis mengenai kehidupan beragama di Amerika tidak akan pernah lagi terlihat sederhana. Imigrasi yang terus berlanjut setelah tahun 1965 membawa serta tradisi keagamaan yang beraneka ragam, yaitu Hindu, Muslim, Budha, Sikh, Jain, dan Zoroaster. Mereka juga membawa perspektif mereka sendiri mengenai masyarakat Amerika, dan lama-kelamaan citra Amerika menjadi masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok keagamaan (pluralisme agama).\*\*\*

### Daftar Bacaan

- Bagus, Lorens, 1996, *Kamus Filsafat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Bellah, Robert, 1975, *The Broken Covenant: American Civil religion in Time of Trial*, New York: Seabury Press
- Berger, Peter L., 1967, *The Sacred Canopy Element of a Sociological theory of Religion*, New York: Doubleday, Garden City
- Carrol, Jackson W., et.all, 1979, *Religion in America 1950 to the Present*, New York: Harper & Row, Publisher
- Cohen, Daniel, 1975, *The New Believers, Young Religion in America*, New York: Ballatine Books
- Dinnerstein, Leonard and David M. Reimers, 1982, *Ethnic Americans A History of Immigration and Assimilation*, New York, Harper & Row Publishers.
- Eck, Diana L., 2005, *Amerika Baru Yang Religius*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Effendy, Bahtiar, 2001, *Masyarakat Agama dan Pluralisme keagamaan*, Yogyakarta, Galang Press
- Gordon, Milton M., 1964, *Assimilation in American Life The role of Race, Religion, and National Origins*, New York, Oxford University Press.
- Herberg, Will, 1983, *Protestant, Catholic, Jew*, Chicago, University of Chicago Press
- Legenhausen, Muhammad, 2002, *Satu Agama atau Banyak Agama*, Terj., Jakarta, Lentera Basritama .
- Luedke, Luther S., 1994, *Mengenal Masyarakat dan Budaya Amerika*, terj. Hermoyo & Masri Maris, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Malamud, Bernand, 1979, *The Tenant*, New York, Straus and Giroux
- Mann, Arthur, 1990, *Yang Satu dan Yang Banyak Refleksi Tentang Identitas Amerika*, terj. P.S Hargosewoyo, Badjah Mada University Press.
- Marsden, George M., 1996, *Agama dan Budaya Amerika*, terj. Dicky Soetadi, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- McDowell, T., 1948, *American Studies*, Minneapolis, the University of Minnesota Press.
- Moore, Robert Laurence, *Religious Outsiders and The Making of Americans*, New York, Oxford University Press
- Roberts, Keith A., 1990, *Religion in Sociological Perspective*, U.S.A, Wadsworth, Inc

- Sarapung, Elga, dkk., 2002, *Pluralisme, Konflik, dan Perdamaian*, Yogyakarta, Interfidei dan the Asian Foundation
- Shanks, Andrew, 2003, *Agama Sipil Civil Religion*, terj. Yudi Susanto, Yogyakarta, Jalasutra
- Shihab, Alwi, 1997, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung, Mizan.
- Sowell, Thomas, 1989, *Mosaik Amerika sejarah etnis Sebuah Bangsa*, terj. Nin Soebakdi Soemanto, Jakarta, Pustaka sinar Harapan
- Tilaar, H.A.R, 2004, *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta, PT. Grasindo
- Tocqueville, Alexis De, 1954, *Democracy in America*, New York, Doubleday & Anchor Books

## Dinamika Hubungan Kaum Muslim dan Umat Hindu di Pulau Lombok

Gazi Saloom

*Dosen pada  
UIN Syarif Hidayatullah  
Jakarta*

### **Abstract**

*The dynamics of relations between any groups always brings upon issues of misunderstanding and prejudice. This kind of potential misunderstanding that may arise to the surface because of the fact that every group has different agendas, needs, cognitive content, and motivation. These differences occur in the individual level as well as in the group level. This paper elaborates the rise and fall including the dynamics of relations between the Sasak ethnic in which most of them are Muslims and the Bali ethnic which most of them are Hindi in Lombok Island in general, specifically in the city of Mataram.*

*The literature based paper concludes that the relationship between Muslims and Hindi in pulau Lombok, especially in Mataram, is full of dynamics, not to mention rise and fall from time to time.*

**Keywords:** *relationship dynamics, misunderstanding, Islam, Hindu*

### **Pengantar**

Masalah interaksi sosial antara beberapa kelompok yang berbeda agama dan pemahaman keagamaan adalah isu klasik. Kendati demikian, isu ini masih tetap menarik untuk dikaji dan dianalisa, apalagi dalam konteks negara Indonesia yang majemuk dari segi agama, bahasa, budaya dan adat-istiadat.

Hubungan antar penganut agama atau pemahaman keagamaan yang berbeda di Indonesia masih sering diwarnai hal-hal yang

berbauh salah pemahaman, prasangka dan sikap permusuhan. Dalam beberapa kasus, kesalahpahaman, prasangka dan sikap permusuhan tersebut telah berkembang menjadi sesuatu yang merusak hubungan antar kelompok etnis, dan penganut keyakinan dan agama di Indonesia. Bahkan, akhir-akhir ini, kekerasan yang mengatasnamakan agama atau keyakinan telah berkembang menjadi satu fenomena penting sekaligus memperhatikan di Indonesia belakangan ini sehingga negeri mayoritas muslim ini acapkali dicap negatif oleh negara-negara Barat.

Kasus kerusuhan Situbondo, Jawa Timur pada tahun 1996, disusul kemudian kasus Tasikmalaya dan selanjutnya kasus Kupang di Nusa Tenggara Timur pada tahun 1998 merupakan bukti dari kondisi tersebut (Mulyadi, 2003) serta berbagai kasus mutakhir yang terjadi pada dekade awal abad ke-21. Berbagai peristiwa pengeboman, terutama pengeboman Bali, yang dilakukan oleh Amrozi dan kawan-kawannya dengan dalih jihad –yang saat ini telah dieksekusi mati oleh regu tembak— semakin membuka ruang prasangka, stereotipe dan stigma tertentu terhadap kaum muslim hingga diduga akan mempengaruhi hubungan dan kontak sosial antara umat Islam dan umat beragama lainnya.

Terlepas dari berbagai peristiwa dan kejadian tersebut, sesungguhnya dinamika hubungan antarkelompok di manapun di dunia ini selalu memunculkan persoalan kesalahfahaman dan prasangka. Sebab, pada tingkat individu dan kelompok, kesalahfahaman berpeluang besar untuk muncul ke permukaan karena perbedaan kepentingan, kebutuhan, isi kognisi dan motivasi.

Tulisan ini mencoba menguraikan pasang-surut dan dinamika hubungan antara etnis Sasak yang mayoritas menganut agama Islam dan etnis Bali yang menganut agama Hindu di Pulau Lombok pada umumnya dan di Kota Mataram secara khusus.

### **Dinamika Hubungan Muslim-Hindu**

Pulau Lombok terletak di sebelah Timur pulau Bali dan di sebelah barat Pulau Sumbawa. Pada bagian Barat, terletak selat Lombok dan pada bagian Timur, terdapat selat Alas. Di sebelah utara Lombok terdapat laut Jawa dan di sebelah Selatan terdapat lautan Indonesia. Pulau Lombok terbagi menjadi tiga pemerintahan kabupaten dan satu pemerintahan kota

yaitu Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram (Budiwanti, 2000)

Sasak adalah penduduk asli dan kelompok etnis mayoritas di Lombok. Jumlah mereka mencapai lebih dari 90% dari keseluruhan penduduk Lombok. Etnis lain seperti etnis Bali, Sumbawa, Bima, Jawa, Arab dan Cina adalah pendatang. Etnis Bali merupakan kelompok etnis pendatang terbesar di Lombok yang jumlahnya mencapai hampir 3% dari keseluruhan penduduk Lombok. (Budiwanti, 2000). Menurut satu situs di internet, jumlah orang Bali di Lombok sekarang ini mencapai 5% dari keseluruhan penduduk Lombok (<http://www.baliforyou.com>).

Secara bahasa, kebudayaan dan agama, Lombok terbagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing etnis berbicara dengan bahasa mereka sendiri. Orang Sasak, Bugis, Sumbawa, Bima dan Arab menganut agama Islam, orang Bali umumnya menganut agama Hindu, dan orang Cina menganut agama Kristen, Budha atau Konghucu. Suku Sasak muslim terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok Muslim waktu Telu dan kelompok Muslim waktu lima. (Marrison, 1999). Pada saat ini, jumlah dan pengaruh kaum Muslim waktu lima semakin meningkat, sementara penganut Islam Waktu Telu semakin berkurang di Pulau Lombok.

Menurut Marisson (1999), Muslim Waktu Lima cenderung puritan dan mengabaikan warisan tradisi dan adat istiadat lama. Pendapat Marisson ini tidak sepenuhnya benar karena pada kenyataannya banyak juga Muslim Waktu Lima yang tetap menghargai tradisi dan adat-istiadat lama, baik dari kalangan generasi tua maupun dari kalangan generasi muda. Apalagi untuk saat ini, Pemerintah Daerah memberi dukungan dan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Muslim tertentu yang dikategorikan penganut waktu lima untuk mengembangkan tradisi dan adat-istiadat lama.

Dengan standar Indonesia, kaum Muslim waktu lima dapat dianggap ortodoks, dan menurut Marrison (1999), kaum Muslim waktu lima di masa lalu lebih suka melakukan konfrontasi ketimbang kompromi dengan Hindu Bali, dan pemimpin di kalangan Sasak yang sering melakukan perlawanan dan pemberontakan terhadap kekuasaan Raja Bali di masa lalu banyak berasal dari kelompok ini. Sikap yang berbeda

terhadap Sukubangsa Bali ditemukan pada Sukubangsa Sasak penganut Waktu Telu. Di antara mereka terjadi hubungan yang harmonis dan tanpa persoalan. Hal itu diduga karena Islam waktu telu adalah ajaran yang mengkombinasikan antara Islam dan ajaran Sasak Boda Kuno. Versi lain menyebutkan, Islam waktu telu adalah kombinasi antara Islam dan Hindu (Badan Pengembangan Kebudayaan dan Parawisata, 2002).

### **Kota Mataram dan Keragaman**

Mataram adalah ibukota provinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram juga merupakan salah satu pemerintahan kota yang terdiri dari kecamatan Mataram, kecamatan Ampenan dan kecamatan Cakranegara. Ketiga kecamatan ini dihuni oleh berbagai sukubangsa dan etnis, tetapi meyoritas mereka merupakan orang Sasak dan Bali (<http://www.baliforyou.com>).

Kota Mataram memiliki banyak peninggalan sejarah kekuasaan Raja Bali di Lombok. Di antaranya terdapat Pura Mayura di Kota Cakranegara yang ditetapkan sebagai peninggalan sejarah yang dilindungi negara. Di Pura ini terdapat patung tokoh Islam dan tokoh Hindu yang menggambarkan bahwa keharmonisan dan keakraban pada masa-masa dahulu pernah terjalin dengan baik di antara etnis Sasak dan etnis Bali (<http://www.baliforyou.com>).

Menurut catatan sejarah sebagaimana disebutkan Marrison (1999), Kaum Hindu Bali mulai mendatangi Lombok pada abad ke-16 Masehi sebagai pendatang, dan pada abad ke-18, mereka melakukan invasi dan menjadi penguasa Pulau Lombok, terutama bagian barat, (Kota Mataram dan sekitarnya) sejak tahun 1740 sampai tahun 1894. Sejak saat itu, hubungan antara Hindu Bali dan Muslim Sasak menjadi sangat kompleks, penuh dengan ketegangan, penaklukan, pemberontakan, berbagai trik politik, akomodasi, kesepakatan, dan perjanjian damai serta kerjasama.

Di masa pemerintahan Raja Ratu Agung Gde Ngurah Karangasem yang memerintah Kerajaan Selaparang (atau disebut juga Kerajaan Mataram), kedua etnis dilibatkan dalam berbagai kerjasama, termasuk dalam kepemimpinan. Bahkan, dalam meningkatkan hubungan baik antara etnis Bali dan etnis Sasak, Raja Selaparang melakukan politik perkawinan dengan menikahi wanita Sasak yang muslimah. (Badan Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan, 2002). Berbagai kasus

pernikahan antara etnis, sekaligus antar agama banyak terjadi, terutama di Lombok bagian Barat. Hasil pernikahan antar etnis itu memunculkan hubungan kekerabatan yang erat antara etnis Sasak Muslim dan etnis Bali Hindu, misalnya, dapat dilihat di Kampung Seganteng Cakranegara Selatan di mana sebutan ibu menggunakan bahasa Bali, yaitu *Meme*. Bahkan, sampai saat ini hubungan kekerabatan antara Sasak Muslim di Kampung Seganteng Cakranegara dengan etnis Bali Hindu di sejumlah perkampungan etnis Bali di Lombok Barat, masih tetap terjalin dengan baik. Tetapi untuk masa sekarang ini, pernikahan antara kedua etnis yang berbeda agama seringkali menimbulkan kesalahfahaman dan perselisihan di antara mereka karena terjadinya pergeseran pemahaman keagamaan di kalangan generasi muda.

Pada bulan Juli sampai bulan November tahun 1826 terjadi perlawanan Kaum Sasak terhadap Raja Bali Penguasa Lombok yang dipimpin oleh Den Suryajaya dari Sakra Lombok Timur dengan dibantu oleh Komaladewa Mas Panji dan penduduk desa sekitar Sakra. Suryajaya terbunuh dan Mas Panji terluka. Kemudian Raja Lombok yang beragama Hindu membakar masjid di Sakra Lombok Timur. Pembakaran masjid tersebut menanamkan kebencian dan rasa tidak suka Kaum Muslim Sasak terhadap kaum Hindu Bali (Marisson, 1999). Pada tahun 1855, ketika Raja Ketut Ngurah Karangasem menjadi raja, tiga orang Sasak yang baru pulang haji dari Mekkah dibunuh oleh orang Hindu-Bali. Hal ini menimbulkan perlawanan kaum Sasak di Praya hingga situasi menjadi pelik. Kaum Muslim Sasak dipaksa menyerah dan bantuan tentara dari Bali didatangkan untuk menguasai keadaan. Perlawanan kaum Muslim Sasak dapat dipatahkan dan puncaknya, kaum Muslim Sasak dilarang mengunjungi masjid. (Marisson, 1999)

Pada tahun 1871 dan 1884 terjadi perlawanan Kaum Muslim Sasak, dan mencapai puncaknya pada tahun 1891, hingga mereka bisa mencapai Kediri di Lombok Barat yang berbatasan dengan daerah kekuasaan Raja Bali di Lombok. Tetapi Raja Bali di Lombok berusaha mematahkan perlawanan ini dengan meminta bantuan 1500 tentara dari Karangasem Bali. Akhirnya, sebanyak 300 orang Kaum Muslim Sasak ditawan dan dipenjara. Kekuasaan Raja Bali atas Lombok berakhir pada tahun 1891 dan menyeret Pulau Lombok ke masa penjajahan Belanda. (Marisson, 1999; Bruinessen, 1992).

Akibat arus migrasi selama berpuluh-puluh tahun, terdapat beberapa suku dengan ragam latar belakang agama dan budaya yang mendiami Pulau Lombok. Para pendatang umumnya menetap di kota-kota seperti Mataram, Cakranegara, Ampenan, Praya, dan Selong. Suku terbesar yang mendiami pulau Lombok adalah suku Sasak, terutama di Lombok Timur dan Tengah, serta sebagian tempat di Lombok Barat. Mereka adalah kaum pribumi yang umumnya menganut agama Islam, karenanya, suku Sasak identik dengan Islam. Suku Sasak muslim terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok Muslim waktu Telu dan kelompok Muslim waktu lima. (Marrison, 1999). Kelompok Muslim Waktu Telu adalah bentuk kongkrit hubungan yang sedemikian dalam antara Suku Sasak penganut Islam dan Suku Bali penganut Hindu di Lombok. Kedekatan hubungan antara Suku Sasak-Muslim yang menganut waktu telu dengan Suku Bali yang Hindu tercermin dalam ritual 'Perang Topat' yang berlangsung tiap tahun di Pura Lingsar Lombok Barat (Badan Pengembangan Kebudayaan dan Parawisata, 2002).

Selain suku Sasak yang Muslim, Pulau Lombok juga didiami oleh suku Bali, Sumbawa, Bima, Jawa, Arab dan Cina. Di antara mereka, orang Bali yang sebagian besar berada di Lombok bagian Barat, terutama di Kecamatan Ampenan, Mataram, Cakranegara, dan Narmada yang sekarang tergabung ke dalam wilayah Kotamadya Mataram, serta sebagian Lombok Tengah, meliputi 3% dari keseluruhan penduduk Lombok. Mereka memiliki tanah sendiri. Riwayat kepemilikan tanah mereka bermula ketika Orang Bali menguasai Lombok pada abad 17. Sebagian besar orang Bali yang tinggal di Lombok ini adalah keturunan dari para penakluk yang datang dari Karangasem. (Budiwanti, 2000;). Karenanya, mereka memiliki status sosial dan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan etnis Sasak yang tinggal di sekitarnya.

Umumnya Sukubangsa Bali menempati perkampungan-perkampungan yang eksklusif, mengelompok dan diberi nama bahasa Bali. Ciri khusus perkampungan Bali adalah adanya sanggah atau pura keluarga di tiap rumah dan pura lingkungan perkampungan. Sedangkan perkampungan Sukubangsa Sasak dicirikan oleh adanya masjid atau *santren* (musala) yang terdapat hampir di tiap perkampungan.

Bentuk pemukiman yang terpisah-pisah dan mengelompok berdasarkan sukubangsa ini, diduga akan mudah menimbulkan solidaritas sosial dari masing-masing sukubangsa jika terjadi pertikaian antarkelompok. Munculnya, berbagai kesalahpahaman antar sukubangsa di Kota Mataram, menurut sejumlah tokoh masyarakat yang pernah diwawancarai Kironosasi (1996) karena kecemburuan sosial dari etnis Sasak yang menganggap sukubangsa Bali lebih baik secara ekonomi. Tetapi seringkali etnis Sasak mengait-ngaitkan kesalahpahaman antar etnis dengan masalah keyakinan agama.

Selain itu, menurut pengamatan penulis selama tinggal di Lombok, kesalahpahaman terjadi akibat standar ganda dari birokrasi terkait. Misalnya, etnis Bali yang tidak menggunakan helm di jalan raya ketika hendak menghadiri acara keagamaan tidak pernah ditilang, sementara etnis Sasak yang tidak menggunakan helm karena menghadiri acara keagamaan tetap saja ditilang.

Terdapat persepsi akan adanya kesamaan dengan etnis Hindu Bali di kalangan Sasak Waktu Telu dan persepsi akan adanya perbedaan di kalangan Sasak Waktu Lima. Ada dugaan bahwa sikap etnis Sasak Muslim Waktu Lima terhadap etnis Bali beragama Hindu Bali yang diwarnai prasangka dan stereotipe tertentu berdasarkan pertimbangan keyakinan dan keanggotaan dalam agama masih berlangsung sampai saat ini. Bahkan, diduga faktor itulah yang mewarnai hubungan antara pemeluk Muslim Sasak Waktu Lima dan Pemeluk Hindu Bali.

Penelitian Kironosasi (1996) menyimpulkan bahwa penilaian Sukubangsa Sasak terhadap Sukubangsa Bali didasarkan atas nilai-nilai keagamaan, sedangkan penilaian Sukubangsa Bali terhadap Sukubangsa Sasak didasarkan atas nilai-nilai keetnisan-kebudayaan yang sangat identik dengan nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, faktor agama tetap menjadi faktor yang mempengaruhi pola hubungan antara kedua etnis.

Berdasarkan pengamatan penulis selama bertahun-tahun tinggal di Kota Mataram, masing-masing sukubangsa (Sasak dan Bali) masih berusaha mempertahankan beberapa nilai budaya sukubangsanya. Sukubangsa Sasak lebih banyak mendasarkan perilaku hidupnya pada nilai-nilai agama Islam dan adat-istiadat sukubangsanya. Hal itu misalnya terlihat dari semaraknya kegiatan pengajian dan acara-acara keagamaan

yang dilakukan di sejumlah masjid dan *santren* (musala, tempat shalat). Karena banyak jumlah masjid di Pulau Lombok maka pulau ini sering disebut 'Pulau Seribu Masjid' dan etnis Sasak dikenal sebagai kaum muslim yang fanatik terhadap agama Islam.

Sementara itu, sukubangsa Bali di Lombok Barat juga masih tetap mempertahankan nilai-nilai ajaran agama Hindu. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa ketaatan etnis Bali yang tinggal di Lombok terhadap ajaran agamanya lebih besar dibandingkan dengan etnis Bali yang tinggal di Pulau Bali. Hal itu terlihat pada saat kegiatan ritual *maturan* (persembahan sesaji kepada para dewa) yang dilakukan hampir setiap hari serta berbagai kegiatan keagamaan besar yang melibatkan banyak umat Hindu dari berbagai tempat di Lombok, bahkan dari Pulau Bali.

Tampaknya, berbagai peristiwa sejarah memunculkan sikap permusuhan yang tersembunyi di alam bawah sadar kedua etnis, serta mempengaruhi bentuk hubungan di antara mereka. Kadang-kadang ada keharmonisan dan kadang-kadang ada kesalahpahaman antar mereka (etnis Sasak dan etnis Bali) sampai ke masa-masa berikutnya. Umumnya, konflik dan kesalahpahaman dipicu oleh hal-hal remeh yang kemudian bergeser menjadi isu panas yang mendorong masing-masing kelompok untuk terlibat di dalamnya.

Dapat dikatakan bahwa sejarah hubungan Sukubangsa Sasak, terutama Kelompok Waktu Lima, dengan Sukubangsa Bali sangat panjang, sepanjang sejarah interaksi mereka. Hubungan antara kedua etnis penuh dengan dinamika, persaingan, kesalahpahaman, sikap negatif, dan konflik. Agaknya, corak yang demikian tersebut terus berlanjut pascakemerdekaan Indonesia, mulai dari Orla, Orba, dan bahkan sampai sekarang.

Pascakemerdekaan, pada zaman Orba, banyak sekali konflik kecil dan lokal yang terjadi antara kelompok etnis Bali yang Hindu dan etnis Sasak yang Muslim di berbagai wilayah di Kabupaten Lombok Barat, tetapi ada tiga konflik yang penulis ketahui ketika sedang berada di sana. Konflik tersebut sampai melibatkan etnis Bali yang berada di Pulau Bali dan etnis Sasak yang terdapat di Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Pulau Sumbawa. Pertama, konflik antara Kelompok Muslim Kampung Taliwang dan Kelompok Hindu Kampung Tohpati atau Kampung Shindu

di kecamatan Cakranegara. Kasus ini telah diteliti oleh Endang Kironosasi W pada tahun 1996 (Kironosasi, 1996).

Kedua dan ketiga, konflik kelompok Muslim dan kelompok Hindu di Kecamatan Ampenan Kotamadya Mataram. Dari konfirmasi melalui wawancara yang penulis lakukan dengan sejumlah sesepuh masyarakat di Lombok Barat, umumnya pertikaian tersebut disebabkan oleh hal-hal sepele dan kesalahpahaman di antara kedua kelompok etnis. Lantas, masing-masing membawa-bawa sentimen keagamaan dan keetnisan.

Berkaitan dengan itu, ajaran atau doktrin agama yang memberi penekanan kuat pada aspek monoteisme, universalitas dan penyelamatan manusia seringkali dengan gampang dipahami sebagai ajakan kepada penggunaan kekerasan. Para penganut agama yang demikian sangat sensitif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peneguhan identitas diri (misalnya sebagai monoteisme murni dihadapkan dengan politesme), penguatan ikatan kelompok (misalnya sebagai kaum beriman sejati, serta semangat menyebarkan kebenaran mutlak yang diyakini. Untuk hal-hal yang demikian, para penganut agama yang bersangkutan akan sangat mudah menggunakan referensi doktrinal agama dalam menggunakan kekerasan. Hal itulah yang melahirkan apa yang disebut dengan *problem religiosentrisme*. (Aziz, 2000).

## Penutup

Tulisan ini menyimpulkan bahwa hubungan antara umat Islam dan umat Hindu di Pulau Lombok, khususnya di Kota Mataram penuh dengan dinamika dan mengalami pasang surut dari waktu ke waktu.

## Daftar Pustaka

---

- Aziz, Abdul. (2000). *Problem religiosentrisme dalam komunikasi antar umat beragama*, dalam Mursyid Ali., *Problem komunikasi antar umat beragama*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI.
- Badan Pengembangan Kebudayaan dan Parawisata Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Bagian Proyek Pengkajian dan Pemanfaatan Sejarah dan Tradisi Bali. (2002). *Integrasi antaretnik berbeda agama melalui upacara agama : Kajian tentang hubungan antaretnik Bali dan Sasak melalui upacara 'Perang*

- Topat' di Pura Lingsar Lombok Barat*. Jakarta : Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI
- Bruinessen, Martin Van. (1992). *Sisa-sisa Naqsyabandiyah di Lombok dalam Tarekat naqsyabandiyah di Indonesia*. Bandung : Mizan
- Budiwanti, Erni,. (2000). *Islam Sasak : Wetu telu Versus Waktu lima*. Yogyakarta : LKIS
- Budiwanti, Erni,. (2002) Maintining identity and inter-religious tolerance : Case studies of muslim minorities in Lombok and Bali, dalam *Communal conflicts in contemporary Indonesia*, Jakarta : PBB dan KAF.
- Hogg, Michael A., & Abram Dominic (Ed.),. (2001), *Intergroup relations*. Philadelphia : Psychology Press
- Islam, Mir Rabiul, et.al (2001). *Dimensions of contact as predictors of intergroup anxiety, perceived out-group variability, and out-group attitudes : An integrative model, Intergroup relation*, Philadelphia US: Psychology Press.
- Kironosasi W, Endang. (1996). *Stereotipe dan prasangka dalam interaksi antar kelompok : Studi komunikasi antar budaya sukubangsa Bali dan sukubangsa Sasak di Shindu, Kotamadya Mataram Lombok Barat*. Jakarta : Program Pascasarjana Bidang Ilmu Sosial.
- Mulyadi, Sukidi. (2003). Violence under the banner of religion : The case of Laskar Jihad and Laskar Kristus. *Studia Islamika* : Indonesian journal for Islamic studies. Jakarta : PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Situs: (<http://www.baliforyou.com>)

## FKUB sebagai Forum Kerjasama Antarumat Beragama

A. Salim Ruhana

Peneliti pada Puslitbang  
Kehidupan Keagamaan

### *Abstract*

*One of the new phenomenon in Indonesia today is an emergence of a spirit of people to be more tolerant and, furthermore, do some cooperation with other religions. It could be seen by a varies kinds of dialogue forums in international, national, and local levels. It's also proofed by the existence and the role of FKUB (interreligious harmony forum) in all provinces and many of regencies/municipalities in Indonesia. However, in the fact, the function of FKUB is not optimal yet. Some problems force them. So, the empowerment of FKUB is our 'homework' today—in line with keeping harmony efforts. And the FKUB must absolutely be a forum which make cooperation among religious adherents.*

**Keywords:** cooperation, dialogue, FKUB

### **Pendahuluan**

Semangat kerjasama antarumat beragama semakin hari semakin memberi harapan. Kesadaran umat beragama untuk bertemu dan berdialog mengenai masalah-masalah yang dihadapi bersama kian tumbuh dan menjalar, baik dalam skala kecil di desa-desa, kabupaten/kota, provinsi, nasional, hingga skala global dalam dialog-dialog internasional. Bahkan lebih jauh lagi, ada pula kerjasama yang tidak berbentuk forum atau wadah, melainkan aksi nyata kerjasama antar warga masyarakat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari. Nampaknya, kebersamaan semakin diyakini

akan memberikan kecenderungan menuju kerukunan dan kemaslahatan bersama. Sebaliknya, individualisme-kelompok lebih banyak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan pada kelompok lain yang tentu saja kurang menguntungkan bagi kerukunan.

Sekedar menunjuk beberapa bukti, semangat kerjasama antarumat beragama di tingkat internasional terlihat dari banyaknya diselenggarakan forum-forum *interfaith dialogue* atau *interreligious dialogue* di berbagai negara di dunia. Ada yang berskala regional-kawasan, bilateral, hingga internasional. Diantara dialog berskala internasional yang diikuti delegasi Indonesia itu adalah:<sup>1</sup> Dialog Antaragama Asia Pasifik ke-1 di Yogyakarta, 6-7 Desember 2004; Dialog Antaragama Asia Pasifik ke-2 di Cebu, Filipina, 14-16 Maret 2006; Dialog Antaragama Asia Pasifik ke-3 di Waitangi, 2007; The 1<sup>st</sup> ASEM Interfaith Dialogue, di Bali tahun 2005); The 2<sup>nd</sup> ASEM Interfaith Dialogue di Larnaca, Cyprus, tahun 2006; The Ulama-Bishop Conference di General Santos, Philippines, tahun 2005; The 3<sup>rd</sup> ASEM Interfaith Dialogue di Nanjing, China, tahun 2007; International Conference on Interfaith Dialogue / Muktamar *al-Dualy li al-Hirvar* di Madrid, Spanyol, tahun 2008; Dialog Bilateral antara Indonesia-Norwegia tentang Agama dan HAM di Oslo, 27-29 April 2009; Dialog bilateral Indonesia-Italia, di Roma, 1-6 Maret 2009; dan Konferensi ke-8 Menteri-menteri Wakaf dan Urusan Islam, di Jeddah, 23-25 Mei 2009. Selain itu, Indonesia turut pula sebagai peserta-aktif dalam Sidang Sesi ke-10 Dewan HAMPBB, di Jenewa, Swiss, tahun 2009.

Adapun di tingkat nasional, kerjasama antarumat beragama diantaranya dilakukan dalam serangkaian dialog dilakukan antara pemuka agama pusat dan daerah dalam kegiatan Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah yang telah dilakukan sejak tahun 2002 hingga kini sedikitnya di 25 provinsi di Indonesia. Selain itu, Kongres Pemuka Agama I dan II, tahun 2006 dan 2008; Kongres Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se-Indonesia, tahun 2007 dan 2009; dan Kemah Pemuda Antaragama, tahun 2007. Di samping itu, yang terutama, dialog dan kerjasama terwujud melalui ada dan berfungsinya FKUB-FKUB yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota bahkan beberapa kecamatan yang ada di Indonesia. Menurut Data di Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), hingga akhir tahun 2009 ini, jumlah FKUB yang ada di Indonesia telah cukup banyak.

Terdapat 33 FKUB provinsi di 33 provinsi di Indonesia, ada sekitar 306 FKUB kabupaten/kota di seluruh pelosok negeri, dan bahkan ada di beberapa kecamatan—meski namanya tidak selalu FKUB. Jumlah FKUB yang cukup banyak ini tentu saja menunjukkan adanya semangat yang besar dari segenap pemuka agama dan masyarakat untuk bekerjasama antarumat beragama melalui forum FKUB tersebut.

### **Kilas Balik Forum Kerjasama<sup>2</sup>**

Semangat besar kerjasama antarumat beragama memang bukan hal baru di Indonesia. Di masa lalu telah ada upaya-upaya yang baik untuk menggalang kerjasama dan membentuk forum kerjasama antarumat beragama, meski tidak semaju seperti sekarang ini. Pembahasan kilas balik seperti ini menjadi penting karena upaya-upaya di masa lalu itu merupakan modal besar dan pijakan bagi tumbuh dan berkembangnya semangat kerjasama seperti sekarang ini.

Sebagaimana diketahui, sekitar tahun 1966 timbul berbagai ketegangan antar berbagai agama, terutama antara agama Islam dan Kristen/Katolik di beberapa daerah. Hal ini, jika tidak segera diatasi, cukup berpotensi membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saat itu. Atas kondisi ini maka Pemerintah mengadakan Musyawarah Antar Agama pada tanggal 30 November 1967, di Gedung Dewan Pertimbangan Agung, Jakarta. Musyawarah dihadiri oleh pemuka-pemuka agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Dalam forum itu Pemerintah mengusulkan perlunya dibentuk Badan Konsultasi Antar Agama dan perlu ditandatangani suatu piagam bersama yang isinya antara lain menerima anjuran Presiden agar tidak menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain. Hasilnya, peserta musyawarah menerima usulan Pemerintah tentang pembentukan Badan Konsultasi Antar Agama, tetapi tidak dapat menyepakati penandatanganan piagam yang telah diusulkan oleh Pemerintah tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena sebagian pimpinan agama belum dapat menyetujui usulan Pemerintah, terutama terkait diktum “agar tidak boleh menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain.” Meski begitu, forum musyawarah pertama tersebut tetap eksis dan berfungsi, antara lain membahas masalah-masalah terkait hubungan antar umat beragama di Indonesia. Bahkan istilah “Kerukunan Hidup Umat Bergama”

pun secara formal muncul pada Musyawarah Antar Agama ini. Kemudian, Badan Konsultasi Antar Agama yang terbentuk tersebut selanjutnya melakukan berbagai jenis kegiatan, antara lain: dialog, konsultasi, musya-warah, kunjungan kerja pimpinan majelis-majelis agama secara bersama ke daerah-daerah, seminar antar cendekiawan berbagai agama, sarasehan pimpinan generasi muda agama, dan sebagainya.

Sementara itu, Pemerintah terus mengusahakan pertemuan dan konsultasi dengan pimpinan agama-agama yang ada di Indonesia. Usaha Menteri Agama K.H.M. Dachlan untuk membentuk Badan Kontak Antar Agama diteruskan oleh Menteri-Menteri Agama berikutnya, yaitu H.A. Mukti Ali dan H. Alamsyah Ratu Perwiranegara. Pada periode Menteri Alamsyah Badan Kontak tersebut dapat dibentuk dengan nama Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB). Badan ini terbentuk dengan SK Menteri Agama No. 35 Tahun 1980, yakni setelah 13 tahun diadakan Musyawarah Antar Agama yang pertama 1967.

Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama tersebut dapat dibentuk setelah diadakan serangkaian pertemuan oleh wakil-wakil Majelis Agama dan pejabat-pejabat Departemen Agama. Dalam pertemuan tanggal 30 Juni 1980 di Jakarta, telah disepakati Pedoman Dasar tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama yang menjadi dasar bagi pembentukan Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama oleh Menteri Agama.

Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama merupakan forum komunikasi antara pimpinan-pimpinan agama. Bentuknya adalah pertemuan-pertemuan yang diadakan sewaktu-waktu, sesuai dengan keperluan, baik atas undangan Menteri Agama maupun atas permintaan salah satu atau lebih majelis agama. Pertemuan-pertemuan tersebut terdiri atas: (1) pertemuan antara sesama wakil-wakil Majelis Agama; (2) pertemuan antara wakil-wakil Majelis Agama dengan Pemerintah.

Beberapa fungsi Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama ini bagi para pemimpin atau pemuka agama adalah sebagai:

1. Wadah atau forum bagi pemimpin-pemimpin/pemuka-pemuka agama untuk membicarakan tanggung jawab bersama dan kerjasama di antara para warga negara yang menganut berbagai agama, dengan

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan serta keutuhan kita sebagai bangsa dan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

2. Wadah atau forum bagi pemimpin-pemimpin/pemuka-pemuka agama untuk membicarakan kerjasama dengan pemerintah, sehubungan dengan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan ketentuan lainnya dari Pemerintah khususnya yang menyangkut bidang keagamaan.
3. Wadah Musyawarah membicarakan segala sesuatu tentang tanggung jawab bersama dan kerjasama di antara para warga negara yang menganut berbagai agama, dan dengan Pemerintah, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan serta keutuhan kita sebagai bangsa dan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan ketentuan lainnya dari Pemerintah, khususnya yang menyangkut bidang keagamaan.
4. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Wadah Musyawarah merupakan kesepakatan yang mempunyai nilai ikatan moral dan bersifat saran/rekomendasi bagi Pemerintah, Majelis-majelis Agama dan masyarakat.

Meski WMAUB hanya dibentuk di tingkat pusat, namun beberapa daerah atas inisiatif Gubernur dan Pimpinan Majelis-majelis Agama di daerah untuk kepentingan daerah masing-masing ada juga yang membentuk wadah serupa, misalnya di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang membentuk Forum Komunikasi dan Konsultasi Pemuka Agama dengan Pemerintah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **FKUB sebagai Forum Kerjasama**

Di era reformasi, ketika tuntutan dialog dan kerjasama antarumat beragama kian besar, maka diperlukan revitalisasi forum-forum antarumat beragama seperti WMAUB tersebut. Maka sejalan dengan terbitnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006<sup>3</sup>, dibentuklah sejumlah Forum Kerukunan

Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota—sebagai pelaksanaan salahsatu pasal dalam PBM tersebut.

PBM itu sendiri lahir dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan untuk menyempurnakan peraturan tentang ini sebelumnya. Seperti diketahui, pada akhir tahun 2004 dan awal 2005 terjadi beberapa pengrusakan rumah ibadat di berbagai tempat di Indonesia, akibat dari kesalahpahaman dalam masyarakat. Instrumen hukum yang ada kala itu adalah SKB No. 1 Tahun 1969 yang kemudian dinilai sudah tidak menjawab kebutuhan karena terlalu singkat dan multitafsir. Maka Presiden memerintahkan untuk melakukan revisi terhadapnya, dan hal itu dilakukan oleh Departemen Agama melalui Badan Litbang dan Diklat. Setelah melalui 11 kali pertemuan antara para wakil majelis agama dan Pemerintah, maka pada 21 Maret 2006 lahirlah PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tersebut. Dengan PBM ini, peran pemuka agama menjadi sangat dominan dan menentukan dalam upaya memelihara kerukunan.

Seperti diketahui, dalam PBM dijelaskan bahwa FKUB beranggotakan pemuka agama setempat, dan dibentuk oleh masyarakat (Pasal 8). Sementara itu, 'pemuka agama' sendiri didefinisikan dengan tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan (Pasal 1 butir 5). Dengan demikian, peran FKUB dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama sejatinya adalah peran masyarakat secara lebih luas dan terdepan dalam pemeliharaan kerukunan. Seperti ditegaskan pula dalam PBM, pemeliharaan kerukunan umat beragama berarti upaya-bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama (Pasal 1 butir 2). Penyebutan kata 'umat beragama' lebih dulu dari 'Pemerintah' tersebut di atas menunjukkan peran umat beragama (baca: masyarakat) yang lebih besar daripada Pemerintah. Hal ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan dengan sadar dimaksudkan dan dibuat oleh para perumus naskah PBM tersebut. Peran masyarakat yang lebih besar ini bukanlah sebagai bentuk lempar tanggung jawab Pemerintah seperti dituduhkan sebagian kalangan, melainkan sebagai bentuk pemberian partisipasi yang luas bagi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan di era reformasi yang mendambakan *civil society* yang kuat.

Adapun bentuk peranserta masyarakat melalui FKUB itu sendiri telah dijelaskan dengan cukup rinci dalam PBM, seperti disebutkan dalam Pasal 9 tentang tugas FKUB, yakni sebagai berikut:

- (1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
  - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
  - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan
  - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pember-dayaan masyarakat.
- (2) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
  - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
  - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/ walikota;
  - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pember-dayaan masyarakat; dan
  - e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Keanggotaan FKUB haruslah melibatkan wakil seluruh agama yang ada di wilayah itu, sesedikit apapun jumlahnya. Tentang keanggotaan ini diatur di dalam Pasal 10 PBM, sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
- 2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 orang.
- 3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan

minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.

- 4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Tak syak lagi, peran FKUB sebagai forum kerjasama lintas agama tergambar dengan jelas dalam komposisi keanggotaan dan tugas-tugasnya sebagaimana disebutkan dalam PBM. Agak sulit membayangkan sebelumnya bagaimana kebersamaan yang diliputi saling pemahaman dapat terjalin dalam suatu kelembagaan seperti dalam forum ini. FKUB telah menjadi wadah baru yang lebih jelas dan terukur, baik dari segi komposisi keanggotaan, tugas dan wewenang, serta output yang dihasilkan. Bahkan lebih jauh, FKUB 'dijamin' keberlangsungannya dengan adanya pasal mengenai anggaran untuk FKUB sebagaimana secara eksplisit disebut dalam Pasal 25 dan 26 PBM. Masalahnya sekarang, apakah FKUB telah benar-benar berperan dengan baik sebagai forum kerjasama antarumat itu?

### **Realitas Pemberdayaan FKUB**

Setelah 3 tahun PBM diberlakukan, secara kuantitatif FKUB memang sudah banyak yang terbentuk. Namun demikian, secara kualitatif perannya di dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama nampaknya masih belum cukup maksimal dan optimal. Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Prof. Dr. HM. Atho Mudzhar, misalnya, menginventarisir beberapa masalah yang dihadapi dalam pemberdayaan FKUB ini.<sup>4</sup> Masalah-masalah itu adalah:

1. Keterlambatan kepala daerah dalam menerbitkan peraturan tentang pembentukan FKUB pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga sejumlah provinsi dan kabupaten/kota sampai saat ini belum memiliki FKUB.
2. Keberadaan Forum Kerukunan yang telah ada dan berperan sebelum lahirnya PBM. Hal ini menimbulkan keengganan bagi sebagian daerah untuk menggantinya dengan FKUB yang diatur oleh PBM tersebut.
3. Sejumlah kabupaten/kota merasa tidak perlu membentuk FKUB

karena tingkat homogenitas masyarakatnya yang sangat tinggi, dan anggapan bahwa tanpa FKUB pun kerukunan umat beragama telah terjaga dengan baik.

4. Tarik ulur antara kelompok-kelompok umat beragama dalam menentukan jumlah wakil mereka dalam FKUB yang akan dibentuk di suatu daerah, sehingga memakan waktu yang lama atau bahkan sampai hari ini pun belum terbentuk.
5. Belum adanya pengaturan apakah aktivis parpol atau anggota legislatif yang mewakili partai politik dapat duduk dalam keanggotaan FKUB.
6. Belum adanya aturan apakah seorang anggota atau pimpinan FKUB perlu mengundurkan diri dari jabatannya itu apabila ia hendak ikut menjadi calon dalam pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah.
7. Perhatian yang belum memadai dari pihak kepala daerah terhadap keperluan pembiayaan FKUB.
8. Belum jelasnya hubungan antara FKUB dan Kantor Kesbanglinmas dalam hal pengajuan dan penggunaan anggaran atas biaya APBD untuk pemeliharaan kerukunan nasional di bidang kerukunan umat beragama.
9. Penciutan pandangan yang mengesankan seolah-olah tugas FKUB adalah hanya memberikan rekomendasi bagi pendirian rumah ibadat.
10. Penyalahgunaan FKUB sebagai alat untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam suatu proses politik di daerah.
11. Penyalahgunaan FKUB untuk mempersulit atau mempermudah pendirian rumah ibadat bagi suatu umat beragama tertentu di suatu daerah.
12. Kecenderungan melemparkan semua persoalan atau beban kerukunan umat beragama kepada FKUB, sedangkan FKUB bukanlah suatu lembaga yang para anggotanya bekerja secara penuh waktu.
13. Sempitnya pandangan sebagian anggota FKUB sehingga menjadikan FKUB sebagai forum untuk tarik ulur kepentingan kelompok agama masing-masing, dan bukan untuk mengedepankan kepentingan kebangsaan Indonesia secara bersama-sama.

14. Keanggotaan sebagian anggota FKUB ditempati oleh orang yang bukan pemuka agama seperti pejabat Pemerintah, atau orang yang tidak diusulkan oleh majelis agamanya.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, ia mengajukan beberapa solusi-tawaran, baik yang bersifat aturan ataupun praksis lapangan.<sup>5</sup> Tentang solusi yang bersifat aturan, perlu dipikirkan penyempurnaan PBM terkait FKUB, seperti menyangkut boleh tidaknya seorang aktivis partai politik atau anggota legislatif duduk dalam FKUB, atau perlu tidaknya seorang anggota atau pimpinan FKUB mengundurkan diri sementara apabila ia hendak ikut menjadi calon dalam suatu pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah, dan lain-lain.

Sedangkan pada tataran lapangan, diusulkan beberapa solusi, yakni:

1. Perlu ada perubahan perilaku agar sikap-sikap sempit kekelompokan anggota FKUB berubah menjadi sikap kenegarawanan.
2. Perlu diintensifkan upaya sosialisasi PBM kepada para kepala daerah dengan cara audiensi dan diskusi tatap muka.
3. Perlu pendalaman pemahaman dan sosialisasi tugas-tugas FKUB.
4. Perlu dilakukan pertemuan-pertemuan antar sesama anggota FKUB dari berbagai daerah dalam bentuk muktamar, munas, atau forum-forum lainnya seperti seminar, diskusi, dan kunjungan.
5. Perlu sosialisasi UU HAM dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan masalah agama kepada para anggota FKUB.

Penulis berpendapat, selain hal-hal tersebut di atas, sesungguhnya ada hal-hal lain yang juga tidak kalah pentingnya untuk segera dilakukan. Hal-hal tersebut adalah:

1. Bahwa dialog perlu dilakukan bersama atau terhadap kelompok-kelompok agama yang berada di luar atau 'menyempal' dari arus utama agama-agama itu. Karena dialog-dialog yang dilakukan selama ini masih terbatas pada kelompok-kelompok yang kira-kira dapat menerima keberbedaan dan memahami pihak lain. Sedangkan kelompok-kelompok 'sempalan' itu justru belum banyak –untuk tidak mengatakan tidak pernah- diajak berdialog, padahal merekalah yang ditengarai kerap menjadi permasalahan di masyarakat dan menimbulkan gangguan kerukunan.

2. Keberadaan lembaga-lembaga di luar FKUB yang bergerak di bidang pemeliharaan kerukunan –baik institusi Pemerintah ataupun LSM— perlu diajak duduk bersama memetakan wilayah tugas yang bisa dilakukan bersama dalam posisinya masing-masing. Selama ini terlihat adanya ketidakterpaduan dan bahkan tidak jarang dalam posisi berhadapan dalam agendanya masing-masing, yang justru menjadi kontraproduktif bagi kerukunan itu sendiri. Trend terjadinya fenomena *cross-cutting* atau kerjasama komplementatif antara LSM dan Pemerintah dewasa ini sesungguhnya bisa menjadi *entry-point* bagi sinergi upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama.

## Penutup

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang kini telah ada di seluruh provinsi dan hampir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia adalah aset yang sangat berharga bagi upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama. Keberadaannya adalah bukti nyata terciptanya kerjasama antarumat beragama. Peran dan tanggung jawab yang diemban FKUB memang tidak ringan dan bukanlah semata tugas pengurus dan anggota FKUB, namun juga menjadi tugas segenap umat beragama untuk turut serta dalam pemberdayaannya. Modal adanya kesadaran untuk bekerjasama, saling bertemu, berdialog mengenai masalah-masalah yang dihadapi bersama kiranya harus terus dipupuk dan, salahsatunya, disalurkan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama. \*\*\*

## Catatan Akhir

<sup>1</sup> Slide berjudul “Developing Dialogue Keeping Peace”, bahan pemaparan Prof. Abd. Rahman Mas’ud pada pertemuan Alliance of Civilization (AoC) di Turki, tahun 2009.

<sup>2</sup> Informasi tentang hal ini dapat dilihat pada Buku Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2008, hlm. 40-42

<sup>3</sup> Selengkapnya berjudul Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. PBM inilah yang menjadi landasan pembentukan dan keberadaan FKUB.

<sup>4</sup> Slide berjudul “Pemberdayaan FKUB untuk Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama”, bahan pemaparan Kepala Badan Litbang dan Diklat dalam Kongres FKUB II, di Hotel Mercure Jakarta, 24 November 2009.

<sup>5</sup> *Ibid.*

## The Relationship between Moslems and Christians: Respond to The Marriage Between its Member of Religious Community

Benny Ferdy Malonda

*Department of Anthropology,  
University of Sam Ratulangi,  
Manado - Indonesia*

### **Abstraksi:**

*Paper ini merupakan hasil riset dalam perspektif antropologi berdasarkan metode riset kualitatif (secara retrospektif dan prospektif). Hasil riset menunjukkan umat Islam dan Kristen secara alami bersikap mementingkan nilai superioritas dari ajaran agamanya dalam menentukan arah diri mereka, dan dalam merespons suatu perkawinan antara seorang perempuan dan lelaki yang berasal dari komunitas agama yang berbeda. Kondisi tersebut menimbulkan beberapa hal seperti: Pertama, terjadi jarak sosial antara perorangan seketurunan darah atau keluarga. Kedua, terjadi penundaan waktu seseorang memasuki siklus hidup perkawinan. Ketiga, pada suatu perkawinan yang terjadi karena salah satu pasangan pindah agama mengikuti calon suami dan istrinya yang berbeda agama, dan pada suatu perkawinan campuran dari masing-masing pasangan berbeda agama, mengakibatkan respon sosial negatif dari umat beragamanya, terhadap pasangan yang bersangkutan, dan orang tua mereka. Kondisi tersebut disimpulkan cenderung tidak sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam kepentingan idealisme persatuan nasional NKRI.*

**Kata kunci:** *social-distance, symbolic interaction, crisis period, and value conflict*

### **The Background**

The concept of national integration could be matched with the idea (meaning) of Indonesia's unity. The concept culturally becoming one of some ideal political views of Indonesia's nation according to the national objective is based on *The Five Basic Principles (Pancasila)* of the Republic of Indonesia.

The above culture of Indonesian's nation ideally, have ever disturbed by individual desire or for the sake of the group interest, for instance the political rebellion of *PRRI/PERMESTA* (Total Struggle of the Republic of Indonesia's Revolutionary Government) in 1958, and in 1990s there is an ethnic conflict that have ever happened between Madura people as a migrant with Dayak people as a native in West Kalimantan. According to Sudarto (1999), there are physical conflict between Moslems and Christians such as In Maumere (1995), Surabaya, Situbondo, and Tasik Malaya (1966), Rengas Dengklok (1997), Jakarta, Solo, and Kupang (1998), Poso, Ambon (1999-2002), that have resulted in many of casualties.

The above condition indicated that the relationship problem between a community based on the difference of religion and ethnic is not so simple imagined, although Indonesia's nation have the idealism premise about *Bhineka Tunggal Ika* or The Unity of Diversity (Malonda 2005).

Also, the above condition indicated that nationalism culture as nation unifying instrument based on *The Five Basic Principles* in The Republic of Indonesia as a unity state did not yet become a basic knowledge of general society continuously. Even though, when the beginning of the concept of democracy and reformation is being raised up by politic partisan adopted by national government, that have ever happened in a group of people as if disagree to *The Five Basic Principle* as a state ideology, and to be changed by the other ideology (Zakaria 2006).

The above condition theoretically and empirically reflects there is a *social distance* between the groups in Indonesia which are differ in religion and ethnic. The theoretical view of *social distance* (Triandis dan Triandis in Ihsan Al-Issa & Dennis Wayne 1984) means as a relationship condition between a personal in a community which is happened closely and not closely. The meaning of a relationship closely and not closely is happened and also not happened in every day life of a community—but there is a condition they need each other as a relationship to be on both side in psychological and social manner. The *social distance* is happened because of the difference and similarity in three of factors, as follows: (1) *race* (that could be explained in *ethnic*), (2) *livelyhood (work)*, and (3) *religion*.

In pre-research interview, there are many parents in the family, based on their faith (religion) and hope that a marriage event of their son and

daughter should be in the same religion. The hope above as a natural and normal condition is supported by the leader of a religion community (also by certain of the government official). The condition above is reflected as a problem that faced by a relationship reality of man and woman who wants to marriage, based on marriage principle that both of them agree toward a marriage between people who comes from different religion. In this case they are faced by the religion community where they come from that disagree and against a marriage that not based on the same religion.

The principle for considering ideal religion that decided to a social relation in a marriage, could be interpreted as well with the theoretical view of *symbolic interaction*, in order to study about a meaning of the cause of people's behaviour in a society. The cause, which is transformed as a dimension from each people, is about something, self direction, and choices, in some situations. In that case, to seek the meaning about cases/matters for instance, whatever to each people think and wish for, to solve the problem for taking role, the condition for practicing matters related to the past time, the way to consider the future (in situations and a certain interest)—and how far is the freedom play an important role which is done by each people related to their participation in a certain situation. Prominently, the *symbolic interaction* is intended to explain problems, such as conflicts, taking of roles, cooperation, identities, self-direction, symbols, social objects, the confusion in some situations, performance concerning protection of a harmony/balance (Charon 1979; Bogdan dan Taylor 1975; Bogdan dan Biklen 1982; Turner 1986).

The objective of this research is to describe a *case-study* about the negative and positive condition that exist because the presence of some marriages that based on difference religion background.

Qualitative method is used in this research retrospectively and prospectively (or processually and longitudinally)<sup>1</sup>. The research target *purposively* is families that originated from Jakarta and Manado (consist of eight cases) that son and daughter in their families get married into his or her couple from differ faith (religion). The primary approach used in this research is depth interview, observation, and content of analysis to mass-media (specially one case about some film actor and artist).

## Description of Marriage Cases

Description as a research result is shown on matrix 1 below:

Matrix 1  
Marriage's Cases Based on Difference Religion

No	Source of Cases and Actor	Cases Description	Condition of exist or not
1.	Four marriages from the brothers from Christian family in Manado that migrated to Jakarta	Two brothers converted to Islam as a faith (religion) of their wives; and two brothers left is still Christian as religion adopted by their wives	Four brothers is separated because of the difference of faith/religion, disturbed the social-psychological relation; based on their authority of religion
2.	A marriage of a women, private worker, as a daughter of a Christian family from Manado, lives in Jakarta	This woman converted to Islam following her husband faith	This woman is separated with her parents, because socially and psychologically, the parents hold on to the authority of their faith as Christian
3.	A marriage of a woman; government Employee; comes from Christian family, lives in Manado	This woman converted to Islam following her husband faith	This woman is separated with her parents, because socially and psychologically, the parents hold on to the authority of their faith as Christian
4.	A marriage of a man as widower; <u>intropreneur</u> , comes from Islam family lives in Jakarta	This man obeyed to his mother that firm concerning Islam, and his wife (that comes from <u>Christian</u> family from Manado) converted to Islam	There is no negative effect, because the parents of the wife, take a stand as moderate to the factor of religion
5.	A marriage of a woman, nurse, as a daughter of a Christian family comes from Manado, lives in Jakarta	This woman converted to Islam because her husband does not want to evade the Islam principle of his family	There is no negative effect, because the parents of the wife, take a stand as moderate to the factor of religion
6.	A marriage of a woman; student, as a <u>Betauninese</u> , comes from Islam family, lives in Jakarta	This woman obeyed to her parents regulation, is that she could marry with a man (anyone) from whatever ethnic, provided he is a Moslem	There is no negative effect, because the woman married with a Islam man, although the husband is advanced in age

7.	A marriage of a woman; private worker, as a <u>Beta</u> winese, comes from Islam family, lives in Jakarta	This woman obeyed to her par- rents regulation, is that she could marry with a man (anyone) from whatever ethnic, provided he is a Moslem, although formerly there is a Christian man liked her	There is no negative effect, because the woman married with a Islam man, although her <u>husband</u> is advanced in age
8.	A woman; nurse; as a <u>Bataks</u> , a daughter of a Christian family, lives in Jakarta	This woman obeyed to her parents regulation is that she could marry with a man (anyone) from whatever ethnic, provided he is a Christian; formerly she was warding (of necessity) a man that comes from Islam family as her fiancé	This woman until her age in 30s <u>din't</u> yet merry, because she didn't yet also find a man in the same religion
9.	Four marriages of four pairs TV-film actor and artist live in Jakarta	Those pairs of actor and artist differ in their faith (religion) have married as moderate to the religion	There is no anything effect until 2007 when this article composed

Source: data of observation, interview, and content analysis, 2006 - 2007

## Explanation

**Case 1:** The eldest brother of four brothers comes from Manado as Christian, in the year 1960s migrated to Jakarta speculate with certificate of economic senior high school and music talent. In short, the eldest brother worked as an official in military office (navy) at Gunung Sahari Jakarta, and became a music-band player in his office. In five years he became as an official, with the condition of his ambition in acting art, then, he finally became a film star, that he pioneered from free worker (assistant player) until became main actor. Once upon a time he felt in love to a woman from Padang, Sumatra, from Islam family background. (with the father as high officer/military). The eldest brother's religion as Christian is

converted to Islam because of his pairs/wife is Moslem, and as a consequence, he changed his Christian name to Moslem name. This new family of Manado-Padang then built some enterprises, for example a travel bureau, a cargo expedition, as contractor, and so on.

Based on the condition of the eldest brother has an economic progression, then, three of his younger brothers, in 1970s followed him migrated to Jakarta. All of his younger brothers had art music talent. The eldest brother supported financially his younger brothers to enter a music school. The older brother of the three younger brothers at last became a keyboard player and had his own, a set of music equipment in 1980s—and had ever became a solo keyboard in several hotels in Bali. At the end he returned and lived in Jakarta and worked in a private enterprise (while did his role as a music player). Because he loved a Moslem woman (from Sundanese) became his wife, then as a Christian he converted to Islam. The second younger brother of the eldest brother at last became an instructor of classical guitar at a music school in Jakarta, instructor of *kolintang* (a traditional music instrument of Manado), and an instructor of choir in Area Military Command Jakarta. He married with a woman from Betawinese from Islam family that converted to Christian, and then they lived in center of Jakarta. The third younger brother became an instructor of pop guitar, keyboard, drum, and group music at a music school in Jakarta. He had his own set of music instrument for rental. Finally, this third younger brother of the eldest brother married to a woman from Javanese from Islam family that converted to Christian, and lived in center of Jakarta.

In the religious and familial life, the eldest brother and his older brother of the three younger brothers have converted to Islam because of following the religion of their wives as their choice. The second and third younger brothers of the eldest brother was still as Christian, and the women as their choice wives converted to Christian from Islam as their faith. This condition have effected a *social distance* and *value conflict* based on religion's symbols between the family that differ in faith. This means that the conditions of social and psychological relation between the brothers and the families have changed, from a good relation and become not good relation. The elemental theoretical data is the religions as faith between the brothers have disturbed the condition of their blood of one descendant.

Because of the *social distance* and *value conflict* affected by the brother's faith, so, each of them stand at attention to show off their religion to be correct, based on the paragraph of the holy book. Finally, the above brothers who differed in religion did not have a close relation as one blood descendant, even in the context to give mutual aid concerning financial.

The wives of the brothers one to each other (because of differ in faith) socially and psychologically did not have a close relation, and there was no initiative to build a friendship. This means that the condition of differing in faith (with each of their husband as brothers) is cutting the social and psychological relation until the time of this research.

**Case 2:** In a Christian family from Manado, lives in Bintaro Jakarta (the head of family have ever became as a member of the house of representative until 1980s) happened a conflict between the parents and their daughter as an eldest sisters. This conflict happened because the eldest sisters did not obey to her parents that forbade her marry to a man from Islam family. As a result, the relation between the parents and their daughter was interrupted. The parents considered their daughter have threw them and cut off the relationship with them (as her parents), because their daughter wanted to marry to a man as her choice. That condition has influenced the mother's feeling of ignored and eventually suffered from stress<sup>2</sup>—that henceforth the mother continuous sadness has affected her (that formerly has suffered from a chronic disease, lungs cancer) finally, passed away. The father of the above mentioned daughter too did not take a long time passed away because of heart disease that harmed him. In medical ethics and according to the theoretical views of medical-anthropology and psychiatry-anthropology, that there is no correlation test between the factor condition of sadness and the death that happened to those parents as Christian *with* the factor of their daughter's willingness to get married and converted to Islam. However, the elemental data theoretically, is that in this case they disagree if their daughter marry to a man not in the same faith or religion, because their emotional attitude according to the perception of ideology, that their faith is the most correct—and to look for an excuse that a marriage ideally if a couple have the same religion.

**Case 3:** The parent in a Christian family, in Manado, both of them as lecturer in an university, disagree their daughter is proposed by a Javanese young man as army comes from Islam family. The above father has his strong principle based on view that somebody will sell his or her religion if he or she converted to another religion. Finally, when his daughter called on her father for asking his agreement and for blessing her, because of the young man still as her choice as her husband, then she and her fathers become emotional, they embraced and cried one another—faced by the problem concerning their principle of religion. Although the above father formerly with her strong attitude forbade his daughter married to a young (military) officer, but finally he agreed his daughter will—and, while both of them cried and they embraced each other, he said: *follow to young man as your choice!* But the above father was not attend in the marriage contract and party of his daughter—because he had strong attitude with his Christian faith. Certainly, before the above daughter proposed by the young man officer, her father suffered from an illness, that have a paralytic stroke. Finally, this illness was resulted her father to die after several years in 1990s.

**Case 4:** On the contrary, a Moslem widower and an entrepreneur (divorced with his first wife) as a son of national ex-high-functionary equal than a state minister comes from Jakarta, had a strong attitude supported his religion principle, also did not want to disappoint his mother as an adherent of Islam obediently. Certainly, he found another young woman (from Manado, Minahasa, from Christian family) that really loved him. Because of his strong attitude in religion and acknowledgment to his faith, then the young woman married him and converted to Islam from Christian as her religion. Fortunately, the parents of the above young woman (also as an active *hukum-tua* or village headman, of a village as clove producer) as a moderate not to question their daughter as a Christian converted to Islam. The parents had a routine twice a year to visit and stay in their daughter family in Jakarta. Based on the parents attitude to the factor of religion as moderate, they have their principle that the parents should have a neutral attitude to son and daughter concerning the choice of wife and husband, even concerning whatever their religion. When the first time the mother as parents seeing her daughter to perform up the five daily prayers, certainly the above mother said that the condition have surprised her—but with

her rational response, she said that her daughter performance was precisely very good for her mental condition.

**Case 5:** The resemble case that is concerning a young woman from a Christian family comes from Manado, that when become a student at a nurse school in Jakarta she is proposed by a man as Moslem comes from South of Sumatera, a worker in a private enterprise in Jakarta. The parents of the above young woman (her father as a retired seaman of a national sailing enterprise, and her mother as a retired nurse) used to stand at attention as moderate and not to question their daughter marry into the above man. They do have their way of life, that in order to become a good citizen, somebody should to have a rational and pragmatism principle in a society, for instance she or he has to stand at attention as moderate toward various of religion tenet. In this case although the parents are Christian, they do have a good communication and relation to their son-in-law. They used to stay for weeks and even for months along their daughter family in Jakarta. They used to not startle when seeing the son-in-law in five obligatory daily prayers. Their daughter herself that determined her husband as her choice, finally with her relative young age have succeeded to fulfill her fifth pillars of Islam going to Holy Land Mekah.

**Case 6:** Another case in Jakarta is concerning a young Betawi woman as a student in a university, comes from Islam family. Before this young woman passed the examination of S1 (bachelor) program, she explained that her parents have determined a strong regulation, that she could associates with whoever man and also get married, provided he is a Moslem. The above young women always obeys to her parent's strong regulation because she is certainly as faithful follower to Islam, even she tends has an emotional and premordial attitude concerning her faith—also has a social distance with her friends as Christian. Her faithfulness to Islam and the parents's strong regulation has effected her cautious attitude to choose male friends, prominently to her life's companion. Finally, she has chosen a man as Moslem, an official of a private enterprise in Jakarta (with age distance with her about 15 years) became her husband. She told that the age gap between her husband and her was not become an obstacle, because her husband is a Moslem, and even the age condition of him, became condition that he would become a protector' husband to herself.

**Case 7:** In a case of young woman, a senior high school graduate came from a religious Islam family as Betawinese in Jakarta. The parents of her deliberately forbidding her going to marry into a young Christian man. The parents had their principle that Moslems forbade by its tenet marry into Christian. Although this daughter was a poor family and the man that has proposed her was from a rich family, she followed her family principle of Islam. Although that none of her family member is educated in senior high school to university, but they were always strong with their faith principle of Islam. Formerly the above young Christian man have stated seriously his desire to the women family to marry their daughter on the time she is still working in an enterprise as the young man's father property. Nevertheless, the woman family firmly believed to their Islam's tenet, and not influenced by the wealth condition of the man that proposed their daughter. In that case this woman family is only has a simple way for refusing the marriage application of the man family, that is a marriage between a pairs in differ faith/religion can not be performed between a couple that differ in faith—and especially based on a tenet that a Moslem is forbidden marry into a Christian, also because it will cause bad luck destiny to whoever as the actors.

**Case 8:** Another case is concerned a young woman from Christian family from North Sumatra as Batak, lives in Jakarta. This Christian family with the parents as senior high school graduate (and have brothers as university graduation) had a strong regulation too, that whoever their son and daughter could be married to any ethnic, provided he or she is a Christian. The father of this family have an otoriter attitude to their daughter. As a result, the above young woman (as a daughter) of this family certainly as faithful follower to Christian, as a nurse in a Christian hospital, did not accept when her fiance (as Moslem) proposed her. She did not accept her fiance request because of she obeyed to her father strong regulation, and has a strong attitude manner to obey to the authority of the tenet her faith as a Christian. Based on the above condition, until her age almost 40 she did not yet get married. She has decided not to marry to the above her fiance as Moslem, because of her principle to have a husband as a Christian.

**Case 9:** Based on the existence of social distance concern, each community has the religion tenet as a view collision in the context of

matrimonial cycle (especially its marriage time). On the contrary there are people of Indonesia is used to go abroad because their mixture marriage based on the difference in faith of religion( SCTV 2006). For instance, the mingled marriage case is done by four pairs TV/film actor and actress in 2000s that each of pair as moderate not to question to their pair's religion. Three pairs of them is forced to get married formally at office of civil annotation (as civil marriage) in Singapore. A pair of them married in Australia. Their basic reason for going abroad especially for the marriage, that is in Indonesia society for instance in Jakarta, people in normal and strong attitude based upon the superiority of each faith, as an absolute important value for determining and responding (as their self direction), to a mingled marriage of a man or a woman from a certain religion community prominently between Moslems and Christian (Barens 2006). Certainly, there are people from each religion community that have responded toward the above marriage. Although as a rumor, but it is reflected, there are people by their emotional attitude that stand for the tenet of religion that they feel is right faced by the above marriage condition. This condition is faced by the fact that there is no national regulation for supporting the above marriage condition. An important elemental and theoretical data, on the contrary that from the mixture marriage in the context (of) in differ religion.(although it is only based on a few informant/sample) is showed that there is no indication concerning conflicted families and above all concerning a divorce in some families, that although in this case the husband and wife not have a same religion.

### **Description of Analysis**

The author found on those cases, most of the informants used to take a stand to their faith of religion, as a value that they had since childhood period (as an adherent of a certain a religion). In this case the authority of religion tenet determining the people to behave in daily social life, for instance for determining a marriage, then, a man or a women were considered ideally if they get married based on the same religion. The natural condition of emotional attitude based on faith of religion create a *social distance* (in far and separated condition) between one religion adherent to another, that prominently in this research become as an effect in families because of a marriage not based on the same religion. In this case, a person

with his or her religion used to stand at attention for her or his self direction based on the authority of the Holy-Book's basis, with the natural perception that his or her religion tenet is the most perfect and correct. Likewise, the people based on symbols of their religion although stealthily, each of them by natural strong attitude used to say that another religion tenet (between Christianity and Islam) isn't correct compared to theirs. The above condition reflected that there is natural *value conflict* between Christian and Moslem. This article is only describing a conflict of religion value in the context of strong debate of the member of a family because to adhere to a certain religion, without its neutral or rational way out—and its effect about the existence of *social distance*, for instance in a marriage event. The people condition in emotional attitude based on the religion tenet based on their religion related to life cycle of marriage, is became disadvantageous effect to each religion adherent and national society, above all to the national Indonesia development program of national integrity.

This research concluded with three types of theoretical and elemental data related to marriage between Christian and Moslems, as follows: (1) The conspicuous conflict based on religion view/tenet, (2) the obedience toward religion principle as parents faith, and (3) the moderate factor toward religion.

### **The conspicuous conflict based on religion view/tenet**

It is proved in this research, in case 1 the four brothers as musician (in fact two of them converted to Islam, and two of the remained as Christian) separated into two parts psychologically and socially because of the authority of religion (Holly Book) paragraph convinced. The condition conflict of them because of religion difference exists in a *value conflict*, appear and go on as a strong debate in religion value without its rational way out. Even their social and psychological relation as one descendant have interrupted.

In case 2 conspicuous conflict existing on religion value, because of the parents (Christian) of a family although educated as university graduate (and especially the husband of this family have ever become a lecturer and even as member in house of representative), disagree their daughter marry into a Moslem man. Finally because this mentioned daughter also get

married into the Moslem young man as her choice, then this condition becoming a basic conflict between the parents and their daughter. Their conflict is exist in a long process because of the mentioned parents principle that a marriage should be based on a religion similarity. This situation become a conditioning the mother and father in the mentioned family so sad. Whereas this mother is suffering from lungs cancer, and her husband is suffering from heart disease.

In case 3 conspicuous conflict existing on religion value as well, because of the parents (Christian) although also educated as university graduate (and also especially the husband have ever become a lecturer and even as member in house of representative), disagree their daughter marry into a Moslem man. Certainly, is correct that the conflict between the parents and their daughter (existing in critical debate) ended after their daughter finally married into the young man as her choice. But this daughter's father certainly has a principle (shaped scientifically by natural of social and cultural process) that if a Christian converted to another faith/ religion, then he or she has soled his or her religion.

### **The obedience toward religion principle as parents faith.**

Case 4, a marriage case of a Moslem widower (as a son of the father ex-high-official positioned equal than a state's minister) becoming an example concerning the obedience attitude toward religion principle as parents faith—faced by his parents attitude prominently his mother as a very obedient woman toward Islam tenet. In this case the above widower is deliberately obeyed toward his mother hope and wish as a faithful adherent of Islam. Thus certainly his mother has a very strong principle in Islam for the sake of the marriage, although for his second time marriage. Formerly, this Moslem widower met his wife candidate a Manadonese woman that also liked him and then converted to Islam because realize there is a good psychological relation between the mentioned widower above (become her husband) and his mother.

Case 6, further become an example too is concerned an obedience attitude of a Moslem woman to her parents (from the time she is still student until almost she is going to marry). This condition is showing a primordial attitude toward religion of this parents that influenced positively

to that mentioned woman above. She and her sister also her brother obeyed to their parents regulation that should to marry into a pairs comes from whatever ethnic, provided is as Moslem. Her Adherence toward her parents in accordance with the process she was studying Islam and science in her faculty. Actually this condition have motivated her, and certainly that is true this woman in her social life environment of young generation in big city like Jakarta, and while as a student in university that almost pass her bachelor (S1) examination, and finally get married, she didn't fall for a bad city association in the context of social illness. In this case, as a Moslem she is certainly increasing a social-distance toward Christian environment, because she does have her strong certainty about her religion truth as her perception.

Case 7, shows an adherence attitude of a Moslem young woman (toward her religion and parents). She is a worker of an enterprise private, and as a senior high school graduation. Her parents is only graduate from elementary school, and especially her father is an authoritarian individual in the case of Islam tenet and general in nonformal education for her at home. The above young woman have choosen that imperishable condition of social and psychological relation between the parents and her as a matter of principle, compared to cut off the relation with them if she is going to marry into a Christian.

Case 8, on the contrary compared to data in case 7, shows an adherence attitude of a Christian young woman (toward her religion and parents), as a nurse in Christian hospital. Her parents is graduate from senior high school (and there is her brother as university graduation) and especially her father is an authoritarian individual in the case of Islam nonformal education for her at home. This young woman is a faithful daughter toward her parents hope so that she has to marry into a Christian man. Actually as a daughter, then her adherence so that she has to marry into a Christian man, basically because she does have a strong principle according to her faith as a Christian.

### **The moderate factor toward religion.**

Case 5, shows a young women comes from Manado, as a nurse school student, doesn't have problem when converted to Islam, because

following her husband's religion. In this case the above women's parents is moderate, because not to question their daughter that left her religion as Christian and converted to Islam. Even because of their moderate background, they have the principle that if somebody wants to become a good citizen he or she has to be rational and pragmatical person in the life of society. The moderate attitude were showed by them in having a good social communication with their son-in-law

Case 9, shows a moderate attitude in the context of religion existing on some TV/film actor and actress. Certainly it is right that certain actor and actress not converted to another religion in order to marry into his wife-to-be (her husband-to-be), and their moderate attitude are not to question the religion of their pairs (couple). And an important elemental theoretical data, about the mixture marriage above in the context of religion's different (although is only in a few informant/sample), shows that there is no indication about conflicted families, specially concerning a divorce.

## Conclusion

The marriage as a period of life cycle, causing a *crisis period* on families when their son and daughter entering the period and want to marry with his or her pair that differ in religion.

The negative factors caused by a condition of *crisis period* (above all related to the existed wish from a marriage between a religion differed pairs), as follows: (a) relation between person to person in a family from one blood descendant, especially between parents and daughters or son interrupted and is becoming under great tension, and even have effected stress condition to the parents, (b) somebody wish for going to marry become postponed according to the age limit, (c) there is a tendency that the marriage effected negative response by families involved in, even by the community according to their religion tenet.

This research shows that there is a *social distance* related to the marriage condition between Moslems and Christian, and it has a tendency to refuse and not conform to the national development objective of Indonesia, in the context of the idealism of national unity and national integrity. The mentioned condition showing that families based on their faith, and according to the certain religion symbols that was inherited from the past

and becoming individual principle also self direction, not conform (also conflicted) with another principle of religion. According to this research result that the problems of *social distance* thus not based on the difference concerning ethnic and work (livelihood) according to theoretical view of Triandis dan Triandis, but it primarily was only has the shape based on different religion. However this reserach found that there are personal prominently women that not to stand attention for her natural self direction based on the authority of the Holy-Book's basis, that her religion tenet is the most perfect and correct. As a result those women as Christian converted to Islam following their husband faith, supported by their parents from Christian family based upon moderate background concerning to the religion.

### Suggestion

By focusing on idealism to have a nationality and state, also the unity of Indonesia in the context of national integrity, based upon the frame of *NKRI* (unity state of the Republic of Indonesia), then: (1) that is important if there is a dialogue based upon government policy and a related side to produce a formal regulation, to organize a social relation concerning to mixture marriage between a pair that not based on the same faith. The above matter related to how the state appreciating a human right in freedom to fullfill basic nature desire of human for building a family freely, for choosing her or his pair of life. As a basic support toward rational framework of thinking, that this research found qualitatively there are some pairs of a family that remained firm although each pair as husband and wife not based on the same faith. In that case, a family is the smallest organization as a basic of human development concerning the grow and develop of children, until adolescent, adult, and so forth), (2) the government of Indonesia need to make a study wisely toward a marriage legislation (in Indonesia) that is in its practice not organizing a marriage problem between a pairs that come from a differ religion. In that case the government of Indonesia should to institutionalize the paragraph 66 about *Marriage Legislation* 1974 of Indonesia concerning *The Mixture Marriage Regulation* (Regeling op de Gemengde Huwelijken) Stb. 1898 No. 158 that used to be abbreviated as *GHR* (Eoh 1996). In that case the paragraph above is able used supporting the implementation of a mixture marriage in the context of different religion.

The couple which is differ in religion that want to marry, is a bio-psychology and socio-cultural problem. It is need some views and solutions theoretically also practically in the context of cultural relativism and especially in multicultural views<sup>3</sup>. In this case, the support of leaders of government apparatus, concerning the prohibition against marriage of a couple which is differ in religion (related to concept of *social distance*), have a tendency that effected there is existence of *budaya pinggir*<sup>4</sup> or sub-culture (become a contradiction with the ideal culture). Also, a *social distance* condition between religion communities in Indonesia that is increasingly shaped and protected, have disturbed the freedom and human rights of people for choosing his or her life couple in the context for shaping the smallest of social organization (a family), and primarily have a tendency refusing a foundation of unity of Indonesia in *Pancasila* (The Five Basic Principles). In this case, it is needed a dialogue between religion's leader (community) including the intellectual of Moslem and Christian, also from university, supported by national government (based on *state law*). The dialogue is needed, so that both of communities could have a mutual understanding concerning the universal of inner truth related to religion tenet, and rationally in common sense, for correcting toward any views as damaging condition of social life to each community, to live through with live-and-let-live attitude as a citizen of The Republic of Indonesia.

## Footnotes

<sup>1</sup> Qualitative method is a method that studying the society and culture interpretively, in the matter of social world and human being materially—by listening to people life explanation, based on their customs and institutions, using a theory as the existence based on an interpretation from a situation of a research background, and using the context of social and cultural concept as a primary description and as a social life stimuli (Geertz 1990, cited by Ahmad 1991).

<sup>2</sup> Writer using the definition of stress, by Schwarzer (1981) as follows: Stress is a complex of phenomenon that exist and develop in a process of the environment of person, by her or his cognitif evaluation toward environment stimuli that challenging, threatening, and damaging, or effecting him or her loss of something. Stress related to the life critical events, including marriage, pregnancy, childbirth of descendant, exist according to the age and certain period of time. The life events dimension could show a true situation of stress in aspect of negative emotion such as anger, anxiety, grief, and depression.

<sup>3</sup> About multicultural views, see Yagin's view (2005) that an understanding toward multicultural view means receiving all sort of cultural expression that contains some views of beauty and humanitarianism. The understanding humanly is admit toward the importance of humanitarianism values concerning how people become a religion adherent means how could people implement the humanitarianism value, to pay honor to the human rights of person to person, pay attention to anybody and to carry on to keep peace to the whole community of men.

<sup>4</sup> About the concept of budaya pinggir (sub culture) see Cloward and Ohlin (1961). *Delinquency and Opportunity*. The Free Press, Glencoe

## References

- Abdullah, Taufik (ed). 1976. *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: CV Radjawali
- Ahmad, S. 1991. Some Notes on Clifford Geertz's Interpretive. In *Antropologi Indonesia*, April. Page 1-29
- Alhumami, Amich. 2005. *Contesting Religious Identity in the Democratization Process in Indonesia*. The National Development Planning Agency.
- Al-Issa, Ihsan, & Dennis Wayne. 1989. *Cross Cultural Studies of Behaviour*. New York. Holt Rinehart & Winston. Inc.
- Barens, J. 2006. Masalah Perkawinan dan Hambatan Sosial, *dalam* Victor Paliama (2006) *Dinamika Hubungan Sosial: Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat*. Wenang Ekstraba.
- Bogdan, R, & S. Taylor. 1975. *Introduction to Qualitative Research Methods*. John Wiley and Sons, Inc.
- Bogdan, R, & S.K. Biklen. 1983. *Qualitative Research for Education; an Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon.
- Caplan, Lionel. (Ed). 1987. *Studies in Religious Fundamentalism*. Houndmills: Macmillan.
- Charon, Joel M. 1979. *Symbolic Interaction: an Introduction, an Interpretation., an Integration*. Englewood Cliffs, Printed Hall Inc.
- Cloward, and Ohlin. 1961. *Delinquency and Opportunity*. The Free Press, Glencoe
- Davis, Jhon (Ed) 1982. *Religious Organization and Religious Experience*. London Academic

- Dohrendwen, Barbara, & Bruce, Dohrendwen. 1974. *Stressful Life Events: The Nature and Effects*. New York: John Wiley & Sons.
- Douglas, Mary. 1982. *The Effect of Modernization on Religious Change*. Daedallus.
- Eoh, O.S. 1996. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek..* Jakarta: Rajagrafindo
- Geertz, Clifford. 1992. *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius
- Malonda, B.F. 2003. *Indonesian Moslem and Christian Relationship: SPR (Social-Political, and Religial) Study in JABODETABEK and MAMIBI*. Article presented in 4th International Symposium of Journal Antropologi Indonesia
- \_\_\_\_\_, 2002. *Perspektif Pembangunan Manusia: Melalui Belajar Kebudayaan Dalam Proses SOSENIN dan Pengendalian Sosial*. Oration Presented in Sam Ratulangi University (Dies Natalis of Faculty of Social and Political Sciences)
- Moore, Sally F. & Barbara Myerhoff. (eds) 1977. *Secular Ritual*. Assen: Van Gorcum.
- Morris, B. 1987. *Anthropological Studies of Religion, an Introductory Text*. Cambridge Univ. Press
- Schwarser, Ralf, (Ed). 1981. *The Self in Anxiety, Stress and Depression*. New York: Elsevier SciencePublishing Company Inc.
- Sudarto, H. 1999. *Konflik Islam Kristen: Menguak Akar Masalah Hubungan Antar Ummat Beragama di Indonesia*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Yaqin, Ainul, M. 2005. *Pendidikan Multikultural Crosss-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media
- Zakaria, Anan. 2006. *Ethnic Group, Religion, and its Challenge to The Five Basic Principle*. Boline Press.
- RCTI. 2006. *Siaran berita kunjungan artis ke luar Negeri*

## Kerjasama Antarumat Beragama di Berbagai Daerah Indonesia

Nuhrison M. Nuh  
dan Kustini

*Penulis adalah Peneliti pada  
Puslitbang Kehidupan  
Keagamaan*

### **Abstract:**

*This research aims to gather information upon individual characteristic, socio-economic status, plurality stance, trust level and its relation with interfaith cooperation. The research applies a qualitative approach through surveys in 6 regions. The population for this research are members of society with different religions selected purposively.*

*It shows that there is no difference between male and female, length of educational years in religious attitude, trust level, and interfaith cooperation. Muslims tend to have a more exclusive attitude compared to followers other religions. Muslims have a relatively lower trust level compared to other religions. While Catholics shows that they have the highest trust level. There is a correlation between educational level with interfaith cooperation. The higher the education level, then more cooperation can be established.*

**Keywords:** *individual characteristic, social economic status, diversity attitude, trust level cooperation*

### **Latar Belakang**

Kerjasama antarumat beragama di Indonesia selama ini telah terjalin relatif cukup baik, terutama dalam bidang-bidang di luar masalah agama, seperti dibidang politik, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang sosial keagamaan, di beberapa daerah, kerjasama pada umumnya berjalan baik. Di Manado, misalnya, ketika di suatu kampung sedang dibangun suatu gereja,

maka umat Islam pun turut membantu baik berupa tenaga maupun dana. Demikian sebaliknya, umat Kristiani pun biasa memberikan bantuan bila ada pembangunan mesjid di lingkungan mereka. Di Jawa Timur, dalam malam perayaan Natal terdapat sejumlah pasukan Banser NU turut menjaga keamanan di sekitar gereja, dalam pelaksanaan hari raya umat Kristiani tersebut. Yang relatif baru dan lebih maju, sejak dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, kerjasama antarumat beragama bahkan dapat terwujud lebih nyata. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi wadah kerjasama antarumat beragama untuk bersama-sama memelihara kerukunan umat beragama dan menyelesaikan masalah-masalah intern dan antarumat beragama yang terjadi di lingkungan mereka.

Namun demikian di daerah-daerah lain kerjasama antarumat beragama tersebut belum bisa diwujudkan, bahkan terjadi hubungan yang kurang harmonis dan konflik. Selama lima tahun (1996-2001) kerusuhan sosial dan keagamaan semakin menjadi gejala yang umum bagi perjalanan kehidupan bangsa Indonesia.<sup>1</sup> Pada tahun 1996 tercatat beberapa kerusuhan besar dan berdimensi agama maupun sosial. Unsur pemicunya adalah masalah agama, seperti terjadi di Situbondo, Tasikmalaya, Pekalongan dan Purwakarta. Pada tahun berikutnya kerusuhan terjadi di Kerawang, kemudian terjadi di Ketapang dengan modus yang hampir sama, menggunakan isu agama sebagai cara untuk membuat kerusuhan. Pola mempertentangkan dan menggunakan agama ini kemudian muncul di Kupang. Pada bulan Januari 1999, menjelang hari raya Idul Fitri, perkelahian di desa Batu Merah Bawah dengan warga Batu Merah Atas, akhirnya memicu pergolakan hampir diseluruh Ambon yang kemudian terus berlanjut dan menyebar ke seluruh Provinsi Maluku.<sup>2</sup>

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, mengapa meskipun lembaga-lembaga *interfaith* dialog menjamur di mana-mana, hubungan antaragama dan kepercayaan di negeri ini masih diselimuti ketegangan, kecurigaan dan kekerasan. Adakah yang salah dalam mendesain dialog agama selama ini? Menurut Sumanto selama ini dialog dibangun hanya membicarakan persamaan-persamaan keagamaan karena hal ini dianggap bisa menjadi perekat, dasar, dan fondasi untuk membangun hubungan antarumat beragama yang harmonis dan *peaceful*. Menjadikan persamaan dan *communalities* sebagai basis dialog agama adalah perlu tetapi

membicarakan perbedaan, sekali lagi dengan sikap elegan, saling menghargai, dan komitmen yang tulus untuk mencari “*pemahaman dari dalam*”, juga sangat vital dalam desain dialog agama. Selama ini memang telah dilakukan upaya penyingkapan perbedaan-perbedaan keagamaan dan keberagamaaan itu. Akan tetapi hal itu dilakukan dalam format monolog atau, kalau tidak, “*debat kusir*” yang diringi sikap sinisme dan semangat penuh kebencian untuk menjatuhkan kelompok keagamaan lain disatu sisi dan meneguhkan kebenaran dan superioritas kelompok keagamaannya sendiri dipihak lain. Model dialog semacam ini tentu saja kontra produktif dengan spirit dialog agama itu sendiri.

Dengan kata lain, kerjasama boleh saja terjadi, namun belum seutuhnya dilandasi oleh kesadaran dan keikhlasan untuk bekerjasama. Kesediaan bekerjasama yang sejati memang meniscayakan adanya sikap keberagamaaan yang kondusif dan tingkat kepercayaan (*trust*) yang tinggi terhadap ‘pihak lain’ yang berbeda. Sikap keberagamaaan tersebut merupakan hal yang bersifat internal-bathini yang kemudian terwujud secara nyata dalam sikap. Sedangkan tingkat kepercayaan/*trust* lebih merupakan kepercayaan penuh kepada pihak lain dan tanpa melandaskan pada pengalaman masa lalu.

Melihat fenomena sosial seperti diuraikan di atas, maka perlu diadakan penelitian untuk mengetahui sejauhmana karakteristik individu, status sosial ekonomi, sikap keberagamaaan dan kepercayaan (*trust*) dapat mempengaruhi kerja-sama antarumat beragama. Kajian seperti ini sangat penting dilakukan, dalam upaya untuk meningkatkan kerukunan umat beragama dari hanya sekedar bersifat pasif (toleran), menjadi kerukunan yang berwajah dinamis (mampu bekerjasama). Selain itu penelitian ini dilakukan dalam upaya mencari solusi terhadap berbagai konflik yang muncul diberbagai daerah, berupa langkah-langkah pencegahan dan pemeliharaan demi terciptanya kerukunan umat beragama yang sesungguhnya.

Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: (1). Apakah karakteristik individu mempunyai hubungan dengan sikap keberagamaaan, (2). Apakah karakteristik individu berhubungan dengan tingkat kepercayaan (*trust*), (3). Apakah akses informasi dan status sosial ekonomi berpengaruh terhadap eksklusifitas, (4). Apakah akses informasi dan status sosial ekonomi berpengaruh terhadap Inklusifitas,

(5). Apakah akses informasi dan status sosial ekonomi berpengaruh terhadap *trust* berdimensi ekspektasi, (6). Apakah akses informasi dan status sosial ekonomi berpengaruh terhadap *trust* berdimensi hubungan sosial, (7). Apakah akses informasi, status sosial ekonomi, sikap keberagamaan, dan *trust* berpengaruh terhadap kerjasama antarumat beragama?

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang karakteristik individu, status sosial ekonomi, sikap keberagamaan, tingkat kepercayaan (*trust*) dalam kaitannya dengan kerjasama antarumat beragama. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Hubungan karakteristik individu dengan sikap keberagamaan, hubungan karakteristik Individu dengan tingkat kepercayaan (*trust*), pengaruh akses informasi dan status sosial ekonomi terhadap eksklusifitas, pengaruh akses informasi dan status sosial ekonomi terhadap Inklusifitas, pengaruh akses informasi dan status sosial ekonomi terhadap *trust* berdimensi ekspektasi, pengaruh akses informasi dan status sosial ekonomi terhadap *Trust* berdimensi hubungan sosial, dan pengaruh akses informasi, status sosial ekonomi, sikap keberagamaan, dan *trust* terhadap kerjasama Antarumat Beragama.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan kerukunan umat beragama, khususnya mengenai pengaruh karakteristik individu, status sosial ekonomi, sikap keberagamaan dan tingkat kepercayaan (*trust*) seseorang terhadap kerjasama antarumat beragama. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut tentang kerjasama antarumat beragama. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pimpinan Departemen Agama, khususnya Pusat Kerukunan Umat Beragama dan Puslitbang Kehidupan Keagamaan dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama, khususnya dalam meningkatkan kerjasama antarumat beragama.

## **Deskripsi Teoritis**

### **1. Tingkat Kerjasama**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan

bersama. Kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial yang didalamnya terdapat persekutuan antara orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat juga terjadi karena orientasi individu terhadap kelompoknya sendiri atau kelompok lain.<sup>3</sup> Menurut C.H. Cooley, kerjasama akan timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian diri sendiri untuk memenuhi kepentingan itu.<sup>4</sup>

Dalam masyarakat yang plural dari segi identitas agama, maka kerjasama, seperti halnya konflik, menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. *Kerjasama sehari-hari* terjadi dalam bentuk interaksi yang sederhana dan rutin antar anggota kedua kelompok. Kerjasama ini terjadi dalam bentuk kunjungan antar tetangga, makan bersama, pesta bersama, mengizinkan anak-anak untuk bermain, saling membantu antar tetangga dan lain-lain. Sementara *kerjasama asosiasional* terjadi dalam kelompok-kelompok yang lebih terorganisir seperti asosiasi bisnis, organisasi profesional, perkumpulan olah raga, atau perkumpulan antar anggota partai politik tertentu. Seiring dengan dinamika masyarakat, Varshney mengindikasikan bahwa pada masyarakat modern atau masyarakat perkotaan, kerjasama sehari-hari semakin sulit dilakukan. Oleh karena itu, kerjasama asosiasional menjadi pilihan untuk lebih mendekatkan hubungan antar kelompok masyarakat termasuk antar agama.

Secara sosiologis, seseorang akan melakukan berbagai tindakan, termasuk tindakan dalam bentuk kerjasama, dengan mengarah kepada suatu tujuan tertentu, dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi). Dengan menganalogikan kepada teori ekonomi, Coleman (dalam Ritzer dan Goodman, 2003, 427)<sup>5</sup> seorang aktor hampir selalu berperilaku rasional dalam arti memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Melalui teori pilihan rasional (*rational choice theory*) Coleman melihat ada dua unsur utama dalam setiap pilihan tindakan manusia yaitu aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat di kontrol oleh aktor. Interaksi minimal antara dua aktor dan sumber daya pada akhirnya dapat membentuk sistem sosial.

## 2. Karakteristik Individu dan Status Sosial Ekonomi

Pemikiran Weber mengenai struktur sosial, atau lebih khususnya sistem stratifikasi sosial memiliki kesamaan dengan Marx. Hanya saja, Weber menambahkan aspek status dan *power* dalam menganalisis kelas sosial dalam struktur masyarakat, di samping faktor ekonomi yang disebutnya sebagai *privilege*. (Bendix dan Lipset, 1968:21-27). Kelompok status merupakan penggolongan individu dalam lapisan sosial berdasarkan penghormatan atau *prestise* (*prestige*), seperti yang dinyatakan dalam gaya hidup mereka. Sedangkan dimensi kekuasaan dicerminkan dari kesempatan seseorang untuk melakukan keinginannya dalam tindakan komunal. Dengan kata lain susunan lapisan sosial yang berdasarkan dimensi kekuasaan dipandang dari segi adanya kesempatan untuk memperoleh atau mewujudkan keinginan, yang tidak sama bagi setiap individu. Lebih lanjut, beberapa pendapat dan hasil penelitian mengkaitkan ketiga aspek struktural tersebut di atas, ternyata berhubungan secara signifikan dengan karakteristik individu anggota sistem sosial itu. Oleh sebab itu karakteristik individu dan status sosial ekonomi seseorang berpengaruh terhadap kerjasama.

## 3. Sikap Keberagamaan

Raimundo Panikkar (1994), sosiolog-teolog asal India, menggolongkan tiga macam sikap keberagamaan yaitu: (1) *Eksklusivisme* yaitu sikap cenderung memutlakkan kebenaran pendapatnya (dalam hal ini agamanya) sendiri, dengan meniadakan sama sekali akan kebenaran di luar agamanya. (2) *Inklusivisme* yaitu sikap cenderung menginterpretasikan kembali teks-teks keagamaan, sehingga interpretasi tersebut tidak hanya cocok tetapi juga dapat diterima. Tegasnya, ia meyakini agamanya yang paling benar, tetapi dalam waktu bersamaan ia mengakui agama-agama lain juga boleh jadi memiliki kebenaran, dan ia tidak memper-masalahkan adanya agama-agama lain tersebut. (3) *Paralelisme/pluralisme* yaitu sikap yang memandang agama sebagai sesuatu yang jauh dari sempurna, namun juga agama dipahami sebagai simbol dari jalan yang benar. Tegasnya, sikap ini memandang agama yang dipeluknya adalah benar dan agama lainnya juga memiliki kebenarannya masing-masing.<sup>6</sup>

Sementara itu, Komaruddin Hidayat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menyebut ada lima tipologi sikap keberagamaan,

yakni: eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme, eklektivisme, dan universalisme. Kelima tipologi ini tidak berarti masing-masing lepas dan terputus dari yang lain dan tidak pula permanen, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai sebuah kecenderungan menonjol, mengingat setiap agama maupun sikap keberagamaan senantiasa memiliki potensi untuk melahirkan kelima sikap di atas. Kelima sikap keberagamaan itu ialah: (1) *Eksklusivisme* yaitu sikap yang akan melahirkan pandangan bahwa ajaran yang paling benar hanyalah agama yang dipeluknya, sedangkan agama lain sesat dan wajib dikikis, atau pemeluknya dikonversi, sebab agama dan penganutnya terkutuk dalam pandangan Tuhan. (2) *Inklusivisme* yaitu sikap yang berpandangan bahwa di luar agama yang dipeluknya juga terdapat kebenaran, meskipun tidak seutuh atau sesempurna agama yang dianutnya. Di sini masih didapatkan toleransi teologis dan iman. (3) *Pluralisme* atau *Paralelisme*, sikap teologis *paralelisme* bisa terekspressi dalam macam-macam rumusan, misalnya: agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai kebenaran yang sama; agama-agama lain berbicara secara berbeda, tetapi merupakan kebenaran-kebenaran yang sama sah; atau, setiap agama mengekspresikan bagian penting sebuah kebenaran. (4) *Eklektivisme* yaitu sikap keberagamaan yang berusaha memilih dan mempertemukan berbagai segi ajaran agama yang dipandang baik dan cocok untuk dirinya sehingga format akhir dari sebuah agama menjadi semacam mozaik yang bersifat eklektik. (5) *Universalisme*. Sikap ini beranggapan bahwa pada dasarnya semua agama adalah satu dan sama. Hanya saja, karena faktor historis-antropologis, agama lalu tampil dalam format plural.<sup>7</sup>

Dari berbagai teori yang dikemukakan di atas dalam penelitian ini hanya digunakan dua saja sikap keberagamaan dari Raimundo Panikkar, yaitu sikap keberagamaan yang eksklusif dan sikap keberagamaan yang inklusif. Hal ini dengan pertimbangan bahwa sikap keberagamaan pluralisme atau paralelisme hampir sama dengan sikap keberagamaan yang inklusif.

#### 4. Tingkat Kepercayaan (*Trust*)

Konsep *trust* merujuk kepada pendapat Lawang (2005:45-61), yang mengemukakan inti kepercayaan ataupun rasa saling percaya antar manusia senyatanya terdiri dari tiga hal yang saling terkait yaitu

menyangkut hubungan sosial antara dua orang atau lebih. Selain itu kepercayaan mengandung adanya harapan menunjuk pada suatu yang akan terjadi di masa datang, dan hal ini berhubungan dengan sesuatu yang menjadi cita-cita untuk dicapai. Terakhir, inti rasa saling percaya itu adalah adanya tindakan sosial atau interaksi sosial sebagai buah dari rasa saling percaya. Dengan demikian maka tingkat kepercayaan yang dimaksudkan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang mengandung harapan yang menguntungkan salah satu atau kedua belah pihak melalui interaksi sosial.

Lebih lanjut dikemukakan, bahwa tingkat kepercayaan mengandung hubungan timbal balik. Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh Fukuyama (1995), bahwa sepanjang ada rasa saling percaya dalam perilaku hubungan kekerabatan maka akan terbangun prinsip-prinsip pertukaran atau resiprositas. Menurutnya, rasa percaya merupakan landasan bagi perilaku moral dimana kapital sosial dibangun. Sementara, membangun rasa saling percaya adalah suatu proses yang sejak awal sudah ada dalam suatu keluarga. Kemudian rasa percaya itu berkembang menjadi suatu landasan berperilaku dalam hubungan kekeluargaan yang akan memunculkan prinsip-prinsip resiprositas (Fukuyama, 1995). Lebih lanjut, rasa percaya akan memudahkan terbangun dan terjalinnya kerjasama.

### **Review Studi-Studi Terdahulu**

Studi tentang kerjasama antarumat umat beragama melalui pendekatan kuantitatif sejauh ini belum banyak dilakukan. Diantara sedikit penelitian yang pernah dilakukan antara lain bisa disebut Fu Xie, Asuthos Varshney, Tim dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan Kusumadewi.

Dalam rangka menyusun disertasinya, Fu Xie (2006) melakukan penelitian tentang Hubungan Antara Orang Kristen dan Islam dalam Masyarakat Sipil: Studi di Kota Sukabumi dan Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Variabel dependen dalam penelitian adalah: perilaku inklusif, sikap inklusif, dan *trust* terhadap orang dari agama lain. Sedangkan variabel independen dikelompokkan ke dalam tiga tingkat yaitu: (1) identitas dan interaksi sehari-hari yang termasuk dalam tingkat mikro, (2) interaksi asosiasional yang mewakili tingkat meso, dan (3) pengaruh negara (*state*) yang merupakan tingkat makro.

Temuan penelitian antara lain menyatakan bahwa: (1) Orang Kristen sebagai kelompok minoritas di kedua kota yang diteliti, lebih berperilaku inklusif dibandingkan dengan orang Islam. (2) di kota kecil (Sukabumi) semakin tinggi perilaku inklusif seseorang maka semakin tinggi sikap inklusif maupun tingkat *trust* terhadap agama lain; namun demikian hal itu tidak berlaku di kota besar seperti Bandung. (3) di kota besar, seorang yang aktif di organisasi non-agama akan mempunyai *trust* terhadap agama lain yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak. (4) di kota besar seperti Bandung anggota dari kelompok minoritas (seperti Kristen) akan kurang menonjolkan identitas kekristenannya dan lebih menonjolkan identitas yang lain. (5) di kota besar seperti Bandung seseorang yang memiliki identitas yang kuat akan lebih inklusif dibandingkan dengan yang lain. Namun hal ini tidak berlaku di kota kecil seperti Sukabumi. (6) Untuk orang Islam, semakin tinggi mobilitas seseorang maka semakin tinggi juga perilaku maupun sikap inklusifnya, namun hal ini tidaklah berlaku untuk orang Kristen.<sup>8</sup>

Lucia Ratih Kusumadewi (1999) dalam rangka penulisan skripsinya telah melakukan penelitian dengan judul: "*Sikap Toleransi Beragama di Kalangan Mahasiswa*". Dengan menggunakan metode kuantitatif, dan pengumpulan data melalui survey, Kusumadewi menyimpulkan bahwa mahasiswa yang termasuk kalangan terdidik memiliki kecenderungan sikap keberagamaan yang pluralis dalam arti menghargai kebenaran-kebenaran lain di luar kebenaran agamanya. Berbagai faktor turut mempengaruhi terjadinya kondisi ini antara lain faktor agama dan komunitas kampus. Agama merupakan faktor dominan yang memiliki andil besar dalam pembentukan sikap keberagamaan yang pada gilirannya sikap ini kemudian mempengaruhi terciptanya toleransi pada tingkat tertentu. Sedangkan faktor komunitas kampus disimpulkan tidak memiliki pengaruh yang signifikan.<sup>9</sup>

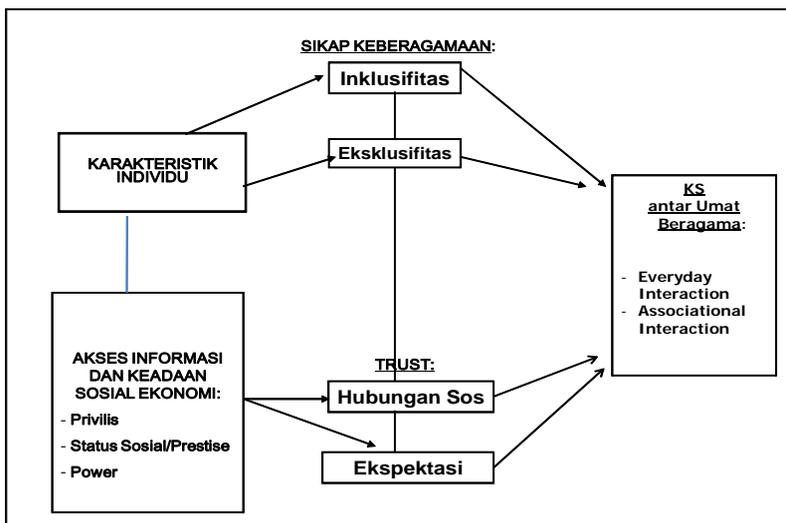
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, melalui Direktorat Agama dan Pendidikan, Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, melakukan Kajian dengan judul: "*Peran Lembaga Sosial Keagamaan dalam Pengembangan Wawasan Multikulturalisme*". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab sejumlah pertanyaan penting tentang Pemikiran, Sikap, dan Prilaku Elit Keagamaan yang Mewakili Lembaga Sosial Keagamaan Menyangkut Isu-Isu Sekitar Multikulturalisme. Multikulturalisme

dirumuskan ke dalam sejumlah konsep operasional, yakni toleransi, demokrasi, pendidikan, kesetaraan gender dan sejumlah isu penting lainnya. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa tingkat toleransi warga masyarakat sudah tergolong tinggi dan sangat kondusif untuk terciptanya kerukunan.<sup>10</sup>

Studi di luar negeri yang patut dicermati telah dilakukan oleh Ashutosh Varshney di India terhadap hubungan yang terjadi antara orang Hindu dan Islam. Penelitian yang dilakukan di 68 kota di India, kemudian mengkaji pengaruh dari interaksi sehari-hari (*everyday interaction*) dan interaksi asosiasional (*associational interaction*) dalam masyarakat sipil (*civil society*). Melalui survey, studi dokumen, dan wawancara mendalam, Varshney menunjukkan bahwa pada masyarakat perkotaan interaksi asosiasional lebih efektif dibandingkan dengan interaksi sehari-hari.

### Kerangka Berpikir

Faktor-faktor yang ditengarai mempengaruhi seseorang bersedia atau tidak bersedia untuk melakukan kerjasama adalah karakteristik individu, status sosial ekonomi, sikap keberagamaan dan tingkat kepercayaan/trust terhadap umat beragama lain. Kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

## Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan antara karakteristik Individu dengan sikap keberagamaan,
2. Terdapat hubungan antara karakteristik Individu dengan tingkat kepercayaan (*trust*)
3. Terdapat pengaruh akses informasi dan status sosial ekonomi terhadap eksklusivitas
4. Terdapat pengaruh akses informasi dan status sosial ekonomi terhadap inklusivitas
5. Terdapat pengaruh akses informasi dan status sosial ekonomi terhadap *trust* berdimensi ekspektasi
6. Terdapat pengaruh akses informasi dan status sosial ekonomi terhadap *trust* berdimensi hubungan sosial
7. Terdapat pengaruh akses informasi, status sosial ekonomi, sikap keberagamaan, dan *trust* terhadap kerjasama antarumat beragama

## Metode Penelitian

Penelitian ini berpegang kepada asumsi ontologis bahwa realitas sosial yang diteliti dipandang tunggal yakni memfokuskan topik penelitian kepada kerjasama antarumat beragama. Sementara secara epistemologi, penelitian ini memandang subyek dan realitas sosial yang diteliti secara obyektif dengan menggunakan metode kuantitatif dan didekati dengan melakukan survai.

Penelitian ini dilaksanakan di 6 lokasi, yaitu Medan, Sumatera Utara; Palu, Sulawesi Tengah; Bandung, Jawa Barat; Semarang, Jawa Tengah; Bandar Lampung, Lampung; dan Singkawang, Kalimantan Barat. Pemilihan 6 lokasi ini dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut pernah terjadi konflik ( Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah) dan daerah yang belum pernah terjadi konflik, selain itu juga didasari pertimbangan bahwa daerah tersebut memiliki komposisi jumlah penganut agama yang beragam, sehingga dimungkinkan terjadi interaksi dan kerjasama antarumat beragama.

Populasi penelitian ini adalah anggota masyarakat berbeda agama di enam provinsi terpilih secara purposive, yang selanjutnya dari enam propinsi itu dipilih masing-masing satu kabupaten atau kota yang memiliki

heterogenitas agama yang tinggi. Jumlah sampel ditetapkan sebanyak 330 orang, dengan perincian setiap lokasi sebanyak 55 orang responden, yang terdiri dari penganut agama berbeda. Dari 330 orang responden, kuesioner, *missing* 2 kuesioner sehingga yang kembali berjumlah 328 orang. Dari 328 kuesioner ada 9 kuesioner yang kurang lengkap, sehingga kuesioner yang dianalisis berjumlah 319 kuesioner. Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan komposisi jumlah pemeluk agama di tingkat kecamatan, dengan proporsi jumlah pemeluk agama kelompok mayoritas sebesar 50% - 70% dan sisanya dari kelompok agama lainnya. Penentuan sampel penelitian ini dilakukan secara proporsional random sampling. Proporsi sampel didasarkan atas komposisi jumlah pemeluk agama di masing-masing lokasi penelitian. Jumlah responden sebagian besar pemeluk agama Islam, sedangkan lainnya dengan jumlah yang relatif kecil berasal dari penganut agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Hal ini memungkinkan munculnya kelemahan dalam pengambilan generalisasi.

### **Instrumen Penelitian**

1. Definisi Konseptual Variabel Kerjasama Antar Umat Beragama, Karakteristik Individu, Status Sosial Ekonomi, Sikap Keberagamaan, dan Tingkat Kepercayaan (*trust*).

Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, adalah kegiatan bersama di antara umat yang berbeda agama, dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan terkait dengan agama. Umat beragama diartikan sebagai kelompok masyarakat yang memeluk suatu agama.

*Trust* berbeda dengan percaya (*believe*). Seorang percaya kepada orang lain karena orang itu sudah membuktikan diri di masa lampau dan *believer* sudah mengetahuinya dengan pasti. Menaruh *trust* terhadap seseorang lebih dari sekedar percaya. *Truster* percaya kepada *trustee* walaupun ada ketidakpastian. *Trust* bukan mengacu pada masa lampau namun pada masa yang akan datang. *Truster* menaruh *trust* bahwa *trustee* akan bisa melakukannya pada masa yang akan datang. *Trust* selalu melibatkan unsur resiko.<sup>11</sup>

2. Definisi Operasional Variabel Kerjasama Antar Umat Beragama, Karakteristik Individu, Status Sosial Ekonomi, Sikap Keberagamaan, dan Tingkat Kepercayaan (*trust*.)

Definisi operasional masing-masing Variabel dan Indikator yang diukur seperti ditulis pada tabel berikut:

Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Indikator yang Diukur	Keterangan
<u>Karakteristik/ Ragam Ciri Individu:</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umur</li> <li>• Jenis Kelamin</li> <li>• Agama</li> <li>• Suku Bangsa</li> <li>• Lama Pendidikan</li> <li>• Lama Tinggal</li> <li>• Jumlah organisasi yang diikuti</li> </ul>	Indikator yang digunakan adalah hasil dari beberapa studi dan dikembangkan berdasarkan pemikiran tim peneliti
Penguasaan informasi dan Keadaan Sosial Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses Informasi</li> <li>• Status Sosial/prestise</li> <li>• Power</li> <li>• Priviles</li> </ul>	Indikator yang digunakan merupakan hasil pengembangan dari tim peneliti
Sikap Keberagamaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inklusivitas</li> <li>• Eksklusivitas</li> </ul>	Dimodifikasi dari hasil studi Fu Xie
Rasa Saling Percaya (Trust)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan Sosial</li> <li>• Ekspektasi</li> </ul>	Indikator yang digunakan disarikan dari Vipriyanti dan hasil pengembangan pemikiran tim peneliti
Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interaksi sehari-hari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah relasi (orang) yang sudah dijalin</li> <li>• Jumlah teman dekat</li> <li>• Jenis atas ragam kerjasama</li> </ul> </li> <li>• Interaksi asosiasional: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keikutsertaan dalam berbagai organisasi</li> <li>• Partisipasi dalam organisasi (kehadiran dalam pertemuan dan jumlah pengeluaran untuk organisasi)</li> <li>• Jenis kegiatan bersama yang pernah diikuti</li> <li>• Motivasi atau Semangat bekerja sama dalam kelompok atau organisasi</li> <li>• Status dalam organisasi</li> <li>• Jumlah organisasi formal yang diketahui</li> <li>• Organisasi informal yang diketahui</li> </ul> </li> </ul>	Indikator yang digunakan disarikan dari Vipriyanti <sup>12)</sup> dan Varshney dan hasil pengembangan pemikiran peneliti

## Teknik Analisis Data

Deskripsi data hasil survai dilakukan melalui tabulasi data. Sementara untuk keperluan statistic inferensia digunakan antara lain teknik uji statistic seperti: t-test, korelasi (Pearson), One-way ANOVA, regresi linear berganda, yang dilanjutkan dengan melakukan analisis jalur (*path analysis*) sesuai dengan model hipotetik dari studi ini. Tahap pengolahan data dimulai dari editing, tabulasi, kompilasi, dan data entry yang memanfaatkan software Exel 2003 dan selanjutnya dianalisis dengan bantuan *software SPSS (Statistical Package for Sosial Sciences)*.

### 1. Data dan Instrumentasi

Data penelitian ini dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari kepala keluarga sebagai sampel. Jenis data yang dikumpulkan beragam dari data nominal untuk: agama; data interval untuk: kedudukan dalam organisasi keagamaan. Data rasio untuk usia, lama sekolah (tingkat pendidikan), dan jumlah pendapatan. Data sekunder dikumpulkan dari lembaga atau dinas instansi yang terkait dengan penelitian ini.

Instrumentasi merupakan upaya menyusun alat ukur atau menentukan parameter terhadap variabel yang diteliti. Instrumentasi yang berupa kuesioner dikembangkan melalui penentuan batasan operasional dari variabel, menetapkan indikator-indikator variabel, dan menentukan parameter dari setiap indikator variabel. Kuesioner yang telah disusun, sebelum digunakan untuk mengumpulkan data penelitian terlebih dulu diuji validitas dan reliabilitasnya.

### 2. Reliabilitas dan Validitas Instrumen Penelitian

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur didalam mengukur gejala yang sama. Sedangkan validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, maka kuesioner yang digunakan harus mengukur apa yang ingin diukur.

Uji reliabilitas instrument yang digunakan dalam peneltian ini dilakukan baik terhadap data uji coba (*pretest*) yang diujicobakan di Purwakarta, maupun terhadap data hasil survai lapangan. Tidak terdapat

perbedaan yang signifikan hasil uji reliabilitas instrument pendahuluan (*pretest*) yang dilakukan di Purwakarta, dengan data hasil survai. Secara umum hasil uji reliabilitas sudah memadai, meskipun untuk beberapa *variabel* mengandung item-item yang reliabilitasnya memiliki alpha Cronbach dibawah 0,6.

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan melihat Nilai Total *Alpha Cronbach*, yakni minimal 0,6. Selanjutnya setiap *variabel* ataupun indikator diuji item-item yang menjadi komponen kuesioner. Jika nilai total *alpha Cronbach* lebih besar dari 0,6 maka item-item tersebut dipertahakan dalam kuesioner, dengan catatan Cronbach's Alpha if Item Deleted bernilai lebih dari 0,756 (nilai alpha Cronbach hasil uji) sebagai ambang batas minimal dari nilai total, dan juga didasari dari hasil *Corrected Item-Total Correlation adalah berkorelasi positif* dalam uji reliabilitas. Berdasarkan uji realibiitas dan validitas yang dilakukan maka ternyata instrumen yang digunakan sangat valid untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.

## Hasil Penelitian

### A. Deskripsi Responden dan Data Penelitian

Uraian berikut merupakan gambaran atau profil responden dilihat dari jenis kelamin, agama, pekerjaan, umur, lama domisili, tingkat pendidikan, jumlah pengeluaran, suku, sikap keberagamaan, kepercayaan dan kerjasama responden. Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar responden terdiri dari laki-laki sebanyak 219 orang (68,7%) dan perempuan sebanyak 100 orang (31,3%). Responden laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan responden perempuan karena berdasarkan pertimbangan yang banyak mengadakan interaksi dengan orang lain di luar rumah adalah laki-laki.

Mayoritas responden beragama Islam yaitu sebanyak 182 orang (57,1%), Kristen sebanyak 55 orang (17,2%), Katolik sebanyak 28 orang (8,8%), Buddha sebanyak 28 orang (8,8%), Khonghucu 17 orang (5,3%) dan yang beragama Hindu berjumlah 9 orang (2,8%). Jumlah responden dari masing-masing agama berdasarkan proporsi jumlah pemeluk agama di wilayah tingkat kecamatan sasaran penelitian.

Dilihat dari aspek pekerjaan, mayoritas bekerja sebagai nelayan/petani/buruh, sebanyak 103 orang (32,3 %), bekerja yang dikelompokkan

dalam lain-lain (ibu RT, wiraswasta, tukang) sebanyak 99 orang (31%), bekerja sebagai PNS sebanyak 74 orang (23,2%), bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 36 orang (11,3%), bekerja sebagai pedagang besar/pengusaha 4 orang (1,3%) dan sebagai anggota TNI/Polri sebanyak 3 orang (9%). Data ini memang menggambarkan karakteristik penduduk Indonesia yang sebagian besar penduduknya sebagai petani dan nelayan.

Berdasarkan lama tinggal di tempatnya yang sekarang, diperoleh data sebagai berikut: responden yang lama tinggal 25 tahun keatas sebanyak 107 orang (32,6%), yang lama tinggal 0-9 tahun 93 orang (28,4%), yang lama tinggal 10-14 tahun 41 orang (12,5%), yang lama tinggal 15-19 tahun 39 orang (11,9%), yang lama tinggal 20-14 tahun 32 orang (9,8%) dan yang tidak tahu 16 orang (4,9%). Dari data ini terlihat bahwa mereka yang lama tinggal 0-9 tahun cukup banyak yaitu 93 orang (28,4%), mereka ini diperkirakan adalah para pendatang dari berbagai daerah.

Profil responden bila dilihat dari tingkat pendidikan diperoleh data sebagai berikut: mereka yang lama pendidikannya 16 tahun keatas berjumlah 88 orang (26,8%), 10-12 tahun 84 orang (25,6%), 13-15 tahun 56 orang (17,1%), 7-9 tahun 50 orang (15,2%), dan 0-6 tahun 37 orang (11,3%) dan yang tidak menjawab 13 orang (4%). Data ini menunjukkan tingkat pendidikan responden tergolong tinggi, dimana 43,9 % berpendidikan diatas sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), bahkan mereka yang berpendidikan S 1 mencapai 26,8%.

Sikap keberagaman responden yang dikaji dari aspek inklusivitas dan eksklusivitas responden di masing-masing provinsi menurut agama menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu signifikan, umumnya sikap keberagamannya sudah cukup baik meskipun terdapat perbedaan diantara masing-masing agama.

Tabel 2  
Sikap Keberagaman Responden

No.	Provinsi	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Rata-2
1	Sulteng	2.89	3.55	4.36	3.57	3.95	-	<b>3.66</b>
2	Kalbar	2.70	3.59	3.67	-	3.87	3.86	<b>3.54</b>
3	Jateng	2.94	3.62	4.00	3.76	3.67	3.90	<b>3.65</b>
4	Jabar	2.60	3.53	3.30	3.62	3.25	3.87	<b>3.36</b>
5	Lampung	2.72	3.93	3.95	3.64	3.73	-	<b>3.59</b>
6	Sumut	2.83	3.53	3.51	3.95	3.45	3.86	<b>3.52</b>
	<b>Rata-2</b>	<b>2.78</b>	<b>3.63</b>	<b>3.80</b>	<b>3.71</b>	<b>3.65</b>	<b>3.87</b>	<b>3.55</b>

Keterangan: Skor dalam rentang 1-5

Tingkat kepercayaan responden berdasarkan dimensi ekspektasi maupun hubungan sosial menurut agama di masing-masing provinsi, dapat dilihat pada tabel 12. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata tingkat kepercayaan, ternyata tingkat kepercayaan responden sudah cukup baik meskipun terdapat perbedaan untuk masing-masing agama. Lebih lanjut, terdapat data yang cukup menggembirakan bahwa di Sulteng yang diketahui relatif baru saja terguncang masalah konflik sosial, ternyata menunjukkan angka rata-rata tingkat kepercayaan yang tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya, meskipun secara umum rata-rata tingkat kepercayaan di seluruh provinsi lokasi penelitian memperlihatkan angka yang relatif tinggi (3,83) dari skala 1 – 5.

Tabel 3  
Tingkat Kepercayaan Responden

No.	Provinsi	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Rata-2
1	Sulteng	3.49	3.80	4.62	3.88	4.24	-	<b>4.01</b>
2	Kalbar	3.04	3.75	3.82		3.91	3.95	<b>3.69</b>
3	Jateng	3.27	4.08	4.24	4.06	4.29	3.82	<b>3.96</b>
4	Jabar	3.31	3.86	3.59	3.86	3.62	4.06	<b>3.72</b>
5	Lampung	3.35	4.19	4.15	3.97	3.61	-	<b>3.85</b>
6	Sumut	3.35	3.71	3.90	4.03	3.68	3.76	<b>3.74</b>
	<b>Rata-2</b>	<b>3.30</b>	<b>3.90</b>	<b>4.05</b>	<b>3.96</b>	<b>3.89</b>	<b>3.90</b>	<b>3.83</b>

Adapun tingkat kerjasama responden di masing-masing provinsi menurut agama yang dipeluknya, menunjukkan adanya kecenderungan bahwa di Sulteng relatif memiliki rata-rata tingkat kerja sama yang tinggi dibandingkan dengan responden di provinsi lainnya, dan yang terendah adalah di Jabar. Dilihat dari rata-rata, maka terlihat bahwa kerjasama responden di enam provinsi masih tergolong belum menggembirakan, karena masih berada ditingkat menengah.

Tabel 4  
Tingkat Kerjasama Responden

No.	Provinsi	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Rata-2
1	Sulteng	2.73	3.38	3.65	3.74	3.48		<b>3.40</b>
2	Kalbar	2.02	3.53	3.38		2.73	2.86	<b>2.90</b>
3	Jateng	2.28	2.73	3.12	3.78	2.41	2.96	<b>2.88</b>
4	Jabar	2.36	2.28	2.19	3.85	2.15	3.21	<b>2.67</b>
5	Lampung	2.31	3.44	3.11	2.63	2.46		<b>2.79</b>
6	Sumut	2.65	3.00	3.40	3.89	3.57	2.93	<b>3.24</b>
	<b>Rata-2</b>	<b>2.39</b>	<b>3.06</b>	<b>3.14</b>	<b>3.58</b>	<b>2.80</b>	<b>2.99</b>	<b>2.98</b>

## Pengujian Hipotesis.

### 1. Hubungan Karakteristik Individu dan Sikap Keberagamaan

Beberapa analisis statistik telah dilakukan untuk melihat adanya perbedaan pandangan antara laki-laki dan perempuan atau berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, lama domisili, dan umur terhadap kerjasama antarumat beragama diperoleh hasil bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, mereka yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi dan rendah, antara yang lama berdomisili dengan mereka yang sebentar, dan antara mereka yang berumur muda dengan mereka yang berumur tua, terhadap kerjasama antarumat beragama.

Mengenai agama dikaitkan dengan tingkat inklusivitas, berdasarkan uji statistik One-Way ANOVA didapatkan  $p\text{-value}$   $0,000 < \alpha 0,05$ , dengan demikian ada perbedaan tingkat inklusivitas antara agama tertentu dengan agama lainnya. Ketika agama dikaitkan dengan tingkat eksklusivitas, berdasarkan uji ANOVA diperoleh  $p\text{-value}$   $0,000 < \alpha 0,05$ . Hal ini berarti ada perbedaan tingkat eksklusivitas antara agama tertentu dengan lainnya.

### 2. Hubungan Karakteristik Individu dengan *Trust*

Melalui analisis statistik antara jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur, lama nya domisili dengan tingkat kepercayaan/*trust*, diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tingkat pendidikan yang rendah dengan yang tinggi, mereka yang berumur tua dengan mereka yang berumur muda, dan antara mereka yang lama berdomisili dengan mereka yang berdomisili tidak terlalu lama bila dikaitkan dengan tingkat kepercayaan/*trust*.

Bila dilihat dari sisi lamanya seseorang menetap ditempat tinggalnya sekarang dikaitkan dengan tingkat kepercayaan, berdasarkan analisis independent t-test (dua sampel) diperoleh hasil:  $p\text{-value}$   $0,233 > \alpha 0,05$ , hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan antara orang yang lama berdomisili dengan yang baru berdomisili dalam hal tingkat kepercayaan/*trust*, jadi lama domisili tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepercayaan/*trust*.

Bila dihubungkan antara lama pendidikan dengan tingkat kepercayaan, berdasarkan analisis statistik korelasi Pearson diperoleh  $p\text{-value}$   $=0,741 > \alpha 0,05$ , sehingga dapat diartikan tidak ada korelasi antara lama pendidikan dengan tingkat kepercayaan

Bila dilihat dari aspek agama dikaitkan dengan tingkat kepercayaan, berdasarkan analisis statistik test homogenitasnya menunjukkan hasil *p-value*  $0,377 >$  dari  $\alpha 0,05$  sehingga keenam populasi agama adalah identik dan dilanjutkan uji ANOVA yang juga didapatkan *p-value* signifikan ( $0,000 <$  dari  $\alpha 0,05$ , sehingga terdapat perbedaan antara agama tertentu dengan agama lainnya dalam hal tingkat kepercayaan/*trust*.

### 3. Hubungan Karakteristik Individu dengan Kerjasama Antarumat

Uji analisis statistik antara karakteristik individu dengan kerjasama diperoleh hasil sebagaimana diuraikan dibawah ini. Uji analisis statistik *independent t-test* (dua sampel) antara jenis kelamin dengan kerjasama antarumat beragama, diperoleh *p-value*  $0,052 >$  dari  $\alpha 0,05$ , data ini menunjukkan bahwa jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan tidak mempunyai pengaruh terhadap kerjasama antarumat beragama.

Mengenai umur bila dikaitkan dengan kerjasama antarumat beragama, berdasarkan analisis *independent t-test* (dua sampel) diperoleh hasil: *p-value*  $0,601 >$  dari  $\alpha 0,05$ , dengan demikian umur baik yang tua ataupun muda tidak mempunyai pengaruh terhadap kerjasama antarumat beragama. Tingkat pendidikan apabila dikaitkan dengan tingkat kerjasama, berdasarkan analisis *independent t-test* diperoleh hasil *p-value*  $=0,076 >$  dari  $\alpha 0,05$ , hal ini berarti tidak ada perbedaan yang nyata mengenai tingkat kerjasama antara pendidikan menengah atas dengan pendidikan rendah.

Bila dilihat korelasi antara umur dengan kerjasama antarumat beragama, berdasarkan analisis korelasi Pearson diperoleh hasil: *p-value*  $0,146 >$  dari  $\alpha 0,05$ , dengan demikian tidak ada hubungan antara umur dengan tingkat kerjasama antarumat beragama. Sementara nilai *p* (*r* Pearson)  $< 0,5$  yang artinya korelasinya lemah.

Sementara itu bila dikaitkan antara lama domisili dengan tingkat kerjasama, berdasarkan analisis statistik *independent t-test* (dua sampel) diperoleh hasil *p-value*  $0,019 <$  dari  $\alpha 0,05$ , hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kerjasama diantara mereka yang lama berdomisili dengan mereka yang baru berdomisili. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin lama seseorang berdomisili di suatu tempat maka akan semakin tinggi tingkat kerjasamanya.

Bila tingkat pendidikan dihubungkan dengan tingkat kerjasama, berdasarkan uji statistik korelasi Pearson diperoleh hasil  $p\text{-value}=0,021 < \text{dari } 0,05$ , sehingga dapat diartikan ada korelasi antara lama pendidikan dengan sikap keberagamaan, nilai  $r$  (r Pearson)  $< 0,5$  yang artinya korelasinya lemah. Nilai  $r$  adalah  $0,130$  yang berarti semakin tinggi tingkat pendidikan (lama pendidikan) semakin tinggi juga tingkat kerjasamanya.

Mengenai agama bila dikaitkan dengan tingkat kerjasama antarumat beragama, berdasarkan hasil uji ANOVA didapat  $p\text{-value}$  signifikan ( $0,000$ )  $< \text{dari } 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara agama tertentu dengan agama lainnya dalam hal tingkat kerjasama antarumat.

Suku merupakan salah satu karakteristik individu dalam penelitian ini. Apabila suku dikaitkan dengan tingkat kerjasama antarumat beragama, berdasarkan Uji ANOVA diperoleh  $p\text{-value}$  signifikan ( $0,000$ )  $< \text{dari } 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kerjasama antara suku tertentu dengan suku lainnya. Menurut hasil analisis Multiple Comparison dan juga homogenous test menunjukkan bahwa antara suku Jawa dan suku lainnya tidak ada perbedaan yang signifikan, tetapi memiliki perbedaan kerjasama dengan suku lainnya. Sementara suku Sunda dan Melayu tidak berbeda nyata dalam tingkat kerjasamanya, tetapi berbeda nyata dengan ketiga suku lainnya.

#### 4. Pengaruh Akses Informasi dan Status Sosial ekonomi thd Eksklusivitas

Eksklusivitas merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menganalisis sikap keberagamaan. Tingkat eksklusivitas itu sendiri, dipengaruhi beberapa faktor antara lain akses informasi dan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Dengan analisis regresi berganda (*multiple regression*) diperoleh output bahwa tingkat akses informasi dan keadaan sosial ekonomi tidak berpengaruh terhadap eksklusivitas. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien beta terstandarisasi (*Standardized Coefficients beta*) adalah sebesar  $0,055$  dengan notasi negative, atau berbanding terbalik. Dengan demikian untuk mengurangi sikap eksklusivitas dalam masyarakat perlu upaya-upaya peningkatan akses informasi, antara lain seperti yang dikemukakan dalam teorinya Nan Lin (2000) bahwa ketidak seimbangan (*inequality*) dalam mengakses informasi menyebabkan antara lain sikap eksklusivitas yang bermuara kepada kurangnya akses terhadap sumber-sumber daya sosial ekonomi. Berbeda dengan keadaan sosial ekonomi,

yang menunjukkan pengaruh linier, yakni semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang akan semakin tinggi juga tingkat eksklusifitasnya.

#### 5. Pengaruh Akses Informasi dan Status Sosial ekonomi thd Inklusifitas

Melalui analisis regresi berganda (*multiple regression*) antara variabel dependen akses informasi dan variabel sosial ekonomi diketahui bahwa keduanya tidak berpengaruh terhadap tingkat inklusifitas. Oleh karena itu, hubungan pengaruh dalam model hipotetik harus dihilangkan. Hampir serupa dengan hasil analisis di atas, ternyata tingkat penguasaan informasi dan tingkat sosial ekonomi tidak mempengaruhi tingkat inklusifitas. Penguasaan informasi yang diukur dalam penelitian ini mencakup informasi yang tersaji melalui televisi, radio, serta media cetak lainnya. Informasi yang disajikan cenderung telah melalui proses seleksi ataupun kontrol dari lembaga terkait, baik lembaga formal maupun informal. Dengan demikian, tentunya pengaruh informasi dimaksud tidak akan signifikan. Kemungkinan akan berbeda jika perolehan informasi itu bersumber dari sumber tertentu yang lebih spesifik misalnya lembaga dakwah yang dilakukan oleh kelompok yang eksklusif.

**Tabel 5**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,073(a)	,005	-,001	,66889

a Predictors: (Constant), Tk\_SOSEK, TK\_AKSINF

**Tabel 6**  
**Coefficients (a)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	3,397	,216		15,725	,000
	TK_AKSINF	-,058	,046	-,075	-1,253	,211
	Tk_SOSIAL					
	EKONOMIO	,004	,044	,006	,094	,925

a Dependent Variabel: TK\_Inklusif

#### 6. Pengaruh Akses Informasi dan Status Sosial ekonomi Terhadap *Trust* Berdimensi Ekspektasi

Berdasarkan analisis hasil regresi terlihat bahwa kedua variabel independen yaitu tingkat sosial ekonomi dan akses informasi mampu menjelaskan tingkat kepercayaan yang berdimensi ekspektasi sebesar 2,70%. Adapun pengaruh masing-masing variabel menunjukkan bahwa tingkat aksesibilitas informasi tidak signifikan terhadap tingkat kepercayaan berdimensi ekspektasi. Sedangkan tingkat sosial ekonomi signifikan pengaruhnya terhadap tingkat kepercayaan berdimensi ekspektasi, dengan dominasi pengaruh sebesar 0,151 seperti yang tampak dari nilai koefisien beta terstandarisasi.

Temuan ini dapat dikaitkan dengan sikap rasionalitas masyarakat yang semakin berkembang. Motivasi individu menunjukkan kecenderungan bahwa pemupukan tingkat kepercayaan tentu sangat didasari oleh kepentingannya dalam memenuhi preferensinya. Oleh karena itu tingkat kepercayaan antar individu dalam masyarakat cenderung dipengaruhi ekspektasi atau harapannya. Fenomena ini selaras dengan pendapat Lawang (2005) yang mengemukakan bahwa tingkat sosial ekonomi berpengaruh terhadap ekspektasi seseorang kepada orang lain.

**Tabel 7**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,163(a)	,027	,020	,48467

a Predictors: (Constant), Tk\_SOSEK, TK\_AKSINF

**Tabel 8**  
**Coefficients (a)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	3,349	,157		21,396	,000
	TK_AKSINF	,017	,033	,030	,509	,611
	Tk_SOSIAL EKONOMIO	,081	,032	,151	2,561	,011

a Dependent Variable: Ekspektasi

## 7. Pengaruh Akses Informasi dan Status Sosial ekonomi Terhadap *Trust* Berdimensi Hubungan Sosial

Model regresi ini menunjukkan hasil bahwa variabel keadaan sosial ekonomi dan akses informasi hanya mampu menjelaskan tingkat hubungan sebesar 1,0% saja yakni sangat kecil. Dengan kata lain terdapat 99% variabel lain yang berpengaruh terhadap *trust* pada dimensi hubungan sosial selain dua variabel tingkat akses informasi dan keadaan sosial ekonomi. Hasil analisis regresi juga menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut tidak berpengaruh kepada tingkat kepercayaan berdimensi hubungan sosial. Temuan ini sesuai dengan pendapat Lawang (2005) dan Varshney (2002), yang mengemukakan bahwa tingkat kepercayaan berdimensi hubungan sosial lebih banyak tergantung pada aspek kekeluargaan, ketetanggaan, pertemanan dan kekerabatan. Artinya, tingkat akses informasi maupun tingkat sosial ekonomi dapat diabaikan dalam menjelaskan bagaimana memupuk ataupun menanamkan tingkat kepercayaan antar individu dalam masyarakat.

**Tabel 9**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,102(a)	,010	,004	,66631

a Predictors: (Constant), Tk\_SOSEK, TK\_AKSINF

**Tabel 10**  
**Coefficients (a)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	3,681	,215		17,106	,000
	TK_AKSINF	-,070	,046	-,090	-1,523	,129
	Tk_SOSIAL EKONOMIO	-,019	,044	-,026	-,443	,658

a Dependent Variable: HUB\_SOS

## 8. Pengaruh Akses Informasi, Status Sosial ekonomi, Sikap Keberagamaan, dan *Trust* Terhadap Kerjasama Antar Umat Beragama

Uji regresi model ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh independent variabel yakni keadaan sosial ekonomi, akses informasi, sikap keberagamaan, yang dilihat dari indikator inklusifitas dan eksklusifitas, tingkat kepercayaan (*trust*) dimensi hubungan sosial maupun kespektasi

terhadap variabel dependent yakni tingkat kerjasama didapatkan hasil uji sebagai berikut.

Tabel 11  
ANOVA (b)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	86,894	6	14,482	56,311	,000(a)
	Residual	80,242	312	,257		
	Total	167,136	318			

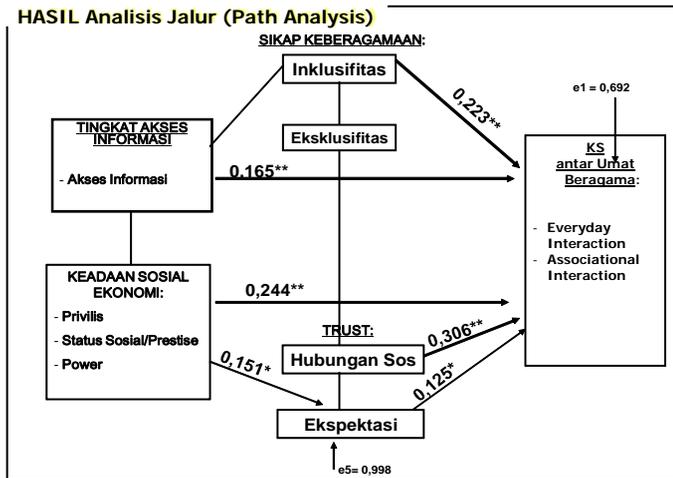
a Predictors: (Constant), HUB\_SOS, Tk\_SOSEK, TK\_AKSINF, Ekspektasi, TK\_eksklusifitas, TK\_Inklusif

b Dependent Variabel: TK\_KS\_AGM

9. Analisis Jalur (*Path Analysis*) Menganai Pengaruh Akses Informasi, Status Sosial ekonomi, Sikap Keberagamaan, dan *Trust* terhadap Kerjasama Antarumat Beragama

Berdasarkan model- model regresi di atas, maka hasil akhir dari analisis jalur (*path analysis*) adalah seperti berikut:

Gambar 3  
Hasil Analisis Jalur (*Path Analysis*)



Dari gambar hasil analisis jalur di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut. Inklusifitas memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kerjasama umat beragama sebesar 0,223 secara sangat signifikan (garis tebal dan \*\*). Dengan kata lain kerjasama antarumat beragama ditentukan

oleh sikap keberagamaan yang berdimensi inklusif. Sementara sikap keberagamaan eksklusivitas tidak berpengaruh terhadap kerjasama antarumat beragama. Oleh karena itu, dalam model di atas, tidak terdapat garis pengaruh dari eksklusivitas kepada *variabel* lain.

Lebih lanjut, akses informasi juga hanya memiliki pengaruh yang langsung saja secara sangat signifikan terhadap kerjasama. Dominasi pengaruhnya sebesar **0,165**, yang berarti lebih kecil jika dibandingkan dengan pengaruh inklusifitas, keadaan sosial ekonomi dan hubungan sosial. Adapun tingkat kepercayaan berdimensi hubungan sosial memiliki pengaruh terhadap kerjasama sebesar **0,306**. Pada model ini, variabel tersebut memiliki pengaruh langsung terbesar dibanding dengan variabel lainnya.

Kemudian, tingkat kepercayaan berdimensi ekspektasi memiliki pengaruh langsung terhadap kerjasama yang paling kecil dibanding variabel lain, yakni sebesar **0,125**. Variabel keadaan ekonomi menunjukkan pengaruh langsung secara sangat signifikan terhadap kerjasama sebesar 0,244; dan pengaruhnya terbesar setelah tingkat kepercayaan berdimensi hubungan sosial. Akan tetapi, variabel status sosial ekonomi ternyata merupakan satu-satunya variabel yang selain berpengaruh langsung juga berpengaruh tidak langsung melalui variabel tingkat kepercayaan berdimensi ekspektasi sebesar  $0,151 \times 0,125 = 0,019$ . Dengan demikian pengaruh total status sosial ekonomi terhadap tingkat kerjasama adalah  $0,244 + 0,019 = \mathbf{0,263}$ .

Tampak bahwa satu-satunya variabel yang memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung adalah status sosial ekonomi. Untuk mengetahui pengaruh indikator status sosial ekonomi terhadap kerjasama umat beragama dapat dijelaskan dengan uji regresi indikator tingkat *privileges*, *prestise* (status), dan indikator *power* seperti berikut. Hasil di bawah ini menjelaskan bawa sampel sangat signifikan dan identik untuk uji regresi, sementara persamaan regresi yang dihasilkan relative baik dengan  $R^2$  sebesar 0,125 yang berarti ketiga indikator status sosial ekonomi dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kerjasama sebesar 12,5%, dan sisanya dijelaskan variabel lain. Sedangkan dari hasil regresi didapat bahwa tingkat status sosial (*prestise*) tidak berpengaruh terhadap kerjasama, sementara *power* sangat signifikan pengaruhnya ( $p\text{-value}=0,000 < 0,01$ ) dengan dominasi pengaruh senilai 0,291. Pada sisi lain indikator *privileges* (lama

pendidikan dan pengeluaran) juga berpengaruh signifikan ( $p\text{-value}=0,001$ ) dan besarnya pengaruh adalah 0,177. Tingginya pengaruh status sosial ekonomi berdimensi power terhadap kerjasama antarumat beragama menunjukkan bahwa tingkat kekuasaan seseorang di masyarakat menentukan tingkat kerjasama. Pada tataran empiris ada kecenderungan bahwa *power* atau kepemimpinan, baik formal maupun informal, ternyata sangat mempengaruhi tingkat kerjasama.

### **Kesimpulan**

1. Profil responden adalah mayoritas laki-laki (68,7%), beragama Islam (57,1%), memiliki pekerjaan sebagai petani/buruh/nelayan dan PNS (55,5%), berumur 40 tahun ke atas (55,2%), lama berdomisili 15 tahun ke atas (44,5%), lama pendidikan 16 tahun ke atas dan 10-12 tahun ( $26,8 + 25,6 = 52,4\%$ ), jumlah pengeluaran dalam satu bulan di bawah satu juta (41,1%) dan berasal dari suku Jawa (40%).
2. Tidak ada perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, umur tua dan umur muda, dan pendidikan dalam hal sikap keberagamaan, tingkat kepercayaan dan kerjasama antarumat beragama.
3. Tidak ada perbedaan sikap keberagamaan dan tingkat kepercayaan antara lama dan tidaknya domisili, sedangkan terhadap kerjasama terdapat perbedaan antara mereka yang lama dan tidak lama berdomisili, semakin lama seseorang berdomisili semakin tinggi tingkat kerjasamanya.
4. Terdapat perbedaan antara pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama lainnya dalam hal sikap keberagamaan. Tetapi perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan karena pada umumnya semua pemeluk agama memiliki sikap keberagamaan yang cukup baik.
5. Terdapat perbedaan antara pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama lainnya dalam hal tingkat kepercayaan. Meskipun demikian umumnya semua pemeluk agama telah mempunyai tingkat kepercayaan yang cenderung positif.
6. Terdapat korelasi (hubungan) antara tingkat pendidikan dengan kerjasama antarumat beragama. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi tingkat kerjasamanya.

7. Berdasarkan uji regresi yang dilanjutkan dengan *path analysis*, dapat dikemukakan bahwa:
  - a. Inklusifitas memiliki pengaruh langsung (22,3%) terhadap tingkat kerjasama umat beragama secara signifikan.
  - b. Akses informasi memiliki pengaruh langsung (16,5%) secara sangat signifikan terhadap kerjasama.
  - c. Tingkat kepercayaan yang berdimensi hubungan sosial memiliki pengaruh terhadap kerjasama (30,6%), ini merupakan pengaruh langsung terbesar dalam model analisis.
  - d. Tingkat kepercayaan berdimensi ekspektasi memiliki pengaruh langsung terhadap kerjasama (12,5%), ini merupakan pengaruh langsung terkecil dalam model analisis.
  - e. Status sosial ekonomi seseorang menunjukkan pengaruh langsung secara signifikan terhadap kerjasama (24,4%). Di samping itu, variabel ini berpengaruh secara tidak langsung terhadap kerjasama melalui *trust* berdimensi ekspektasi sebesar 12,5% sehingga total pengaruhnya 26,3%.

Berdasarkan model-model regresi yang termasuk ke dalam model hipotetik antarvariabel penelitian, ternyata nilai R Square adalah 0,520. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang diteliti dalam studi ini mampu menjelaskan keragaman pengaruh sebesar 52%. Dengan demikian terdapat 48% variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap kerjasama.

### **Rekomendasi**

1. Berdasarkan hasil analisis di atas, perlunya dilakukan peningkatan inklusivitas keberagaman masyarakat, sebab diyakini dengan meningkatnya sikap inklusivitas masyarakat maka akan meningkat pula tingkat kerjasamanya. Oleh sebab itu diharapkan materi ajaran agama yang disampaikan kepada masyarakat merupakan ajaran agama yang bersifat inklusif atau memahami ajaran agama secara komprehensif.
2. Mengingat bahwa tingkat kepercayaan berdimensi hubungan sosial mempunyai pengaruh terbesar dalam hal kerjasama, maka pemerintah diharapkan menyediakan lebih banyak sarana dan prasarana sosial seperti tempat oleh raga, gedung kesenian, balai pertemuan yang

memungkinkan masyarakat berbeda agama dapat bertemu, berinteraksi dan berdialog sehingga dapat meningkatkan hubungan sosial diantara mereka.

3. Mengingat faktor sosial ekonomi mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kerjasama, maka meningkatnya ekonomi masyarakat sangat berpengaruh dalam meningkatkan kerjasama antarumat beragama. Pemerintah diharapkan memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan dan bantuan modal kepada masyarakat yang tingkat ekonominya tergolong rendah.
4. Mengingat tingkat pendidikan mempunyai korelasi terhadap kerjasama antarumat beragama, maka di daerah-daerah yang masih rendah tingkat pendidikannya, perlu ditingkatkan tingkat pendidikannya dengan mendirikan sekolah-sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dan menyediakan tenaga gurunya.
5. Mengingat terdapat sekitar 48% variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap tingkat kerjasama, maka diperlukan penelitian lebih lanjut dengan mengungkap variabel lain seperti antara lain variabel budaya dan variabel politik.

### Catatan Akhir

<sup>1</sup> Jajat Burhanudin, dkk, *Sistim Siaga Dini* (terhadap kerusuhan sosial), Badan Litbang Agama & PPIM-IAIN Jakarta, Jakarta, 2000.

<sup>2</sup> Rosita, S, Noer, *Kerusuhan Sosial, Masalah SARA, Hubungan, Struktur dan Jarak Sosial*, dalam Mursyid Ali (editor) *Konflik Sosial, Demokrasi dan Rekonsiliasi, Menurut Perspektif Agama-Agama*, Badan Litbang Agama, Jakarta, 2000, hal 1-2.

<sup>3</sup> Kimbal Young, *Social Cultures Processes*, dalam Setangkai Bunga Sosiologi, Oleh Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, Jakarta, Penerbit Fakultas Ekonomi UI, hal 206.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 207

<sup>5</sup> George Ritzer & Douglas J. Goodman, 2003, *Sociological Theory*, hal 427.

<sup>6</sup> Raimundo Panikkar, *Dialog Intra Relegius*, Yogyakarta, Kanisius, 1994, dalam Lucia Ratih Kusumadewi, *Sikap Dan Toleransi Beragama di Kalangan Mahasiswa: Studi di 3 Perguruan Tinggi di Jakarta*, Skripsi, FISIP-UI, 1969, hal 25

<sup>8</sup> Fu Xie, Hubungan Antara Orang Kristen dan Islam dalam Masyarakat Sipil; Studi di Kota Sukabumi dan Kota Bandung, Jakarta, Disertasi, Program Pascasarjana FISIP-UI, Tidak diterbitkan, 2006.

<sup>9</sup> Lucia Ratih Kusumadewi, Sikap Toleransi Beragama di Kalangan Mahasiswa: Studi di Tiga Perguruan Tinggi di Jakarta, Jakarta, Skripsi, FISIP-UI, Tidak diterbitkan, 1999.

<sup>10</sup> Direktorat Agama Dan Kependudukan, Deputi Bidang SDM Dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS, Kajian Peran Lembaga Sosial Keagamaan Dalam Pengembangan Wawasan Multikulturalisme, Jakarta, 18 Desember 2007.

<sup>11</sup> Fu Xie, *Hubungan Antara Orang Kristen dan Islam dalam Masyarakat Sipil (Studi di Kota Sukabumi dan Kota Bandung)*, disertasi, FISIP UI, 2006, hlm 48-49.

<sup>12</sup> Vipriyanti. N.U (2007). Studi Sosial Ekonomi Tentang Keterkaitan Antara Modal Sosial dan Pembangunan Wilayah: Disertasi Pascasarjana IPB.Bogor

### Daftar Pustaka

- Agresty, A and Finlay, B. *Statistical Methods for Social Sciences*. Dellen Publishing Company. San Fransisco. 1996.
- Asry, M. Yusuf, *Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Kehidupan Beragama dan Berbangsa di Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2001.
- Bappenas, Direktorat Agama dan Kependudukan, Deputi Bidang SDM Dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS, *Kajian Peran Lembaga Sosial Keagamaan Dalam Pengembangan Wawasan Multikulturalisme*, Jakarta, 18 Desember 2007.
- Bryman, A. *Social Research Methods. (Second Edition)*. Oxford University Press, Inc. New York. 2004.
- Burhanudin, Jajat. dkk, *Sistim Siaga Dini (Terhadap Kerusuhan Sosial)*, Badan Litbang Agama & PPIM-IAIN Jakarta, Jakarta, 2000.
- Creswell. J. W. 2003. *Research Design: Qualitatif, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publication. London. 2003.
- Direktorat Agama dan Pendidikan Deputi Bidang SDM Dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS, *Kajian Peran Lembaga Sosial Keagamaan Dalam Pengembangan Wawasan Multikulturalisme*”, Jakarta, 18 Desember 2007.

- Fu Xie, "Hubungan Antara Orang Kristen dan Islam dalam Masyarakat Sipil: Studi di Kota Sukabumi dan Kota Bandung", Jakarta, Disertasi, Program Pascasarjana FISIP UI, Tidak diterbitkan, 2006.
- Henslin. James M. *Essentials of Sociology: A Down to Earth Approach*. Alih Bahasa: Kamanto Sunarto. "Sosiologi dengan Pendekatan Membumi". Jakarta. Erlangga. 2007.
- Kimbal Young, Social Cultures Processes, dalam *Setangkai Bunga Sosiologi*, Oleh Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, Jakarta, Penerbit Fakultas Ekonomi UI
- Kusumadewi, Lucia Ratih. "Sikap Toleransi Beragama di Kalangan Mahasiswa": Studi di Tiga Perguruan Tinggi di Jakarta, Jakarta, Skripsi FISIP UI, 1999.
- Lin, N. 2000. *Inequality in Social Capital. Contemporary Sociology*. Washington: Nov 2000. Vol. 29 p: 785, 11 pgs
- Nee, Victor, "The New Institutionalisms in Economics and Sociology," in Smelser J. Neil and Richard Swedberg (eds), in *the Handbook of Economic Sociology*. Princeton University Press, 2005.
- Panikkar, Raimundo. "Dialog Intra Relegius, Yogyakarta", Kanisius, 1994, dalam Lucia Ratih Kusumadewi, *Sikap dan Toleransi Beragama di Kalangan Mahasiswa: Studi di Tiga Perguruan Tinggi di Jakarta*, Skripsi, FISIP UI, 1999.
- Rosita, S, Noer, "Kerusuhan Sosial, Masalah SARA, Hubungan, Struktur dan Jarak Sosial", dalam Mursyid Ali (editor) *Konflik Sosial, Demokrasi dan Rekonsiliasi, Menurut Perspektif Agama-Agama*, Badan Litbang Agama, Jakarta, 2000.
- Vipriyanti, *Studi Sosial Ekonomi Tentang Keterkaitan Antara Modal Sosial dan Pembangunan Wilayah*: Disertasi Pascasarjana IPB. Bogor, 2007.

[www.wahidinstitute.org](http://www.wahidinstitute.org)

## Piagam Madinah dan Resolusi Konflik: Model Penataan Hubungan Antar Umat Beragama

Ridwan

Dosen pada  
STAIN Purwokerto

### **Abstract:**

*This study proves that Medina Charter has been a formula of legal-constitutional instrument for pursuing conflict resolution in Islam. The substance of Medina Charter describes the existence of a process of institutionalizing people awareness in putting a foundation for relationship of a heterogeneous community in the spirit of living together in peace (peace building community). As a heterogeneous community, Medina community was a multi-ethnic, multi-tribal and multi-religion community with different political, cultural and religious identities. One of the consequences of such heterogeneity was continuous clash and conflict among tribes existing in Medina/Yathrib community, especially the conflict of two largest tribes, Aus and Khazraj.*

*Medina Charter was a manifesto of a new awareness of Medina Community's in managing inter-faith relations in Medina to live together. In this position, Medina Charter can be used as a model for building inter-religious relations. This paper gives evidences that Medina Charter was a political experiment of the Messenger as a design of conflict resolution for making peace building community exist. Medina Charter, in the context of this paper, is not only placed as a textual source. It is also viewed as a historical fact of the Messenger's ability in learning Medina's local wisdom, so that he could take strategic roles in negotiating and compromising, especially in managing, inter-faith relations. The birth of Medina Charter was not a historical accident. Rather, it was a historical phenomenon designed and planned as a scenario for realizing Islamic preaching. Articles of Medina Charter drev on a process of a transformation from co-existence to pro-existence which is very useful for managing interfaith relationship in Indonesia.*

**Keywords:** *Medina Charter, conflict resolution, inter-faith relations*

## Latar Belakang

Islam hadir di tengah masyarakat yang tidak hampa budaya. Jazirah Arab sebagai tempat agama Islam mulai dikenalkan oleh Nabi Muhammad merupakan daerah dengan tingkat heterogenitas yang sangat kompleks baik dari sisi etnik, budaya, agama dengan berbagai sistem sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu kemajemukan (pluralisme) agama dan suku sudah lama ada, dan diakui eksistensinya. Dari sisi pluralitas agama, di Madinah misalnya, hidup dan berkembang tiga kelompok masyarakat yaitu Muslim, Yahudi dan Paganis.<sup>1</sup>

Dilihat dari sosiopolitik -sebelum kelahiran Nabi Muhammad- semenanjung Arab secara geografis dan cultural terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Arab Utara dan Arab Selatan. Masing-masing mempunyai struktur sosial dan politik yang berbeda. Masyarakat Arab Selatan menganut sistem kerajaan (*monarchy*). Sedangkan masyarakat Arab Utara menganut sistem kesukuan (*tribalism*). Karakter dominan kedua masyarakat Arab tersebut adalah adanya pembatasan kekuasaan seorang pemimpin. Kekuasaan raja bagian selatan dibatasi oleh sebuah *council of notables* yaitu sebuah dewan yang beranggota-kan tokoh-tokoh terkemuka. Sedangkan pemimpin wilayah Utara berada pada seorang kepala suku (*syaiikh*) yang kekuasaannya dibatasi oleh *council of elders* yaitu dewan yang beranggotakan para tokoh *sepuh* (tua) yang disebut dengan majelis.<sup>2</sup> Masing-masing anggota suku diikat oleh hubungan darah (*bloods ties*). Setiap individu haruslah mempunyai suku demi perlindungan dan keamanan mereka. Deskripsi situasi objektif masyarakat Arab pra Islam tersebut menandakan bahwa system social-politik Arab pra Islam belum terstruktur karena memang tidak adanya pusat kekuasaan (*centralized authority*).<sup>3</sup>

Kepindahan (hijrah) Nabi Muhammad dari Makkah ke Yatsrib (Madinah) menandai babak baru perjalanan karirnya sebagai Nabi dan Rasul sekaligus sebagai pemimpin politik.<sup>4</sup> Dengan prestise moral dan kecakapan politik yang beliau punyai, menjadikan komunitas Madinah tertarik pada sosok beliau yang merindukan sang arbitator untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan di Madinah.<sup>5</sup> Peran strategis Nabi Muhammad sebagai arbitator dan negoisator di kalangan masyarakat Madinah dibuktikan dengan disepakatinya sebuah perjanjian bersama yang disebut dengan Piagam Madinah atau Perjanjian Madinah.<sup>6</sup>

Dengan demikian posisi Piagam Madinah dapat disebut sebagai sebuah konstitusi sebuah Negara sekaligus sebagai resolusi konflik<sup>7</sup> untuk mengakhiri konflik dengan damai di antara anggota masyarakat Madinah. Piagam Madinah juga menjadi *starting point* bagi penataan hubungan antar umat beragama di Madinah untuk hidup berdampingan (*coexistence*) secara bermartabat yang sangat signifikan untuk dijadikan model dalam membangun hubungan antar umat beragama sekaligus hubungan inter umat beragama. Tulisan ini ingin membuktikan bahwa Piagam Madinah merupakan eksperimen politik Rasulullah sebagai desain resolusi konflik untuk mewujudkan *peace building community*. Piagam Madinah dalam konteks tulisan ini tidak sekedar diposisikan sebagai sumber tekstual, tetapi juga sebagai fakta histories kemampuan Rasulullah dalam membaca *local wisdom* masyarakat Madinah sehingga beliau mampu mengambil peran-peran strategis dalam melakukan negoisasi dan kompromi terutama dalam penataan hubungan antar umat beragama. Dengan analisa data *content analysis* dan hermeneutika, kajian terhadap Piagam Madinah difokuskan pada penggalian spirit dasar dari Piagam Madinah dengan mengungkap latarbelakang setting social politik realitas masyarakat Madinah dan mengurai relasi social politik antar suku di Madinah dihubungkan dengan peran-peran Nabi Muhammad dalam proses lahirnya.

### **Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi masalah pokok penelitian ini adalah apakah Piagam Madinah dapat disebut sebagai resolusi konflik di tengah konflik masyarakat Madinah yang multikultur?. Dari masalah pokok penelitian ini kemudian dapat dirinci menjadi beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana *setting* sosial politik masyarakat Madinah yang mengitari lahirnya Piagam Madinah?
2. Apa pesan penting dari substansi Piagam Madinah ?
3. Apakah Piagam Madinah dapat disebut sebagai resolusi konflik?
4. Bagaimana refleksi Piagam Madinah dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultur?

## Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah :

1. Untuk membuktikan bahwa Piagam Madinah adalah instrumen konstitusional untuk menciptakan masyarakat damai di tengah konflik sosial yang dipicu oleh sentimen etnik.
2. Untuk membuktikan bahwa Piagam Madinah bisa menjadi model bagi pencarian format resolusi konflik di tengah masyarakat multikultur terutama penataan hubungan antar ummat beragama.

## Kerangka Teoritis Konflik dan Integrasi Sosial

Watak dasar manusia (*human nature*) pada hakikatnya menginginkan harmoni dalam kehidupan. John Burton<sup>8</sup> misalnya, mengatakan bahwa konflik bukanlah watak manusia. Oleh karena itu menurutnya konflik lahir karena struktur social ekonomi yang melingkupi kehidupan manusia yang memicu lahirnya konflik terutama ketika kebutuhan dasar manusia yang ia perlukan tidak terpenuhi. Pola relasi yang tidakimbang dalam proses-proses social antar individu inilah yang kerap melahirkan gesekan kepentingan yang ujungnya lahir suasana *disharmoni* dalam wujud konflik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konflik akan ada sebagai bagian dari proses perubahan social yang lahir karena adanya heteroginitas kepentingan seperti kepentingan nilai-nilai keyakinan.<sup>9</sup> Konflik adalah polarisasi berbagai kepentingan atau keyakinan dari suatu kelompok yang tidak terwadahi aspirasinya secara terus menerus.<sup>10</sup>

Manusia hidup tidak lepas dari konflik, sehingga dapat dipastikan bahwa usia konflik seumur dengan peradaban manusia. Konflik terjadi disebabkan karena adanya perbedaan, persinggungan dan pergerakan. Sistem nilai, budaya, keyakinan cenderung mengelompokkan masyarakat dalam sekat-sekat kelompok yang bersifat kompetitif dan dominatif daripada hubungan yang bersifat kooperatif. Hubungan social yang bersifat dominatif pada akhirnya akan melahirkan hukum tradisional dan primitive yaitu siapa yang kuat itulah yang menang dan berkuasa serta dialah yang membuat hukum.<sup>11</sup>

Konflik atau pertentangan mempunyai hubungan erat dengan integrasi. Hubungan ini disebabkan karena proses integrasi sekaligus

merupakan suatu proses disorganisasi dan disintegrasi. Makin tinggi derajat konflik suatu kelompok maka makin kecil derajat integrasinya. Secara teoritis, solidaritas antar kelompok (*in group solidarity*) dan pertentangan dengan kelompok luar (*outgroup conflict*) terdapat hubungan yang saling pengaruh mempengaruhi.<sup>12</sup>

Salah satu teori yang berpengaruh dalam membaca konflik dan mendesain resolusi konflik adalah teori kebutuhan yang digagas oleh John Burton. Menurutnya, kebutuhan yang tidak terpenuhi merupakan sebab yang paling sering terjadi dan sangat serius dalam konflik. Resolusi tidak akan terjadi tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut.<sup>13</sup> Jika setiap pihak yang bertikai dapat mengetahui kebutuhannya masing-masing, mereka mungkin akan dapat melihat bahwa kebutuhan tersebut tidak perlu dicapai melalui konflik, namun bisa melalui cara lain dengan cara mempertemukan kebutuhan dari setiap pihak. Cara ini lebih dikenal dengan pendekatan *win win solution* (sama-sama menang)

Ada beberapa strategi yang biasa digunakan dalam menyelesaikan konflik. *Pertama*, strategi yang disebut dengan *contending* (bertanding) yaitu upaya untuk mencari penyelesaian konflik dengan cara bertarung. *Kedua*, strategi yang disebut *yielding* (mengalah) yaitu strategi dengan menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia kurang dari yang sebetulnya diinginkan. *Ketiga*, strategi yang disebut dengan *problem solving* yaitu mencari alternative yang memuaskan kedua belah pihak. *Keempat*, strategi yang disebut dengan *with drawing* (menarik diri) yaitu memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis. *Kelima*, strategi yang disebut dengan *inaction* (diam) strategi menghindari konflik dengan cara tidak melakukan apapun.<sup>14</sup>

Dialog merupakan pusat dari resolusi konflik dalam rangka membangun kepercayaan, pengertian dan hubungan kerja sama, atau berfokus pada pencarian kesepakatan yang digambarkan sebagai negosiasi. Sebuah negosiasi dapat berbentuk sebagai kondisi tawar menawar yang sulit, dimana para *protagonist* memanfaatkan kekuatannya untuk saling mengeruk keuntungan. Tujuan dasar dari resolusi konflik adalah mencari dan mengembangkan dasar yang umum demi mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, melalui proses kerjasama daripada persaingan.

Dalam proses negoisasi dalam konteks desain resolusi konflik, peran pihak ketiga sebagai negoisator / arbitrator / mediator menjadi sangat sentral sebagai penengah dan fasilitator sebuah gagasan kompromi diantara para pihak yang terlibat konflik. Sosok negoisator merupakan pihak yang dipercaya oleh pihak-pihak yang konflik. Tujuan pokok mediasi adalah menemukan solusi praktis dalam menyelesaikan masalah.<sup>15</sup>

Secara teoritik, resolusi konflik dilakukan dengan menggunakan empat tahap yang dilakukan secara berkesinambungan menjadi satu kesatuan yang koheren:<sup>16</sup> *Pertama*, Tahap Mencari De-eskalasi Konflik Tahap ini merupakan tahap penurunan ketegangan (*tension*) dari eskalasi konflik. *Kedua*, Tahap Intervensi Kemanusiaan dan Negoisasi Politik. Langkah intervensi kemanusiaan lebih pada upaya rehabilitasi social korban konflik diiringi dengan membuka ruang-ruang dialog untuk melakukan negoisasi politik diantara pihak yang terlibat konflik. *Ketiga*, *Problem Solving Approach*. tahapan ini lebih berorientasi social yang diarahkan pada penciptaan kondisi yang kondusif bagi pihak-pihak yang konflik untuk melakukan transformasi konflik ke arah resolusi. *Keempat*, *Peace-Building* tahap ini merupakan rangkaian dari tahapan transisi, rekonsiliasi dan tahap konsolidasi. Tahap ini memerlukan waktu lama karena memiliki orientasi struktural-kultural menuju perdamaian hakiki.

Dengan menggunakan kerangka teori di atas didukung dengan analisis hermeneutis kita dapat memahami apa dan mengapa Piagam Madinah lahir sebagai sebuah kesepakatan social. Kelahiran Piagam Madinah tidak pada waktu dan ruang yang kosong (*space and time*) sesuai dengan teori *continuity and change*. Dengan pendekatan kesejarahan (*historical approach*) Piagam Madinah lahir sebagai bagian dari tuntutan sejarahnya. Ketika Yatsrib didera krisis kepemimpinan yang melahirkan situasi penuh dengan konflik horizontal dengan multi kepentingan yang mengitarinya, penduduk kota Yatsrib (Madinah) merindukan seorang pemimpin yang mampu mengeluarkan mereka dari kubangan konflik yang tak berkesudahan. Nabi Muhammad tampil sebagai mediator yang mampu mengakomodir kepentingan berbagai kelompok komunitas yang ada di Madinah untuk membangun kesadaran kolektif sebagai kesadaran kritis mereka untuk menemukan *common platform* sebagai cita-cita bersama yang dituangkan dalam narasi teks 'konstitusi' yang disebut Piagam Madinah.

## Sosio-Religio Politik Masyarakat Madinah

Karakteristik khas masyarakat Yatsrib (Madinah) berbeda dengan masyarakat Makkah baik secara sosial, ekonomi, politik dan agama. Penduduk Madinah secara social dihuni oleh dua kelompok masyarakat (*emigrant*) yang berbeda asal usul dan tradisinya. Kelompok pertama mereka yang berasal dari Utara yaitu bangsa Yahudi. Sedangkan kelompok kedua mereka yang berasal dari Selatan yaitu masyarakat suku-suku Arab.<sup>17</sup> Dari sekian suku Arab yang ada di Madinah terdapat dua suku besar yaitu suku Aus dan Khazraj. Kedua kelompok masyarakat Madinah yaitu kelompok Yahudi dan suku Arab selalu bermusuhan. Namun demikian, di internal suku Arab sendiri terutama Aus dan Khazraj juga terlibat konflik yang terus menerus.<sup>18</sup> Kelompok Yahudi pada umumnya menguasai lahan-lahan perekebunan yang subur.<sup>19</sup>

Madinah merupakan sebuah komunitas majemuk dan multi etnik, suku dan agama dengan identitas politik, kultural dan identitas keagamaan. Konsekuensi dari heterogenitas tersebut adalah lahirnya gesekan dan konflik yang berkepanjangan antar suku yang ada dalam komunitas Madinah / Yatsrib terutama konflik antar dua suku besar yaitu Khazraj dan Aus. Hampir tidak mungkin sebuah masyarakat yang plural tak terlibat dan mengalami konflik. Konflik di sini memang tidak identik dengan kerusuhan dan pertikaian yang berkepanjangan.

Dalam kebudayaan Arab pra Islam, hubungan kesukuan diatur dengan semangat pembalasan secara adil sebagai solusi bagi kejahatan. Jika dilaksanakan secara berlebihan, keadaan ini terbukti lebih merugikan dibandingkan dengan manfaat bagi kesejahteraan umum. Hubungan antar suku di Arab diwarnai oleh pertikaian berdarah di mana langkah retributive selalu melebihi kadar sepatasnya. Tradisi mekanisme "*legal-punishment* "nyawa di balas nyawa" justeru menimbulkan eskalasi kekerasan dan korban nyawa yang jauh lebih dahsyat karena terjadinya kevakuman otoritas legal yang diakui secara bersama. Siklus yang tak berkesudahan dari kejahatan nyawa di balas nyawa adalah konteks sosial cultural turunya ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178. Ayat ini memberikan jalan damai dengan cara menganjurkan memberi maaf dengan memberi kompensasi materiil (*diyat*) dan ditinggalkannya balas dendam sebagai titik sentral mencegah kekerasan dengan solusi damai dengan prinsip keadilan. Secara jelas al-Qur'an menawarkan sebuah gagasan resolusi konflik menuju masyarakat yang damai.

Sebagaimana kota-kota lain dibelahan jazirah Arab, masyarakat Madinah tidak memiliki penguasa tunggal yang bisa menjamin ketentraman bersama. Posisi Yahudi di Madinah di hadapan suku Arab menjadi musuh, namun pada saat yang sama posisi Yahudi justru kadang menjadi penengah pada konflik yang terjadi antara suku Arab Aus dan Khazraj.<sup>20</sup> Kehidupan ekonomi Madinah banyak didominasi oleh masyarakat Yahudi khususnya di bidang pertanian. Mereka mempunyai kelebihan kemampuan dalam megolah tanaman. Relasi ekonomi Yahudi dan Arab sangat timpang. Kelompok yahudi menjadi superior sementara suku Arab di Madinah menjadi kelompok yang tersubordinasikan karena kekalahan dalam pengelolaan potensi sumber daya alam. Situasi inilah yang melahirkan kebencian orang Arab yang seringkali terjadi konflik antara Yahudi dan suku Arab. Orang Arab sangat merindukan seorang tokoh yang bisa membebaskan keterbelengguan mereka secara ekonomis dibawah tekanan dominasi Yahudi. Inilah yang menjadi salah satu faktor ketertarikan sebagian suku Arab Madinah terhadap Rasulullah yang kelak diharapkan menjadi pembebas dari kungkungan dominasi Yahudi, di samping mereka jenuh dengan konflik internal sesama suku Arab.<sup>21</sup>

Dari perspektif social politik, masyarakat Yatsrib (Madinah) masih menggunakan system kesukuan yang tidak diperintah oleh seorang raja sebagaimana layaknya sebuah Negara. Situasi inilah yang kemudian disebut '*jahiliyah*' (kebodohan) sebagaimana yang disifatkan Islam terhadap orang-orang Arab sebelum diutusnya Muhammad SAW.<sup>22</sup> Kebodohan yang tidak hanya berarti ketiadaan ilmu, namun karena tidak adanya kondisi yang mendukung dan menjadi prasyarat bagi tumbuhnya ilmu, khususnya ketiadaan ikatan dengan undang-undang atau aturan. Demikian juga tidak adanya pandangan menyeluruh yang menganggap kemaslahatan sebagai sesuatu yang berada di atas segala pertimbangan apapun.

Dengan memperhatikan beberapa data literature di atas maka jelaslah bahwa situasi objektif masyarakat Arab umumnya dan Madinah khususnya sebelum kedatangan Islam dalam situasi *anomaly* baik secara sosial, politik dan moral keagamaan. Oleh karena berbagai konflik atas nama identitas etnik dan agama menjadi proses yang terus menerus berlangsung tanpa ada harapan untuk mereka tampil sebagai masyarakat yang damai dan hidup berdampingan secara wajar dan bermartabat.

## Piagam Madinah sebagai Resolusi Konflik

Agenda penting yang pertama kali Nabi Muhammad lakukan setelah berada di tengah-tengah komunitas Madinah adalah membangun masjid Quba dan menata kehidupan social politik masyarakat kota itu yang bercorak mejemuk. Pembangunan masjid dimaksudkan sebagai tempat aktivitas ritual keagamaan dilaksanakan sekaligus sebagai media Nabi dan komunitas muslim untuk membicarakan masalah-maslah social, politik dan ekonomi. Sebagai kota yang heterogen, Madinah dihuni oleh tiga komunitas yang berbeda yaitu komunitas Muslim, Yahudi dan komunitas Paganis. Penataan internal ummat Islam yang dilakukan oleh Nabi adalah mempersatukan visi dan misi kehidupan keberagamaan kelompok Anzor dan Muhajirin dengan identitas kesatuan teologis. Setelah penataan internal selesai adalah dengan melakukan berbagai negoisasi politik untuk membuat bingkai kehidupan dalam kebersamaan sebagai komunitas Madinah secara umum khususnya dengan komunitas Yahudi dengan disepakatinya Piagam Madinah.

Hijrahnya *Nabî* Muhammad menandai tidak hanya perubahan dramatik dalam pertumbuhan jumlah ummat Islâm dan pembentukan masyarakat politik di Madinah, tetapi juga peralihan yang signifikan dalam materi pokok dan misi *Nabî*. Secara umum dapat disepakati bahwa periode Makkah, ajaran Islâm lebih banyak berbicara persoalan moral keagamaan dan tidak menyinggung persoalan hukum dan sosial politik secara luas. Persoalan hukum dan sosial politik banyak disinggung keika periode Madinah. Hal ini disebabkan karena pada periode Madinah al-Qur'ân dan as-Sunnah harus memberikan respon terhadap kebutuhan sosial politik yang konkrit di suatu komunitas.<sup>23</sup>

Dalam konteks negara Madinah ini, Nabî Muhammad sendiri memainkan peranan kunci dalam perkembangan komunitas muslim. Di samping beliau seorang pemimpin keagamaan, tetapi beliau juga *coordinator* utama persoalan-persoalan politik dan *administrative* dan komandan militer. Semua dimensi kehidupan Nabî adalah subyek dari pesan wahyu Allah. Nabî telah menunjukkan ketundukan yang kuat terhadap wahyu, namun pada saat yang sama, beliau sangat fleksibel dalam menghadapi persoalan-persoalan baru. Kemampuannya untuk dapat menyesuaikan secara tepat adalah faktor pemersatu bagi komunitas muslim.<sup>24</sup> Realitas sosial Madinah yang penuh dengan konflik secara politis

sangat menguntungkan posisi Nabi Muhammad untuk melakukan gerakan politik (*dakwah al-siyasy*) dan mengambil peran dalam proses rekonsiliasi di antara masyarakat Yatsrib.

Rivalitas suku Arab Aus dan Khazraj dalam konteks perebutan ruang dominasi antara keduanya membuat mereka masing-masing membuat skenario berebut untuk berinisiatif menemui Nabi Muhammad dalam rangka masuk Islam dan memperoleh legitimasi yang kuat dan ini mereka butuhkan sebagai bagian cara meningkatkan dominasinya. Langkah konkrit yang mereka lakukan adalah dengan membangun komitmen dengan Nabi Muhammad. Dukungan orang Madinah terhadap Rasulullah dituangkan dalam sebuah pernyataan kesetiaan pada Rasulullah yang kemudian peristiwa sejarah ini dikenal dengan *bai'at aqabah*. Peristiwa ini terjadi dua kali yaitu terjadi pada tahun 621 dan 622 H yang kemudian disebut *bai'at aqabah I* dan II.<sup>25</sup> *Bai'at*<sup>26</sup> *aqabah* merupakan “persekutuan politik” dan bagi Nabi merupakan investasi politik yang luar biasa dalam konteks pembumian Islam.

Implikasi dari *bai'at* adalah proteksi dan kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam tradisi suku Arab, proteksi menjadi suatu hal yang penting untuk sebuah jaminan perlindungan di tengah system kesukuan yang saling berebut dominasi dengan parameter kekuatan. Dari sini jelas bahwa lahirnya Piagam Madinah bukanlah kecelakan sejarah (*historical accidence*) tetapi perjalanan sejarah yang sudah direncanakan/ didesain sebagai sebuah skenario untuk membumikan dakwah Islamiyah. Sebagai sebuah kontrak sosial, Piagam Madinah menggambarkan semangat kebersamaan, toleransi antar umat agama dan dialog dengan prinsip kesetaraan. Piagam Madinah secara keseluruhan memuat 47 pasal.<sup>27</sup>

Dilihat dari sisi kandungan makna yang menjadi pesan dasar dari butir-butir Piagam Madinah, maka ia mengandung beberapa anasir yang tercermin dari pasal-pasal yang merupakan sebuah gugusan norma dasar dari institusi sosial politik yang berkeadaban sebagai berikut.<sup>28</sup>

No	Nilai Sosial-Propetik	Pasal
1	Pembentukan Ummat	1
2	Hak Asasi Manusia (HAM)	2 - 10
3	Persatuan Seagama	11 - 15
4	Persatuan Segenap Warga Negara	16 - 23
5	Hak Golongan Minoritas	24 - 35
6	Tugas Warga Negara	36 - 38
7	Melindungi Negara	39 - 41
8	Pemimpin Negara	42 - 44
9	Politik Perdamaian	45 - 56
10	Penutup	47

Dari semua pasal yang termuat dalam Piagam Madinah yang berjumlah 47 pasal, menurut Munawwir Sjadzali prinsip dasarnya memuat dua hal pokok, yaitu: 1. Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku merupakan satu komunitas; dan 2. Hubungan antar sesama anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas lain didasarkan pada nilai-nilai, (a) bertetangga baik, (b) saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, (c) membela mereka yang teraniaya, (d) saling menasihati, dan (e) menghormati kebebasan beragama.<sup>29</sup>

Perjanjian ini merupakan upaya Nabi Muhammad melakukan pembaharuan secara cermat dan bijaksana terkait dengan berbagai konflik di Madinah. Tentang hal ini R.A Nicholson menyatakan:

“Tak seorangpun dapat mengkaji dokumen ini tanpa terkesan oleh kejeniusan politik penyusunnya. Perjanjian ini merupakan buah pikiran yang arif dan bijaksana sekaligus merupakan terobosan baru. Muhammad tidak secara terbuka menyerang kemandirian para suku yang ada, namun sesungguhnya beliau menghantamkannya dengan cara memindahkan pusat kekuasaan yang ada di kepala suku ke tangan masyarakat. Komunitas muslim adalah mitra aktif yang dalam waktu dekat akan mendominasi negara baru yang baru saja dibentuk”<sup>30</sup>

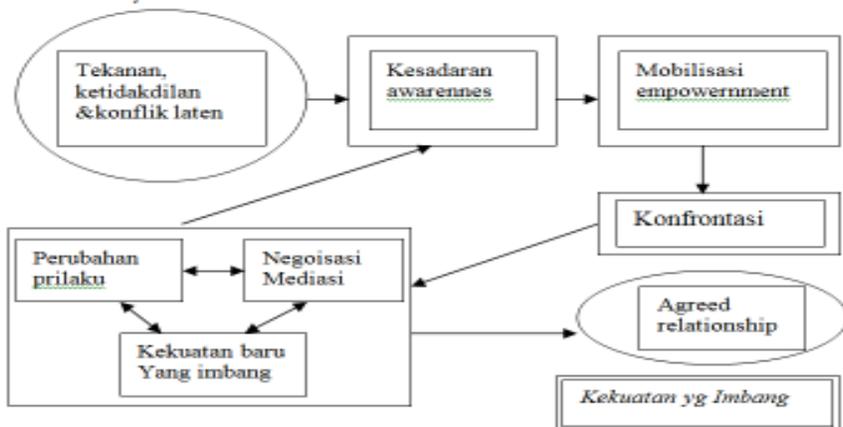
Perubahan struktur yang radikal dari Piagam Madinah adalah mengubah konfederasi kesukuan menjadi masyarakat baru yang dikendalikan oleh ajaran-ajaran moral dengan instrumentasi hukum yang

kelas. Ajaran Yahudi lebih memfokuskan pada ajaran hukum, sementara Nasrani hanya mendakwahkan persaudaraan spiritual saja. Dengan demikian, ajaran Islam dibangun diatas hukum dan moral secara beriringan. Dari sisi politik, Piagam Madinah menggambarkan sebuah doktrin politik religius (*politico-religious doctrine*) yang didasarkan pada persaudaran universal. Negara ideal Islam adalah komunitas iman atau ummah, tanpa memandang ras, atau pertimbangan geografis.<sup>31</sup>

Dari dokumen Piagam Madinah juga tercermin proses dialog system keyakinan dan tradisi setiap komunitas yang ada untuk membangun kesadaran kolektif melalui proses negoisasi dan kompromi yang melahirkan tatanan yang akomodatif. Lahirnya Piagam Madinah melahirkan perubahan yang fantastik terkait dengan posisi Nabi Muhammad dan ummat Islam pada umumnya. *Pertama*, komunitas Islam telah terbangun *sense of pride and rightteousness* (memiliki harga diri dan kebajikan sosial). *Kedua*, Posisi Muhamad semakin kokoh di samping sebagai Nabi dan Rasul beliu juga diakui sebagai pemimpin komunitas politik Madinah. *Ketiga*, pergeseran dan peneguhan posisi Nabi Muhammad sebagai pemimpin komunitas berakibat melekatnya hak-hak judicial untuk melakukan penataan otoritas politik dan hukum terutama bagi kaum muslimin yang terlibat sengketa.<sup>32</sup> *Ketiga* perubahan di atas secara sosial dan politik telah merubah peta kekuatan sosial politik ummat Islam dari *powerless* / tidak berdaya (ketika di Makkah) menjadi *powerfull* atau mempunyai kekuatan penuh.

Posisi Nabi sebagai negoisiator digambarkan sebagai berikut :<sup>33</sup>

*Unbalanced power*



Perubahan struktur yang radikal dari Piagam Madinah adalah mengubah konfederasi kesukuan menjadi masyarakat baru yang dikendalikan oleh ajaran-ajaran moral dengan instrumentasi hukum yang jelas. Ajaran agama Yahudi lebih memfokuskan pada ajaran hukum, sementara agama Nasrani hanya mendakwahkan persaudaraan spiritual saja. Dengan demikian, ajaran Islam dibangun di atas hukum dan moral secara beriringan. Dari sisi politik, Piagam Madinah menggambarkan sebuah doktrin politik religius (*politico-religious doctrine*) yang didasarkan pada persaudaraan universal. Negara ideal Islam adalah komunitas iman atau ummah, tanpa memandang ras, atau pertimbangan geografis.<sup>34</sup>

Melalui dialog, Islam memberi ruang dan kesempatan besar bagi terjadinya pencerahan umat karena nilai-nilainya selalu kontekstual, menyapa kehidupan sesuai karakter kehidupan yang sangat beragam. Dialog akan meletakkan umatnya kepada kondisi untuk selalu memahami kehidupan dan umat manusia secara utuh dan menyikapinya berdasar watak asalnya. Konsekuensinya, pluralisme dalam keberagamaan umat Islam menjadi kemestian untuk dikembangkan.

Dialog sebagai proses untuk menelanjangi diri sendiri, sekaligus upaya melihat orang, kelompok, atau subyek lain sebagaimana apa adanya akan mengantarkan umat Islam untuk memahami segala sesuatu yang ada di luar diri sendiri secara arif. Dengan demikian, hal itu akan menjauhkan mereka dari sikap untuk mereduksi keberadaan yang lain dalam kepentingan sempit mereka sendiri. Pada gilirannya hal itu akan menumbuhkan secara kokoh sikap menghormati subyek lain dalam bentuk perwujudan perilaku yang dapat membawa kebaikan dalam kehidupan.<sup>35</sup> Piagam Madinah telah mengganti ikatan kekeluargaan dan kesukuan yang individual menjadi ikatan persaudaraan. Piagam Madinah juga mengakui eksistensi Yahudi sebagai komunitas yang berdiri sendiri dan hidup berdampingan dengan ummat Islam.

Pluralisme keagamaan bagi syari'at Islam bukanlah sekedar masalah mengakomodasi berbagai klaim kebenaran agama dalam wilayah keimanan pribadi seseorang. Pluralisme religius secara inheren selalu merupakan masalah kebijakan publik dimana setiap pemerintahan Islam harus mengakui dan melindungi hak pemberian Tuhan kepada setiap pribadi untuk menentukan sendiri nasib spiritualnya tanpa paksaan.

Pengakuan terhadap kebebasan hati nurani dalam hal keimanan adalah titik utama konsep al-Qur'an mengenai pluralisme religius, pluralisme antar agama maupun intra agama.<sup>36</sup>

Beberapa diktum pasal dalam Piagam Madinah yang menggambarkan penghormatan atas hak beragama antara lain tercermin pada pasal 2 dan 25. Sedangkan pasal yang secara eksplisit menjelaskan hubungan yang koeksistensi secara sosial antara lain tergambar pada pasal 37.

Pasal 2. Kaum muslimin adalah ummat yang satu utuh, mereka hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain.

Pasal 25. Sebagai satu kelompok, Yahudi bani 'Auf hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Kedua belah pihak memiliki agama masing-masing. Demikian pula halnya dengan sekutu dan diri masing-masing. Bila diantara mereka ada yang melakukan aniaya dan dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri.

Pasal 37. Kaum Yahudi dan kaum muslimin membiayai pihaknya masing-masing. Kedua belah pihak akan membela satu dengan yang lain dalam menghadapi pihak yang memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui perjanjian piagam Madinah ini. Kedua belah pihak juga saling memberi saran dan nasihat dalam kebaikan tidak dalam perbuatan dosa.

Piagam Madinah merupakan salah satu bukti histories yang terdokumentasikan secara tekstual sebagai sumber normative sekaligus model aktual bagaimana masyarakat muslim mendesain pola hubungan antar ummat beragama. Melalui Piagam Madinah penataan hubungan antar agama dalam Islâm telah diberi tauladannya oleh Rasulullah setelah hijrah dari Makkah ke Madinah (*al-Madinah*, kota *par excellence*).<sup>37</sup> Dari nama yang dipilih oleh *Nabî* sebagai kota hijrahnya, menunjukkan rencana *Nabî* dalam rangka mengemban misi sucinya dari Tuhan, yaitu menciptakan masyarakat yang berbudaya tinggi, yang kemudian menghasilkan suatu entitas sosial politik sebuah negara. Negara Madinah<sup>38</sup> yang dipimpin oleh *Nabî* dalam model bagi hubungan antara agama dalam Islâm.<sup>39</sup> Sedangkan substansi dari Piagam Madinah menggambarkan adanya proses pelebagaan kesadaran masyarakat Madinah untuk meletakkan fondasi relasi masyarakat yang majemuk dengan spirit hidup berdampingan dan damai (*peace building community*).

## Piagam Madinah dan Refleksi Keberagaman di Indonesia

Fenomena pengkafiran (*takfir*) dan menilai sesat (*tadhliil*) oleh satu kelompok Islam kepada kelompok lain atau antara muslim dengan non muslim tentang klaim keselamatan akhirat di Indonesia seringkali terjadi dan menjadi realitas yang kadang ada di sekitar masyarakat yang seringkali melahirkan konflik yang bersifat fisik. Fakta ini menguatkan adanya pola pemahaman keislaman yang intoleran dan eksklusif yang mengancam budaya 'ukhuwwah' antar sesama warga bangsa atau sesama ummat Islam. Di samping itu juga banyak kasus konflik-konflik sosial yang dipicu oleh gesekan sosial karena perbedaan agama dan etnis.

Eksplorasi Gagasan dasar Piagam Madinah sebagai manipesto resolusi konflik sangat signifikan bagi perumusan model-model relasi sosial untuk komunitas yang secara sosial heterogen seperti Indonesia. Oleh karena itu kontribusi teoritik yang bersifat akademik dari penelitian ini adalah merumuskan konsep *peace building community* sebagai alternatif model dalam menciptakan tatanan hubungan keberagaman masyarakat yang beradab dan penuh dengan kedamaian di bumi Indonesia.

Pemahaman yang utuh dan komprehensif tentang Piagam Madinah sebagai konsep dan fakta sejarah dalam membangun penataan model keberagaman dalam komunitas yang majemuk sangat berguna bagi pengembangan masyarakat muslim yang inklusif yaitu masyarakat yang mampu menghargai dan menghormati pluralisme keagamaan. Pluralisme dimaknai sebagai sebuah keniscayaan sejarah atau bahkan pluralisme diposisikan sebagai karya Tuhan. Kesadaran masyarakat akan realitas pluralisme akan melahirkan cara penyikapan perbedaan secara arif dan tidak mudah memberikan stigma-stigma negatif dan mengedepankan *truth claim* ketika berhadapan dengan kelompok lain yang berbeda yang seringkali menyebabkan lahirnya gesekan-gesekan secara sosial.

Untuk memahami Piagam Madinah sebagai sebuah hasil dari ruang dialog antar komunitas agama yang menghasilkan pola relasi sosial yang *coexistence*, dapat dilihat dari teorinya Hans Kung tentang dialog yang mengarahkan situasi ko-eksistensi ke pro-eksistensi, yaitu:

1. Dialog dimaksudkan untuk memahami kepercayaan dan nilai-nilai ritus dan simbol-simbol orang lain atau sesama kita, maka kita akan dapat memahami orang lian secara sungguh-sungguh.

2. Dengan memahami kepercayaan orang lain, maka kita dapat memahami iman kita sendiri secara sungguh-sungguh, kekuatan dan kelemahan, segi-segi yang konstan dan yang berubah.
3. Dengan memahami kepercayaan orang lain, maka kita dapat menemukan dasar yang sama -meskipun terdapat perbedaannya-dapat menjadi landasan untuk hidup bersama di dunia ini secara damai.

Dengan dialog seperti ini maka tidak hanya akan melahirkan toleransi tetapi juga pengalaman transformatif bagi pihak-pihak yang terlibat. Tujuan dialog tidak hanya berhenti pada *ko-eksistensi*, melainkan *pro-eksistensi*, tidak hanya membiarkan orang itu ada, tetapi juga ikut mengadakanya secara aktif demi kebaikan bersama dan dengan cara belajar bersama. Butir-butir Piagam Madinah sangat menggambarkan proses transformatif dari *ko-eksistensi* menjadi *pro-eksistensi* yang sangat berguna bagi perumusan model penataan hubungan antarumat beragama di Indonesia.\*\*\*

### Catatan Akhir

<sup>1</sup> A. Syalabi, *al-Tarikh al-Islamy wa al-Khadharah al-Islamiyyah*, terj. Mukhtar Yahya (Jakarta: Pustaka al-Khusna, 1983), hal. 102-103. Lihat pula, Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), hal. 9-10.

<sup>2</sup> Penjelasan tentang setting sosio-kultur dan tradisi politik masyarakat Arab para Islam dapat dilihat pada beberapa buku, antara lain. Manoucher Paydar, *Aspects of the Islamic State: Religious Norm and Political Realities*, terj. Maufur el-Khoeri (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2003), hal. 2-3., lihat pula, A. Syalabi, *Al-Tarikh al-Islam.*, hal. 32-33.

<sup>3</sup> Erwin J. Roshenthal, *Political Thought an Mediavel Islam*, (Cambridge at The University Press, 1958), hal. 21. Lihat pula, Montgomery Watt, *Bells' Introduction to the Qur'an*, terj. Lilian D. Tedjasudhana (Jakarta: INIS, 1998), hal. 5-6.

<sup>4</sup> Dalam kaapistasnya sebagai pemimpin, Nabi Muhammad tidak saja sebagai pemimpin spiritual (imam shalat), tetapi juga memberi keputusan hukum sebagai hakim (qa>dhi), sebagai panglima perang sekaligus sebagai pemimpin politik dengan segala otoritas yang dimilikinya. Dengan demikian, maka sistem politik Islam awal adalah kesatuan religio-politik yang bersifat organis. Lihat, Donald Eugene Smith, *Religion and Political Development* (Canada: Little Brown and Company, 1970), hal. 266. lihat pula, *Al-Islam wa al-Dustur*, juz 1, hal. 66. Bandingkan dengan, Taufiq Abdul Aziz al-Sadiri, *Al-Islam wa al-Dustur*, (Riyadh: Wizara't al-Syu'u'n al-Islamiyah wa al-Auqa'f, 1425 H), hal. 66.

<sup>5</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984). Hal. 13.

<sup>6</sup> Ridwan, *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 50.

<sup>7</sup> Resolusi konflik adalah transformasi gagasan kognitif untuk menghindari/meminimalisir lahirnya konflik dan kekerasan diganti dengan perdamaian baik dengan pendekatan sosial maupun politik. Resolusi konflik merupakan suatu skenario mengatasi berbagai konflik social secara komprehensif yang berangkat dari akar masalahnya. Dalam rumusan lain Resolusi konflik merupakan usaha untuk merubah proses dominasi dengan proses yang bersifat kooperatif untuk mencari solusi inklusif yang memenangkan semua pihak yang terlibat konflik. Lebih Lanjut lihat, Hugh Miall, Oliver Rombos, Tom Tom woodhouse. *Contemporary Conflict Resolution*, (USA: Polity Press, 1999), hal. 22. Bandingkan dengan, Diana Francis, *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial* (Yogyakarta: Quilis, 2005), hal. 138.

<sup>8</sup> Adapun struktur kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal menurut John Burton ada dua yaitu Ontological need seperti kebutuhan rasa aman dan Subjective psychological need seperti kebutuhan pengakuan akan eksistensi hidup manusia. lebih lanjut lihat. Sedangkan teori kebutuhan manusia lain adalah pendapat Galtung yang menyatakan kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan bertahan hidup, kehormatan, identitas dan makna serta kebebasan. Hampir sama dengan Galtung, Manfred Max-Neef menyatakan bahwa kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan penghidupan, partisipasi, kebutua beristirahat, rekreasi, identitas dan kebebasan. Lihat, Nathalie Tacci, "Conflict Resolution in the European Neighbourhood: The Role the EU as a Framework and as an Actor", EUI Working Paper Uerpean University Institute, Italy, 2004, hal. 2-5. Bandingkan dengan, Diana Francis, *Teori Dasar Transformasi Konflik*. hal. 139-140.

<sup>9</sup> Hugh Miall, Oliver Rombos, Tom Tom woodhouse. *Contemporary Conflict Resolution*. hal. 5. Alo Liliweri mengajukan beberapa rumusan definisi konflik antara lain ia menyebutkan bahwa konflik adalah bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok, karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan., lebih lanjut lihat, Alo Liliweri, *Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Jogjakarta: LKiS, 2005), hal. 249.

<sup>10</sup> Jeffrey Z. Rubin, Dean G. Pruitt dan Sung Hee Kim, *Sosial Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement* (United States of America: McGraw-Hill, Inc, 1994), hal. 5.

<sup>11</sup> Diana Francis, *Teori Dasar Transformasi Konflik*. hal. 7-8.

<sup>12</sup> Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Binacipta, 1985), hal. 103-104.

<sup>13</sup> Diana Francis, *Teori Dasar Transformasi Konflik*. hal. 60.

<sup>14</sup> Jeffrey Z. Rubin, Dean G. Pruitt dan Sung Hee Kim, *Sosial Conflict.*, h. 4-7.

<sup>15</sup> Alef Theria Wasim (eds), *Harmoni Kehidupan Beragama: Problem, Praktik & Pendidikan* (Yogyakarta: Oasis Publisher, 2005), hal. 55.

<sup>16</sup> Andi Widjajanto, "Empat Tahap Resolusi Konflik; *tempointeraktif*, <http://www.tempointeraktif.com>. Kamis 17 Juni 2004, hal. 1-4.

<sup>17</sup> Kelompok yahudi Madinah berasal dari suku Bani Nadhir dan Bani Quraidhah. Sedangkan suku Arab yaitu suku Aus dan Khazraj berasal dari Yaman. Lihat, Asghar Ali Engineer, *Islamic State*, terj. Imam Muttaqin (Jogjakarta: LKiS, 200). hal. 31.

<sup>18</sup> A. Syalabi, *Al-Tarikh al-Islamy*. Hal. 103-104.

<sup>19</sup> Masyarakat Yahudi merupakan kelompok yang paling berkuasa di Madinah. Asal usul dan sejarah komunitas Yahudi Madinah belum jelas, ada yang berpendapat mereka adalah emigrant dari Palestina ada juga yang berpendapat bahwa mereka orang Arab asli yang pindah ke Madinah. Dalam catatan Montgomery Watt, komunitas Yahudi Madinah tidak kurang dari dari 59 suku, sedangkan komunitas Arab di Madinah ada 13 suku. Di antara suku Yahudi yang paling memainkan peranan penting adalah suku Yahudi Quraidhah, Nadzir dan Qainuqa. Lihat, William Montgomery Watt, *Muhammad at Madinah* (Oxford: Clarendon Press, 1956), hal. 192-193.

<sup>20</sup> Asghar Ali Engineer, *Islamic State*. hal. 31.

<sup>21</sup> M. Zuhri, *Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad Rasulullah*, (Jogjakarta: LESFI, 2004), hal. 30.

<sup>22</sup> Muhamad Abid al-Jabiri, *Al-Din wa al-Daulah wa al-Tathbiq al-Syari'ah*, (Bairut: Markaz al-Dirasat al-Wahdah al-Arabiyah, 1996), hal. 8.

<sup>23</sup> Abdullah Ahmed an-Naim, *Toward an Islâm Reformation, Civic Liberties, Human Right and International Law*, terj. A.Suaedi, *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islâm*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hal. 28.

<sup>24</sup> John Obet Voll, *Islâm Continuity and Change*, terj. Ajat Sudrajat, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press), hal. 30.

<sup>25</sup> Nama 'Aqabah diderivasi dari nama tempat di mana perjanjian itu terjadi. Bait al-aqabah I diikuti oleh 13 orang yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan satu orang perempuan yang bernama Afra' ibn Abidin ibn Tsa'bah. Oleh karena itu bait aqabah I dikenal dengan istilah perjanjian wanita. Sedangkan bait aqabah II diikuti oleh 73 orang Madinah. Pada bai'at aqabah I orang-orang Madinah berjanji tidak akan menyembah selain Allah, akan meninggalkan segala perbuatan jahat dan akan mentaati segala perintah Rasulullah dalam hal yang benar. Sedangkan pada bai'at aqabah II orang-orang Madinah berjanji akan melindungi Nabi sebagaimana mereka melindungi keluarganya, akan mentaati beliau sebagai pemimpin mereka. Nabi juga berjanji akan berjuang bersama mereka baik untuk berperang maupun untuk perdamaian. lihat J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), hal. 79.

<sup>26</sup> Kata Bai'at makna awalnya adalah melakukan barter yang mengandung arti membeli dan menjual sebagaimana dalam terminologi hukum Islam dikenal kata bay' yang berarti jual beli yang berdimensi kontraktual. Namun dalam

konteks politis, kata bai'at dipahami sebagai kesepakatan kontraktual antara yang berkuasa dan rakyatnya yang melahirkan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan bersama. Lebih lanjut lihat, Bernard Lewis, *The Political Language of Islam*, terj Ihsan Ali Fauzi (Jakarta: Gramedia, 1994), hal. 83.

<sup>27</sup> Dokumen perjanjian selengkapnya memuat 47 pasal. Lihat, Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), hal. 10-15. Lihat pula, Asghar Ali Engineer, *Islamic State*. hal. 32-33., lihat pula, Abu Ubaid, *Kitab al-Amwal*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1988) hal. 260-264. Lihat pula, Ibn Kastir, *al-Sirah al-Nabawiyah*, juz 2 hal. 231. Bandingkan dengan Ibn Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, juz 1, hal. 501.

<sup>28</sup> [http://wikisource.org/wiki/Piagam\\_Madinah](http://wikisource.org/wiki/Piagam_Madinah). Bandingkan pula dengan M. Dawam Raharjo, "Ensiklopedi al-Qur'an: Ummah" *Jurnal Ulumul Qur'an* Volume III. No. 1 TH. 1992, hal. 60

<sup>29</sup> Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*. hal. 15.

<sup>30</sup> Asghar Ali Engineer, *Islamic State*. hal. 34.

<sup>31</sup> Manoucher Paydar, *Aspects of the Islamic State*. hal. 41.

<sup>32</sup> Otoritas politik dan yudisial yang dimiliki Nabi sejak beliau diangkat sebagai pemimpin politik komunitas Madinah telah menggeser orientasi dakwah dari yang bersifat moral (ketika di Makkah) menjadi dakwah yang bersifat struktural dengan ditopang oleh inpra dan supra struktur kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi. Oleh karena itulah ayat-ayat Madaniyah banyak berbicara tentang pranta sosial baik hukum, ekonomi maupun politik.

<sup>33</sup> Hugh Miall, Oliver Rombos, Tom Tom woodhouse. *Contemporary Conflict Resolution*, (USA: Polity Press, 1999), hal. 17.

<sup>34</sup> Manoucher Paydar, *Aspects of the Islamic State*. hal. 41.

<sup>35</sup> Abd A'la, *Kompas*, 24 September 2003.

<sup>36</sup> Abdul Aziz Sachedina, *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*, terj. Satrio Wahono (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004) hal. 49-53.

<sup>37</sup> Madinah selain nama sebuah kota, yaitu Madinah al-Nabî dan Madinah al-Munawarah, ia juga merupakan cermin dari sebuah tatanan peradaban, karena kata Madinah yang juga jamaknya menjadi Madain berasal dari akar kata m-d-n yang artinya membangun, berdekatan dengan kata tamaddun yang berarti peradaban (civilization). Di samping itu kata m-d-n berdekatan dengan arti kata daana yang kata derivasinya adalah al-din yang berarti agama. Oleh Karena itu kota Madinah yang didirikan oleh Nabi adalah tatanan peradaban yang disinari oleh agama. Lebih lanjut, Dawam Raharjo, Ensiklopedia al-Qur'an: "Madinah", dalam *Jurnal Ulumul* No. 5 Vol. IV, Th 1993. hal. 25-29.

<sup>38</sup> Yang dimaksud dengan Negara Madinah adalah 'suatu Negara' yang didirikan oleh Nabi Muhammad berdasarkan perjanjian (bai'at) Aqabah I dan II. Wilayah Negara Madinah adalah seluruh kota Yatsrib yang kemudian berkembang selama masa pemerintahan Khulafa al-Rasyidin. Konstitusi negara Madinah adalah Piagam Madinah yang merupakan sumber hukum bagi pengaturan hak dan kewajiban warga Madinah. Lebih lanjut lihat, Muhammad

Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hal. 12.

<sup>39</sup> Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islâm dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hal. 589. Lihat pula Abdul Rashid Moten, *Political Science: an Islamic Perspective*. (London: Macmillan Press, 1996), hal. 29.

### Daftar Pustaka

- Abu Ubaid al-Qasim ibn al-Salam, *Kitab al-Anwal*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1988)
- Abdul Rashid Moten, *Political Science: an Islamic Perspective*. (London: Macmillan Press, 1996).
- A. Syalabi, *al-Tarikh al-Islamy wa al-Khadharah al-Islamiyyah*, terj. Mukhtar Yahya (Jakarta: Pustaka al-Khusna, 1983)
- Jeffrey Z. Rubin, Dean G. Pruitt dan Sung Hee Kim, *Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement* (United States of America: McGraw-Hill, Inc, 1994),
- Abdul Aziz Sachedina, *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*, terj. Satrio Wahono (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004)
- Abdullah Ahmed an-Naim, *Toward an Islâm Reformation, Civic Liberties, Human Right and International Law*, terj. A.Suaedi, Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan International dalam Islâm, (Yogyakarta: LKiS, 1994).
- Alo Liliweri, *Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Jogjakarta: LKiS, 2005)
- Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Binacipta, 1985)
- A.Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1993)
- Alef Theria Wasim (eds), *Harmoni Kehidupan Beragama: Problem, Praktik & Pendidikan* (Yogyakarta: Oasis Publisher, 2005)
- AKS Lambton, *Islâmic Political Thought*, dalam Schacht Joseph with C.E. Boswort, ed. *The Legacy of Islâmic*, (Oxford At The Clarendon, 1974).
- Andi Widjajanto, "Empat Tahap Resolusi Konflik:, *tempointeraktif*, <http://www.tempointeraktif.com>. Kamis 17 Juni 2004.
- Asghar Ali Engineer, *Islamic State*, terj. Imam Muttaqin (Jogjakarta: LKiS, 200)
- Bernard Lewis, *The Political Language of Islam*, terj Ihsan Ali Fauzi (Jakarta: Gramedia, 1994).
- Dawam Raharjo, *Ensiklopedia al-Qur'ân: "Madinah"*, dalam *Jurnal Ulumul* No.5 Vol. IV, Th 1993.
- Diana Francis, *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial* (Yogyakarta: Quilis, 2005)

- Erwin J. Roshenthal, *Political Thought an Mediavel Islam*, (Cambridge at The University Press, 1958).
- Djohan Effendi, "Kemusliman dan Kemajemukan Agama" dalam *Dialog: Kritik&Identitas Agama* Th. Sumartana dkk, (Jogjakarta: Dian/Interfidei, T.th)
- Glenn D. Paige, *Islam Tanpa Kekerasan*, (Jogjakarta: LKiS, 1998)
- Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984)
- Hugh Miall, Oliver Rombos, Tom Tom woodhouse. *Contemporary Conflict Resolution*, (USA: Polity Press, 1999)
- John Obert Voll, *Islâm Continuity and Change*, terj. Ajat Sudrajat, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press).
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Grafindo Persada, 1997)
- Manoucher Paydar, *Aspects of the Islamic State: Relegious Norm and Political Realities*, terj. Maufur el-Khoeri (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2003)
- Montgomery Watt, *Bells' Introduction to the Qur'an*, terj. Lilian D. Tedjasudhana (Jakarta: INIS, 1998)
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)
- M. Zuhri, *Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad Rasulullah*, (Jogjakarta: LESFI, 2004)
- Muhammad Abid al-Jabiri, *Al-Din wa al-Daulah wa al-Tathbiq al-Syari'ah*, (Bairut: Markaz al-Dirasat al-Wahdah al-Arabiyah, 1996)
- Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993).
- Mun'im A. Sirry (ed), *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2004)
- Nathalie Tacci, "Conflict Resolution in the European Neighbourhood: The Role the EU as a Framework and as an Actor", *EUI Working Paper Uerpean University Institute, Italy*, 2004.
- Ridwan, *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Taufiq Abdul Az al-Sadiri, *Al-Islam wa al-Dustur*, (Riyadh: Wizarat al-Syu'un al-Islamiyah wa al-Auqaf, 1425 H)
- William Montgomery Watt, *Muhammad at Madinah* (Oxford: Clarendon Press, 1956), hal. 192-193.
- Zainun Kamal, "Kebebasan Beragama dalam Islam", dalam Modul Fiqh Tasamuh: *Membangun Toleransi Berbasis Pesantren dan Masjid*, Zuhairi Misrawi dkk (eds) (Jakarta: P3M, 2007)

## Kerjasama Antar Umat Beragama dalam Wujud Kearifan Lokal di Kabupaten Poso

Haidlor Ali Ahmad

*Peneliti Puslitbang  
Kehidupan Keagamaan*

### **Abstract:**

*Each society has their own local wisdom so that they can live together in harmony. Some societal groups create harmony by establishing social norms, though far but peaceful. Meanwhile, there are social groups that create harmony by establishing intimacy in every aspects of life. Even though they have different religions, they can work together so that they enter the religious domain. The cooperation that triggers intimacy is the subject that the writer elaborates in the social life of Poso, which has experience prolonged conflicts before.*

*This research implements a qualitative approach with case study. It indicates that : (1) the highly intense and continuous Poso conflict contradicts the local wisdom named mosintuwu, which they should be able to interact without differentiating ethnicity and religion.; (2) The Poso riot a few years ago involved many people from regions outside Poso, because the people believes that "if Poso people were the only groups involved, the conflict wouldn't take that long"; and (3) The slow Law enforcement in Poso contributes to the prolonged conflict*

**Keywords:** *cooperation, local wisdom, Poso Conflict*

### **Latar Belakang**

Pada waktu Alamsyah Ratu Perwiranegara menjabat Menteri Agama, wadah kerukunan telah dibentuk dengan nama Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMA-UB) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 35 tanggal 30 Juni 1980. Wadah tersebut memiliki fungsi sebagai forum

konsultasi dan komunikasi antar pemimpin-pemimpin/pemuka- pemuka agama. Secara lebih rinci: a) Sebagai forum untuk membicarakan tanggung jawab bersama dan kerja sama antar warga negara yang menganut berbagai agama; b) Sebagai forum untuk membicarakan kerja sama dengan pemerintah.

Dalam kosideran Surat Keputusan Menteri Agama itu dijelaskan tujuan dari WMAUB itu ialah: untuk meningkatkan pembinaan kerukunan hidup di antara sesama umat beragama demi terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa.<sup>1</sup> Saat itu suasana ketegangan dan pertentangan dalam kehidupan beragama muncul kepermukaan, di antaranya adalah: kasus perusakan tempat-tempat ibadat, penyiaran agama kepada orang yang telah memeluk suatu agama, pendirian rumah ibadat, serta kompetisi yang tidak sehat, yang berakibat munculnya fenomena disintegrasi dan perselisihan di kalangan umat bergama, sekalipun tidak pernah terjadi benturan fisik. Keberadaan wadah tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap kerukunan hidup umat di antara sesama umat beragama, serta kesatuan dan persatuan bangsa saat itu telah dirasakan, walaupun disadari masih banyak persoalan yang belum dapat diselesaikan secara tuntas.

Pada waktu Tarmidzi Taher menjabat Menteri Agama –melalui Proyek Pembinaan Kerukunan Umat Beragama– dibentuk Lembaga Pengkajian Kerukunan Antar Umat Beragama (LPKUB) di Yogyakarta, Medan dan Ambon. Fungsi dan tujuan dibentuknya lembaga pengkajian ini tidak jauh berbeda dengan WMUB. Perbedaannya, LPKUB lebih menekankan pada pengkajian yang melibatkan cendekiawan-cendekiawan dari berbagai agama. Keduanya, baik LPKUB maupun WMAUB dibentuk dan dibiayai oleh pemerintah (*top-down*), dan lebih diperuntukan kalangan elit dan kurang menyentuh masyarakat bawah.

Setelah terjadi pergeseran kekuasaan, dengan runtuhnya rezim orde baru dan digantikan oleh orde reformasi – di satu sisi banyak terjadi konflik terbuka di berbagai daerah, seperti di Pontianak, Sampit, Ambon, Poso dan lain-lain. Namun di sisi lain juga timbul kesadaran dari bawah untuk menggali kearifan lokal yang mereka miliki yang dahulu pernah menjadi perekat yang “ampuh” bagi kerukunan hidup antar umat beragama maupun antar etnis; mereka ada juga yang membangun wadah

kerukunan atau melakukan rekacipta wadah kerukunan baru (*institutional development*)<sup>2</sup>. Masyarakat yang terlibat konflik, setelah mereka jenuh dengan konflik berkepanjangan, seperti masyarakat Ambon dan Poso, mereka mulai berupaya menggali atau menghidupkan kembali (revitalisasi) kearifan lokal yang pernah mereka miliki atau upaya untuk merekacipta (*institutional development*) kearifan lokal yang dahulu sangat “ampuh” namun belakangan kurang fungsional.

Tertarik dengan upaya-upaya revitalisasi kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat yang mengalami kejenuhan dengan konflik yang berkepanjangan, dalam kesempatan penelitian *Peranan FKUB dalam Pelaksanaan Pasal 8 dan 9 Tahun 2006* dengan sasaran FKUB Kabupaten Poso, peneliti memanfaatkan juga untuk mengumpulkan data kerja sama antar umat beragama dalam wujud kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat Poso.

### **Kerangka Pemikiran**

Secara normatif, semua agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, cinta kasih, perdamaian dan persaudaraan. Agama juga mengajarkan toleransi beragama, yang berarti tidak ada paksaan dalam beragama, sehingga setiap penganut suatu agama harus menghormati keyakinan dan kepercayaan penganut agama yang lain. Dalam teologi masing-masing agama yang berbeda-beda bahkan mungkin saling bertentangan yang diyakini sepenuhnya oleh masing-masing penganutnya harus pula dihormati. Penganut agama yang satu harus menghormati dan tidak boleh mencampuri urusan keyakinan teologis penganut agama yang lain, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian dalam kehidupan beragama ada domain keyakinan yang harus dibatasi dan dijaga serta saling dihormati dan ada pula domain hubungan sosial-kemasyarakatan, ekonomi dan politik yang harus dijalin. Pada domain kedua ini kemudian melahirkan bentuk-bentuk kerja sama antar penganut agama yang berbeda yang dalam perjalanan sejarahnya akan melahirkan harmoni kehidupan bersama dalam wujud budaya, atau yang lebih aplikatif berbentuk kearifan lokal.

Ada bermacam-macam corak kerja sama antar umat beragama di berbagai wilayah di Indonesia. Di daerah tertentu antar umat beragama ada yang dapat bekerja sama hingga masuk ke wilayah keagamaan yang

lebih dalam, misalnya dalam membangun rumah ibadat, kepanitiaan dalam peringatan hari besar, hingga melibatkan penganut agama lain, bahkan dalam ritual keagamaan, misalnya, shalat Ied dijaga umat Kristiani, atau sebaliknya ritual Natal dijaga oleh umat Muslim; Ada yang berbaur sebatas dalam pesta, meskipun meja makan untuk kalangan Muslim dibedakan dengan meja untuk kalangan Kristiani; Ada pula yang karena sangat hati-hatinya dalam kehidupan sehari-hari antara penganut agama yang berbeda-beda itu membuat batas-batas sosial untuk tidak terlalu akrab dalam bergaul. Batas-batas seperti itu diterapkan bagi semua anggota masyarakat dari sejak anak-anak hingga orang dewasa. Karena mereka sadar keyakinan dan ritual mereka berbeda, sehingga mereka khawatir jika terlalu akrab akan mengganggu dalam pertemanan. Mereka hanya menjalin hubungan dalam sosial-ekonomi. Sementara dalam hubungan politik dan budaya juga kurang.

Tipe interaksi sosial masyarakat yang terakhir peneliti kemukakan ini, peneliti temukan di Desa Gempolan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Namun masyarakat yang membuat batas-batas sosial sedemikian rupa ini justru dapat hidup harmonis. Di desa ini nyaris tidak pernah terjadi konflik antar penganut agama, kecuali ketika terjadi peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965. Bahkan pada awal digulirkannya reformasi, generasi muda Desa Gempolan bersatu padu (untuk sementara melupakan sekat-sekat agama dan variannya) melengserkan Lurah Po yang korup. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki kearifan masing-masing untuk dapat mewujudkan kehidupan bersama yang harmonis. Ada kelompok masyarakat yang menciptakan keharmonisan dengan membuat batas-batas sosial, tidak terlalu akrab tapi rukun. Kerja sama antar umat beragama hanya sebatas hal-hal yang profan,. Sebaliknya ada kelompok masyarakat yang dalam mewujudkan keharmonisan kehidupan bersama dengan menjalin keakraban dalam segala aspek kehidupan. Meskipun berbeda agama tapi mereka dapat bekerja sama hingga memasuki domain keagamaan.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep yang digunakan dan perlu dijelaskan. Konsep-konsep dimaksud antara lain:

Kerja sama (*co-operation*) ialah rangkaian interaksi atau jaringan interaksi untuk mencapai tujuan-tujuan umum, kemungkinan prestasi

bagi semua atau tak seorang pun dari partisipan. Terdapat beberapa term *co-operation*, dalam makalah ini yang lebih tepat adalah *direct co-operation* yaitu kerja sama yang menyangkut perwujudan aktivitas secara berdampingan, yang dapat dilakukan secara individual.<sup>3</sup>

*Revitalisasi* berasal dari bahasa Inggris, *revitalize* -kata kerja transitif- yang artinya (1) *put new life into*; (2) *restore vitality*. Kata bendanya *revitalization (US)*.<sup>4</sup> Dalam konteks penelitian ini yang lebih tepat adalah definisi menurut Wallace, A.F.C. yang mengatakan *revitalization* adalah peningkatan melalui suatu pergerakan kultur yang lebih memuaskan dengan menerima secara cepat suatu pola inovasi ganda.<sup>5</sup>

Kearifan lokal (*lokal wisdom*) merupakan tata aturan tak tertulis yang menjadi acuan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan, berupa: a) Tata aturan yang menyangkut hubungan antar sesama manusia, misalnya dalam interaksi sosial baik antar individu maupun kelompok, yang berkaitan dengan hirarkhi dalam pemerintahan dan adat, aturan perkawinan antar klan, tata krama dalam kehidupan sehari-hari; b) Tata aturan menyangkut hubungan manusia dengan alam, binatang dan tumbuh-tumbuhan yang lebih bertujuan pada upaya konservasi alam. Contoh: sasi darat, sasi laut di Maluku; c) Tata aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan yang gaib, misalnya Tuhan dan roh-roh gaib. Tidak semua aspek tersebut dijadikan sebagai bahan kajian dalam kegiatan ini, kecuali aspek-aspek yang berkaitan dengan interaksi sosial antar individu maupun antar kelompok, khususnya dalam hubungan sosial keagamaan.

Kearifan lokal dapat berupa adat istiadat, institusi, kata-kata bijak dan pepatah. Fokus penelitian ini tidak hanya pada kearifan lokal dalam bentuk aslinya, tetapi juga pada upaya masyarakat dalam melakukan rekacipta kearifan lokal baru (*institutional development*), yaitu “memperbarui institusi-institusi lama dan pernah berfungsi baik” dan dalam upaya membangun tradisi, yaitu “membangun seperangkat institusi adat istiadat yang pernah berfungsi dengan baik dalam memenuhi kebutuhan sosial politik tertentu pada suatu masa tertentu, yang terus menerus direvisi dan direkacipta ulang sesuai dengan perubahan kebutuhan sosial politik dalam masyarakat”. Pengembangan institusi ini harus dilakukan oleh masyarakat

lokal itu sendiri dengan melibatkan unsur pemerintah dan unsur non-pemerintah, dengan kombinasi pendekatan *top-down* dan *bottom-up*.<sup>6</sup>

Yang dimaksud dengan kearifan lokal dalam penelitian ini adalah suatu sintesa budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang melalui internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat.<sup>7</sup>

Kerukunan berasal dari kata dasar rukun, mendapat awalan ke dan akhiran an, sehingga mengubahnya dari kata sifat menjadi kata benda. Berdasarkan etimologi, kata rukun berasal dari bahasa Arab yang berarti tiang, dasar, atau sila.<sup>8</sup> Perkembangannya dalam bahasa Indonesia, kata rukun berarti “mengatasi perbedaan-perbedaan, bekerjasama, saling menerima, hati tenang dan hidup harmonis. Misalnya, nilai kerukunan itu diwujudkan dalam perilaku dengan atasan harus hormat, sopan, patuh dan berjarak. Dengan sesama warga komunitas harus dapat seperti halnya anggota keluarga: kangen dan menyenangkan.<sup>9</sup> Sedangkan berlaku rukun – sebagaimana dikutip Franz Magnis-Suseno dari Hildret Geertz – berarti mengilangkan tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat atau antara pribadi-pribadi, sehingga hubungan sosial tetap kelihatan selaras.<sup>10</sup>

Agama selain terdapat agama-agama besar, juga ada agama-agama lokal (*folk religion*). Dalam hal ini agama dipandang sebagai fenomena sosial karena agama ada dan terwujud dalam kaitannya dengan keyakinan dan tindakan dan hasil tindakan manusia sebagai anggota masyarakat. Secara umum agama dapat didefinisikan sebagai “seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya”. Secara khusus agama juga dapat didefinisikan sebagai “sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwajibkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasikan dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai gaib dan suci”.<sup>11</sup>

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Eksplanasi hasil kajiannya berbentuk deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

Wawancara, dilakukan untuk memperoleh data berupa informasi, keterangan, penjelasan, dan pengakuan dari para aktor maupun orang-orang yang berada di luar fokus penelitian. Pengamatan dilakukan untuk melihat fakta di lapangan. Selain itu pengamatan juga dapat digunakan untuk kroscek terhadap data yang diperoleh melalui wawancara. Studi dokumentasi, dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan pengamatan. Data yang diperoleh melalui studi dokumentasi berupa data yang diabadikan atau bukti-bukti tertulis dalam bentuk selain buku/pustaka.

Data yang terkumpul dikelompok-kelompokkan, dikategorisasi dan disistimatisasi. Data yang telah disusun kemudian dianalisa, juga dibuat penafsiran-penafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi, dan membandingkannya dengan fenomena-fenomena lain di luar penelitian. Berdasarkan analisa dan penafsiran yang dibuat, ditarik kesimpulan-kesimpulan, serta implikasi-implikasi dan saran-saran bagi kebijakan-kebijakan selanjutnya.<sup>12</sup>

## Sejarah Singkat Kabupaten Poso

Wilayah yang sekarang menjadi wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Poso pada waktu sebelumnya berada di bawah kekuasaan pemerintah kerajaan-kerajaan kecil, yaitu: Kerajaan Poso, Napu, Mori, Tojo, Una-una dan Bungku, yang satu sama lain tidak saing berhubungan. Keenam wilayah kerajaan tersebut berada di bawah pengaruh kerajaan yang lebih besar. Wilayah bagian selatan di bawah pengaruh kerajaan Luwu yang berpusat di Palopo; Wilayah bagian utara di bawah pengaruh kerajaan Sigi (masuk daerah kabupaten Donggala sekarang); dan wilayah bagian timur meliputi Bungku dan daerah kepulauan berada di bawah kekuasaan kerajaan Ternate.

Sejak tahun 1880 Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Bagian Utara mulai menguasai wilayah Sulawesi Tengah dan secara berangsur-angsur berusaha untuk melepas pengaruh Kerajaan Luwu dan Sigi di

daerah Poso. Dalam tahun 1905-1918 Pemerintah Hindia Belanda membagi wilayah Poso menjadi 2 wilayah kekuasaan, sebagian masuk wilayah Karesidenan Manado, yaitu Onderafdeeling (Kawedanan) Poso dan Tojo Una-Una. Sedangkan sebagian lagi masuk Karesidenan Makassar yaitu Onderafdeeling (Kawedanan) Kolonodale dan Bungku. Sedangkan kedudukan raja-raja dan wilayah kekuasaannya tetap dipertahankan dengan sebutan *Self Bestuure-Gebeiden* (wilayah kerajaan). Hal ini diatur berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang disebut *Self Bestuure* atau Peraturan Adat Kerajaan (hukum adat).

Pada tahun 1918, seluruh wilayah Sulawesi Tengah termasuk di dalamnya wilayah Kabupaten Poso, kemudian dikuasai Belanda dan mulai dibentuk pemerintahan sipil. Pada tahun berikutnya, tahun 1919, seluruh wilayah Poso digabungkan dalam wilayah Karesidenan Manado. Sulawesi bagian tengah terbagi dalam 2 wilayah yang disebut *afdeeling*, yaitu *Afdeeling* Donggala dengan ibu kota Donggala, dan *Afdeeling* Poso dengan ibukota Poso. Masing-masing *afdeeling* dipimpin oleh *asisten residen*.

Sejak tanggal 2 Desember 1948 dibentuk Daerah Otonom Sulawesi Tengah yang meliputi *Afdeeling* Donggala dan *Afdeeling* Poso dengan ibukota Poso. Daerah Otonom Sulawesi Tengah terdiri dari 3 wilayah *onder afdeeling chef* yang pada waktu itu biasa disebut *kontroleur* atau *hoofd van paltselyk bestuure* (HPB). Ketiga *onderafdeeling* ini meliputi beberapa *landschap* dan terbagi menjadi beberapa *distrik*, yaitu:

1. *Onderafdeeling* Poso, meliputi: *Landschap* Poso/Lage berkedudukan di Poso, *Landschap* Lore berkedudukan di Wanga, *Landschap* Tojo berkedudukan di Ampana, dan *Landschap* Una-Una.;
2. *Onderafdeeling* Bungku dan Mori, meliputi: *Lanschape* Bungku, dan *Landschap* Mori berkedudukan di Kolonodale; dan
3. *Onderafdeeling* Luwuk, meliputi: *Landschap* Banggai berkedudukan di Luwuk

Disamping ketiga *onderafdeeling* tersebut di atas terdapat 4 *onderafdeeling* lainnya, yaitu: Donggala, Palu, Toli-Toli dan Parigi.

Berdasarkan hasil Mukhtar Raja-raja se-Sulawesi Tengah tanggal 13-14 Oktober 1948 di Tentena, yang mencetuskan suara rakyat se-Sulawesi Tengah agar dalam lingkungan Pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT) dapat berdiri sendiri, maka pada tahun berikutnya (1949) dibentuklah

Daerah Otonom Sulawesi Tengah, yang kemudian disusul dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sulawesi Tengah.

Perjuangan rakyat Sulawesi Tengah melalui DPR Sulawesi Tengah pada tahun 1952 dikelurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1952 tentang Pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah yang terdiri dari *Onderafdeeling* Poso, Luwuk Banggai dan Kolonodale dengan ibukotanya Poso, dan Daerah Otonom Donggala meliputi *Onderafdeeling* Donggala, Palu, Parigi, dan Toli-Toli dengan ibu kotanya Palu. Pada tahun 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959, Daerah Otonom Poso dipecah menjadi 2 daerah kabupaten, yaitu Kabupaten Poso dengan ibu kotanya Poso, dan Kabupaten Luwuk Banggai dengan ibu kotanya Luwuk. Sejak era reformasi, wilayah Kabupaten Poso mengalami 2 kali pemecahan. Pada tahun 1999 wilayah Kabupaten Poso dipecah menjadi Kabupaten Poso dengan ibukotanya Poso dan Kabupaten Morowali dengan ibukotanya Kolonodale. Pada tahun 2004 wilayah Kabupaten Poso dipecah lagi menjadi Kabupaten Poso ibukotanya tetap di Poso dan Kabupaten Tojo Una-Una dengan ibukotanya di Ampana.

### **Letak Wilayah Kabupaten Poso**

Letak wilayah Kabupaten Poso dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain letak astronomis, geografis, dan geologis. Letak astronomis, wilayah Kabupaten Poso terletak pada koordinat 1, 06' 44" – 2, 12' 53" Lintang Selatan dan 120, 05' 09" – 120,52' 04" Bujur Timur. Letak Geografis Dilihat dari posisinya di permukaan bumi, letak wilayah Kabupaten Poso secara umum berada di wilayah pegunungan dan sebagian kecil berada di wilayah pantai, yaitu di pantai Teluk Tomini dan Teluk Tolo. Letak geologis wilayah Kabupaten Poso terletak pada deretan pegunungan lipatan, yakni Pegunungan Fennema dan Tineba di bagian barat, Pegunungan Takolekaju di bagian barat daya, pegunungan Verbeek di bagian tenggara, pegunungan Pompangeo dan pegunungan Lumut di bagian timur laut.

### **Luas Wilayah**

Luas wilayah Kabupaten Poso diperkirakan sekitar 8.712,25 km<sup>2</sup> atau 12,81% dari wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso menempati urutan ke empat.

Secara administratif pemerintahan wilayah Kabupaten Poso terbagi menjadi 18 kecamatan, 133 desa dan 33 kelurahan, sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah	
			Kelurahan	Desa
1	<u>Pamona Selatan</u>	<u>Pendolo</u>	-	12
2	<u>Pamona Barat</u>	<u>Meko</u>	-	5
3	<u>Pamona Tenggara</u>	<u>Koreboho</u>	-	9
4	<u>Pamona Utara</u>	<u>Tentena</u>	6	14
5	<u>Pamona Timur</u>	<u>Taripa</u>	-	12
6	<u>Lore Selatan</u>	<u>Cirtu</u>	-	8
7	<u>Lore Barat</u>	<u>Lengkaka</u>	-	6
8	<u>Lore Utara</u>	<u>Wuasa</u>	-	7
9	<u>Lore Tengah</u>	<u>Doda</u>	-	8
10	<u>Lore Timur</u>	<u>Mahoto</u>	-	4
11	<u>Lore Peone</u>	<u>Watutau</u>	-	5
12	<u>Poso Pesisir</u>	<u>Mapane</u>	2	12
13	<u>Poso Pesisir Selatan</u>	<u>Tangkura</u>	-	8
14	<u>Poso Pesisir Utara</u>	<u>Tambarana</u>	-	9
15	<u>Poso Kota</u>	<u>Poso</u>	4	-
16	<u>Poso Kota Selatan</u>	<u>Kawua</u>	5	-
17	<u>Poso Kota Utara</u>	<u>Lawanga</u>	6	-
18	<u>Lege</u>	<u>Tagolu</u>	-	14

Sumber: Kabupaten Poso dalam Angka Tahun 2007 diadaptasi oleh peneliti.

### Masyarakat Heterogen yang Damai

Secara historis dan sosio-kultural wilayah Poso (sebelum 2 kali pemekaran) dihuni 5 suku asli, yaitu Pamona, Napu, Tojo, Mori dan Bungku. Kelima suku tersebut mendiami wilayah yang terbentang dari barat, yaitu Sedoa (Lore Utara/Napu) sampai Fua-Fua (Bungku Utara) di bagian timur; dan dari utara yaitu Pulau Walea Besar (Tojo) sampai Terebino atau Pulau Menui (Wilayah Bungku) di bagian selatan. Dilihat dari corak keagamaannya, penduduk wilayah Bungku dan Tojo mayoritas beragama Islam, sedangkan penduduk wilayah Pamona, Mori, Napu mayoritas beragama Kristen.

Masyarakat Poso yang pluralis baik dilihat dari sisi etnis, agama, adat dan budaya ini dalam realitas kehidupan mereka berpijak pada landasan kekeluargaan, kekerabatan, persaudaraan, kebersamaan dan gotong royong. Realitas kehidupan yang rukun dan damai sesama etnis

yang menghuni tanah Poso ini berjalan sepanjang sejarah mereka selama ratusan tahun. Tidak pernah ada torehan tinta merah sebagai pertanda terjadinya gejolak sosial apalagi konflik terbuka dalam lembaran sejarah lokal masyarakat Poso baik yang dipicu oleh faktor politik, ekonomi agama dan budaya, kecuali perjuangan perlawanan terhadap penjajahan pemerintah Hindia Belanda, seperti yang terjadi di Napu, Mori, Bungku, Tojo, Togean, dan Poso serta perlawanan terhadap gerombolan DI/TII di Bungku dan perlawanan terhadap pemberontak Permesta tahun 1958 di Banggai.

Fenomena kehidupan masyarakat Poso yang damai dengan tingkat toleransi yang tinggi ini tercermin juga dalam bidang pemerintahan daerah. Sepanjang sejarah pimpinan di lingkungan Pemerintah Daerah Poso yang dijabat oleh seseorang dari etnis dan agama apapun yang berbeda dengan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk tidak pernah menjadi sumber permasalahan maupun konflik.

Untuk tingkat kabupaten Poso, bupati, sekwilda dan ketua DPRD telah berganti-ganti sejak tahun 1960 dari berbagai etnis dan agama yang berbeda-beda namun tidak pernah menimbulkan permasalahan dan gejolak di kalangan masyarakat.

Kehidupan masyarakat yang harmonis dan tidak pernah mempermasalahkan siapa yang menjadi pemimpin mereka, meski berbeda etnis maupun agama dengan mayoritas penduduk. Sebagaimana diuraikan di atas meskipun camat, wedana (wakil bupati), sekwilda, bupati dan ketua DPRD dari etnis dan agama yang berbeda dengan mayoritas penduduk tapi tidak pernah menimbulkan permasalahan atau gejolak masyarakat, sehingga terjadinya pemicu konflik pada malam Natal 25 Desember 1998. Yang sebenarnya peristiwa malam Natal tersebut hanya persolan kecil, perselisihan antar 2 pemuda yang kebetulan berbeda agama (Muslim dan Kristen).

### **Kearifan Lokal Masyarakat Poso**

Sepanjang sejarah (sebelum terjadinya konflik) masyarakat Poso hidup dalam suasana "*mosintuwu'* (tolong menolong). Sejak ratusan tahun yang lalu, dalam fenomena kehidupan sehari-hari masyarakat Tanah Poso tidak mengenal adanya sekat-sekat ataupun diskriminasi antara penduduk asli dan pendatang, antara yang seagama dan yang berbeda agama. Hal

itu terlihat dalam acara perkawinan, upacara kematian, membuka lahan perkebunan/persawahan, pada waktu musim tanam atau pada waktu musim panen, dan pada waktu mendirikan rumah tinggal.

Setiap anggota masyarakat akan 'merasa bersalah' atau merasa telah 'melanggar kebiasaan' apabila tidak memberi *posintuwu* (barang pemberian) yang bisa berupa kehadiran atau turut menyumbangkan tenaga atau bingkisan sesuai keberadaannya.

Seorang tamu (*torata*) sangat dihormati sebagaimana tampak pada cara menerima tamu pada masa lalu. Sudah menjadi tradisi, setiap rumah tangga menyediakan seperangkat peralatan masak dan peralatan makan serta seperangkat perlengkapan tidur, berupa tikar pandan dan bantal yang disimpan di para-para yang disediakan secara khusus untuk para tamu. Apabila tuan rumahnya beragama Kristen sedangkan tamunya beragama Islam, tuan rumah menyediakan ayam yang masih hidup untuk disembelih dan dimasak sendiri oleh tamunya. Kalau tidak ada ayam tuan rumah minimal menyediakan telur rebus.

Corak kehidupan masyarakat Tanah Poso yang sedemikian rupa menjadikan mereka memiliki sikap hidup dengan tingkat toleransi dan solidaritas yang tinggi. Mereka terbuka terhadap para pendatang. Mereka mudah berasimilasi dengan para pendatang melalui proses kawin mawin. Hubungan kawin mawin ini bukan hanya antara pribumi dan pendatang, tapi juga antara mereka yang berbeda agama. Dalam hal ini tidak ada kekakuan sepanjang tidak melanggar adat maupun budaya lokal.

Tata kehidupan masyarakat Poso yang sedemikian rupa menjadikan penduduk yang memeluk agama minoritas baik Islam maupun Kristen dapat hidup tenang dan damai serta dapat melaksanakan ajaran agamanya tanpa rasa takut dan tanpa gangguan apapun, meski mereka berada di tengah-tengah lingkungan pemeluk agama mayoritas yang berbeda baik Kristen maupun Islam. Bahkan untuk membangun rumah ibadat mereka yang berbeda agama itu dapat saling membantu dengan penuh rasa suka rela dan dengan landasan semangat gotong royong. Sebagaimana pembangunan gereja di Bungku tahun 1962 warga Muslim turut serta berpartisipasi, demikian pula pembangunan masjid di Kelurahan Sangele Tentena tahun 1974 warga Nasrani juga ikut bekerjasama, bahkan ketua panitianya tokoh masyarakat Kristen setempat.

## Konflik Poso

Suatu peristiwa berdarah, penusukan terhadap seorang pemuda Muslim yang sedang tidur-tiduran di masjid kelurahan Sayo sambil menunggu makan sahur oleh seorang pemuda Kristen pada tanggal 24 Desember 1998 malam Natal yang bertepatan dengan bulan Ramadhan. Peristiwa ini ditengarai sebagai awal konflik Poso yang kemudian berkepanjangan dengan intensitas yang semakin tinggi hingga tahun 2002, dapat dilihat tahapan-tahapannya serta sebaran area konfliknya sebagai berikut:

Tahap awal, tanggal 24-28 Desember 1998 Pada tahap awal ini area konflik terbatas dalam Kota Poso (Kecamatan Poso Kota) meliputi Kelurahan Lombogia, Kasintuwu dan Sayo. Masyarakat kecamatan dan kelurahan lain memandang konflik ini sebagai kasus ketiga kelurahan tersebut.

Tahap kedua, tanggal 17-21 April 2000 Pada tahap kedua ini, area konflik meluas menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Poso Kota, Poso Pesisir (sebelum pemekaran) dan Lege. Kasus ini terjadi akibat operasi miras oleh kelompok masa tertentu dan tidak diterima secara baik oleh kelompok lain. Selain itu kasus ini tidak dilokalisasi oleh aparat keamanan, sehingga melebar ketiga wilayah kecamatan tersebut.

Tahap ketiga, tanggal 23 Mei 2000 Pada tahap ketiga, area konflik meluas menjadi 7 wilayah kecamatan, yaitu: Poso Kota, Poso Pesisir (sebelum pemekaran menjadi 3 kecamatan), Pamona Utara, Pamona Timur, Pamona Selatan (sebelum pemekaran menjadi 3 kecamatan), Tojo (sebelum pemerakaran Kabupaten Touna) dan Kecamatan Mori Atas (setelah pemekaran masuk wilayah Kabupaten Morowali).

## Kearifan Lokal Selama Konflik

Kehidupan masyarakat Poso yang harmonis dengan berpegang pada kearifan lokal *sintuwu maroso* seperti di atas berlangsung dari generasi ke generasi dalam kurun waktu yang relatif sangat panjang. Kehidupan yang harmonis itu dapat dikatakan sepanjang sejarah masyarakat Poso hingga terjadi peristiwa berdarah pada tanggal 25 Desember 1998 malam Natal yang bertepatan dengan bulan Ramadhan, yaitu insiden penusukan

terhadap seorang pemuda Muslim yang sedang tidur-tiduran sambil menunggu makan sahur di Masjid Darusalam kelurahan Sayo oleh seorang pemuda Kristen.

Peristiwa itu telah meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan dan pranata-pranata sosial budaya yang diwariskan oleh para leluhur dari generasi ke generasi. Dengan sekejap masyarakat Poso yang ramah dan santun telah berubah seakan menjadi masyarakat Barbar. Kejadian itu di luar kebiasaan masyarakat Poso yang ramah dan santun, hanya karena masalah “sepele” – perselisihan pinjam-meminjam obeng kecil - antara 2 pemuda (Muslim dan Kristen), namun akibatnya sangat di luar dugaan, ratusan jiwa terbunuh, ribuan rumah tinggal, puluhan rumah ibadat (baik masjid maupun gereja), sarana dan prasarana pendidikan dan fasilitas umum hangus dibakar, serta harta benda yang tidak dapat lagi ditaksir nilainya musnah.

Dengan terjadinya konflik yang sedemikian rupa, banyak orang terutama para pakar mempertanyakan: “Kemanakah budaya *mosintuwu*, *sangkomp*, *nosarara*?” Drs. Abdul Malik Sjahadat, Ketua FKUB Kabupaten Poso mengatakan; “Kasih, sayang, perdamaian, *mosintuwu*, *sangkomp* dan *nosarara* masih melekat dan belum hilang di hati sebagian anggota masyarakat Poso. Karena fakta di lapangan bersifat kasuistis dan lokal tidak mewakili semua elemen masyarakat serta tidak bisa digeneralisasi. Ada beberapa fakta dilapangan yang dapat dijadikan sebagai bukti”. Sjahadat mengemukakan fakta-fakta di lapangan sebagai berikut:

*Pertama*, ketika terjadi kerusuhan tahap awal, 25 Desember 1998, masyarakat mayoritas Kristen di kecamatan-kecamatan sekitar Kota Poso menceca dan mengancam kejadian tersebut (penusukan yang dilakukan seorang pemuda Kristen terhadap seorang pemuda Muslim), mereka tidak ikut campur dan menganggap peristiwa itu sebagai peristiwa lokal Kota Poso. Sehingga dalam waktu seminggu suasana sudah pulih dan pengungsi yang rumahnya terbakar di Kelurahan Lombogia sudah pulang dan memperbaiki rumah-rumah mereka. Kemudian pada Hari Raya Idul Fitri, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat Kristen, bahkan dari Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) Tentena bersilat urrahmi ke tokoh-tokoh Islam di Kota Poso, seperti tidak pernah terjadi peristiwa. Begitu pula masyarakat minoritas Muslim yang berada di tengah-tengah

masyarakat mayoritas Kristen, seperti di kecamatan Lege, Pamona Utara dan Pamona Selatan belum mengungsi karena tidak merasa terganggu.

*Kedua*, pelepasan jamaah calon haji dari Pamona Utara dan sekitarnya biasanya bergabung di Poso (ibu kota kabupaten). Tapi pada musim haji tahun 1999, masyarakat Tentena yang mayoritas Kristen, meminta agar pelepasan jamaah calon haji dari Pamona Utara dan sekitarnya yang berjumlah 20 orang lebih tidak bergabung dengan jamaah Poso. Melainkan, mereka selenggarakan upacara pelepasan tersendiri di masjid Sangele Tentena. Upacara pelepasan tersebut dipimpin oleh Asisten III Bupati Poso, Awad Alamrie, SH dan dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat Kristen dan para pendeta di Tentena. Selanjutnya, rombongan jamaah calon haji diberangkatkan dengan mobil ke Makassar dihantar dengan iring-iringan mobil masyarakat hingga Sawidago pinggiran Kota Tentena.

*Ketiga*, ketika terjadi kerusuhan tahap ketiga bulan Mei tahun 2000 yang merupakan kerusuhan yang terbesar dan cenderung meluas ke beberapa kecamatan, minoritas Muslim di dusun Toaro, Kelurahan Sawidago dan dusun Mangapu, Desa Kamba bisa mengungsi dengan lancar tanpa mendapat gangguan dari mayoritas Kristen. Demikian pula minoritas Muslim di Kecamatan Lore Selatan, Lore Tengah dan Lore Utara selama kerusuhan hingga sekarang tidak pernah mengungsi karena dijamin keamanannya oleh mayoritas Kristen. Bahkan di Desa Alitapu, Kecamatan Lore Utara yang mayoritas Kristen di saat berkecamuk kerusuhan, mengundang ketua umum PB Al-Khairat dari Palu untuk meletakkan batu pertama pembangunan masjid yang dihadiri para pendeta, suster, gembala dan tokoh masyarakat Kristen. Sebaliknya, minoritas Kristen di Desa Wakai, Kecamatan Una-Una, di Desa Kalia, Kecamatan Walea Kepulauan, di Kota Ampana, Tete, Bungku, Bungku Selatan, Bungku Utara tetap hidup berbaur dengan mayoritas Muslim. Di wilayah tersebut juga tidak ada pengrusakan terhadap gereja dan rumah warga Kristiani.

*Keempat*, ketika kerusuhan menjalar keluar Kota Poso ada satu keluarga Muslim di Watuawu diselamatkan dan disembunyikan oleh gembala dan Kepala Desa Watuawu, selanjutnya diantarkan kepada aparat TNI untuk diungsikan ke wilayah yang aman. Di Sangele, Buyumpondoli, Tonusu dan Toinasa ada masyarakat minoritas Muslim yang diungsikan dan dikawal oleh beberapa tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Kristen

keluar dari Pamona Utara menuju Morowali dan Pamona Selatan dan selanjutnya masuk ke wilayah Palopo. Ada pula seorang Muslimah yang disembunyikan oleh seorang ibu-ibu Nasrani di kebun di wilayah Taripa selama beberapa hari, kemudian diungsikan ke luar wilayah Taripa dengan selamat.

*Kelima*, ada fenomena yang tidak masuk akal bagi pada umumnya masyarakat di Indonesia di Lore Utara dan Lore Tengah yang mayoritas Kristen yang banyak memiliki sarjana dan cendekiawan, tapi yang mewakili mereka di DPRD Kabupaten Poso periode 1997-1999-2004 justru seorang Muslim.

*Keenam*, sekitar bulan Juli dan Agustus tahun 2000 di saat-saat suasana konflik sedang mencekam, beberapa tokoh Islam dan tokoh masyarakat Kecamatan Tojo dipimpin Drs. Ramli Lasawedi dengan kendaraan dan biaya sendiri menuju Tentena dan menginap di sana dan menuju ke Kamba untuk mengajak warga Kristiani yang berasal dari Bambalo, Tana Mawau, Malewa, Matako, Gandalari, Korondoda, Galuga, Mawomba, Tongko untuk kembali ke Kecamatan Tojo yang mayoritas Muslim dan mereka pun dijamin keamanannya.

Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tampak bahwa sebenarnya kearifan lokal masyarakat Poso masih belum lenyap dari benak mereka. Dalam situasi konflik yang sedemikian rup, sebagian anggota masyarakat baik Muslim maupun Kristiani masih bersedia dengan tulus melakukan kerja, saling tolong-menolong dan saling melindungi. Dengan adanya fakta-fakta tersebut semakin menguatkan tesis yang dikemukakan para tokoh agama dan tokoh masyarakat Poso, "Jika hanya orang Poso saja yang terlibat, maka konflik Poso tidak akan berlangsung lama". Faktanya dalam kasus kerusuhan tersebut, baik dari kalangan Islam maupun Kristen banyak melibatkan orang-orang dari luar Poso.

Dalam upaya menciptakan kerukunan, para tokoh masyarakat dan tokoh agama di Poso (sebelum lahirnya PBM) sudah berupaya membentuk wadah-wadah kerukunan. Di hampir setiap desa/kelurahan mereka membentuk wadah kerukunan. Dalam hal ini mereka memiliki keyakinan bahwa yang dapat menyelesaikan konflik Poso adalah masyarakat Poso sendiri.

## **Penegak Hukum yang Kurang Arif**

Ketika terjadi konflik yang pertama, malam Natal 25 Desember 1998 yang dipicu oleh peristiwa penusukan terhadap seorang pemuda Muslim oleh seorang pemuda Kristen di sebuah masjid di kelurahan Sayo, tidak diselesaikan secara hukum dengan baik oleh aparat penegak hukum. Pelaku sempat diamankan oleh pihak kepolisian, namun kemudian dikeluarkan kembali dengan alasan agar bisa ikut merayakan Natal. Seandainya, para penegak hukum memiliki komitmen dan menjunjung tinggi kekuasaan hukum, barangkali peristiwa subuh berdarah di masjid kelurahan Sayo itu tidak akan melebar sampai ke tiga kelurahan.

Pada waktu konflik yang ke dua tanggal 17-21 April 2000, yang terjadi akibat operasi minuman keras (miras) oleh kelompok masa tertentu dan tidak bisa diterima oleh kelompok lain, pihak yang berwajib tidak segera menindak atas nama hukum, atau minimal melokalisir kerusuhan sehingga tidak merembet ke wilayah lain. Namun karena tidak ada tindakan hukum dan kerusuhan yang lebih besar tidak diantisipasi, maka kerusuhan itupun menjalar ke 3 kecamatan

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi konflik di tanah Poso, kiranya kearifan aparat/elit setempat masih sangat diharapkan. Ketidakearifan aparat/elit setempat dapat saja menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, pada acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tanggal 3 Mei 2009 terjadi insiden (protes) dari sekelompok anak muda Islam yang dikenal dengan kelompok Mujahidin yang memrotes adanya tari-tarian pada acara yang mereka anggap sebagai acara sakral tersebut. Kearifan aparat/elit setempat tidak hanya terfokus pada kearifan lokal masa lalu, tetapi juga meliputi hal-hal yang dipandang sakral oleh kelompok tertentu harus dihargai. Mencampuradukkan hal-hal yang sakral dengan yang batil, atau minimal yang dianggap batil oleh kelompok tertentu sangat riskan. Sebagai mana kasus di atas, dalam acara MTQ ada tari-tarian oleh kelompok tertentu dianggap kontradiktif hendaknya dapat difahami, dan dihindari. Masih beruntung kelompok pemuda Islam Mujahidin tersebut dapat diberi pemahaman oleh aparat/elit setempat, bisa jadi insiden tersebut akan menjadi pemicu konflik.

## Kesimpulan

Dari deskripsi di atas dapat diambil beberapa simpulan, sbb:

1. Konflik Poso dengan intensitas yang tinggi dan berkepanjangan sangat kontras dengan kearifan lokal *mosintuwu*. Di mana masyarakat Poso dalam upaya menciptakan kerukunan dapat berinteraksi dan bekerja sama tanpa membedakan batas-batas etnis maupun agama. Bahkan mereka dapat bekerja sama antar umat beragama hingga memasuki domain keagamaan.
2. Meskipun konflik sedang berkecamuk, tapi sebagian anggota masyarakat baik Muslim maupun Kristiani masih bersedia dengan tulus melakukan kerja sama, saling tolong-menolong dan saling melindungi. Hal ini menguatkan tesis yang dikemukakan para tokoh agama dan tokoh masyarakat Poso, "Jika hanya orang Poso saja yang terlibat, maka konflik Poso tidak akan berlangsung lama". Dalam kerusuhan tersebut, baik dari kalangan Islam maupun Kristen memang banyak terlibat orang-orang dari luar Poso.
3. Para penegak hukum di Poso yang tidak memiliki komitmen dan tidak menjunjung tinggi kekuasaan hukum ikut andil menjadikan konflik Poso berlarut-larut dan menimbulkan banyak korban jiwa dan harta.

## Rekomendasi

1. Hendaknya para penegak hukum di Poso memiliki komitmen dan menjunjung tinggi kekuasaan hukum agar dapat bersama-sama masyarakat dalam upaya menciptakan perdamaian dan kerukunan hidup antar umat beragama di Poso.
2. Untuk menjaga kelanggengan perdamaian di Poso, perlu adanya revitalisasi kearifan lokal dengan melakukan *institutional development* wadah kerukunan. Untuk ini, perlu dikembangkan: *Pertama*, pengembangan wadah kerukunan yang kuat. Wadah ini harus merupakan forum komunikasi kelompok-kelompok yang secara murni menghendaki kerukunan. Untuk itu, wadah harus memiliki kejelasan orientasi (visi dan misi) yang dapat diprogramkan. *Kedua*, pengembangan sistem norma, atau perangkat pengaturan ikhwal norma dan nilai tentang ekspektasi serta preskripsi dan proskripsi yang diperlukan. Sistem norma dan nilai yang dibangun niscaya harus merepresentasikan prinsip-prinsip kejelasan orientasi, relevansi dengan kebutuhan, keadilan bagi semua fihak, kebersamaan, dan kepraktisan.

## Catatan Akhir

<sup>1</sup>Hendropoespita, 1984.

<sup>2</sup>*Institutional development* yaitu memperbaharui institusi-institusi lama yang pernah berfungsi baik, dan dalam upaya membangun tradisi, yaitu membangun seperangkat institusi adat-istiadat yang pernah berfungsi dengan baik dalam memenuhi kebutuhan sosial-politik tertentu pada suatu masa tertentu. Pengembangan institusi ini harus dilakukan oleh masyarakat lokal itu sendiri, dengan melibatkan unsur pemerintah dan unsur non-pemerintah, dengan kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up. Lihat: Amri Marzali, 25 Agustus 2005: h 7.

<sup>3</sup>Reading, Hugo F, 1986: 85.

<sup>4</sup>Hornby, 1980: 726.

<sup>5</sup>Reading, 1986: 357.

<sup>6</sup> Amri Marzali, *Kearifan Budaya Lokal dan Kerukunan Beragama*, (makalah tidak diterbitkan) , 25 Agustus 2005.

<sup>7</sup> Haidlor Ali Ahmad, "Kearifan Lokal Menuju keharmonisan Hidup Beragama di desa Gempolan, Gurah Kediri Jawa Timur", dalam *Adaptasi dan Resistensi*. Balai Litbang Agama Jakarta dan Penamadani, 2006.

<sup>8</sup>Lihat: Lubis, dkk., 2004: 21.

<sup>9</sup>Mulder, 1984: 43.

<sup>10</sup>Suseno, 1988: 39.

<sup>11</sup> Parsudi Suparlan dalam Roland Robertson, (ed), *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 1988.

<sup>12</sup>Nazir, 1988: 405-406.

## Daftar Pustaka

Ahmad, Haidlor Ali, "Kearifan Lokal Menuju Keharmonisan Hidup Beragama di Desa Gempolan, Gurah, Kediri, Jawa Timur" dalam *Adaptasi dan Resistensi*. Jakarta, Balai Litbang Agama Jakarta dan Penamadani, 2006.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso, *Kabupaten Poso dalam Angka 2007*. Kerjasama Badan Pusat Statistik dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Poso.

Marzali, Amri, *Kearifan Budaya Lokal dan Kerukunan Beragama*. (makalah tidak diterbitkan), 25 Agustus 2005.

Purwanto, Wawan H., *Menggapai Damai di Poso*. Jakarta: CBM Press, 2007.

Reading, Hugo F., *Kamus Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta, CV Rajawali, 1986.

Syahadat, A. Malik, Drs., *Poso Kemarin, Hari Ini, dan Besok* (makalah t.t.). Poso: 2007.

Suparlan, Parsudi dalam Roland Robertson (ed), *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 1988.

## Kerjasama Antar Umat Beragama di Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung

Suhanah

*Peneliti Puslitbang  
Kehidupan Keagamaan*

### **Abstract:**

*This research is focused on interfaith social cooperation in kecamatan Astanaanyar Bandung to understand problems involved by applying a qualitative approach and case study.*

*This research indicates: 1) The Interfaith relation condition in Astanaanyar is quite conducive, along with high tolerance, they do not bother each other and discredit other religions. 2) Interfaith social cooperation occurs in daily activities such as interactions in the traditional market, sports event, national day ceremonies and community service. 3) Some of the Astanaanyar people seems exclusive according to the understanding and religious faith which they believe in, based on the verse "To you be your Way to me to be mine" (lakum diinukum waliyadiin).*

**Keywords:** *cooperation, tolerance, interfaith relationship*

### **Latar Belakang**

Dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, tiap pemeluk agama mendapatkan kesempatan untuk menjalankan agama dan menciptakan kehidupan beragama sesuai ajaran agama masing-masing. Begitu juga bagi setiap pemeluk agama harus menjaga agar kegiatan-kegiatan keagamaan masing-masing umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, tidak boleh menyinggung atau mengganggu perasaan keagamaan kelompok agama lainnya. Dengan kata lain pengembangan agama dan

kehidupan keagamaan di satu pihak tidak boleh menjurus kearah tumbuhnya pemikiran dan pemahaman agama yang sempit. Di sisi lain toleransi umat beragama tidak boleh mengorbankan keyakinan agama masing-masing.

Masyarakat Indonesia yang pluralistik, pengetahuan tentang interaksi sosial yang terjadi antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya sangat penting. Di negara kita, interaksi sosial umat beragama dapat berlangsung antar suku, antar golongan maupun antar agama. Oleh karena itu, dengan mengetahui dan melihat kondisi apa yang menimbulkan serta mengurangi bentuk interaksi sosial tertentu, maka pengetahuan tersebut dapat disumbangkan bagi usaha bersama yang disebut pembinaan berbangsa.

Ketidak harmonisan hubungan antar umat beragama merupakan salah satu dinamika dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan adanya interaksi atau kerjasama sosial di antara masing-masing umat beragama yang mempunyai nilai-nilai atau acuan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang kehidupan ekonomi, politik, pendidikan, suku dan agama.

Kerjasama yang rukun bisa terjadi, apabila di antara mereka saling membutuhkan, saling menghargai perbedaan, saling tolong menolong, saling membantu dan mampu menyatukan pendapat. Tetapi juga sebaliknya, konflik bisa saja terjadi bila masing-masing umat beragama tidak mampu menyamakan persepsinya. Dalam masyarakat terjadi interaksi sosial antar komponen, baik secara individual, kelompok maupun lembaga. Sesama umat beragama dapat hidup berdampingan, saling berhubungan antar suku, saling mempengaruhi, menjaga dan menghargai dalam harmonitas sosial yang terbina berdasarkan nilai dan norma (institusional) yang berlaku. Yang menjadi masalah ialah adanya kegiatan-kegiatan keagamaan bersifat eksklusif, tidak bisa dikerjakamkan kecuali dalam kegiatan-kegiatan sosial. Itulah yang diyakini oleh sebagian masyarakat di Astananyar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Puslitbang Kehidupan Keagamaan menganggap perlu diadakan penelitian tentang Kerjasama Antar Umat Beragama di Kecamatan Astananyar. Daerah ini tergolong penduduk heterogen dalam agama, pendidikan, ekonomi dan etnis.

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana kondisi kehidupan keagamaan masyarakat Astanaanyar?; (2) Bagaimana kerjasama antar umat beragama dalam kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut.

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pimpinan Departemen Agama sebagai bahan informasi dalam pengambilan kebijakan, terutama bagi Pusat Kerukunan Umat Beragama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi kasus. Instrumen pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan, dan dilengkapi dengan studi dokumentasi. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

## Konsep

Ada beberapa konsep yang perlu dijelaskan di sini, sebagai berikut: Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan suatu proses sosial yang di dalamnya terdapat persekutuan antara orang per-orang atau kelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini dapat juga terjadi karena orientasi individu terhadap kelompoknya sendiri atau kelompok lain.<sup>1</sup> Menurut CH. Cooley, kerjasama akan timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian diri sendiri untuk memenuhi kepentingan itu.<sup>2</sup>

Kerjasama akan menimbulkan asimilasi yaitu suatu proses yang ditandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan yang terdapat pada perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Juga berusaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan bersama.

Dalam masyarakat yang plural dalam agama, kerjasama sehari-hari terjadi dalam bentuk interaksi yang sederhana dan rutin antar anggota kelompok. Interaksi terjadi dalam bentuk seperti kunjungan antar tetangga, makan bersama, pesta bersama, mengizinkan anak-anak untuk bermain bersama, dan saling membantu antar tetangga.

Umat beragama adalah penganut suatu agama yang berkembang di masyarakat. Misalnya, penganut Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Dengan kata agama terdapat tiga aspek, yaitu aspek kepercayaan, aspek peribadatan, dan aspek sosiologis. Dari ketiga aspek tersebut, aspek sosiologislah yang memiliki hubungan antar sesama umat beragama. Ronald Robetson mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem kesatuan dari keyakinan dan praktek-praktek yang bersifat relatif terhadap hal-hal yang *secret* yakni segala sesuatu yang dihindari atau dilarang.<sup>3</sup>

Kerukunan umat beragama adalah terciptanya suatu hubungan yang harmonis dan dinamis serta damai di antara sesama umat beragama. Hubungan harmonis antara sesama umat satu agama dan umat berbagai agama serta antara umat beragama dengan pemerintah, dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa serta meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. (Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 1990). Kerjasama yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kerjasama antar umat beragama dalam kegiatan sosial dan keagamaan.

## **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **Keadaan Geografi**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini terdapat semua penganut agama yang berkembang pada umumnya di Indonesia. Penganutnya juga hampir berimbang antara penganut Islam dan non Islam.

Kecamatan Astanaanyar merupakan salah satu bagian dari wilayah Tegallega Kota Bandung, dengan luas daerah 287,868 Ha. Secara administrasi kecamatan dibatasi sebagai berikut: sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bojongloa Kidul, sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Andir, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Regol, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bojongloa Kaler.

Kecamatan Astanaanyar ini terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu: Kelurahan Cibadak, Karanganyar, Nyengseret, Panjuanan, Pelindung Hewan dan kelurahan Karasak. Di sini terdapat 303 Rukun Tetangga (RT) dan 47 Rukun Warga (RW).

## Demografi dan Mata Pencaharian

Jumlah penduduk di Kecamatan Astanaanyar dari segi jenis kelamin: laki-laki 36.212 jiwa dan perempuan 35.355 jiwa. Berdasarkan tingkat pendidikan: a) Belum sekolah 7.837 orang; b) Tidak tamat SD 2.690 orang; c) Tamat SD 10.461 orang; d) Tamat SLTP 12.164 orang; e) Tamat SLTA 8.596 orang; f) Sarjana Muda (D3) 1.607 orang; g) Sarjana (S1) 772 orang; h) Pasca Sarjana (S2) 410 orang; dan i) Pasca (S3) atau Doktor 359 orang. Penduduk berdasarkan mata pencaharian adalah sebagai berikut: a) Sebagai petani 12 orang; b) Pegawai Negeri Sipil 3.299 orang; c) TNI/ABRI 421 orang; d) Dokter 23 orang; e) Pengusaha 475 orang; f) Pegawai swasta 15.281 orang; g) Petani 5.703 orang; h) Pertukangan 12 orang; i) Buruh tani 3.631 orang; j) Pensiunan 6.616 orang; dan k) Sebagai jasa 1.159 orang.

## Sistem Sosial Budaya dan Ekonomi

Sarana kesehatan di Kecamatan Astanaanyar antara lain: a) Rumah sakit 4 buah; b) Rumah bersalin 1 buah; c) Dokter umum 4 buah; e) Dokter gigi 4 buah; f) Puskesmas 4 buah; g) Balai pengobatan/klinik 4 buah; h) Posyandu 6 buah; dan i) Apotik 16 buah.

Sarana ekonomi yang ada di wilayah ini meliputi: a) Pasar umum 4 buah; b) Usaha perdagangan 4 buah; c) 18 buah; d) Tokoh atau Swalayan 35 buah; e) Warung makan 26 buah; d) Restoran 2 buah; e) Kios/warung klontong; f) Pedagang kaki lima 1.250 buah; g) Bank 8 buah; h) Industri makanan 12 buah; i) Industri kerajinan 12 buah; j) Industri pakaian 6 buah; k) Perusahaan angkutan 2 buah; l) Percetakan/sablon 6 buah; m) Bengkel motor/sepeda 24 buah; dan n) Bengkel mobil 6 buah.<sup>4</sup>

Kehidupan beragama cukup marak dan heterogen. Bukti heteroginitasnya di wilayah ini terdapat sejumlah rumah ibadat yaitu masjid 372 buah, mushalla 57 buah, gereja 10 buah dan vihara 6 buah. Jumlah penganut agama Islam 53.053 jiwa, Kristen 9.675 jiwa, Katolik 5.986 jiwa, Hindu 251 jiwa, Buddha 2.374 jiwa dan penganut agama Konghucu 228 jiwa.<sup>5</sup>

Kesemarakan kehidupan keagamaan terdapat banyak kegiatan keagamaan masyarakat. Seperti setiap hari Minggu penganut Kristiani melakukan ibadah di Gereja-gereja. Umat Buddha beribadah di vihara.

Masyarakat Hindu melakukan ibadatnya di Pura-Pura yang ada di Wilayah lain, karena memang di wilayah ini tidak terdapat Pura. Untuk masyarakat Khonghucu karena memang di wilayahnya tidak terdapat Klenteng, juga beribadah ke Klenteng yang ada di wilayah lain. Sedangkan kegiatan keagamaan untuk agama Islam dilakukan di Masjid-masjid, Mushalla-mushalla atau langgar-langgar.

Masyarakat di wilayah Kecamatan Astanaanyar dapat hidup rukun dan damai, saling menghargai dan menghormati antara sesama umat berbeda agama. Hal ini dilakukan atas dasar kemanusiaan, bahwa sebagai sesama bangsa Indonesia dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan untuk dapat hidup saling berbuat baik kepada siapapun.

Dalam hal agama, Allah tidak memaksa. Dalam al-Quran disebutkan "*Laa ikraaha fiddin*" artinya tidak ada paksaan dalam memilih agama. Terkecuali sesama umat Islam agar masuk Islam secara paripurna "*Fissilmi kaaffah*".<sup>6</sup>

Masyarakat di wilayah ini, khususnya agama Islam beranggapan bahwa hanya agama Islamlah yang paling benar sesuai keyakinan mereka yang didasari dengan dalil: *Innaddiina 'indallahil Islam*, yang artinya : Sesungguhnya di sisi Allah hanya agama Islamlah yang paling benar, walaupun pernyataan ini tidak diungkapkan di muka umum. Namun demikian anggapan tersebut bertolak belakang dengan pendapat orang non muslim yang menyatakan bahwa semua agama adalah benar, sama-sama menuju ke surga hanya jalanya saja yang berbeda.

Sekalipun berbeda dalam meyakini agamanya, masyarakat selalu merayakan hari raya agama sendiri-sendiri dan tidak ada saling kunjung mengunjungi di antara umat berbeda agama, kecuali sesama umat satu agama. Begitu pula umat non muslim seperti umat Kristen dalam merayakan hari raya Natalan, mereka saling berkunjung ke rumah sesama umatnya, sedangkan umat Islam tidak berkunjung ke rumah umat non muslim. Apabila ada umat non muslim yang mendapatkan musibah seperti meninggal dunia, maka umat Islam hanya berkunjung sebatas mengetahui tetangganya meninggal. Tetapi belum pernah memberikan fasilitas berupa apapun, apalagi ikut membantu dalam pengurusan pemakaman. Kecuali yang meninggal itu umat Islam, maka umat non muslim ada yang hadir. Masyarakat Islam di wilayah ini tidak

mbolehkan umat berbeda agama beribadah di rumahnya, kecuali satu agama. Tetapi umat non muslim mbolehkan umat berbeda agama melakukan ibadah di rumahnya.

Dalam masalah doa bersama, masyarakat di wilayah ini jarang sekali mengadakan doa bersama antar umat berbeda agama kecuali dalam merayakan hari besar nasional seperti peringatan tujuh belas Agustus. Dalam pendirian rumah ibadah, masyarakat di wilayah ini tidak pernah terjadi konflik, sejauh ini sesuai peraturan pemerintah. Tetapi masyarakat daerah ini tidak ada saling membantu dalam membangun rumah ibadah kecuali sesama umat seagama.<sup>7</sup> Yahya Hidayat mengatakan masalah doa bersama, sepanjang kegiatan yang sifatnya nasional boleh saja dilakukan oleh seluruh umat berbeda agama tetapi dalam kegiatan khusus keagamaan tertentu tidak bisa dilakukan secara bersama.<sup>8</sup>

Menurut ketua MUI Kecamatan Astanaanyar, bahwa masalah perpindahan agama pernah terjadi seperti umat agama Katolik pindah ke agama Islam atau dari umat Kristen masuk agama Islam. Di sini sudah ada lima keluarga. Dalam pandangan masyarakat Islam baik-baik saja terhadap orang yang berpindah agama itu. Namun, sebelum mereka mengucapkan syahadat, ditanya dulu, sanggup tidak masuk agama Islam karena ada syarat-syaratnya. Jika sanggup silahkan, kalau tidak jangan. Masalah agama tidak bisa dipertainkan. Dalam masalah perkawinan antar agama belum pernah terjadi, karena para ulama menyerukan kepada umatnya bahwa perkawinan antar agama adalah haram hukumnya. Umat Islam di wilayah ini tidak pernah mengucapkan salam kepada umat non muslim dalam merayakan hari Natal, kecuali ada umat non muslim mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri kepada umat Islam.

Masyarakat Islam di wilayah ini, bila diantarkan makanan ataupun masakan atau dihidangkannya berupa lauk pauk/nasi dari orang non muslim, tidak dimakan karena masih menimbulkan keraguan, kecuali makanan kering atau berupa sembako.

Menurut AF. Arifin Ketua MUI Kecamatan Astanaanyar, sekaligus aktivis NU, menyatakan bahwa kita sesama umat berbeda agama harus dapat membedakan mana urusan agama dan mana urusan sosial. Masalah-masalah sosial bisa kita kerjasamakan. Tetapi dalam masalah agama, masing-masing saja, dan tidak bisa dikerjasamakan. Hal ini sesuai dalilnya:

*'Lakum diinukum waliyadain'*. Artinya: *"bagimu agamamu dan bagiku agamaku"*. Tetapi masyarakat di sini memang bisa hidup rukun dan saling menghargai atas dasar tidak saling mengganggu dalam masalah ibadah. Seperti di Gang Anom ada dua tempat ibadah yang letaknya berdampingan, tetapi sesama umat berbeda agama saling menyadari dan memahami. Contoh ketika umat Islam sedang melakukan kegiatan keagamaan, maka umat non muslim tidak melakukan kegiatan apapun.

Dalam pemilihan pimpinan lingkungan seperti pemilihan RT, RW masyarakat di wilayah ini dilihat atas dasar pemukiman penduduk. Jadi kalau penduduknya mayoritas non muslim, boleh saja mereka menjadi RT atau RW di pemukiman orang non muslim itu. Seperti contoh di kelurahan Karanganyar karena banyak orang Cina maka RTnya dipilih orang Cina.

## **Kerjasama Antar Umat Beragama**

### **Kerjasama dalam Kegiatan Keagamaan**

Menurut AF. Arifin Ketua MUI Kecamatan Astanaanyar dan aktivis organisasi NU, menyatakan bahwa sesama umat berbeda agama harus dapat membedakan mana urusan agama dan mana urusan sosial. Masalah-masalah sosial bisa kita kerjasamakan. Tetapi dalam masalah agama, masing-masing saja, dan tidak bisa dikerjasamakan. Sebagaimana dalilnya: *'Lakum diinukum waliyadain'*. Artinya: *"bagimu agamamu dan bagiku agamaku"*. Maksudnya adalah bagi penganut Islam menjalankan agama Islamnya, sedangkan bagi non muslim menjalankan agamanya sendiri dan jangan dicampuradukkan antara agama kamu dengan agama aku dikerjakan secara bersama-sama.

Masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Astanaanyar ini dalam kehidupan sehari-hari bisa hidup rukun dan damai, dengan dasar tidak saling mengganggu, tidak saling merendahkan dan tidak saling mencurigai agama orang lain. Seperti contoh di Gang Anom Desa Kecamatan Astanaanyar ada tempat ibadah yang letaknya berdampingan antara masjid dan gereja, di mana masing-masing umat berbeda agama tidak saling mengganggu bahkan saling menyadari dan memahami kalau waktunya umat Islam sedang melakukan kegiatan keagamaan maka umat non muslim tidak melakukan kegiatan apapun.

Begitu pula dalam perayaan hari-hari besar keagamaan seperti perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW atau peringatan Isra' Mi'raj, umat Islam tidak mengundang umat non muslim, jadi masing-masing saja kecuali sesama umat Islam itu sendiri. Bahkan bagi umat non muslim seperti perayaan Natalan perayaan hari Waisak, mereka juga tidak mengundang umat Islam. Hanya satu umat saja yang saling mengundang. Yang terpenting tidak saling mengganggu di antara masing-masing umat berbeda agama.<sup>9</sup>

### **Kerjasama dalam Pendidikan**

Pendidikan adalah suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Dengan kata lain pendidikan tidak hanya berlangsung di kelas, tetapi berlangsung pula di masyarakat. Pendidikan bukan hanya bersifat formal saja, tetapi bersifat non formal. (Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, 1992: 120).

Menurut Yayah Hidayat bahwa masyarakat di wilayah Astanaanyar, khususnya masyarakat Islam jarang sekali yang mau menyekolahkan anaknya di sekolah yang bercirikan khas agama lain karena masalah pendidikan merupakan hal yang sangat mendasar bagi anak-anak didik. Dengan menyebut dalil: "Kullu mauluudin yuuladu alal fitrah". Artinya, "tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan suci".

Kerjasamanya dalam pendidikan terhadap orang non muslim jelas ada, seperti: pembelian buku-buku dan pakaian yang dijual oleh orang-orang non muslim di pasar. Selain itu tidak bersedianya menyekolahkan anaknya di sekolah yang bercirikan khas agama lain menurut mereka karena di wilayahnya masih ada sekolah Islam Muhammadiyah dan sekolah umum lainnya.

### **Kerjasama dalam Ekonomi**

Masyarakat di Kecamatan Astanaanyar terbiasa bertemu dan berbicara dengan orang yang berbeda agama seperti : orang Islam berbicara dan bertemu dengan orang non muslim ketika terjadi transaksi jual beli barang di pasar atau di Toko. Orang Islam membeli TV, mobil, motor, emas, bahan-bahan pakaian atau barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya di toko milik orang-orang Cina. Begitu juga orang-orang non muslim berbicara dan bertemu dengan orang-orang Islam ketika terjadi

transaksi jual beli tanah milik orang Islam, atau juga orang-orang Islam memperbaiki alat-alat elektronik dengan orang-orang non muslim.

Kerjasama antar orang yang memiliki keahlian dengan orang yang tidak memiliki keahlian diperlukan walaupun mereka itu berbeda agama, suku, tingkat pendidikan maupun tingkat ekonomi. Menurut Yayah Hidayat, orang Katolik memiliki rasa toleransi. Mereka memberikan bantuan uang dan sembako tiap bulan untuk keperluan anak-anak yatim dibawah asuhannya sebanyak 40 orang.<sup>10</sup>

### **Kerjasama dalam Kegiatan Upacara Lingkaran Hidup**

Setiap manusia tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan seperti upacara lingkaran hidup, perkawinan, khitanan, tujuh bulanan dan melahirkan. Dalam pelaksanaan upacara tersebut, masyarakat merayakannya dengan mengundang teman-teman dan kerabat-kerabatnya terdekat dan para tetangga, walaupun berbeda agamanya. Biasanya umat non muslim bila diundang oleh orang Islam sebagai tetangganya mereka datang menghadiri upacara tersebut. Selain itu bila umat Islam mendapatkan musibah kematian, maka umat non muslim datang melayat ke rumah orang yang sedang mendapatkan musibah itu.

### **Kerjasama dalam Kegiatan Bakti Sosial**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari hubungan dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Tuhan telah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dari jenis laki-laki dan perempuan, tidak lain adalah untuk saling kenal mengenal di antara sesama. Dengan saling kenal mengenal, terjadi interaksi sosial, saling bekerja sama dalam kegiatan ronda malam, bersama-sama antar umat berbeda agama dalam hal kerja bakti membersihkan selokan, dan membersihkan jalan antar sesama Rukun Tetangga (RT) dan antar sesama warga.<sup>11</sup>

### **Kerjasama dalam Kegiatan Olah Raga**

Masyarakat di Kecamatan Astanaanyar sering melakukan gerak jalan bersama. Misalnya Camat setempat mengkoordinasikan para karyawan/karyawati, pemuda/pemudi dan ibu-ibu yang terlibat dalam kegiatan posyandu dan lainnya ikut memeriahkan gerak jalan bersama tanpa memandang latar belakang agama. Contoh lain adalah permainan tenis meja, bulu tangkis dan sepak bola dari masing-masing unsur terkait sebagai perwakilan.<sup>12</sup>

## Kesimpulan

Kondisi kehidupan keagamaan masyarakat Astanaanyar rukun. Masing-masing umat beragama dapat menjalankan agamanya tanpa saling mengganggu dan tidak saling merendahkan agama orang lain.

Kerjasama antar umat beragama dalam kegiatan-kegiatan sosial, dan bukan dalam kegiatan keagamaan. Dalam masalah keagamaan berdasarkan masing-masing pemahaman dan keyakinan agamanya.

Dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, terlihat sikap toleransi dari umat non muslim dan juga umat Islam. Tidak saling mengganggu antar penganut agama.

## Rekomendasi

1. Interaksi atau kerjasama sosial antar umat beragama yang telah dilakukan masyarakat Kecamatan Astanaanyar selama ini, perlu dipertahankan terus;
2. Toleransi antar umat beragama yang telah berjalan selama ini perlu ditingkatkan;
3. Suasana kerukunan antar umat beragama masyarakat Kecamatan Astanaanyar yang sudah begitu kondusif perlu dipertahankan terus.

## Catatan Akhir

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Kerjasama Antar Umat Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia*, Jakarta, 2008.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 13

<sup>3</sup> Ronald Robetson, *Agama Dalam Analisa Interpretasi Sosiologis*, Jakarta, 1992.

<sup>4</sup> *Profil Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung*, tahun 2008

<sup>5</sup> *Ibid*.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Tokoh Agama, H. Abdul Kholiq, Aktiv di MUI tingkat Kecamatan, tgl. 13 Oktober 2008.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Rachmat Setiawan, sebagai pimpinan PERSIS tingkat kecamatan.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Yayah Hidayat, Pimpinan Muhammadiyah Cabang Kecamatan Astanaanyar, 2008

<sup>9</sup> Wawancara dengan AF Arifin, Ketua MUI Kecamatan Astanaanyar, 14 Oktober 2008

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Yayah Hidayat, 13 Oktober 2008

<sup>11</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, 13 Oktober 2008

<sup>12</sup> Ibid.

### Daftar Pustaka

Alo Siliweri, Prof. Dr. MS. *Prasangka dan Konflik*, Jakarta, 2005

Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Kerjasama Antar Umat Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia*, Departemen Agama, Jakarta, 2008.

\_\_\_\_\_, *Tiga Kondisi Ideal Kehidupan Beragama di Indonesia*, Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, Jakarta, 1992.

Basri Yusriati, *Pembinaan Kehidupan Beragama Melalui Masjid di Kota Kecil Semarang, Profil Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung*, 2008.

Ronald Robetson, *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, Jakarta, 1992.

Saifuddin, Ahmad Fedyani, *Konflik dan Integrasi Sosial*, Jakarta, 1982.

Suerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, 2003.

## Mukti Ali dan Dialog Antar Agama: Biografi dan Pemikiran

Arifinsyah

*Dosen Fakultas Ushuluddin  
IAIN Sumatera Utara,  
Kandidat Doktor (S-3)  
PPs. IAIN Sumut  
dan Pengurus FKUB  
Propinsi Sumatera Utara*

### Pendahuluan

**A**. Mukti Ali, seorang sarjana perbandingan agama yang berhasil merintis hubungan antargama di Indonesia dan menumbuhkan gairah di kalangan mahasiswa IAIN untuk memperdalam pengetahuan dalam ilmu ini, sehingga ia dinobatkan sebagai Bapak Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia.<sup>1</sup> Ia adalah salah seorang pemikir pluralis yang dikenal kritis terhadap tradisinya sendiri. Meski seorang alumnus Barat, dalam melihat persoalan hubungan Islam-Barat, pluralisme, dan hubungan antaragama, ia cukup proporsional. Mukti Ali tidak berhenti dengan hanya mengkritik, dengan semangat *Religious Studies*, ia menunjukkan variasi-variasi dan perkembangan di dalam kajian hubungan antaragama, liberalisme, dan pluralisme termasuk orientalisme berperan dalam menciptakan konflik agama dan sebaliknya hubungan antaragama juga memiliki andil cukup besar dalam membentuk wajah pluralis di Indonesia.

Salah satu agenda besar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menjaga persatuan, kesatuan bangsa dan integrasi umat beragama dalam membangun perdamaian dan kesejahteraan hidup bersama. Untuk mewujudkan ke arah tersebut tentu melalui berbagai proses dan hambatan, salah satunya adalah

masalah kerukunan nasional, termasuk di dalamnya hubungan antarumat beragama. Persoalan ini semakin krusial kerana terdapat serangkaian kondisi sosial yang menyuburkan konflik, sehingga terganggu kebersamaan dalam membangun peradaban universal. Demikian pula kebanggaan terhadap kerukunan dirasakan selama bertahun-tahun mengalami *degradasi*, bahkan menimbulkan kecemasan terjadinya disintegrasi bangsa. Untuk itu diperlukan dialog yang diharapkan mampu menciptakan keharmonisan hidup beragama, sebagai modal dasar pembangunan nasional.

Kajian hubungan antaragama, tampaknya memang tetap menarik dan, dalam beberapa hal, telah menunjukkan ke arah peningkatan, lebih-lebih dalam lingkungan ilmiah-akademis. Terus dilakukannya berbagai upaya menuju terjadinya “kesepakatan” dalam hal bahasa, metodologi dan pendekatan dalam mengkaji agama-agama (*Religious Studies*), membuktikan bahwa kerjasama dan dialog antara tradisi keagamaan bukan hanya sekedar isu, tetapi sebuah pilihan yang nyata dalam bingkai persatuan Indonesia.

Dalam hubungan antaragama dan dialog pluralistik di Indonesia, maka pemikiran Mukti Ali merupakan fenomena yang menarik untuk ditelaah. Makalah ini mencoba mengkaji pemikiran Mukti Ali di seputar diskursus Perbandingan Agama dan dialog antara agama dalam konteks “*Agree in disagreement*” intern dan antarumat beragama di Indonesia. Alasan dipilihnya pemikiran Mukti Ali sebagai subjek kajian, tidak saja karena pemikiran itu melahirkan dari pemahamannya tentang pluralisme Islam di era global, di mana ia menjadi besar, tetapi juga tentang Islam dan studi Islam, dimana ia sendiri melihat dan membuktikannya. Dengan demikian mendapatkan informasi yang lebih terjamin keobjektifannya.

### **Mengenal A. Mukti Ali**

Prof. Dr. H. Abdul Mukti Ali (1923-2004), selanjutnya dipanggil Mukti Ali, lahir di Cepu, 23 Agustus 1923. Sejak berumur delapan tahun, Mukti Ali mengenyam pendidikan Belanda HIS. Ketika berumur 17 tahun, ia melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Termas-Pacitan, Jawa Timur. Pondok Pesantren ini juga menghasilkan alumnus KH. Ahmad Zabidi (mantan Dubes untuk Arab Saudi), Let. Jend. M. Sarbini dan KH. Ali Ma’shum (pengasuh Pondok Pesantren Krapyak dan Rois Aam PB NU).<sup>2</sup>

Semasa kecil ia bernama Boedjono, anak kelima dari tujuh bersaudara. Ayahnya bernama Idris. Tapi, setelah kembali dari menunaikan ibadah haji namanya ditukar menjadi H. Abu Ali. Sedangkan ibunya bernama Muti'ah, dan setelah menunaikan ibadah haji ditukar menjadi Hj. Khalijah. Di dalam penukaran-penukaran nama di tengah-tengah keluarga Mukti Ali tampaknya semacam tradisi. Secara berturut-turut, anak pertama dari Abu Ali bernama Soepeni, setelah menunaikan ibadah haji diganti namanya menjadi Hj. Zainab. Anak yang kedua laki-laki bernama Iskan diganti menjadi Iskandar, anak ketiga juga laki-laki pada mulanya bernama Ishadi diganti menjadi H. Dimayati dan anak keempat wanita bernama Umi Hafifah. Anak kelima itulah Boedjono ketika ia belajar di Pondok Pesantren Tremas, Pacitan, Jawa Timur, salah seorang ustadnya mengatakan, Boedjono termasuk santri yang cerdas. Di situ ia bukan hanya mendapatkan ilmu, melainkan juga nama baru, yakni Abdul Mukti Ali. Adik Mukti Ali ada dua orang yaitu Zainuri dan Sri Monah. Zainuri bertukar nama sampai dua kali, pertama Suwito dan setelah menunaikan ibadah haji bertukar lagi namanya menjadi H. Abdul Qadir.<sup>3</sup>

Pergantian nama itu adalah dilakukan oleh Kyai Abdul Hamid Pasuman, yang nama kecilnya sebelum menjadi seorang Kyai adalah Abdul Mukti, berbincang-bincang dengan Boedjono menyarankan untuk menukar namanya menjadi Abdul Mukti. Perintah penukaran nama ini oleh Boedjono dirasakan sebagai suatu penghormatan, sekaligus tantangan dan tanggungjawab moral untuk menjaga nama tersebut. Sejak itulah dia mengubah nama menjadi Abdul Mukti. Nama Abdul Mukti adalah pemberian gurunya, sedangkan nama Ali diambil dari potongan nama ayahnya yaitu H. Abu Ali.

Malam itu, Kiyai Hamid ingin meminta saya agar bersedia dipungut sebagai anak. Lalu, mengusulkan agar saya mengganti nama saya dengan Mukti Ali, karena itulah namanya sendiri sebelum ia naik haji ke Mekkah. Saya tentu terkejut, tetapi bangga juga, karena permintaan dari seorang kiyai seperti itu pasti ada maksud tertentu. Saya yakin bahwa itu adalah suatu kehormatan. Bagi saya, mengganti nama di kalangan masyarakat Jawa adalah biasa, seperti juga terjadi di keluarga saya. Tetapi, untuk menerima sebuah nama dari seorang kiyai besar seperti kiyai Hamid belum tentu dialami setiap orang. Bagi si penerima nama, hal itu merupakan tanggungjawab moral. Tetapi, himah juga.<sup>4</sup>

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, orang tua Mukti Ali bekerja sebagai pedagang, bergerak dalam bidang bisnis tembakau. Dengan semangat kerja keras orang tuanya dalam berdagang tembakau sampai usia 62 tahun boleh dikatakan cukup sukses. Begitu pula ibunya mengambil bagian berdagang kain, kendatipun tampaknya kedua orang tua Mukti Ali sibuk di bidang dagang, namun susunan dalam rumah tangga penuh keakraban dan kedamaian. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan pendidikan keluarga dan saudara-saudara Mukti Ali, yang dilandasi oleh nilai-nilai *akhlak al-karimah*.<sup>5</sup>

Meskipun tingkat pendidikan Abu Ali sangat rendah, diperolehnya hanya dari mengaji kitab di pesantren di Cepu, ia adalah orang tua yang dengan keras menyuruh anaknya untuk sekolah. Abu Ali mendatangkan guru *ngaji* untuk anak-anaknya ke rumah mengajarkan Alquran dan ibadah. Di sinilah, Boedjono memperlihatkan sikap yang sungguh-sungguh untuk belajar. Tampaknya, keluarga Mukti Ali yang mempunyai tradisi keagamaan yang dekat-dekat dengan tasawuf (ayahnya dan kakak tertuanya adalah pengikut jama'ah tarekat Qadiriyah di Cepu) berpengaruh padanya untuk ikut aktif di pengajian tarekat Naqsabandiyah, yang dipimpin KH. Hamid Dimiyati, di Pondok Termas.<sup>6</sup>

Alumnus Universitas Islam Indonesia ini, yang dahulu bernama Sekolah Tinggi Islam, Mukti Ali dikenal sebagai cendekiawan Islam yang pluralis. Menurut Website Tokoh Indonesia, ia adalah tokoh pembaharu Islam yang memelopori liberalisme pemikiran Islam di era Indonesia modern. Selain sebagai penggagas liberalisme Islam di Indonesia, ia terkenal sangat moderat dan pluralis, baik internal masyarakat Islam maupun eksternal di luar Islam.<sup>7</sup>

Mukti Ali muda, yang fasih berbahasa Inggris ini, kemudian melanjutkan studi ke India dengan memperoleh gelar doktor sekitar tahun 1952. Karena belum puas mengecap pendidikan, ia melanjutkan studi ke McGill University, Montreal, Kanada mengambil gelar MA. Di sana ia belajar dengan seorang dosen dan pembimbingnya yang simpati dengan Islam, yaitu Wilfred Cantwell Smith, ahli Islam dan studi agama-agama. Sejak ia menuntut ilmu di McGill University Montreal-Kanada gagasan pembaharuan Mukti Ali sebenarnya telah terlihat jelas. Mukti Ali misalnya kerap kali menulis soal-soal gagasan pembaharuan keislaman Muhammad Abduh dan Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah.

Meskipun saat itu, Mukti Ali masih pada taraf membandingkan gagasan pembaharuan kedua tokoh pembaru tersebut, namun benih-benih pembaharuannya itu menjadi *entry point* penting kelak dalam perkembangannya. Pesan-Pesan pembaharuan Islam yang disampaikan Mukti Ali memiliki gaya dan caranya yang khas. Berbeda dengan kebanyakan pemikir dan pembaharu Islam lainnya, Mukti Ali cukup lihai dan cenderung mengintodisir gagasan liberal Islam sedemikian rupa sehingga relatif tidak menimbulkan perlawanan dari kalangan yang tidak sepaham dengannya.

Yang unik dari cara mantan rektor IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta ini, bahwa Mukti Ali melakukan pembaharuan dan gagasan Islam liberal secara tidak gegap gempita, tidak bergaya provokatif dan disertai dengan solusi. Kalau ada kritikan terhadap pemikiran tertentu Mukti Ali, itu lebih disebabkan sikapnya terhadap para pemikir liberal di masanya. Misalnya terhadap Ahmad Wahib atau Harun Nasution, Mukti Ali dinilai sebagian kalangan sebagai memberi perlindungan kepara mereka daripada memberi kritik. Bagi Mukti Ali, membiarkan pemikiran liberal tumbuh akan lebih menguntungkan dan kondusif bagi perkembangan Islam modern. Karena itulah dapat dipahami bila tokoh ini tidak mengkritisi liberalisme Islam yang dikembangkan para intelektual semacam Ahmad Wahib maupun Harun Nasution.

Kenapa Mukti Ali berpikiran demikian, karena ia paham betul kondisi objek pemikiran keislaman saat itu, dimana kelemahan dan kemunduran umat Islam disebabkan oleh corak pemikiran yang dominan pendekatan fiqh yang normatif dan penghayatan agama secara mistis. Mukti Ali mengatakan:

Pemikiran ulama-ulama Indonesia dalam Islam lebih banyak ditekankan dalam bidang fiqh dengan pendekatan secara normatif. Kita mengetahui bahwa setelah Terusan Suez dibuka hubungan antara Indonesia dengan negeri Arab makin berkembang. Jemaah haji dari Indonesia makin meningkat, bahkan ada sebagian yang menetap di Tanah Suci, baik untuk belajar maupun untuk lainnya. Timbullah masyarakat 'Jawi' di Mekah. Sebaliknya orang-orang Arab, terutama dari Hadramaut, datang ke Indonesia untuk mengadu nasib. Akibat dari hubungan ini, pemikiran fiqh masuk ke Indonesia. Dengan itu dua kecenderungan berebut pengaruh di Indonesia, yaitu penghayatan agama secara tawasuf dan pendekatan agama secara fiqh yang normatif. Sudah barangtentu

pendekatan secara normatif ini dan berpusat sekitar fiqih adalah jauh berbeda dengan pendekatan secara ilmiah terhadap agama pada umumnya. Sudah barang tentu terhadap kedua pemikiran itu timbullah reaksi di kalangan pemikir-pemikir Muslim. Dalam hal ini kami ingin menyebutkan Harun Nasution, Guru Besar Filsafat Islam di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia menentang kehidupan agama yang serba mistis dan pendekatan agama secara normatif yang hanya terpusat kepada fiqih. Oleh karena itu ia mengarang buku-buku dalam bidang ilmu kalam dan filsafat. Namun demikian perbandingan agama dalam menghadapi reaksi yang sedemikian itu harus berhati-hari supaya ilmu itu tidak terseret dalam teologi maupun filsafat agama.<sup>8</sup>

Mukti Ali dalam melakukan pembaharuan Islam cenderung menjaga hubungan baik dengan kalangan masyumi ketika itu. Bahkan dia sendiri pernah menjadi sekretaris Muhammad Natsir, mantan ketua Masyumi. Selain itu, Mukti Ali juga membina dan mencoba merujukan hubungan baik antara NU dan Muhammadiyah, serta memelopori gerakan kerukunan antaragama.

Dalam konteks pemerintahan, Mukti Ali terlihat bagaimana keinginan kuatnya agar umat Islam ini masuk pemerintahan. Makanya ketika terjadi pro-kontra berkaitan penerimaan Asas Tunggal Pancasila, Mukti Ali menyarankan umat Islam agar menerimanya. Yang penting umat Islam dapat masuk pemerintahan dan memperjuangkan nasib mereka. Dan itu pula yang dilakukan Mukti Ali, baik melalui Departemen Agama maupun IAIN. Karir politiknya berada di puncak ketika menjabat Menteri Agama tahun 1971 hingga tahun 1978.

Ditulis di situs pusat data Tempo, ketika memimpin Departemen Agama, ia dikenal sebagai menteri yang 'lunak' terutama dalam menata kerja ke luar. Ia mampu mengubah departemennya dari 'departemen ideologi' menjadi departemen yang sinkron dengan semangat teknokratis, dan dikenal sebagai pencetus istilah 'pembangunan manusia Indonesia seutuhnya'.<sup>9</sup>

Selain itu, ia menganggap perlunya para ahli agama, yang bukan politikus, mengadakan dialog. "Sepuluh orang Islam, dan sepuluh orang lagi Yahudi, ujanya. Penyelenggara konsultasi itu, harus pihak ketiga, yakni Dewan gereja-gereja sedunia. Hal ini menurut dia, untuk menciptakan suatu perjanjian koeksistensi damai, dan tidak saling menyerang.

Dalam hal ilmu, ia memang bersikap liberal, mengizinkan lahirnya berbagai pemikiran tentang agama yang aneh sekalipun. Asal bisa didebat, katanya. Kan lebih baik berkreasi, walaupun salah ketimbang mematuhi kesimpulan-kesimpulan yang jumud (beku). Mukti Ali termasuk orang yang punya andil besar terhadap subur dan maraknya liberalisme Islam di Indonesia sekarang ini. Sebab, dalam masa kepemimpinannya di Departemen Agama, ia mengirim para sarjana IAIN untuk sekolah atau melanjutkan studi, belajar ilmu-ilmu Islam di negara-negara Barat. Beberapa intelektual Islam sekebalnya dari Barat menyebarkan paham sekularisme, liberalisme dan pluralisme.<sup>10</sup>

Masih menurut Tempo, setelah Mukti Ali berangkat menunaikan ibadah haji ke Makkah, kemudian bekerja di Kedubes RI Pakistan, sambil belajar di Universitas Karachi, Lahore. Di sana ia meraih gelar doktor untuk ilmu perbandingan agama. Sebelum kembali ke tanah air, ia sempat kuliah di Faculty of Devinity and Islamic Studies, Universitas McGill, di Montreal Kanada.<sup>11</sup>

Selain pernah menjadi anggota DPA, ia juga mengajar di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunun Kalijaga, Yogyakarta, khususnya pada Jurusan Perbandingan Agama. Hasratnya mencetak sarjana Islam yang ahli tentang Barat, yaitu para oksidental. Usaha wajib belajar bagi anak usia sekolah, disambutnya dengan penuh perhatian. Program orang tua asuh, patut dimasyarakatkan, ujarnya. Menurut agama Islam, hal itu merupakan amal jariah yang besar nilainya. Namun, ia kurang sependapat dengan sistem panti asuhan. Peninggalan kolonial Belanda ini, menurut dia, mempunyai dampak negatif dan cukup kompleks, tidak mendukung pembinaan seseorang untuk mandiri.

Menggeluti dunia perguruan tinggi, ayah tiga anak ini mengemukakan, pembangunan tanpa perguruan tinggi akan lumpuh. Sebaliknya, perguruan tinggi bisa gulung tikar, jika tidak ditanamkan cita-cita pembangunan. Karena itu, ia mengharap para mahasiswa mampu menjawab tuntutan dan kesertaan dalam setiap program pembangunan. Meski tak lagi menjabat sebagai menteri agama, gagasan dan pemikirannya ini tetap diteruskan oleh penggantinya, kala itu, Alamsyah Ratu Perwiranegara. Bahkan kemudian oleh penggantinya itu dikembangkan menjadi konsep, 'Trilogi Kerukunan' yang meliputi kerukunan intern umat

beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dan pemerintah.

Tak diragukan lagi, bahwa Mukti Ali yang menyelesaikan doktor mengenai perbandingan agama dari Universtas Lahore dan Universitas McGill Montreal Kanada, banyak menulis buku dan beberapa artikel. Di antara buku-buku yang ditulis oleh Mukti Ali, antara lain :

- *Beberapa Persoalan Agama Dewasa ini*, Rajawali, Jakarta, 1987.
- *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*, Djambatan, Jakarta, 1994.
- *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, IAIN Press, Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan Mizan, Bandung, 1992.
- *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh; Ahmad Dahlan, Muhammad Iqbal*, Mizan, Bandung, 1995.
- *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Mizan, bandung, 1991.
- *Asal Usul Agama*, Yayasan Nida, Yogyakarta, 1969.
- *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, Mizan, Bandung, 1991.
- Dan masih banyak lagi tulisan-tulisan di berbagai majalah serta artikel lainnya.

Walaupun dengan berbagai kesibukan yang ditekuni oleh Mukti Ali, namun ia masih dapat membagi waktu mengikuti organisasi baik dalam maupun luar negeri, seperti anggota Dewan Riset Nasional Jakarta, anggota Akademi Jakarta, anggota dewa penasehat pembentukan parlemen national Hijra Council Pakistan serta mengisi dalam maupun luar negeri.

Ia meninggal dunia dalam usia 81 tahun pada 5 Mei 2004, sekitar pukul 17.30 di Rumah Sakit Umum Dr. Sardjito, Yogyakarta. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarga besar IAIN Sunan Kalijaga di Desa Kadisoko, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Ia meninggalkan seorang isteri, tiga orang anak, dan empat orang cucu. Isterinya, Siti Asmadah, memandang mukti Ali sebagai sosok suami yang sangat sabar.<sup>12</sup>

### **Pemikiran Studi Agama dan Dialog**

Dalam perspektif Islam, dasar-dasar untuk hidup bersama dalam masyarakat yang pluralistik secara religius, sejak semula, memang telah

dibangun di atas landasan normatif dan historis sekaligus. Jika ada hambatan atau anamoli-anamoli di sana sini, penyebab utamanya bukan karena inti ajaran Islam itu sendiri yang bersifat intoleran dan eksklusif, tetapi lebih banyak ditentukan dan dikondisikan oleh situasi historis, ekonomis, politis yang melingkari komunitas umat Islam di berbagai tempat. Kompetisi untuk menguasai sumber-sumber ekonomi, kekuasaan politik, hegemoni kekuasaan, jauh lebih mewarnai ketidak-mesraan hubungan antar pemeluk agama dan bukannya oleh kandungan ajaran etika agama itu sendiri.<sup>13</sup>

Hal yang tak kalah urgennya adalah bagaimana menyediakan pondasi yang kondusif demi menghindarkan dialog dari premis-premis lama dan pemahaman-pemahaman yang salah. Termasuk pula, demi menghindari subyektifitas yang berbentuk superioritas di satu pihak, ataupun inferioritas di pihak lain. Karena memang, dalam penyelenggaraan sebuah dialog, kepercayaan yang berlebihan tidak lebih sedikit bahayanya dibanding rasa minder.

Sudah beberapa kali dan di beberapa tempat diadakan dialog, maka dapat dibentuk Badan Konsultasi Antar Umat Beragama yang merupakan badan yang membicarakan masalah pembangunan yang menyangkut kehidupan umat beragama di Indonesia. Hasil-hasil dialog yang sementara itu merupakan modal yang sangat besar dari pembangunan kita. Salah satu faktor yang mendukung suksesnya dialog antar agama di Indonesia adalah juga pantulan-pantulan dari berbagai macam pertemuan pemimpin-pemimpin agama yang bersifat regional dan internasional yang dihadiri oleh tokoh-tokoh agama dari Indonesia. Selain itu mental bangsa Indonesia berupa 'musyawarah untuk mufakat' yang merupakan prinsip bukan hanya dalam kehidupan politik tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah maka dialog-dialog antarumat beragama di Indonesia berjalan dengan baik.<sup>14</sup>

Karena itu, suatu dialog yang berhasil harus steril dari niatan untuk mengenyahkan pihak lain, atau bahkan mengeliminasi perannya. Termasuk pula harus steril dari niatan memonopoli kebenaran sepihak. Dengan kata lain, dialog antaragama yang hakiki harus berangkat dari etos saling menghargai, pandangan humanisme universal yang benar-benar menghargai kemanusiaan, persamaan martabat umat manusia,

menghapuskan egoisme, kesepahaman untuk menerima kebenaran dari pihak lain tanpa tendensi meremehkan atau mendistorsi. Dengan demikian, akan terjadi integrasi antarumat yang saling menyadari eksistensi dan menyelamatkan dunia dari perpecahan.

Pada masa Mukti Ali studi agama adalah kajian yang bersifat ilmiah dan objektif. Ilmu Perbandingan Agama didefinisikan sebagai :

Sebuah cabang ilmu pengetahuan yang berusaha untuk memahami gejala-gejala daripada suatu kepercayaan dalam hubungannya dengan agama-agama lain. Pemahaman ini meliputi persamaan, juga perbedaan. Dari pembahasan yang demikian itu, maka struktur yang asasi daripada pengalaman keagamaan daripada manusia dan pentingnya bagi hidup dan kehidupan orang itu akan dipelajari dan dinilai.<sup>15</sup>

Ada tiga metode yang digunakan oleh Ilmu Perbandingan Agama. Pertama metode Sejarah Agama (*History of Religion*), untuk mengumpulkan dan meneliti data-data fundamental agama-agama. Dengan mengkaji fakta-fakta tersebut sesuai standar prosedur ilmiah diharapkan akan dapat ditemukan gambaran universal dari pengalaman keagamaan manusia. Data-data keagamaan ini diambil dari fakta-fakta antropologis berupa artefak-artefak, dan juga pemikiran-pemikiran para pemimpin dan para pendiri agama besar di dunia, sejarah biografi masing-masing agama, serta rekonstruksi konsepsi agama berdasarkan prinsip-prinsip ajaran yang terdapat di dalam masing-masing agama tersebut. Kedua, metode yang digunakan adalah Perbandingan Agama (*Comparison of Religion*), sebagai jalan untuk memahami semua data-data yang berhasil dihimpun oleh sejarah agama. Data-data dari masing-masing agama dihubungkan dan diperbandingkan untuk menemukan struktur dasar pengalaman keagamaan dan konsep-konsep keagamaan, serta memunculkan karakteristik mengenai perbedaan maupun persamaan dari agama-agama yang ada. Ketiga, adalah filsafat agama (*Philosophy of Religion*), yang bertugas melakukan analisis dan pemahaman filosofis terhadap data-data agama yang dihimpun oleh sejarah agama dan telah dirumuskan karakteristik perbedaan maupun persamaannya oleh perbandingan agama, dalam rangka menemukan elemen-elemen keagamaan yang merupakan pengalaman manusiawi fundamental.<sup>16</sup>

Metode perbandingan agama dari Mukti Ali ini tidak banyak mengalami perkembangan yang signifikan hingga akhir dekade tahun

70-an. Selain karena kondisi masih baru, sehingga baik para pengkaji maupun kajian-kajian yang dilakukan masih dalam stadium awal, pada waktu ini kajian agama-agama lebih terfokus pada persoalan praktis menyangkut penataan, pembinaan dan pengembangan hubungan antar pemeluk agama-agama di Indonesia. Perlu dicatat bahwa hamper semua tokoh pengkaji agama kala itu adalah personil-personil pegawai Negara, baik dari lembaga pendidikan dan urusan agama maupun instansi-instansi lain, sehingga ketika pemerintah menetapkan program kerukunan umat beragama, mereka semua tersedot ke dalam proyek ini. Mukti Ali, yang kemudian menjabat menteri agama, dan tokoh-tokoh lain lebih disibukan oleh kegiatan menyelenggarakan dan menghadiri dialog-dialog agama-agama, baik nasional maupun internasional.

Dalam buku Ilmu Perbandingan Agama karya Mukti Ali tampil sebagai sosok seorang empu dalam ilmu perbandingan agama. Ia mengulas pertumbuhan dan perkembangan studi ilmu perbandingan agama, mulaidari akar-akar histories warisan kajian para ilmuwan Barat mengenai agama-agama di Indonesia, khususnya yang dikembangkan oleh Snouch Horgronje dan para pelanjutnya, serta tradisi akademik Leiden. Ia juga menyinggung kendala-kendala yang dihadapi studi perbandingan agama selama ini, yang ia indikasikan ada empat poin. Pertama, kurangnya literature ilmiah studi agama di perpustakaan yang ada di Indonesia; kedua, kurangnya kegiatan penelitian dalam bidang ini; ketiga, rendahnya frekuensi maupun intensitas diskusi-diskusi akademis; dan keempat, lemahnya penguasaan bahasa asing dari para pengkaji agama, baik untuk mengakses sumber-sumber literature ilmiah maupun teks-teks asli agama-agama.

Dalam wacana dunia komtemporer, isu dialog telah menjadi isu sentral di segala lapisan. Saat ini manusia sedang hidup dalam masa yang carut marut dengan kepentingan, dimana persoalan-persoalan yang ada, berkembang dalam bentuk yang tak pernah terjadi sebelumnya. Karena itu, upaya pencarian solusi melalui dialog merupakan suatu kemestian yang tak bisa ditawar-tawar lagi.<sup>17</sup> Kenapa demikian, karena jalan panjang sejarah kebudayaan antaranak manusia, senantiasa menyimpan bibit konflik yang satu saat akan terjadi menjadi ancaman sekaligus kehancuran peradaban manusia itu sendiri.

Dialog antaragama termasuk bagian yang tak terpisahkan dari dialog antar peradaban. Seperti diketahui, peradaban-peradaban di seluruh penjuru dunia utamanya dibangun di atas pondasi keagamaan. Para penulis terkemuka di Barat sampai saat inipun relatif sepakat bahwa agama merupakan elemen paling penting dalam membentuk setiap peradaban, terutama jika dibanding dengan bahasa, sejarah, dan kebudayaan. Karena itu, Barat mengidentifikasi peradaban mereka sebagai peradaban Kristen, sebagaimana kaum muslimin juga mengidentifikasi peradaban mereka sebagai peradaban Islam.<sup>18</sup>

Mukti Ali berpendapat bahwa mempelajari ilmu perbandingan agama secara ilmiah bisa digabungkan dengan tujuan untuk mencapai kerukunan hidup antar umat beragama. Dengan ini, maka Mukti Ali tidak menyetujui pendapat 'ilmu untuk ilmu', dan 'seni untuk seni', akan tetapi berpendapat bahwa ilmu, juga seni, untuk ibadah. Oleh karena itu mempelajari ilmu perbandingan agama bertujuan untuk menciptakan dunia yang penuh dengan moral dan etik dan bukan dunia yang penuh dengan rudah dan atom. Inilah amal bakti peminat perbandingan agama sebagai seorang muslim.<sup>19</sup>

Di sinilah perlunya keluawasan wawasan keilmuan dan wawasan keagamaan untuk terciptanya integritas bangsa yang konstruktif dan produktif. Perlunya integrasi, karena adanya keragaman, baik ragam ras, suku, bahasa, budaya maupun agama. Agama merupakan fenomena universal dalam kehidupan manusia secara menyeluruh, dari yang primitif hingga yang ultra-modern, mulai dari manusia pertama, hingga kita yang hidup sekarang di awal millenium ketiga. Agama juga menjadi ciri umum bagi manusia yang hidup di segala penjuru bumi, orang barat dan orang timur sama-sama memiliki keyakinan atas adanya sesuatu yang sakral yaitu Realitas Tertinggi (*The Ultimate Reality*), dimana pemikiran dan tingkah laku manusia dipengaruhi oleh keyakinan tersebut. Tidaklah mengherankan jika manusia sering didefinisikan sebagai makhluk yang beragama (*homo religious*), sekaligus makhluk social (*zoon politicon*). Sebagaimana disebut Ibn Khaldun; "manusia mempunyai tabiat bermasyarakat dan berbudaya (*al insan madaniyyun bi al thaba'*).<sup>20</sup>

Tidak diragukan lagi bahwa agama adalah sebuah fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas secara alamiah. Masyarakat mana pun tidak akan dapat terlepas dari fenomena ini, baik dahulu maupun sekarang. Kebenaran yang tidak dapat dipungkiri adalah

bahwa agama merupakan fenomena kemanusiaan yang tumbuh bersama manusia. Sedangkan tindakan manusia dalam memeluk agama dalam bentuk apa pun merupakan realitas sejarah yang tidak dapat diragukan lagi. Oleh sebab itu, dari masa ke masa, manusia manapun tidak akan dapat melepaskan diri dari agama. Sebagaimana Geoffrey Parrinder menyebutkan:

Orang melihat agama yang ada di dunia ini secara menyeluruh akan mendapatkan agama dalam bentuk yang sangat rumit. Sejak dahulu hingga sekarang, bentuk-bentuk keyakinan beragama terus berkembang. Keyakinan-keyakinan tersebut telah menghasilkan ritual-ritual dan praktek-praktek yang tidak terhingga jumlahnya. Ritual-ritual itu merupakan bentuk usaha manusia untuk memberikan suatu makna bagi dunia ini dan juga untuk memberikan makna bagi kehidupan ini. Ketika manusia melihat perkembangan, agama mulia dari zaman prasejarah hingga agama Islam, maka dia akan merasa bingung atas beragamnya agama yang tiada batas ini.<sup>21</sup>

Secara realita, agama yang terdapat di kehidupan kita, termasuk di Indonesia cukup beragam baik agama yang berskala dunia ataupun yang hanya terdapat pada suatu kelompok lokal tertentu. Akan tetapi kesadaran tentang keragaman itu hanya sebatas sampai kepada hitung-hitungan jumlah. Fenomena keberagaman itu memang diakui cukup menonjol di dalam masyarakat, akan tetapi perhatian terhadap gejala itu hanya sebatas sampai kepada seremoni yang merupakan hari-hari penting bagi masing-masing sejarah keagamaan. Tetapi, dengan berbagai kasus setelah reformasi, sekalipun kasus-kasus konflik yang melanda sebagian daerah di tanah air tidak langsung berkaitan dengan akar emosi keagamaan, namun diakui atau tidak, fakta tersebut menyentak kita bahwa potensi agama itu cukup penting dalam melahirkan integrasi atau konflik di dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Ungkapan di atas menjadi satu bukti bahwa keragaman merupakan *sunnatullah* atau sebuah keniscayaan yang harus dihargai sekaligus dipelihara, sebagai khazanah membangun kebersamaan untuk didialogkan secara arif dan bijaksana. Tepat sekali bila dikatakan, bahwa hidup bersama mutlak perlu bagi manusia, walau beragam budaya dan agama, dalam mempertahankan hidupnya, baik secara individual, komunal maupun berbangsa. Karena keberagaman ini merupakan kenyataan yang telah ditetapkan oleh Yang Punya alam semesta ini. Tapi bila ada yang menolak,

ia akan menemukan kesulitan, karena berhadapan dengan kenyataan itu sendiri.

Mengingat kemajemukan tersebut merupakan realitas sosial dan sebuah ketentuan dari Realitas Tertinggi, maka bagi manusia tidak ada alternatif lain, kecuali menerima dan memelihara dengan mengarahkan kepada kepentingan dan tujuan bersama. Pada zahirnya, keragaman budaya dan agama dapat menjadi sumber perpecahan yang tidak mustahil mengarah kepada munculnya *saparatism*. Tapi karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, maka cukup signifikan sebagai modal membangun persatuan dan kebersamaan yang hakiki. Dengan modal keragaman inilah insan Indonesia menggalang dan membina persatuan, menjadi hasrat kolektif dalam membangun bangsanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mukti Ali :

*Pluralisme agama* di dunia adalah suatu kenyataan yang makin lama makin jelas kelihatan, karena makin mudahnya komunikasi. Di Indonesia pun terdapat agama-agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Agama-agama itu merupakan jalan hidup bagi sebagian besar umat manusia. Agama-agama itu merupakan ekspresi yang hidup dari pelbagai macam jiwa kelompok umat manusia yang sangat luas. Agama itu membawa pantulan beribu-ribu tahun lamanya dari usaha untuk mencari Tuhan. Agama-agama itu memiliki pusaka yang mengesankan dari teks-teks agamais. Agama-agama itu menyadarkan kepada generasi umat manusia bagaimana untuk hidup, bagaimana untuk berdoa, dan bagaimana untuk mati. Oleh karena itu, agama apa pun tidak bisa mengabaikan agama-agama yang bukan agamanya sendiri.<sup>23</sup>

Dalam konteks agama, pluralitas merupakan bagian dari anatomi keragaman yang dilihat dari sudut kepercayaan yang dianut masyarakat. Penjelasan secara khusus dari perspektif ini menunjukkan bahwa persoalan ini adalah masalah yang urgen dan signifikan secara analitis. Peranan agama tidak bisa dipandang sebelah mata dalam melahirkan integrasi umat dan hubungan sosial, kebudayaan, maupun peradaban. Agama menempati tempat yang sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya di Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat yang religius. Pluralitas agama di kawasan ini ditandai dengan keragaman agama yang ditemukan dan sekaligus diterima sebagai agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu diajukan sebagai salah satu bagian dari agama-agama yang mendapat legimitasi formal

untuk hidup berdampingan dengan agama-agama tersebut. Kenyataan pluralitas agama di Indonesia menunjukkan adanya dinamisasi sekaligus problematik yang dihadapi bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan dalam kebersamaannya.

Umat beragama sadar bahwa mereka hidup di dunia yang serba ganda. Dunia semakin sempit dan semakin beraneka ragam. Persoalan kita dewasa ini ialah bagaimana kita bisa hidup bersama bukan hanya dalam perdamaian, tetapi juga dalam suasana saling percaya memperayai dan setia satu sama lain. Ini berarti bahwa kita harus berusaha sekeras-kerasnya supaya orang lain percaya kepada kita, sebagaimana kita pun dapat memahami dan menghargai mereka. Kita harus berusaha menciptakan situasi di mana kita dapat menghormati nilai-nilai yang dihormati oleh orang lain, dengan tidak usah meninggalkan nilai-nilai yang kita junjung tinggi sendiri. Untuk itulah umat beragama lalu mengadakan dialog.<sup>24</sup>

Untuk mewujudkan persaudaraan yang sejati atau solidaritas sosial (*ashobiyah*) dalam piranti integrasi umat beragama, paham pluralis harus disertai keterlibatan aktif dalam dialog konstruktif dan produktif membangun kehidupan bersama. Pluralitas tidak cukup hanya dengan mengakui dan menghormati keberadaan orang lain yang berbeda etnis, warna kulit, bahasa, maupun agama, tetapi juga harus disertai kesadaran yang mendalam untuk bersama-sama membangun suatu pergaulan yang dilandasi penghargaan dan penghayatan atas kemaje mukan.<sup>25</sup>

Menurut Mukti Ali, untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar terwujud kestabilan di tengah-tengah masyarakat yang prulalistik, budaya bahasa dan agama bukanlah suatu hal yang mudah. Untuk itulah tampaknya beliau merumuskan konsep "*Agree in Disagreement*" yang artinya setuju dalam perbedaan. Mengenai pengertian konsep ini, beliau menguraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Bangsa Indonesia yang kini sedang membangun menuju manusia seutuhnya hidup dalam "*Plural Society*" masyarakat serta ganda, baik keyakinannya, agamanya, bahasa dan budayanya. Manusia Indonesia yang beragama ini dituntut supaya rukun dalam kehidupan agama. Kericuhan dalam kehidupan agama merupakan halangan bagi pembangunan. Pembangunan mustahil dilaksanakan dalam masyarakat yang kacau balau. Kerukunan hidup masyarakat merupakan pra kondisi bagi pembangunan. Rukun dalam kehidupan agama dapat tercipta apabila

tiap-tiap orang itu saling tenggang menengggalkan rasa dan lapang dada (toleran).<sup>26</sup>

Dari Konsep yang diungkapkan Mukti Ali di atas, berarti dapat dipa-hami bahwa kerukunan hidup beragama dalam mengisi pembangunan mutlak diperlukan. Lahirnya kerukunan dari masing-masing agama, serta bekerjasama untuk merumuskan langkah-langkah yang akan diambil untuk mempercepat arus pembangunan material maupun spiritual, dengan adanya kerukunan dan kerjasama antar pemeluk agama, bukan agama tetapi untuk mencari rumusan yang mempunyai kesamaan pandangan tanpa merugikan pihak agama lain. Di sini lebih lanjut Mukti Ali memaparkan pendapatnya dengan penuh keyakinan bahwa:

Dengan jalan *Agree in Disagreement* (setuju dalam perbedaan). Ia percaya bahwa agama yang di peluk itulah agama yang paling baik, dan mempersilahkan orang lain untuk mempercayai bahwa agama yang diperlukannya adalah agama yang paling baik. Dan yakin bahwa antara satu agama dan yang lainnya, saling terdapat perbedaan, juga terdapat persamaan. Berdasarkan pengertian itulah saling menghargai ditimbulkan antara pemeluk agama yang satu dan pemeluk agama yang lain.<sup>27</sup>

Dari konsep *Agree in Disagreement* itulah timbulnya upaya Mukti Ali untuk memelihara dan menciptakan kestabilan nasional dapat berjalan lancar melalui kerukunan hidup beragama. Dalam upaya mewujudkan cita-cita yang ideal dalam kehidupan beragama, yang terbaik ditempuh kata Mukti Ali adalah:

*Agree in Disagreement*, setuju dalam perbedaan, inilah jalan yang paling baik ditempuh untuk menimbulkan kerukunan hidup beragama. Orang yang beragama harus percaya bahwa agama yang ia peluk itulah agama yang paling baik dan paling benar. Dan orang lain juga dipersilahkan, bahkan dihargai, untuk percaya dan yakin bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik dan paling benar. Sebab apabila orang tidak percaya bahwa agama yang ia peluk itu adalah agama yang paling benar dan paling baik, maka adalah suatu kebodohan, untuk memeluk agama itu. Dengan keyakinan bahwa agama yang ia peluk itu adalah agama yang paling bertingkah laku lahiriah sesuai dengan ucapan batinnya yang merupakan dorong agama yang ia peluk. Kemudian antara satu agama dengan agama yang lain, masih banyak terdapat persamaan-

persamaannya. Dan berdasarkan pengertian itulah hormat menghormati dan harga menghargai ditumbuhkan. Dan dengan dasar inilah, maka kerukunan dalam kehidupan beragama dapat diciptakan. Hormatilah manusia dengan segala totalitasnya, termasuk agamanya.<sup>28</sup>

Dari uraian Mukti Ali yang cukup cermat dan bernas mengenai *Agree in Disagreement*, menurut hemat penulis ide ini adalah sangat tepat untuk terus di tumbuh kembangkan di tengah-tengah masyarakat sebagai wadah social control dalam kehidupan beragama. Sebab menurut analisa penulis bahwa ide *Agree in Disagreement* memiliki dua wawasan. Pertama, berwawasan ke Ilahian, dalam hal ini adalah menjamin kebebasan masing-masing agama untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Disamping itu pula kebebasan untuk mengaktualisasikan ajaran agamanya masing-masing untuk kebaikan di tengah-tengah ummat. Kedua, berwawasan ke manusiaan, dalam hal ini berarti saling menghormati, menghargai dan megasihi di sepanjang batas-batas kemanusiaan, tanpa merugikan keyakinan agama lain. Kesimpulan seperti ini adalah tercermin dari dua hal pernyataan Mukti Ali yakni:

Pertama, kita harus berpegang teguh terhadap etika penyiaran agama. Jangan sampai kita menyiarkan agama kepada kepada orang yang jelas telah memeluk suatu agama, apalagi memaksanya. Begitu juga jangan sekali-kali menggunakan atau memanfaatkan kemiskinan seseorang untuk menyebarkan agamanya, dengan memberikan uang, bantuan dalam pendidikan, pertolongan mengenai obat-obatan dan sebagainya.

Kedua, kita harus dapat menjembatani dan menutup gap atau kesenjangan antara indahny ajaran dengan pelakasanaannya. Di Indonesia jalan keluarnya untuk menjaga kerukunan beragama diatur dalam SKB antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri antara lain dalam mendirikan bangunan masjid, gereja, kuil maupun rumah ibadah lainnya harus ada izin bangunan yang memperhatikan lingkungan, tidak dibenarkan menyiarkan agama pada orang yang sudah beragama.

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa pada masa Mukti Ali mulai dikenal sejumlah metode dan pendekatan dalam studi agama-agama. Seperti diketahui perkembangan pendekatan terhadap masalah agama setelah max Muller (1823-1900 M) dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu pendekatan dari sudut sosiologis, etnologis, psikologis dan

historis. Sesudah itu muncul pendekatan fenomenologis yang kemudian diikuti oleh pendekatan historis-fenomenologis.

Dikenalnya sejumlah pendekatan dan metode dalam studi agama-agama itu tentu saja membawa implikasi positif bagi keberlangsungan dialog antaragama di Indonesia. Dialog yang berlangsung pada periode ini tidak lagi berisi salah pengertian dan kecaman antar umat beragama, tetapi justru menumbuhkan upaya saling memahami dan menggalang toleransi antar umat beragama. Apalagi dengan semakin populernya pendekatan historis, kesadaran akan pentingnya prinsip *agree in disagreement* (setuju dalam ketidaksetujuan) semakin menguat.

Satu dasawarsa belakangan ini adalah era dimana dialog antar agama diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi secara bersama-sama oleh berbagai penganut agama. Dapat dikatakan era ini adalah era dialog antar agama dalam pigura humanisasi. Maksudnya, dialog dalam sekarang ini berisi pembicaraan mengenai tema-tema sentral problem kemanusiaan universal, seperti kemiskinan, lingkungan hidup, hak asasi manusia, kependudukan bahkan masalah buruh. Model dialog seperti itu tampaknya dilandasi oleh kesadaran bahwa tantangan yang dihadapi agama adalah juga tantangan yang dihadapi oleh manusia. Berarti jika agama berurusan dengan perbaikan nasib manusia dalam segala aspek, maka hal yang sama sebenarnya juga ingin dicapai oleh manusia, lepas dari apakah ia beragama maupun tidak. Setidak-tidaknya disini dapat ditunjuk konsep keselamatan bagi penganutnya, yang dicita-citakan setiap agama, sebagai titik pertemuan.

Apabila model studi agama seperti ini (dialog pihura humanisasi) dan dilandasi oleh kejujuran intelektual, maka dialog menjadi sebuah kemestian, sebab kejujuran intelektual merupakan kriteria penting dalam Ilmu Perbandingan Agama. Selama ini, sadar atau tidak, masalah kejujuran intelektual ini sering diabaikan. Sehingga para ahli ilmu perbandingan agama terkadang mendistorsikan suatu agama tertentu di hadapan agama lain. Penyusutan agama ini, jika boleh disebut demikian, jelas merupakan sikap tidak adil terhadap agama-agama itu sendiri.

Dialog dan kerukunan antar umat beragama masih merupakan barang mewah di dunia ini. Di Timur Tengah, India, Burma dan di tempat lainnya, ketegangan antar umat beragama masih sangat tampak menghiasi

berita surat kabar. Di berbagai Negara, pluralitas keberagamaan manusia dapat dengan mudah mencabik-cabik kesatuan dan persatuan bangsa. Pluralitas agama di Indonesia, yang berpenduduk mayoritas Muslim, begitu banyak mendapat sorotan tajam dari banyak pengamat luar negeri. Meskipun beberapa kalangan tertentu di alam negeri masih ada yang merasa tidak puas terhadap kehidupan beragama di tanah air, namun para pengamat dari luar mulai melihat model dialog dan kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia sebagai alternatif yang perlu dikembangkan.

### **Ilustrasi Penutup**

Dialog agama sekarang ini telah menjadi suatu keniscayaan dan mendesak agama-agama, termasuk keislaman untuk menghadapi dan mengubah paradigma pemahaman teologinya. Semua agama menurut A. Mukti Ali, tidak hanya didesak untuk memikirkan sikap praktis untuk bergaul dengan agama yang lain, tetapi juga didesak untuk memahami secara teologis apakah makna kehadiran agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang lain itu. Mengembangkan teologi agama-agama bukan tanpa kesulitan kuat dalam Islam serta resistensi fundamentalisme Islam. Secara eksternal, pluralisme agama dicurigai sebagai misi terselubung kekristenan untuk mempertobatkan yang lain dan sekaligus keengganan mengakui bahwa kebenaran agamanya relatif.

Proses munculnya pluralitas agama di Indonesia dapat diamati secara empiris historis. Secara kronologis dapat disebutkan bahwa dalam wilayah kepulauan Nusantara, hanya agama Hindu dan Budha yang dahulu dipeluk oleh masyarakat, terutama di pulau Jawa. Candi Prambanan dan candi Brobudur adalah saksi sejarah yang paling otentik. Kenyataan demikian tidak menepikan tumbuh berkembangnya budaya anismisme dan dinamisme, baik di pulau Jawa maupun di luar Jawa.<sup>29</sup> Ketika penyebaran agama Islam lewat jalur perdagangan sampai di pulau Nusantara, maka proses perubahan pemeluk agama secara bertahap berlangsung. Islam bukannya agama terakhir yang masuk ke wilayah kepulauan Nusantara. Ketika kepulauan nusantara memasuki era penjajahan Eropa, terutama penjajahan Belanda, sekitar abad 16, agama Kristen Protestan dan Katolik ikut menyebar secara luas. Hal ini satu bukti

bahwa pluralitas agama menjadi sebuah keniscayaan yang harus disikapi secara arif dan ilmiah.

Sekalipun muncul kecurigaan, perlawanan dan penolakan terhadap pentingnya pluralisme dan dialog agama bukan berarti sikap demikian disetujui dan menyurutkan tekad mengembangkan pluralisme dan dialog. Apa yang telah digagaskan oleh A. Mukti Ali memperlihatkan suatu usaha yang serius dan menganalisis sejauhmana relasi keislaman dengan agama-agama lain, khususnya agama Kristen di Indonesia. Baik secara pribadi, maupun kelembagaan yang pernah beliau nahodai, tidak luput dari usaha untuk memahami kepada umat Islam bahwa pluralisme itu adalah sebuah keniscayaan dan tak terelakkan oleh anak manusia, karena dunia semakin hari semakin terasa sempit dan dekat sehingga semua informasi mudah diakses. Dengan demikian diperlukan dialog inklusif untuk menciptakan perdamaian dan kebersamaan dalam perbedaan, "*agree in disagreement*".

Jika eksklusivisme dan inklusivisme tidak memadai lagi bagi keislaman dalam relasi dengan agama-agama lain, maka paradigma pluralisme menjadi pilihan terbaik. Tentunya pluralisme yang memiliki konsistensi dengan jati diri dan menjunjung tinggi nilai-nilai keyakinan dasar. Pluralisme menggunakan pendekatan teosentris yang menekankan pada kehendak universal Allah untuk menyemalatkan seluruh manusia. Artinya, bagaimana berbagai agama dapat berdialog secara jujur dan terbuka sehingga dapat memberikan sumbangsih penting dalam menanggulangi penderitaan manusia dan kerusakan lingkungan yang akut. Tanpa mengklaim bahwa semua agama itu sama (*equal*), umat Islam dengan mentalitas korelasional berpendapat bahwa sejak permulaan semua pihak harus saling mengakui persamaan hak di dalam dialog antaragama, sehingga setiap penganut agama berhak berbicara, atau membuat klaim, dan peserta lain membuka hati dan pikiran terhadap kebenaran dari partner dialognya.

Dialog agama memberi peranan penting bagi terselenggaranya dialog agar tercapai saling pengertian yang mendalam. Dialog bukanlah suatu kegemaran intelektual melainkan suatu keharusan.<sup>30</sup> Dialog sejatinya dilakukan dalam kesetaraan, *par cum pari* (setara dengan setara). Dalam dialog tidak boleh mengabaikan prinsip dan tidak boleh sekedar mencari

kedamaian palsu, sebaliknya harus ada kesaksian yang diberi dan diterima guna saling memajukan satu sama lain di dalam perjalanan pencarian dan pengalaman keagamaan.

Dialog antaragama dapat meningkatkan kerjasama dalam masyarakat dan saling pengertian dan saling hormat antar manusia. Agama adalah salah satu dorongan yang paling kuat untuk berbuat. Juga kebudayaan dan agama adalah sangat erat hubungannya. Masyarakat umat manusia selalu dihadapi oleh perubahan dan tantangan, bahaya dan ketegangan, krisis dan kesempatan, yang menuntut umat beragama untuk meningkatkan keadilan dan perdamaian, cinta dan kasih dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa.\*\*\*

### Catatan Akhir

<sup>1</sup> Azyumardi Azra, (Ed), *Menteri-Menteri Agama RI; Biografi Sosial-Politik*, Seri INIS, Jakarta, 1998, hlm. 286.

<sup>2</sup> Goenawan Muhammad, *Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia*, PT. Grafiti Press, Jakarta, 1984, hlm. 56.

<sup>3</sup> M. Damami (dkk), H.A. Mukti Ali; *Ketaatan, Kealahan dan Kecendikiawanan, dalam Abdurrahman (Ed), Agama dan Masyarakat, 70 Tahun H.A. Mukti Ali*, IAIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 3-6.

<sup>4</sup> Azyumardi Azra, *Op.cit.*, hlm. 275.

<sup>5</sup> *Op.cit.*, hlm. 7.

<sup>6</sup> Azyumardi Azra, (Ed), *Op.cit.*, hlm. 273. Mukti Ali sendiri pernah dimasukkan ke pesantren tarekat di Padangan, Tuban. Tetapi ia segera menghentikan amalan-amalan tarekat itu setelah mendengar nasehat Kiyai Dimiyati.

<sup>7</sup> [www.tokohindonesia.com](http://www.tokohindonesia.com) *Ensiklopedi Tokoh Indonesia*, [www.pdat.co.id](http://www.pdat.co.id).

<sup>8</sup> A. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, IAIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, 1988, hlm. 7.

<sup>9</sup> [www.tokohindonesia.com](http://www.tokohindonesia.com) *Ensiklopedi Tokoh Indonesia*, [www.pdat.co.id](http://www.pdat.co.id).

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup> Goenawan Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 56.

<sup>12</sup> [www.tokohindonesia.com](http://www.tokohindonesia.com) *Ensiklopedi Tokoh Indonesia*, [www.pdat.co.id](http://www.pdat.co.id).

<sup>13</sup> M. Amin Abdullah, *Etika dan Dialog Antar Agama; Perspektif Islam*, dalam *Jurnal Ilmiah "Ulumul Quran"*, Nomor, 4, Vol. IV Th. 1993, hlm. 22.

<sup>14</sup> A. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama...*, hlm. 67-68.

<sup>15</sup> A. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama, Sebuah Pembahasan Tentang Methodos dan Sistem*, NIDA, Yogyakarta, 1965, hlm. 75.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>17</sup> Baca; Ismail Raji al-Faruqi, *Triialogue of The Abrahamic Faith*, Amana Publications Beltsville, Maryland USA, 1995. hlm. ix-xi. Dan lihat; Burhanuddin Daya, *Agama Dialogis, Merenda Dialektika Idealita dan Realitas Hubungan Antaragama*, LKiS, Yogyakarta, 2004, hlm. 22-28.

<sup>18</sup> Baca; Hassan Hanafi, *Dialog Agama dan Revolusi*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1991. hlm, 120-126.

<sup>19</sup> A. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, dalam “*Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia (Beberapa Permasalahan)*”, INIS, Jakarta, 1990, hlm. 11.

<sup>20</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Pustaka Firdaus, Jakarta, 2000, hlm. 71-72.

<sup>21</sup> Geoffrey Parrinder, *World Religions, From Ancient History to Present, Fact on File*, Publication, New York, hlm. 508.

<sup>22</sup> M.Ridwan Lubis, *Membangun Kehidupan Umat Beragama, Yang Rukun, Demokratis dan Bermakna*, Citapustaka Media, Bandung, 2003, hlm. 28.

<sup>23</sup> A. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi*, dalam INIS, Jalarta, 1992, hlm, 215-216.

<sup>24</sup> A. Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Rajawali Press, Jakarta, 1987, hlm. 364.

<sup>25</sup> Baca; Alwi Shihab, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Mizan, Bandung, 1997, hlm. 41-43.

<sup>26</sup> H. Soeroyo, H. A. Mukti Ali dan *Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*, dalam Abdurrahamn (Ed), *Op.cit.*, hlm. 105-106.

<sup>27</sup> A. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda*, Seri INIS, jilid 14, Jakarta, 1992, hlm. 229.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 230-231.

<sup>29</sup> Menurut paparan A. Mukti Ali, Aliran modern dalam Islam di Indonesia berusaha dengan gigih untuk menghilangkan pengaruh animisme dan dinamisme yang terekspresikan dalam macam-macam bid’ah, khurafat, takhayul dari batang tubuh ajaran agama Islam. Lihat A. Mukti Ali, *Alam Pemikiran Islam Modern di Indonesia*, Jajasan NIDA, Yogyakarta, 1971, hlm. 14.

<sup>30</sup> Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan Katakanlah: “Kami Telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami Hanya kepada-Nya berserah diri”. (QS. 29:46). Dan Alquran sendiri telah menjelaskan kepada umat manusia bahwa tugas agama bukan untuk saling bersaing mencapai tujuan-tujuan duniawi, melainkan untuk berlomba-lomba mengerjakan kebajikan. Begitulah yang dipaparkan oleh Alquran melalui firmanNya. (QS.5:48).

<sup>30</sup> Olaf H. Schumann, *Menghadapi Tantangan Memperjuangkan Kerukunan*, kata pengantar oleh Komaruddin Hidayat, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2004, hlm. 122.

## Daftar Pustaka

- A. Mukti Ali, *Alam Pemikiran Islam Modern di Indonesia*, Jajasan NIDA, Yogyakarta, 1971.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Rajawali Press, Jakarta, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*, Djambatan, Jakarta, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Mizan, Bandung, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, Mizan, Bandung, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda*, Seri INIS, jilid 14, Jakarta, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, dalam "Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia (Beberapa Permasalahan)", INIS, Jakarta, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, IAIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi*, dalam INIS, Jakarta, 1992.
- Abdurrahman (Ed), *Agama dan Masyarakat, 70 Tahun H.A. Mukti Ali*, IAIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta.
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Mizan, Bandung, 1997.
- Azyumardi Azra, (Ed), *Menteri-Menteri Agama RI; Biografi Sosial-Politik*, Seri INIS, Jakarta, 1998,
- Burhanuddin Daya, *Agama Dialogis, Merenda Dialektika Idealita dan Realitas Hubungan Antaragama*, LKiS, Yogyakarta, 2004.
- Geoffrey Parrinder, *World Religions, From Ancient History to Present*, Fact on File, Publication, New York, tp
- Goenawan Muhammad, *Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia*, PT. Grafiti Press, Jakarta, 1984.
- Hassan Hanafi, *Dialog Agama dan Revolusi*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1991
- Ismail Raji al-Faruqi, *Triologue of The Abrahamic Faith*, Amana Publications Beltsville, Maryland USA, 1995.
- M. Amin Abdullah, *Etika dan Dialog Antar Agama; Perspektif Islam*, dalam Jurnal Ilmiah "Ulumul Quran", Nomor, 4, Vol. IV Th. 1993.
- M. Ridwan Lubis, *Membangun Kehidupan Umat Beragama, Yang Rukun, Demokratis dan Bermakna*, Citapustaka Media, Bandung, 2003.
- Olaf H. Schumann, *Menghadapi Tantangan Memperjuangkan Kerukunan*, kata pengantar oleh Komaruddin Hidayat, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2004.
- [www.tokohindonesia.com](http://www.tokohindonesia.com) Ensiklopedi Tokoh Indonesia, [www.pdat.co.id](http://www.pdat.co.id).

## Perjumpaan di Serambi Iman

Achmad Rosidi

*Peneliti Puslitbang  
Kehidupan Keagamaan*

Judul : **Perjumpaan di Serambi Iman**  
(Suatu Studi tentang Pandangan Para  
Teolog Muslim dan Kristen  
Mengenai Hubungan Antaragama)

Penulis: Nicholas J Wolly

Penerbit: BPK Gunung Mulia Jakarta

Tebal : xxii + 600 hlm.

Dapatkah umat yang berbeda agama berdo'a bersama? Itulah kalimat pertanyaan yang terlintas dalam pikiran penulis buku ini. Pertanyaan ini pula yang menginspirasi dirinya dan memotivasi untuk mencari jawaban mengenai hakekat hubungan umat beragama.

Buku ini menyodorkan pandangan keagamaan, khususnya Kristen dan Islam bagi masing-masing penganutnya untuk mempertanyakan kembali mengenai pandangan teologis. Masing-masing harus mengakui akan kebenaran pada ajaran agama masing-masing, dan menyerahkan kebenaran agama lain pada masing-masing pengikutnya pula. Dengan begitu, akan tercipta keharmonisan hubungan, kedamaian dan mengarah pada kebaikan bagi umat manusia. Namun, kenyataan selalu berbeda. Di masyarakat sering terjadi

permusuhan dan perseteruan berdalih agama. Mengapa terjadi benturan antar umat beragama? Salah satu faktor adalah munculnya klaim kebenaran dan keselamatan bagi dirinya, dan pengkafiran pada komunitas lain yang dipandang sesat sehingga harus diselamatkan.

Pemahaman seseorang pada agama dan mengakui akan kebenaran padanya seharusnya menjadikan dirinya lebih yakin akan agamanya ketika menjalin hubungan dengan agama lain dan menyerahkan kebenaran agama lain pada masing-masing penganut. Dengan berprinsip pada hal tersebut, niscaya tidak akan pernah terjadi benturan-benturan. Untuk memunculkan sikap toleransi dalam kehidupan beragama, perlu dikembangkan sikap menjauhi prasangka negatif dan memberikan apresiasi pada orang lain yang berbeda keyakinan, sikap toleransi dan berfikir positif. Peniadaan sikap demikian akan mudah memunculkan konflik dan perusakan yang sangat berbahaya bagi kemanusiaan.

Menurutnya, Islam dan Kristen merupakan agama universal. Kedua agama ini bukan agama yang bersifat kesukuan dan bukan agama yang mengajarkan kebencian kepada orang lain. Para penganut keduanya memiliki kesadaran akan pengajaran mengenai kebenaran sebagai aktivitas rohani mereka. Kebenaran menurutnya adalah tunggal dan universal, maka dalam pengajaran agama ini harus saling memperhatikan pandangan-pandangan agama satu dengan agama yang lain.

Penulis buku ini mengaku dalam menggali informasi mengenai Islam, diperoleh dengan cara mendengar dan belajar dari pada sejumlah tokoh Islam. Para tokoh pemikir agama ini telah banyak memberikan wawasan kepadanya yang dipandang sebagai modal besar dalam penyusunan buku ini dan referensi untuk membangun kerukunan umat beragama. Dari hasil kajiannya tersebut, solusi yang ditawarkan dalam buku ini adalah dilakukannya dialog agama. Istilah yang digunakannya pun cukup menggugah, yaitu "Perjumpaan di Serambi Iman" yang kemudian menjadi judul buku ini dengan harapan para tokoh agama dapat menemukan formula yang tepat dalam membangun dialog dengan melakukan rekonstruksi konsep penyiaran. Dialog dibangun untuk meminimalisir kecurigaan pada kelompok lain yang tidak sama keyakinan. Dialog terbentuk untuk "menghidupkan" dan menggairahkan perasaan toleransi yang tinggi antar umat beragama.

Sikap toleransi umat beragama terbangun bukan untuk membuat metode bagaimana secara bersama-sama umat beragama melakukan peribadatan yang sama. Sikap toleransi justru menjadikan masing-masing umat beragama bersikap protektif pada ajaran agama yang dianut dan menjaga kemurniannya, lebih yakin dan mendalam dalam menjalankan kehidupan spiritual yang sangat privat tersebut.

## **Pandangan Teolog Muslim tentang Hubungan Antaragama**

### **Ismail Ragi al-Faruqi**

Penulis buku ini mengutip pernyataan Al-Faruqi yang menyalahkan penyalahgunaan misi oleh penguasa Kristen yang dalam sejarah perkembangannya misi Kristen dilakukan secara ekspansif. Langkah ini bukan dilakukan oleh agama Kristen. Misi Kristen selalu dikaitkan dengan kolonialisme oleh penguasa Kristen di masa lalu dan masa sekarang dengan persekongkolan subversif neokolonialisme yang memiliki jaringan kuat. Misi baik masa lalu maupun sekarang dilakukan bertujuan untuk membangun kejayaan dan kemuliaan penguasa Kristen daripada mencari keridhaan Tuhan. Hal tersebut menurut Al-Faruqi jelas suatu perlawanan kepada Tuhan karena menimbulkan gangguan yang menyakitkan bagi pemahaman dan kerjasama Kristen dan Muslim. Maka sangat urgen diperlukan rekonseptualisasi antara ajaran Kristen dan menjalankan misi memisahkan antara Kristen sebagai agama Tuhan dari eksploitasi, kesewenangan dan penghujatan pada Kristen. Untuk menjembatani keharmonisan itu perlu dilakukan dialog.

Dialog dalam pandangan Al-Faruqi, merupakan dimensi kesadaran manusia sebagai satu-satunya jalan komunikasi yang paling etis. Dialog melatih kesadaran manusia untuk mengakui kebenaran yang *inherent* dalam realitas dan mengenal figurisasi realitas-realitas di luar pengetahuan dan jangkauan nalar para penganutnya. Dialog merupakan pendidikan terbaik dan paling bernilai. Al-Faruqi memahami dialog sebagai suatu kesempatan dan tempat di mana Islam, Kristen dan Yahudi sebagai pewaris agama Ibrahim. Melalui dialog semua rintangan antara Muslim, Kristen dan Yahudi dapat teratasi. Dialog merupakan satu-satunya cara yang tepat bagi hubungan antarmanusia. Menurut Al-Faruqi, dialog merupakan esensi bagi agama yang berbeda dan menampilkan kesatuan sebagai agama Allah.

Al-Faruqi telah memelopori dialog antaragama. Untuk menghindari dialog dari berbagai kepentingan terselubung, Al-Faruqi memberikan metode khusus yang berasal dari analisis-analisisnya mengenai perbandingan agama, minimal ada 6 prinsip, yakni; *pertama*, dialog harus berprinsip pada kritik terbuka yang diindikasikan oleh suatu penggunaan otoritas rasional yang utuh; *Kedua*, dialog tidak boleh melanggar aturan-aturan koherensial internal. *Ketiga*, dialog tidak boleh melanggar aturan koherensi eksternal, didasarkan pada pengetahuan tentang semua sejarah agama umat manusia.; *Keempat*, dialog tidak boleh melanggar prinsip persesuaian antara kebenaran dengan realitas; *Kelima*, dialog antaragama mensyaratkan suatu sikap bebas berhadapan dengan figurisasi kanonik. *Keenam*, dialog dilakukan mengenai masalah-masalah etis dan bukan persoalan-persoalan teologis.

Untuk mewujudkan dialog yang benar-benar produktif dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat, tema dialog yang diusung adalah yang berlandaskan pada faktor-faktor dominan berikut: *pertama*, umat Islam dan Kristen memandang dirinya sebagai yang berada dalam kondisi tabula rasa (*state of innocence*); *Kedua*, umat Islam dan Kristen secara bersama-sama menyadari pentingnya mengenal kehendak Tuhan dan segala perintah-Nya. *Ketiga*, umat Islam dan Kristen mengakui bahwa manusia hidup di dunia ini harus digenapi oleh keterpanggilan moral dan misi.

Ismail Ragi Al-Faruqi lahir di Jaffa Palestina pada 1 Januari 1921. Pendidikan masa kecil dihabiskan di lingkungan masjid yang berbahasa Arab. Beberapa tahun ia menghabiskan waktu dalam pendidikan sekolah biara di Perancis sampai pada tahun 1936.

Pengalaman hidupnya ialah yang ia dapat merasakan begitu mendalam, ketika ia berada di lingkungan Kristen dan membawanya pada pemikiran muslim yang kritis dalam persoalan teologi kontemporer.

### **Mahmoud Mustafa Ayoub**

Ayoub adalah sarjana Libanon berkewarganegaraan Amerika. Ia lahir di desa Shí'a, Ayn Qana di Libanon Selatan. Ayoub memperoleh pendidikan pertama di sekolah misionari (Kristen). Sejak saat itu, Ayoub hidup dan bekerja dalam tradisi Islam dan Kristen. Dengan latar belakang

ini nampak bahwa Ayoub tidak hanya terlibat dalam tradisinya sendiri, tetapi juga terlibat dalam tradisi orang lain serta memiliki perhatian yang mendalam pada usaha membangun dialog yang konstruktif antara Islam dan Kristen. Di antara pikiran-pikiran Ayoub dalam membangun dialog Islam dan Kristen adalah pandangan adanya titik-titik kesamaan antara Islam dan Kristen, seperti mengenai cerita tentang Yesus menurut Al-Qur'an dan pandangan Yesus mengenai kesalahan Islam.

Kristologi yang dibangun Ayoub adalah pemahaman mengenai Kristus sebagai manusia, sebagai hamba, tetapi juga mengenal Yesus sebagai Firman Allah, Roh-Nya dan sahabat-Nya yang mulia. Dengan pernyataan ini, Ayoub berusaha menunjukkan suatu pemahaman tentang gambaran Al-Qur'an mengenai Yesus yang mengingkari ke-Ilahi-an Kristus tanpa mengingkari kemanusiaannya yang istimewa. Kristologi Ayoub menurut penulis buku ini dipandang dekat dengan Kristologi Kristen kontekstual masa kini.

Menurut Ayoub, Yesus tetap seperti yang diajarkan oleh Al-Qur'an, yaitu sebagai seorang Nabi dan utusan Allah bagi segenap umat manusia yang memiliki kedudukan istimewa, sebagai Firman Allah, Roh Allah yang benar-benar bebas dari dosa. Keistimewaan Yesus adalah manifestasi dari keagungan dan kemuliaan Ilahi di dalam dan melalui manusia. Menurutnya terdapat perbedaan yang besar antara Islam dan Kristen mengenai relasi manusia dengan Allah, antara Islam dan Kristen. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa dalam Islam relasi itu dimulai dengan naiknya manusia kepada Ilahi, sementara dalam Kristen dimulai dengan turunnya Ilahi kepada manusia.

Pendekatan yang digunakan oleh Ayoub dalam pemahamannya mengenai Kristus dilandaskan pada perlunya dialog antara Islam dan Kristen dengan memperhatikan pendekatan dan cara pemahaman secara komprehensif dari kedua belah pihak. Untuk merealisasikan terwujudnya dialog yang harmonis, harus dibuka cakrawala berfikir yang pluralistik dan religius bagi kedua agama.

### **Seyyed Hossein Nasr**

Seyyed Hossein Nasr lahir pada tahun 1933. Pandangan Nasr sebagai Muslim mengenai Kristen, terdapat suatu persoalan esoteris

dengan etika Kristen menurut pandangan Islam, meskipun terdapat kesamaan antara Islam dan Kristen. Menurutnya, bagi kaum Muslim tradisional, ajaran-ajaran etika Kristen yang didasarkan pada ajaran-ajaran etika Kristus harus dikritik, bukan karena ajaran-ajaran tersebut salah, tetapi karena terlampau agung untuk dilaksanakan oleh orang biasa, sehingga tidak bisa diterapkan secara luas. Nasihat moral hanya bisa dilakukan oleh para *santo* dan *santa*, karena semua umat manusia bukanlah orang-orang suci dan moralitas itu terlampau luhur bagi orang-orang biasa.

Pandangan tentang Kristen, Nasr berbeda dengan Al-Faruqi dan Ayoub. Nasr menggambarkan pendekatan yang disebut dengan Kristo-Mariologi. Nasr menanggapi serius kesamaan-kesamaan esoteris antara Islam dan Kristen. Nasr memandang bahwa umat Kristen dan Yahudi harus terus hidup dan mempraktekkan agama mereka, dan keduanya berdasarkan kehendak Tuhan. Dengan datangnya Islam, tidak serta merta Yahudi dan Kristen dibubarkan dan kemudian masuk Islam karena yang terdahulu telah di-*naskh* dengan yang kemudian. Baginya, Yahudi dan Kristen dapat diselamatkan apabila mereka melaksanakan agamanya. Gagasan ini mendapat reaksi dari internal umat Islam sendiri.

Nasr menilai antara Islam dan Kristen terdapat hubungan yang erat dan ada hubungan saling ketergantungan satu sama lain. Untuk mewujudkan hubungan itu, harus ada upaya kondisi dialogis yang harus segera diwujudkan, karena kondisi harmonis antara dua kelompok berbeda akan mendatangkan kemenangan berdasarkan pada kebenaran. Islam dan Kristen, keduanya adalah agama Allah dan antara keduanya merupakan komunitas umat beriman yang harus hidup bersama dalam semangat hidup bersama secara damai.

### **Maulana Abul Kalam Azad**

Ia adalah seorang pemimpin besar Muslim India yang telah menorehkan namanya di bidang politik, baik pada masa perjuangan maupun masa kemerdekaan. Ia lahir di Makkah pada 11 November 1888. Azad menyetujui pandangan Syed Ahmed Khan yang bijaksana bahwa kaum muslimin harus mengikuti perkembangan pemikiran dan teknologi di barat. Baginya, seseorang tidak benar-benar terdidik dalam dunia modern jika tidak mempelajari ilmu pengetahuan modern, filsafat dan

literatur. Namun, secara radikal ia juga menolak keluarga Khan yang memiliki tradisi Aligarh yang mencintai segala hal yang berbau Inggris dan bekerja sama dengan Inggris. Azad memiliki pandangan teologi agama-agama yang khas Muslim dimana dia melihat agama-agama dunia sebagai maifestasi dari ur-religi (agama awal yang asli) yang telah ditetapkan oleh Allah. Logika dari pernyataan ini bahwa semua agama yang benar harus berasal dari Allah.

Menurut Azad, Tuhan itu Esa, maka agama yang ditetapkan oleh Tuhan pun harus satu. Jadi, apabila ada kepercayaan akan keesaan Allah, harus percaya akan adanya kesatuan agama-agama. Agama inilah yang menurutnya disebut oleh Al-Qur'an sebagai *ad-diin*, yang berarti agama atau jalan bagi kehidupan keagamaan yang benar, jalan yang lurus. Dasar agama adalah penyembahan kepada Allah dan keyakinan pada kehidupan yang benar yang bertujuan mengarahkan manusia pada penyembahan, kepasrahan hanya mutlak kepada Allah. Kepasrahan itulah sebenarnya-benarnya arti dari Islam.

Perbedaan antaragama terletak pada aspek-aspek penerapan dari kedua unsur utama agama, yaitu penyembahan kepada Allah dan kehidupan yang benar. Semua agama dunia merupakan satu keluarga dari berbagai komunitas agama yang menjalankan Islam, yang berada di jalan yang lurus.

### **Fazlur Rahman**

Ia lahir di Pakistan tahun 1919. Ia dibesarkan dalam keluarga Muslim yang shalih. Ayahnya adalah lulusan Deoband, sebuah kampus yang terkenal sebagai sekolah spiritualisme reformis Islam.

Rahman menekankan kesatuan agama-agama dunia yang sebenarnya. Menurutnya terbagi-baginya umat manusia ke dalam berbagai komunitas keagamaan merupakan petunjuk dan wahyu Allah. Keanekaragaman komunitas tersebut adalah ciptaan Allah melalui pesan para Nabi. Umat manusia dari awal merupakan satu kesatuan, kemudian terbagi-bagi karena datangnya pesan para Nabi (QS. 2:213). Kewajiban masing-masing umat adalah saling mengakui bahwa semua komunitas agama memikul tanggungjawab yang sama di depan Tuhannya. Komunitas beragama kemudian melakukan yang terbaik sebagaimana

yang diwahyukan dalam Al-Qur'an untuk berlomba-lomba berbuat kebajikan dan menjalankan hidup yang benar. Ia tidak sepakat dengan eksklusivisme, karena menurutnya kesalehan terdapat dalam semua komunitas agama.

Ia mengajak umat beragama dalam beragama dengan pemahaman monoteisme universal, yaitu monoteisme yang dapat diimplementasikan dalam ketiga agama (Islam, Kristen dan Yahudi). Harus ada pertemuan yang berarti antar umat Islam dan Kristen serta Yahudi. Beberapa gagasan-gagasan Fazlur Rahman mengundang kontroversi yang ditentang oleh muslim tradisional.

### **Hasan Askari**

Ia lahir di India pada tahun 1932, adalah seorang pelopor dialog antaragama dan dikenal dengan konsep spiritualitas interreligi. Ia dipandang sebagai pemikir terkemuka muslim sejajar dengan Abul Kalam Azad dan Fazlur Rahman. Askari adalah seorang sosiolog agama muslim Shi'a yang saleh. Ia sangat aktif dalam pertemuan internasional dengan orang-orang berbeda agama dan mempunyai pemikiran terbuka pada nilai-nilai dan kebenaran-kebenaran agama-agama lain. Pertemuan-pertemuan itu diakuinya telah mendorong perkembangan spiritual dan intelektualnya.

Hasan Askari dikenal luas dalam pembicaraan antaragama. Ia memiliki komitmen pada upaya membangun saling pengertian antara Muslim-Kristen di Asia, Timur Tengah, Eropa dan Amerika. Askari aktif juga di dalam Dewan Gereja-gereja se-Dunia. Komitmen dukungannya pada dialog antar umat beragama telah memberikan dirinya sebagai sosok pemikir muslim formatif yang unik dan dijadikan sebagai seorang praktisi muslim terkemuka dalam mengapresiasi Kristen.

Kaitan hubungan antara Islam, Kristen dan Yahudi, Askari berpendapat bahwa Kristen merupakan transformasi mendalam dari agama Yahudi dan Islam merupakan perluasan dari transformasi tersebut, baik dengan jalan menerima kebenaran ajaran Kristen maupun menolaknya. Namun, Askari mengingatkan bahwa pernyataan tersebut akan sangat mudah menimbulkan salah faham dan akan membahayakan seluruh kerangka komunikasi. Perspektif masing-masing harus hadir

secara utuh. Seperti pernyataan jelas dalam Al-Qur'an, bahwa kesaksian terdahulu (*tasdiq*) harus bekerja dengan sebenar-benarnya dan bertindak sebagai afirmasi dari masa lampau yang melalui masa sekarang dan dari masa sekarang yang melalui masa lampau. Ia mengutip QS. 4:171 mengenai pandangan Al-Qur'an tentang Isa. Menurut Askari, ayat inilah yang memisahkan antara Islam dan Kristen. Meskipun demikian, keduanya tetap berada dalam hubungan yang erat yang menunjuk pada saling keterlibatan keduanya.

### **Nurcholis Madjid**

Nurcholis Madjid lahir pada 17 Maret 1939 di Jombang Jawa Timur, Indonesia. Ia dibesarkan dalam sebuah keluarga musli yang saleh. Setelah menamatkan pendidikan menengah, ia "nyantri" di Pondok Modern Gontor Ponorogo. Selepas nyantri itu, ia melanjutkan pendidikan di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada jurusan Sastra Arab dan Kebudayaan Islam di Fakultas Sastra dan Budaya dan menamatkan pada tahun 1968. Pada tahun 1970, ia memperoleh beasiswa dan belajar di Universitas Chicago dan memperoleh gelar doktor pada tahun 1984 dengan risalah doctoral yang berjudul *Ibn Taimiya on Kalam and Falasifa* di bawah bimbingan Fazlur Rahman.

Cak Nur (begitu akrab dipanggil) adalah seorang pemikir neo-modernis Islam Indonesia. Ia memainkan peranan penting dalam formasi pemikiran Islam di Indonesia (berkaitan dengan pluralisme agama dan budaya). Ia mengembangkan sikap optimistis dan positif tentang agama dan pengikut-pengikutnya. Pandangan-pandangannya menjadi rujukan bagi diskusi hubungan antarumat beragama di Indonesia, walaupun menimbulkan kontroversi di kalangan mainstream tradisional.

Islam menurut Cak Nur mengajarkan toleransi, kebebasan, keterbukaan, keadilan dan kejujuran. Sikap unik yang ditunjukkan Islam bersumber dari kebenaran universal tunggal yang diwahyukan dalam kitab-kitab suci semua agama di dunia dan yang diajarkan oleh para utusan Allah SWT. Ia menekankan kesatuan umat manusia dari sudut pandang antropologis. Konsep kesatuan dasar ajaran membawa pada konsep kesatuan kenabian dan kerasulan dan bermuara pada konsep kesatuan umat beriman.

## Muhammad Arkoun

Arkoun lahir pada 1 Februari 1928 dari keluarga Berber bagian timur Aljazair. Ia fasih berbahasa Perancis dan bahasa Arab disamping juga menguasai bahasa ibunya. Salah satu gagasannya mengenai masyarakat religi adalah konsep tentang masyarakat kitab suci. Wahyu dipandanginya merupakan titik penghubung yang paling tinggi bagi Islam, Kristen dan Yahudi.

Dari konsep yang disodorkan Arkoun, usaha yang perlu dilakukan adalah penilaian kembali gagasan mengenai wahyu sebagai isu sentral, kemudian beralih secara intelektual, kultural dan historis dari visi umat berkitab suci kepada konsep masyarakat kitab suci sehingga terbentuk komunikasi dan dialog yang penuh toleran.

## Mohamed Talbi

Ia lahir tahun 1921, merupakan guru besar Emeritus pada Fakultas Sastra Universitas Tunis, Tunisia. Dia mengajar di sekolah ini sejak tahun 1958 dan menjadi Dekan pada tahun 1966-1970. Pada tahun 1973-1977, ia memimpin Departemen Sejarah di Pusat Studi bidang penelitian ekonomi dan sosial di Tunis. Gelar doktor diperoleh pada tahun 1968 di Universitas Sorbonne. Talbi banyak berperan dalam konteks hubungan antar agama dan sering melakukan dialog bersama dengan Arkoun dan menjadi salah seorang peserta *Muslim-Christian Research Group* yang menerbitkan *The Challenge of the Scriptures – The Bible and the Qur'an*.

Menurut Talbi, terdapat hubungan yang erat antara wahyu dan dialog. Dalam Al-Qur'an, dialog adalah perintah yang jelas. Inti dari dialog adalah rekonsiliasi dengan dunia pada umumnya. Semua agama di dunia akan menjadi akrab dengan sendirinya dengan terbangunnya dialog. Kendala yang dihadapi dalam dialog adalah adanya perbedaan yang besar antara mereka yang berpartisipasi dalam dialog dan kajian yang tidak sama dalam tradisi masing-masing serta didukung oleh perkembangan teologis yang tidak sama. Dialog adalah salah satu bagian yang penting bagi manusia untuk menjadi religius dan manusiawi yang sepenuhnya berserah diri pada kehendak Allah SWT.

## **Pandangan Teolog Kristen tentang Hubungan Antaragama**

### **Hendrik Kraemer**

Ia dilahirkan di Amsterdam pada tanggal 17 Mei 1888 dan meninggal pada 11 November 1965. Ia pernah belajar bahasa Jawa di Universitas Leiden dan belajar Islam di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Ia pernah bekerja pada Dutch Bible Society di Indonesia pada tahun 1922-1937.

Dalam bidang hubungan antar agama, Kraemer memiliki kontribusi besar dan inspirasi yang mengilhami pada diskusi tentang persoalan misiologis. Ia adalah pakar filolog, pakar Islam dan pemimpin dalam gerakan spiritual melawan Nazi. Ia seorang pembaru gereja Belanda yang menjadi guru besar bidang teologi dari kalangan awam.

Agama menurut Kraemer dipandang sebagai jalan usaha manusia menekspresikan spiritual seluruh kehidupan. Agama merupakan satu dari berbagai ekspresi kebudayaan yang paling menonjol, unsur paling berpengaruh dalam proses pembentukan kesadaran manusia dan menjadi sistem yang inklusif dan teori-teori kehidupan. Agama mencakup sistem budaya, peradaban dan struktur masyarakat. Berbicara tentang agama, berarti bicara tentang dunia dan segi-seginya.

Filsafat menurut Kraemer adalah usaha manusia untuk mencapai pemahaman melalui ilmu dengan perantaraan akal, sedangkan agama adalah usaha manusia dengan menggunakan hati. Teologi adalah usaha untuk membuat refleksi pemahaman yang berciri keagamaan tentang keberadaan kehidupan dalam suatu sistem pemikiran yang logis.

Kraemer menekankan adanya komunikasi intensif antaragama. Tetapi ia juga mengingatkan keras akan bahaya sinkretisme, karena keduanya sangat berlawanan. Sinkretisme merupakan paduan yang tidak sah, karena berasal dari berbagai unsur agama. Sinkretisme menurutnya memiliki pengertian teologis yang benar-benar negatif.

### **Johan Herman Bavinck**

Ia dilahirkan pada 22 November 1895 Rotterdam. Ia meninggal pada 23 Juni 1964. agama menurut Bavinck merupakan media bagi manusia dalam menjawab dan bereaksi pada pernyataan Tuhan. Agama

adalah jawaban atau respon manusia pada pernyataan Ilahi yang diduga sebagai yang Ilahi. Jawaban ini meliputi tindakan dan sikap, yaitu iman, penyerahan diri dan do'a. Agama tidak pernah menjadi percakapan seorang diri atau suatu dialog seseorang dengan dirinya sendiri. Melalui agama, manusia dapat melakukan perjumpaan dengan Allah melalui pernyataan-Nya. Kesadaran ini menuntun pada beberapa kesamaan antara agama-agama dunia yang digambarkan dalam "*five magnetic points*, yaitu; *pertama*, hubungan manusia dengan kosmos; *kedua*, hubungan manusia dengan norma; *ketiga*, hubungan manusia dengan misteri keberadaannya; *keempat*, hubungan manusia dengan keselamatan; *kelima*, hubungan manusia dengan kekuatan Ilahi.

Untuk membangun toleransi, bagi seorang Kristen kepada agama lain adalah harus dimulai dengan penelitian tanpa prasangka buruk terhadap nilai-nilai spiritual yang tersembunyi di balik agama-agama tersebut. Menurutnya, perlu dicari formula yang tepat dengan pikiran terbuka dan perhatian yang saling menghargai berbagai indikasi akan kehadiran Allah dalam agama non-Kristen.

### **Leslie Newbiggin**

James Edward Lesslie Newbiggin lahir pada 12 Desember 1909. Menurutnya, dialog adalah salah satu ciri pokok menjadi seorang Kristen. Seorang Kristen harus bisa berdialog, entah dengan sesama Kristen maupun dengan penganut agama lain. Tujuan dilakukannya dialog bagi orang Kristen menurutnya adalah untuk menjadi saksi setia Yesus. Tujuan dialog bertujuan untuk mengangkat dan penghormatan pada Yesus. Kalau memiliki tujuan selain itu, makan akan menyeret pada pengingkaran atas ketuhanan Yesus Kristus. Dialog tidak bertujuan mengkristenkan peserta dialog, tetapi untuk menunjukkan kesetiaan pada Yesus. Semakin sering melakukan dialog, seorang Kristen semakin dituntut untuk setia pada Yesus. Kepada orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, seorang Kristen bertugas menemukan dan menghimpun semua refleksi tentang sang terang yang benar dalam kehidupan dari mereka yang dijumpai.

Gagasan dialog bagi penganut Kristen didasarkan pada kepercayaan fundamental yang diwujudkan dalam penegasan bahwa Allah menyatakan diri-Nya sebagai Bapak, Putra dan Roh Kudus. Newbiggin menekankan

perlunya umat Kristen memahami adanya terang keselamatan dalam berbagai agama dunia, sebagai jalan masuk untuk mengadakan dialog dengan agama lain.

### **Kenneth Cragg**

Ia adalah Albert Kenneth Cragg, yang lahir pada 8 Maret 1913 di Blackpool Inggris. Cragg mengemukakan konsep mengenai teologi agama-agama yang disebut dengan *Theology of Religious Pluralism*. Seorang Kristen dituntut untuk peduli pada sesama termasuk di luar Kristen untuk mewujudkan perdamaian. Umat Kristen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari realitas kemajemukan agama-agama. Pemahaman orang Kristen yang menjadi identitas kekristenannya harus ditunjukkan dengan pemahaman yang benar terhadap agama orang lain. Eksistensi agama lain bukan merupakan ancaman, melainkan berkat bagi kehidupan iman Kristen. Umat Kristen menanggapi secara bertanggungjawab atas realitas agama-agama. Perbedaan-perbedaan keyakinan berimplikasi pada suasana batin dan cara berfikir Kristen yang memberikan pengaruh pada pola tingkah laku sosial dalam masyarakat majemuk.

Untuk menciptakan kondisi dialogis, perlu menghilangkan ungkapan non-Kristen yang sering dipakai untuk menyebut agama-agama lain. Hal tersebut dilakukan karena istilah itu tiak mampu menyatakan isi terdalam dari agama-agama lain, bahkan mengaburkan pengertian penting dari keseluruhan ajaran dan tuntunan spiritual dari hubungan dan hidup berdampingan antaragama. Cragg meyakini akan adanya kewajiban bagi umat Kristen untuk hadir di tengah kehidupan agama-agama lain dalam berbagai persoalan, kecemasan, simbol-simbol dan lain-lain. Kewajiban itu merupakan hal terbaik yang dapat dilakukan sebagai pemenuhan tugas sebagai wujud kesetiaan pada Roh Kudus dan komitmen pada Kristus.

### **Kosuke Koyama**

Ia lahir di Tokyo pada 1929. Ia pernah menjadi misionaris Japanese Kyodan untuk gereja Thailand pada tahun 1960-1968. Menurut Koyama, terdapat suatu dialog tersembunyi antara pesan-pesan sentral agama-agama besar yang berasal dari pengalaman historis spiritualitas manusia yang memiliki arti dan nilai dalam situasi hidup di dunia ini. Ia berpendapat

bahwa seruan (*shema*) “Dengarlah” bagi semua agama merupakan satu kesatuan suara Tuhan yang berbicara pada jutaan manusia di dunia.

Pertemuan agama-agama merupakan suatu hal yang tak terelakkan. Tetapi, menurutnya tidak berarti pertemuan itu yang memunculkan sinkretisme agama-agama menjadi hal yang negatif, tetapi juga dapat bersifat positif. Sinkretisme agama dengan kebudayaan tidak dapat terelakkan. Walaupun sinkretisme menurut para misionaris barat dipandang sebagai kejahatan yang serius. Bagi Koyama, Kristen di barat telah mempengaruhi kebudayaan mereka dan budaya barat sebaliknya telah mempengaruhi Kristen mereka.

Mengenai perjumpaan dengan penganut agama lain, Koyama memandang harus mau mendengar dan belajar pada mereka sesuai dengan ajaran Injil. Baginya, Kristen telah mempersembahkan kepada dunia sebuah konsep baru tentang simbolisme pusat yang sungguh telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Koyama dan Cragg sepakat mengupayakan kehadiran umat Kristen yang membawa manfaat bagi umat lain.

### **Hans Küng**

Küng dilahirkan di Sursee Swiss tahun 19 Maret 1928. Ia dikenal sebagai teolog Katolik yang kontroversial pernah mendapatkan peringatan keras Vatikan karena mempersoalkan doktrin-doktrin tradisional gereja. Namun demikian, dia masih menjadi seorang Katolik yang setia. Küng memandang penting hubungan antar agama dan mengakui Kristen bersama agama-agama lain merupakan jalan-jalan bagi keselamatan. Namun demikian, baginya Kristen merupakan jalan keselamatan paling istimewa, dan agama lain sebagai jalan keselamatan biasa. Agama-agama lain di dunia degnan tradisinya masing-masing merupakan agama-agama yang sah dib awah anugerah Allah yang universal dan memiliki legitimasi teologis yang autentik. Küng menekankan pada keselamatan yang dikehendaki oleh Allah bagi setiap orang. Semua orang dapat menemukan keselamatannya di dalam situasi historis dan tradisinya masing-masing. Fase pemikiran di atas adalah fase pertama pemikiran Küng (sampai tahun 1970). Fase kedua (tahun 1977) memberikan pandangan yang lebih luas, yaitu setiap agama itu sesuai dengan tradisinya masing-masing. Dengan

wawasan yang luas, setiap agama harus terbuka terhadap persepsi-persepsi baru tentang kebenaran.

Fase ketiga (1980), Küng lebih suka mengembangkan metode dengan memberikan respon terhadap berbagai tantangan spiritual yang ditawarkan oleh agama-agama yang telah berkembang selama ribuan tahun. Ia mengembangkan Oikumenisme global yang mencakup seluruh agama. Umat Kristen tidak boleh memaksakan agama Kristen kepada pemeluk agama lain, namun harus menjalin hubungan yang baik dengan cara mau mendengarkan dan menghargai pandangan kebenaran teologis yang dinyatakan oleh agama lain. Inilah yang menjadi kunci dibukanya dialog antar agama.

### **Wilfred Cantwell Smith**

Ia adalah seorang teolog yang lahir Toronto Kanada pada 21 Juli 1916 dari kalangan keluarga gereja Presbiterian. Presbiterian adalah salah satu denominasi di lingkungan Gereja-gereja Protestan, yang berakar pada gerakan Reformasi pada abad ke-16 di Eropa Barat. Dari segi doktrin dan ajaran, Gereja Presbiterian mengikuti ajaran Yohanes Calvin, reformis dari Prancis. Secara kelembagaan, Presbiterian muncul dari Skotlandia yang dirintis oleh John Knox, salah seorang murid Calvin. Maka, pada umumnya ditemukan di negara-negara bekas koloni Inggris, seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, India dan lain-lain.

Agama menurut Smith bersifat personal, dialami dan dijumpai oleh pribadi manusia dalam kehidupan spiritualnya sehari-hari. Agama merupakan realitas dinamis dan sebuah historis yang panjang. Berbicara mengenai agama, berarti berbicara mengenai seluruhnya suatu rangkaian panjang peristiwa yang selalu berubah dalam sejarah manusia masa lalu, masa sekarang dan masa datang. Maka, dalam setiap tahapan itu manusia selalu berperan dalam sejarah kehidupan keberagamaan secara keseluruhan. Walaupun bersifat personal dan historis, namun agama mensyaratkan kesatuan umat manusia.

Smith menyarankan kepada para misionaris Kristen untuk selalu melakukan percakapan interreligius bagi kegiatan misionarisnya. Hal itu dilakukan dengan cara duduk bersama dan mendiskusikannya secara konstruktif untuk mencapai keharmonisan komunikasi antar umat beragama.

## **John Hick**

Dilahirkan di Scarborough Yorkshire Inggris pada 20 Januari 1922. Hick dibesarkan di dalam gereja Anglikan, kemudian masuk ke gereja Presbiterian pada 1940. Hick menganjurkan perlunya orang Kristen bersikap menerima keharusan memahami bagaimana kehadiran Allah yang sama dalam semua bentuk kehidupan keberagamaan umat manusia yang dapat dilihat di dalam bingkai tradisi dan budaya masing-masing penganut. Keselamatan menurut Hick adalah semua karya penciptaan yang dilakukan Allah untuk meniadakan tabiat kebinatangan dalam diri manusia dan mengembalikannya dalam posisi anak-anak Allah yang bertabiat seperti yang dikehendaki Allah.

Misi Kristen menurutnya harus memiliki daya tarik positif dari pribadi dan pengajaran Yesus dan kehidupan yang dijalankan sebagai tindakan pemuridan kepada-Nya. Umat Kristen harus menghadirkan Yesus dan kehidupan Kristen dalam suatu cara yang sesuai dengan pengakuan iman Kristen tentang keabsahan agama-agama lain yang pada hakekatnya merupakan jalan keselamatan juga.

## **S.J. Samartha**

Nama lengkapnya adalah Stanley Jedidiah Samartha, dilahirkan pada 7 Oktober 1920 di Karkal India Selatan. Samartha dikenal sebagai tokoh yang mempelopori sikap kontekstual Kristen dalam dialog antaragama. Ia telah mempengaruhi, mendorong dan membimbing sikap-sikap protestan terhadap agama-agama lain dalam cara yang historis. Samartha dijuluki sebagai arsitek dialog antaragama dan memberikan kontribusi yang fenomenal dalam gerakan Oikumenis. Menurutnya, kemajemukan agama merupakan bagian dari seluruh warisan kemanusiaan yang merupakan struktur realitas yang paling mendasar. Secara teologis kemajemukan keagamaan merupakan kehendak Tuhan dan kemajemukan historis bagi kehidupan manusia. Setiap agama dapat memberikan pengertian misteri-misteri ajaran Ilahi yang diyakini yang tidak akan pernah dibatasi oleh satu keyakinan pun. Baik Samartha, Hick maupun Smith, semua sependapat untuk mencari suatu pemahaman yang tepat mengenai hubungan antaragama di dunia. Mereka melakukan pendekatan masalah ini dari sudut pandang teosentris. \*\*\*

